MUHAMMADIYAH "Ahmad Dahlan"

Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah

Editor

M. Azrul Tanjung | Rusdianto | R. Alpha Ammirachman | Sutia Budi

MUHAMMADIYAH "AHMAD DAHLAN" MENEMUKAN KEMBALI OTENTISITAS GERAKAN MUHAMMADIYAH

Editor

M. Azrul Tanjung | Rusdianto | R. Alpha Amirrachman | Sutia Budi

Penyelaras Bahasa

Suparman | Tito Siswanto | Ukay Masduki

Desain Sampul & Penata Letak

Suparman | Tito Siswanto

Penerbit

STIE AHMAD DAHLAN

Kerjasama dengan

Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisations

(CDCC)

ISBN : 978-602-71457-1-9

PENGANTAR EDITOR

KH Ahmad Dahlan, merupakan entitas orisinal yang telah memberi kontribusi terhadap peradaban. Bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Ahmad Dahlan telah menyumbangkan gerakan pemurnian (purifikasi) terhadap proses pembentuk masyarakat dan struktur sosial. Ada lima hal yang menjadi perspektif dan pendirian Muhammadiyah yakni *Ideology Order of Islam, Social Order and Networking Movement, Integrity dan* Karakter Berkemajuan, *Cross-Cultural* Muhammadiyah.

Didirikannya Muhammadiyah untuk mewujudkan perilaku individu dan kolektif agar menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tatanan masyarakat yang dimaksud dapat ditafsirkan sebagai citra masyarakat utama, yaitu masyarakat yang unggul diberbagai bidang, utamanya akhlak dan juga dari sudut sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Konsep tersebut bersifat futuristik sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda "Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dialah tergolong orang yang merugi".

Wujud dari hadis tersebut Muhammadiyah yang awalnya hanya bergerak dalam bidang keagamaan, melebarkan dakwahnya pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah baik dalam bentuk pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMU, dan bahkan Perguruan Tinggi. Saat ini tidak kurang dari 175 perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah, 50 rumah sakit, dan puluhan *baitul mal wa tanwil* (BTM). Bahkan, Muhammadiyah berani masuk ke ranah politik yang kemudian menjadi sesuatu diletamatis dan *debatable*.

Penulisan buku berjudul **MUHAMMADIYAH 'AHMAD DAHLAN': Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah** menjadi

penting sebagai *ikhtiar* aktifis Muhammadiyah, khususnya mereka yang tergabung dalam Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Terutama untuk turut menjaga purifikasi Muhammadiyah. Buku ini berisikan pokok-pokok pikiran dalam berbagai perspektif, terutama tauhid, ekonomi dan politik.

Tim Editor

KATA PENGANTAR

Revitalisasi Kebudayaan Persfektif Komunikasi Politik

Armyn Gultom

Buku ini muncul disaat yang tepat, ada dua alasan kemunculannya yakni *pertama,* karena Muhammadiyah baru saja melewati guncangan politik praktis yang sangat luar biasa dan *kedua,* di dorong oleh keinginan Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di berbagai daerah agar FOKAL dapat di revitalisasi dan regenerasi serta menjalin silaturrahmi antar elemen alumni sehingga tercipta simbiosis mutualisme.

Saya mengatakan saat yang tepat kehadiran buku "Muhammadiyah Ahmad Dahlan; Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah" yang penulisnya terdiri dari berbagai alumni, sungguh sangat luar biasa. Begitu banyak intelektual muda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau organisasi tercinta kita ini telah dapat memberikan pencerahan bagi kita semua di berbagai mozaik pemeikiran penulis dalam buku ini.

Satu hal yang tampak menjadi pembicaraan hangat ketika pergelaran pilpres kemarin yakni posisi dan sikap Muhammadiyah yang menurut mereka mengalami pergeseran paradigma dalam merespon situasi politik nasional dengan tak punya identitas respon sehingga dianggap lemah oleh pihak lain. Tentu kedepan kita harus merebutnya, alumni harus tampil sebagai pendobrak utama panggung sosial politik dan kebudayaan Indonesia.

Namun, saya berkesempatan untuk memberikan sebuah asupan kepada berbagai penulis karena buku yang kita pegang bersifat informatif

sekaligus inspiratif terhadap seluruh kekuatan lainnya. Karena selama ini hanya diketahui bahwa kita lemah dalam gerakan apapun sehingga perlu mendaras kepiluan ditinggal oleh keadaan yang telah berubah sejak bangsa ini hadir.

Semua penulis buku ini, justru mengajak kita semua, terutama FOKAL IMM untuk menyikapi potensi perkembangan sumberdaya politik yang belum maksimal di tampung dan di gerakkan. Kemudian, harapan kepada Muhammadiyah juga, harus menjadi *master* praksis politik alokatif *(distribution)* yang membawa Muhammadiyah menuju politik pencerahan dengan berbagai metodologi politik yang telah dirancang dan di jelaskan oleh seluruh penulis.

Nah, berawal dari hasil kajian dan ekplorasi pemikiran politik kebudayaan para alumni IMM yang tergabung dalam FOKAL, terdapat banyak paradigma tentang politik, kesejahteraan, pemberdayaan, negara dan pemerintahan. Paradigma ini terletak pada kontekstualisasi dari istilah tersebut. Saya mengambil rujukan dan dasar kepada Islam politik tanpa ada dikotomis antara Islam, politik, kesejahteraan, pemberdayaan, distribusi sumberdaya, negara dan pemerintahan. Lebih jelas, menyatakan *"... kendati Islam sebagai agama yang memiliki totalitas, dalam pengertian meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk politik, namun sumber-sumber Islam juga mengajukan istilah seperti dunya - akhirat (dunia-akhirat), din - daulah (agama-negara), atau umur al-dunya-umur al-din (urusan dunia-urusan agama). Istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan konseptual dan mengesankan adanya dikotomi".*

Namun demikian, saya memandang perlunya politik kebudayaan di kembangkan dalam sutua pemerintahan sebagai panggung ekstensif yang merupakan sebuah keniscayaan, dan hampir semua berada dalam garis politik yang harus di rebut kembali sebagai entitas kejayaan sehingga dapat mengatur, mengubah dan bahkan merobah keadaan.

Bersepakat dari kewajiban FOKAL IMM sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat baik dalam urusan keagamaan maupun keduniaan. Perdebatannya hanyalah apakah kewajiban itu berdasarkan politik amar ma'ruf nahi munkar atau jalan sunyi dengan mendorong seluruh asset potensial, yaitu mewajibkan untuk saling berpegang tangan, dukung satu sama lain, jangan bersikap egois dan menyendiri. Bawalah identitas kita sebagai kader bahwa eksistensi itu merupakan hukum alam yang logis dan ilmiah secara bergantian bahwa generasi tak akan pernah mati dan berjalan terus.

Pendapat tersebut sama benarnya, karena menurut logika dan pertimbangan rasional umat manusia memerlukan institusi yang harus di rebut untuk mengatur kehidupan kolektif mereka, sehingga perlu ada yang memerintah *(the ruler atau al-rai)* dan yang *diperintah (the ruled atau al-ra'iyyah).*

Beberapa konsep yang pernah dipraktekkan dalam sejarah dan dianggap memiliki landasan teologis ternyata tidak luput dari persoalan-persoalan terletak pada derajat mewakili *(representativeness)* konsep-konsep tersebut akan nilai-nilai ideal, baik pada dataran konseptual maupun dataran praksisnya.

Membaca dan menafsirkan pemikiran para penulis dari berbagai persfektif bahwa satu masalah yang masih lemah di kita adalah *Revitalisasi Kebudayaan Persfektif Komunikasi Politik* oleh berbagai penulis tentu berkaitan dengan negara, pemikiran Ahmad Dahlan, teologi dan politik Muhammadiyah. Maka, sebetulnya argumentasi semua penulis, dapatlah dilihat konteks realitas politik dan sikap komunikasi politik seluruh sumberdaya manusia Muhammadiyah yang seharus membumikan akar ideologi kebudayaan politik substanstif terhadap problem masyarakat yang mempunyai batasan saluran menyalurkan aspirasi.

Pengertian substantif dalam konsep revitalisasi kebudayaan adalah upaya mengharmonikan hubungan sosial, negara dan pemerintahan maupun masyarakat tanpa perbedaan kelas termasuk masalah suksesi kepemimpinan. Itu hanya bisa dilakukan ketika unsur komunikasi politik di lakukan dan terpenuhi. Walaupun perbedaan itu selalu ada dengan tingkat kelas sosial yang tinggi, tetapi harus terdapat nilai persamaan. Disini letaknya Muhammadiyah berperan sebagai aktor *communicant* (mengkomunikasikan) secara baik dengan harus hadir negara ditengah rakyat untuk memberikan harmonisasi dan mengatur kepentingan orang banyak.

Paradigma Muhammadiyah secara kultural telah mengembangkan landasan budaya bagi terwujudnya masyarakat utama sesuai nilai-nilai Islam bagi bangsa dan negara. Dalam proses politik, Muhammadiyah melakukan komunikator politik yakni pembelajaran dan partisipasi yang berdampak pada masyarakat untuk melihat tanggapan dan reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sehingga tujuan politik Muhammadiyah tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat. Muhammadiyah sangat intensif membaca aktivitas politik, paling tidak harus mampu revolusi politik melalui berbagai konsep dan strategi. Maka tentu Muhammadiyah bisa menembus seluruh ruang-ruang kosong untuk mengisinya dengan norma, nilai, sehingga mampu mengubah gaya politik yang selama ini

memang hedonis dan opportunis.

Komunikasi politik Muhammadiyah pasti membawa dampak perubahan dalam masyarakat Indonesia. Karena pada prinsipnya, dunia politik merupakan konvergensi komunikasi politik yang memiliki dampak baik dan buruk. Dalam hal sekarang ini, Dien Syamsuddin cukup banyak memberikan gagasan politik sebagai sebuah keniscayaan sebagai budaya politik yang patut di pelajari yakni dampak budaya politik positif seperti budaya dakwah, demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan, menjalankan khittah dan budaya berkemajuan (pembaharuan).

Muhammadiyah ditakdirkan untuk menjadi gerakan kultural, politik, sosial ekonomi dan dakwah yang menaungi seluruh kelompok masyarakat, dan menjadi tenda kultural bagi bangsa ini. Muhammadiyah selama ini telah dikenal sebagai *"rumah rakyat"*, yang setiap saat dapat dijadikan sebagai tempat pengaduan. Hal ini merupakan bagian dari komunikasi politik persfektif *Political allocative* dengan mainseat *logical construct*. Hal ini sangat berkaitan dengan perangkat interaksi, komentar, kritik maupun proses pengalokasian sumber daya politik.

Mengutif penulis, bahwa ternyata politik kebudayaan di konstruksi dalam komunikasi politik sangat relevan menginggat ungkapkan *Langguage political* dan *language allocative lebih pada* texstur komunikasi, seperti bahasa budaya *power, dakwah, prophetic, leaders reformatif, good governance, trust* dan *karakter bangsa*.

Substansinya bahwa Muhammadiyah nerupakan diplomat, komunikator dan *resources* politik yang mengalami perubahan secara terus menerus. Hal ini lebih pada penjaminan *leadershif* dalam menjaga kapabilitas yang mampu membangun komunikasi diantara seluruh elemen organisasi politik di Indonesia sehingga terciptanya basis politik. Hal ini pertanda bahwa *leadershif* Muhammadiyah selalu membawa ciri khas komunikasi politik sesuai karakter maupun sikap.

Keberadaan FOKAL IMM banyak melakukan kerja-kerja politik, kebudayaan dan kemanusiaan, itu hanya sebuah konsekwensi dari tanggungjawab besar terhadap Muhammadiyah. Sadar betul bahwa Muhammadiyah tidak mungkin di pisahkan dari politik, karena banyak kader dan simpatisannya adalah mahluk yang berdakwah di jalan politik. Kendati, dapat bedakan dalam berbagai kelompok politik dalam Muhammadiyah yang bermetamorfosis dalam berbagai varian politik dan selalu ada pilihan ketika terjadi tekanan maupun fragmentasi.

Penting, memang harus di konstruksikan pemikiran Muhammadiyah

Ahmad Dahlan persfektif komunikasi sebagai khasanah baru dalam menyikapi pergulatan politik kebangsaan. Arus besar "Islam berkemajuan, masyarakat berkemajuan, Indonesia berkemajuan". Konsep ini juga menjadi perangkat utama dan mendasar dalam format metodologi politik kebudayaan Muhammadiyah dalam melihat dan memahami pertautan keagamaan dengan realitas politik Indonesia.

Terakhir, saya percaya bahwa pokok-pokok pikiran dalam buku ini akan memperkaya khasanah pengetahuan dan wawasan setiap orang membacanya. Semoga hasil tulisan ini menjadi amal sholeh yang bernilai di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

PROLOG

Tauhid Pencerahan "Ahmad Dahlan" untuk Indonesia Berkemajuan

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA

Sungguh kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT, bahwa umat Islam selalu diberikan kekuatan hidayah Allah, sehingga dapat menghirup udara segar nikmat Allah swt. Hubungan vertikal manusia dengan Allah Yang Maha Pencipta *(hablun min Allah)* yang harus berlangsung atas dasar keikhlasan pengabdian, yaitu hubungan yang ditegakkan atas dasar cinta tanpa pamrih. Manusia modern sekarang mungkin akan mencari dalih bahwa perintah Allah dan indoktrinasi Al Qur'an itu hanyalah tipu daya setan yang harus dihindari. Kecintaan manusia modern kepada dunia akan menghalanginya untuk melenyapkam milik yang paling dicintainya lewat tangan sendiri. Namun, tidaklah demikian, Islam sebagai agama monoteisme didasari pada keimanan yang kuat menghujam dalam diri, dan ketaatannya kepada Allah yang mengatasi segala loyalitas kepada makhluk, telah menggerakkan hatinya untuk memenuhi perintah Allah, walau secara manusiawi sangat berat untuk dilaksanakan.

Revitalisasi tauhid di tengah-tengah erosi keimanan dewasa ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh kaum beriman. Kehidupan pada masa modern telah melahirkan dua tipe manusia, *pertama,* manusia yang sombong dan angkuh sehingga ia menggeser pusat kesadaran dan kehidupannya dari Tuhan Pencipta *(theo-centrism)* kepada suatu kehidupannya dan kesadaran akan kekuasaan manusia *(anthropocentrism),* sehingga manusia menyembah dan mengabdi kepada dirinya sendiri. *Kedua,* manusia yang tiada berdaya dan terjajah oleh manusia dan makhluk lain, dan lupa akan kemahakuasaan

Allah, sehingga dia menyembah dan menyerahkan segala urusan kepada makhluk lain. Karena itu, menjaga Islam sangat penting bagi kita agar meneguhkan komitmen keimanan hanya kepada Allah, Pencipta manusia dan alam semesta.

Insan yang memiliki keteguhan komitmen keimanan hanya kepada Allah adalah insan paripurna. Terbentuknya insan paripurna adalah prasyarat bagi terwujudnya masyarakat utama *(khaira ummah)*, karena insan paripurna adalah elemen terkecil dari masyarakat utama itu. Jika umat Islam, seperti dinyatakan oleh al- Qur'an, adalah *khaira ummah* atau masyarakat utama/terbaik, maka harus terdiri dari individu-individu yang paripurna. Sebagai *khaira ummah*, umat Islam harus memiliki keunggulan-keunggulan dalam berbagai bidang kebudayaan dan peradaban. Hal ini pernah diraih oleh umat Islam ketika mereka berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad-abad pertengahan. Pada saat itu, umat Islam, dengan di sinari wahyu al-Qur'an, berhasil menemukan dan mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan filsafat yang merupakan pilar suatu peradaban tinggi. Sebagai hasilnya, umat Islam menjadi pemegang supremasi peradaban dunia.

Namun, kejayaan peradaban Islam itu tidak berlangsung terus, tetapi justru mengalami kemunduran hingga sekarang ini. Dunia Islam menjadi mundur, dan umat Islam terjatuh kepada tiga masalah sekaligus citra utama, yaitu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Umat Islam menghadapi masalah kesenjangan antara jumlahnya yang besar dan kualitas perannya bagi peradaban dunia. Umat Islam yang berjumlah sekitar 1,4 milyar orang atau sekitar 22% dari total penduduk dunia hanya dapat memberi sumbangan 5% terhadap perekonomian dunia. Begitu pula dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam nyaris menjadi konsumen daripada produsen. Dunia Islam tidak banyak memiliki ilmuwan sejati dan kurang memiliki pusat-pusat keunggulan akademik *(center for academic excellent)* yang merupakan prasyarat bagi kemajuan ilmu-pengetahuan dan teknologi. Walaupun banyak Negara Islam yang mempunyai sumber daya alam yang kaya raya, tetapi karena tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka hampir tidak ada Negara Islam yang bisa dikategorikan sebagai negara maju.

Dalam konteks Indonesia, fenomena serupa juga terjadi. Sebagai bagian terbesar dari bangsa ini umat Islam belum dapat menampilkan peran-peran pencerahan. Umat Islam Indonesia menghadapi masalah rendahnya kualitas hidup, kemiskinan, infrastruktur sosial, minim pengusaha muslim, krisis

ekonomi dan keterbelakangan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, banyaknya lembaga pendidikan yang dikelola umat Islam belum sepadan dengan mutu lembaga-lembaga pendidikan tersebut, walaupun sudah mulai muncul sekolah-sekolah berkualitas. Dalam bidang ekonomi terdapat ironi dalam realitas kehidupan kita. Islam yang masuk ke Nusantara lewat jalur ekonomi karena dibawa oleh dai-dai saudagar pedagang, yang kemudian ikut mempengaruhi terbentuknya kelas menengah Islam yang relatif berjaya dalam bidang ekonomi dan kemudian membentuk sentra-sentra perekonomian umat di beberapa daerah, kini terpuruk dan belum dapat bangkit kembali. Kalau dalam bidang pendidikan dan ekonomi Islam ada fenomena *"robohnya surau kami"*, dalam bidang ekonomi ada fenomena *"runtuhnya kedai kami"*. Kelemahan dalam bidang ekonomi ini membawa dampak terhadap bidang-bidang kehidupan lain, baik sosial, pendidikan, politik maupun dakwah.

Kesenjangan antara idealitas Islam dan realitas kehidupan umat Islam adalah masalah besar yang harus diatasi. Kalau umat Islam ingin bangkit kembali merebut supremasi peradaban dunia, maka tidak ada pilihan lain kecuali umat Islam menangkap kembali api dan semangat Islam. Islam adalah agama kemajuan, yang mendorong kehidupan umatnya ke arah hidup yang berkemajuan. Jika kemajuan Eropa didorong oleh etika Protestanisme yang menekankan kerja keras, produktifitas, penghargaan akan waktu, dan penghematan—begitu pula kebangkitan Asia-Pasifik karena etika Konghucu yang juga menekankan nilai-nilai yang sama—maka Islam jauh lebih kuat mendorong nilai-nilai etika tersebut dalam banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Bahkan sebagai *khaira ummah*, umat Islam diperintahkan oleh al- Qur'an untuk menjadi saksi-saksi bagi umat manusia seperti dalam ayat: *"Dan dengan demikian Kami jadikan kamu semua umat tengahan supaya kamu semua menjadi saksi-saksi atas semua manusia, dan Rasul menjadi saksi atas apa yang kamu semua lakukan. . . "* (al-Baqarah: 143).

Dari ayat tadi terdapat isyarat bahwa umat Islam perlu menampilkan dua macam syahadat untuk memberikan efek positif terhadap pola pembentukan karakter masyarakat berkemajuan dalam suatu bangsa. Selain harus menampilkan *"syahadat keyakinan"* yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT dan kerasulan Muhammad SAW (*La Ilaha illallah, Muhammadur rasulullah*), umat Islam perlu juga sebagai manifestasi *"syahadat keyakinan"* itu untuk menampilkan *"syahadat kebudayaan dan peradaban"*, yaitu dengan memberi bukti-bukti bahwa kebudayaan dan peradaban Islam

adalah tinggi. Maksudnya, umat Islam harus tampil merebut kemajuan dan keunggulan dalam kebudayaan dan peradaban.

Pada ayat diatas, cita-cita kemajuan dan keunggulan dikaitkan dengan keberadaan umat Islam sebagai "umat tengahan" *(ummatan wasthan)*. Citra diri sebagai *"umat tengahan"* mengandung arti bahwa umat Islam tidak boleh terjebak kepada spektrum ekstrimitas keberagamaan dalam kehidupan. Sebaliknya, umat Islam perlu mengambil posisi tengahan *(median position)* dalam menegakkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memang, menurut para ulama, seperti Imam al-Ghazali, akidah Islam adalah akidah tengahan (*al- aqidah al- wasithiyyah*) yang menjaga keseimbangan antara *hablun minallah* dan *hablun minannas*, antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, dan antara kehidupan individual dan kehidupan kolektivitas sosial. Akidah tengahan ini dapat juga diterapkan pada berbagai aspek kehidupan lain.

Sebagai umat tengahan dengan akidah tengahan maka keberagamaan umat Islam perlu juga mengambil posisi jalan tengah *(middle path)*. Posisi jalan tengah dalam beragama adalah posisi keberagamaan yang tidak terjebak baik kepada ekstrim yang hanya mementingkan kehidupan ukhrawi saja sehingga melupakan kehidupan duniawi, atau sebaliknya, mementingkan duniawi saja sehingga melupakan kehidupan ukhrawi. Keberagaman tengahan mengejawantah dalam kesungguhan hidup pada dua dunia itu, seperti tercermin dalam kata hikmah *"berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok"*. Keberagamaan tengahan, dengan demikian, adalah keberagamaan total dan komprehensif, bukan keberagamaan parsial, yakni demi keseimbangan mengambil sebagian dari setiap dua hal. Keberagamaan tengahan juga mengambil bentuk keberagamaan proporsional, yaitu menjalankan ajaran-ajaran agama sesuai dengan proporsinya.

Islam jalan tengah seperti itu mungkin bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang kini masih terpuruk. Sejak era reformasi sepuluh tahun yang lalu, memang harus diakui banyak kemajuan yang telah dicapai dalam kehidupan kebangsaan kita, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masalah di hadapan kita. Proses kehidupan bangsa selama ini belum membawa perubahan mendasar. Memang multi krisis telah bergerak dari palungnya yang paling dalam, tetapi proses kepulihan belum tiba di permukaan. Dalam bidang ekonomi kita bersyukur telah keluar krisis tetapi perbaikan tarap kehidupan ekonomi masyarakat masih

jauh dari harapan. Angka kemiskinan masih tinggi, begitu pula angka pengangguran. Sebagian rakyat masih hidup dalam kesusahan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Fenomena kemiskinan rakyat Indonesia memang masih memprihatinkan, seperti ditunjukkan pada penyaluran dana yang bersifat massal, begitu banyak rakyat jelata yang rela berjejal di bawah terik panas matahari hanya untuk harapan menerima dua puluh rupiah. Fenomena kemiskinan ini menampilkan ironi bagi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Memang ironi ketika ayam mati di lumbung padi.Tetapi, jawabannya sangat jelas, bahwa pengelolaan sumber daya alam kita, baik yang ada di perut bumi seperti minyak, gas, batu bara, emas, tembaga, maupun yang ada di atas tanah seperti kayu, coklat, cengkeh, serta di dalam laut Indonesia seperti ikan, dan lain-lain, lebih banyak menguntungkan pihak luar dari pada membawa kesejahteraan bagi rakyat kita sendiri. Sumber daya alam kita terkuras dan terjarah oleh pihak asing adalah karena kita sendiri bersedia "dijajah" sehingga mau menjual tanah dan air yang kita miliki dengan harga murah.

Dalam bidang politik memang ada kemajuan. Proses demokrasi yang berlangsung selama ini mendapat pujian banyak pihak bahwa Indonesia sedang bangkit menjadi negara demokrasi terbesar keempat dan negeri Islam demokratis terbesar di di dunia. Demokratisasi yang ditandai oleh pembentukan lembaga-lembaga quasi negara dan proses pemilihan langsung kepala daerah dan negara adalah prestasi yang patut dipuji. Namun prestasi tersebut bukan tanpa cela dan harga mahal yang harus dibayar. Pemilihan langsung, umpamanya, telah menimbulkan keretakan sosial; bukan hanya antar partai-partai politik pengusung calon, tetapi dalam satu partai politik, bahkan organisasi masyarakat sekalipun. Lebih dari pada itu, banyak partai politik yang mungkin dipandang sebagai manifestasi kebebasan dan persamaan hak politik rakyat warga negara sangat potensial menciptakan disintegrasi sosial, termasuk di kalangan umat Islam. Hal ini mungkin terjadi kala seseorang memberi loyalitas berlebih terhadap partai yang acapkali menampilkan fanatisme kelompok yang berlebihan pula. Sebagai akibatnya, keretakan bahkan perpecahan masyarakat tak terelakkan. Bahkan ukhuwah Islamiyah bisa menjadi korban akibat orientasi duniawi yang ekstrim ini.

Demokrasi Indonesia memang masih bersifat prosedural, belum bersifat substantif apalagi fungsional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Kita tidak mungkin memutar arah jam sejarah ke arah otoritarianisme

politik, tetapi kita tidak boleh membiarkan proses demokrasi itu berlangsung liar tanpa kendali. Sudah saatnya proses demokrasi ini kita koreksi dengan mensenyawakan nilai-nilai etika dan moral politik berdasarkan agama dan budaya luhur bangsa.

Pada tataran internasional, kita masih menghadapi masalah rendahnya daya saing bangsa dalam berbagai bidang, baik dalam bidang seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perekonomian. Sebagai bangsa besar, seyogyanya Indonesia bisa tampil sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi, citra kita sebagai bangsa besar itu belum menjelma dalam hubungan antar bangsa dewasa ini. Kebangkitan dan kemajuan kawasan Asia Pasifik atau Asia Timur di mana Indonesia berada belum dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika hal ini tidak segera disadari dengan langkah-langkah penghadapan nyata, maka tidak mustahil kita hanya akan jadi penonton terhadap dinamika kawasan yang berkembang cepat, sementara Indonesia yang kaya raya menjadi mangsa empuk kedigdayaan macan-macan Asia baru itu.

Fenomena keterpurukan tadi masih dapat ditambah dalam bidang moral. Bahwa masalah demi masalah yang kita hadapi ternyata berpangkal pada krisis moral. Tetapi arus demoralisasi yang melanda kehidupan bangsa tidak cukup disadari sebagai ancaman serius bagi eksistensi bangsa itu sendiri. Hal ini terjadi ketika kita terjebak ke dalam permisivisme budaya, yaitu dengan membiarkan dan mengabaikan proses dekadensi moral yang terjadi secara sistematis tanpa tergerak untuk mengatasi dan menghalanginya. Bahkan pelanggaran moral itu nyaris menjadi "moralitas publik" baru kala sebagian dari kita mau untuk terlibat dalam pelanggaran yang bersifat kolektif. Itulah yang terjadi pada perkembangan budaya hedonistik yang mendapat dukungan masif dari warga masyarakat. Begitu juga pada kasus korupsi, banyak elit pada banyak lingkaran mau melakukannya secara terbuka dan berjamaah. Kita memuji pemberantasn korupsi yang sudah mulai menggeliat, tetapi kita masih bersedih bahwa praktek-praktek korupsi masih terjadi, baik di lingkaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan praktek-praktek serupa masih terjadi dengan melibat rakyat pada lapis bawa, yaitu ketika mereka terpaksa berkompromi dalam pengurusan dokumen-dokumen sebagai warga negara dan di jalan-jalan raya. Memang korupsi belum menjadi budaya, tetapi jika praktek-praktek yang ada tidak segera diakhiri maka tidak mustahil akan membawa kerusakan bangsa.

Bagaimana dengan peran umat Islam terhadap kemajuan bangsa? Umat Islam dapat tampil memberi solusi. Sebagai bagian terbesar dari bangsa

yang telah memberi peran besar dan strategis bagi pembentukan bangsa pada masa lalu, umat Islam harus merasa memiliki tanggung jawab terbesar pula untuk mengatasi aneka masalah yang dihadapi bangsa dewasa ini. Umat Islam harus tampil sebagai problem solver atau penyelesai masalah bangsa, tentu dengan bekerja sama dengan komponen-komponen bangsa lainnya. Karena penyelesaian problematika Indonesia tidak bisa ditangani oleh suatu kelompok tertentu, tetapi harus dengan kebersamaan seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat madani.

Namun, sebagai kelompok mayoritas umat Islam harus tampil sebagai salah satu faktor determinan Indonesia. Maju mundurnya bangsa di masa depan harus ikut ditentukan oleh maju mundurnya umat Islam. Jika umat Islam maju maka Indonesia akan maju. Begitu pula sebaliknya, jika Indonesia terpuruk berarti ada yang salah dalam diri umat Islam yang belum mampu mendorong kemajuan Indonesia. Oleh karena itulah, Jalan Tengah mungkin dapat menjadi solusi. Jalan Tengah ini perlu menjadi bagian dari kesadaran baru umat Islam dan Bangsa Indonesia. Paling tidak ada sepuluh watak budaya merdeka yang perlu menjadi budaya baru Bangsa Indonesia. Dasar watak budaya itu adalah :

1. Merdeka dari kebiasaan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan mengedepankan kepentingan publik dan kepentingan bangsa yang lebih luas;
2. Merdeka dari tirani perasaan benar sendiri menjadi anak bangsa yang toleran dan menghargai perbedaan;
3. Merdeka dari sifat-sifat feodalisme dan primordialisme menjadi egalitarian yang menempatkan sesama anak bangsa dalam posisi dan perlakuan yang sama;
4. Merdeka dari budaya yang hanya mencela belaka dengan membangun budaya menghargai upaya dan hasil karya orang lain;
5. Merdeka dari budaya nepotisme dengan mengedepankan kultur meritokrasi atau prestasi;
6. Merdeka dari kultur kekerasan menjadi bangsa yang beradab dalam menyelesaikan setiap persoalan;
7. Merdeka dari kecintaan pada dunia fana belaka dan mulai menyeimbangkan kehidupan dengan menjalankan ajaran agama yang baik (agama yang fungsional yang tidak hanya berhenti pada spritualisme pasif tetapi spritualisme aktif dan dinamis yang mendorong daya saing dan mendorong etos kerja sehingga bangsa dapat bersaing dipentas global);

8. Merdeka dari kebiasaan korupsi dan mulai bekerja membangun prestasi dan menuai karya dari hasil keringat sendiri;
9. Merdeka dari ketergantungan dari bangsa lain dan mulai membangun kemandirian nasional, mulai kerjasama internasional yang adil dan saling menguntungkan;
10. Merdeka dari rasa rendah diri dalam pergaulan antar bangsa dan menjadi bangsa yang berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Sebagai insan yang beragama kita semua harus optimis bahwa Bangsa Indonesia akan dapat bangkit merebut kemajuan dan keunggulan. Memang kita tidak boleh bersedih apalagi berputus asa akan masa depan kita. Keadaan kita pada masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk merubah diri dan melakukan perubahan itu sendiri, seperti dinyatakan Allah SWT dalam al- Qur'an: *"Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan sesuatu bangsa, melainkan bangsa itu sendiri melakukan perubahan terhadap apa-apa yang adalam diri mereka sendiri"* (al- Ra`d: 11).

Buku ini adalah buah karya intelektual dari kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam mengidentifikasi dan menganalisis problem dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat serta menginterpretasi apa dan bagaimana membentuk insan paripurna yang memiliki keteguhan keimanan kepada Allah SWT sekaligus menjadi *khaira ummah* (masyarakat utama) yang mampu memecahkan permasalahan dan mentauhidkan peradaban serta merubah tantangan menjadi kesempatan dengan keunggulan-keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang berkemajuan. Selamat membaca!

Wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Bagian Satu

MEMAKNAI TAUHID SOSIAL MUHAMMADIYAH

TEOLOGI SOSIAL:
Membaca Pemikiran Ahmad Dahlan

Masri Mansoer

Berbagai literatur menggambarkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia secara massif dan berkesinambungan adalah corak pemikiran Islam abad pertengahan yang dominan corak sufistik dan teologi tradisional versi Asya`riyah dan Maturidiyah. Pandangan ini berdasarkan atas penelitian terhadap buku-buku yang digunakan pada lembaga pendidikan pesanteren abad ke 19 menunjukan bahwa buku-buku aqidah (teologi) yang digunakan semua berasal dari kitab-kitab teologi tradisional. Hal itu dapat dibaca dari kitab-kitab sebagai berikut: *Bahjat al-'Ulum (*As-Samarqani), *Umm al-Barahin* (As-Sanusi al-Husaini), *al-Mufid* (Sulaiman al-Jazuli), *Fath al-Mubin* (Muhammad al-Bajuri), *Kifayatul al-Awam dan al Miftah fi syarh ma'rifat al-Islam* (Muhammad bin Asy-Syafi'i), *Jauharat at-Tauhid* dan *Iftah al-Murid* (Ibrahim al-Laqani) (Karel A. Steenbrink: 1984 h. 157-158).

Teologi tradisional menurut Harun Nasution memiliki ciri-ciri, yakni kedudukan akal yang rendah; ketidakbebasan manusia dalam kemauan dan perbuatannya; kebebasan berpikir yang diikat oleh banyak *dogma*; ketidakpercayaan kepada *sunnatullah* dan kausalitas; terikat kepada arti tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis; statis dalam sikap dan berpikir.

Aliran kalam ini diwakili oleh Asy'ariyah dan Muturidiyah Bukhara. Teologi rasional atau teologi *sunnatullah* memiliki ciri-ciri, yakni kedudukan akal yang tinggi; kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatannya; kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis yang sedikit sekali jumlahnya; percaya adanya *sunnatullah* dan kausalitas; mengambil arti *metafor* dari teks wahyu; dinamis dalam sikap berpikir.

Aliran kalam ini diwakili oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkan (Harun Nasution, 1996:28)

Selama beberapa abad pandangan teologi tradisonal ini menjadi pandangan teologi Islam di Indonesia. Tetapi ketika terjadi gerakan pembaharuan di dunia Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, mulai kembali di perkenalkan pandangan teologi rasional. KH. Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah dan memimpinnya tahun 1912-1923 adalah tokoh yang banyak berkenalan dengan pembaharuan dan teologi rasional Muhammad Abduh. Dahlan sejak masa muda dikenal sebagai anak yang sangat pintar bahkan ia dikenal sebagai tokoh yang tekun membaca dan menelaah pemikiran keislaman reformis. Ia menekuni pemikiran yang bernafaskan tajdid (pembaharuan) dan dakwah, dari sinilah kemudian ia tergugah untuk berbuat sesuatu agar umat muslim di Indonesia menyadari tentang cita-cita yang terkandung dalam ajaran Islam (Ibid Sutarmo: 2005:16-18).

Berangkat dari kesadaran bahwa Islam agama yang membebaskan, beliau tergugah melihat dan memahami bahwa umat Islam yang berada disekitar tempat tinggalnya sangat terbelenggu dan prihatin. Banyak diantara mereka yang terbelenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan kejumudan yang disebabkan oleh adat istiadat dan keyakinan keagamaan yang tidak masuk akal bahkan telah menjerumuskan pada perilaku syirik. Sedangkan, mereka belum memahami betul tentang ajaran agama dengan baik dan benar, ibadah hanya dilaksanakan secara formalitas dan terbatas hanya pada shalat, puasa, haji dan zakat. Persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan dan perkembangan zaman tidak banyak diajarkan pada mereka (Ibid Sutarmo, 2005:18).

Seiring dengan bekobarnya api pembaharuan dalam Islam di Timur Tengah yang diproklamirkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh segera megalir ke Nusantara memberikan janji-janji dan harapan baru bagi tokoh-tokoh Islam untuk mengadakan gerakan pemurnian dan pembaharuan. Kiyai Ahmad Dahlan merupa- kan salah satu tokoh gerakan yang menyalakan api pembaharuan di Nusantara, dengan mendirikan Muhammadiyah. Ide-ide pembaharuan beliau dipengaruhi oleh pendidikan agama dan realitas sosial-keagamaan selama di Nusantara dan di Saudi Arabia. Tambah lagi oleh bahan bacaan yang sering beliau gali dari Majalah al-Manar dan bahkan beliau pernah berjumpa langsung dengan Muhammad Rasyid Ridha (Ibid Sutarmo: 2005 h. 17).

Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Muhammadiyah merumuskan

identitas dan aspek gerakannya. Identitas Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma`ruf nahi munkar* dan tajdid. Bergerak dalam tiga bidang, yaitu bidang sosial keagamaan, sosial pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Melalui identitas dan bidang gerakan inilah, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi modern yang terbesar di Nusantara bahkan dunia.

Gagasan pembaharuan ini kemudian melahirkan sebuah pandangan teologi sosial yang berbasis pada prinsip tauhid dan amal. Karena itu Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaharuan sosio-religius, reformis-religius dan *agent of sosial change*. Beliau menanamkan ideologi yang berupaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman yang berpegang teguh pada dasar-dasar *(ushul)* yang sudah diletakkan oleh agama, yaitu al-Qur`an dan Sunnah. Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan tentang pemikiran Ahmad Dahlan yang berkaitan dengan teologi sosial.

Gagasan Teologi Sosial Ahmad Dahlan

Term teologi *(kalam)* pada dasarnya bukan khazanah baru dalam pemikiran Islam. Faktor awal yang melatar belakangi lahirnya pembahasan tentang teologi ini adalah persoalan politik yang berujung pada masalah teologi. Perkembangan selanjutnya, ketika meluasnya wilayah dakwah Islam yang ditandai adanya transformasi intelektual muslim melalui penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab.

Penggunaan term ini sebagai substitusi atau penganti terhadap term *kalam*. Mengutip dari Wolfson, proses sejarah yang berulang *re historica progcces*. Pada dasarnya, kedua term tersebut meskipun berkembang dalam tradisi agama Kristen akan tetapi subtansinya sama yaitu ilmu yang berkaitan dengan Tuhan dan berbagai derivasinya, baik dalam relasi-Nya dengan alam semesta maupun manusia (In'an Esa: 2001, h. 21).

Penulis menggunakan term teologi sosial dalam menggambarkan pemikiran dan aksi nyata yang dipraktekkan Dahlan dalam menjalan- kan kehidupan sehari-hari dan pengamalan Islam. Berpijak pada kandungan surah al-Ma'un yang berisi tentang Apakah engkau melihat orang yang mendustakan catatan kehidupan [agama]?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat!, Mereka yang lalai dalam salat, mereka yang ingin dilihat dan tidak mau memberikan kebutuhan sehari-hari [kepada sesamanya]. (QS: al-Ma'un ayat 1-7).

Berangkat dari ajaran inilah Kiyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai wadah implementasi pemahaman keIslaman-nya. Ada dua faktor yang melatar belakanginya, yaitu faktor eksternal dan internal umat Islam Indonesia, *pertama*, kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda yang terus berusaha memperkokoh hegemoninya, faktor internal banyaknya umat Islam Indonesia yang masih percaya pada persoalan tahayul, bid`ah dan khurafat (TBC) sehingga menyebabkan mereka bodoh, miskin dan tertinggal dari negara-negara Eropa (Abdul Munir Mulkhan, 2010:2-3).

Gagasan inilah yang kemudian menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh Ahmad Dahlan, yakni aspek tauhid, ibadah, muamalah dan pemahaman yang bersumber dari al-Quran dan hadist menjadi perhatiannya. Dalam aspek tauhid, ia ingin membersihkan segala macam perbuatan kemusyrikan, pada aspek ibadah berupaya agar bersih dari persoalan bid'ah, aspek muamalah membersihkan dari khurafat terhadap ajaran Islam (Abdul Munir Mulkhan, 2010:4).

Selain itu, gagasan ini juga melahirkan konsep etika *welas asih*, penulis mengutip Abdul Munir Mulkhan sebagaimana dikutip dalam naskah yang berjudul *Tali Pengikat Hidup Manusia*, KH Ahmad Dahlan mengatakan tentang pandangannya pada masalah kemanusiaan, hubungan antar bangsa, ilmu dan pokok-pokok isi Kitab Suci al-Quran yaitu ...."*kebanyakan pemimpin-pemimpin belum menuju baik dan enaknya segala manusia, baru memerlukan kaumnya golongan sendiri saja, kaumnya tiada dipedulikan. Jika badannya sendiri sudah mendapat kesenangan, pada perasaannya sudah berpahala, sudah sampai pada maksudnya... begitu juga sudah menjadi kebiasaan orang, segan dan tiada mau menerima barang apa saja yang kelihatan baru, yang tiada sama dengan yang sudah dijalani, sebab pada perasaannya barang, barang yang kelihatan baru itu menjadikan celaka dan susah, meskipun sudah kenyataan, bahwa orang yang menjalani barang yang baru senang mendapat kesenagan dan kebahagiaan. Hal itu terkecuali orang-orang yang memang bersungguh-sungguh berikhtiar buat gunanya orang banyak, dan suka memikir dan merasakan dengan panjang dan dalam*". (Abdul Munir Mulkhan, 2010:5).

Selain itu, Kiai Ahmad Dahlan juga mengatakan tentang memelihara dan meningkatkan kemampuan berpikir yang masih berkaitan dengan kepeduliannya terhadap persoalan kemasyarakatan. Dengan menyatakan ...."*hidup akal yang sempurna dan agar supaya dapat tetap namanya akal, itu ada kumpuan enam,...... antara lain: Pertama, memilih perkara apa-apa*

harus dengan belas kasih. Manusia tidak sampai kepada keutamaan, bila tidak dengan belas kasihan; sebab wataknya orang yang tidak belas kasihan itu, segala perbuatannya biasanya kejadian melainkan dengan kejadiannya kesenangan, yang akhirnya lalu bosan dan terus sia-sia. Kedua, harus bersungguh-sungguh akan mencari; sebab sembarang yang dimaksudkan kepada keutamaan dunia dan akhirat, itu tidak sekali-kali dapat tercapai bila tidak dicari dengan daya dan upaya ikhtiar dengan pembelaan harta dan benda, kekuatan dan fikir" (Abdul Munir Mulkhan, 2010:5-6).

Dua pandangan ini bisa menggambarkan garis besar kepribadian dan pemikiran bahwa Ahmad Dahlan adalah sosok yang sangat peduli dengan persoalan kemasyarakatan, kemiskinan dan kebodohan khususnya yang dialami bangsa Indonesia pada waktu itu (Abdul Munir Mulkhan: 2010, h. 7).

Kiyai Dahlan dikenal sebagai tokoh perubahan dan amal shaleh dalam beragama, saat beberapa kesempatan ketika beliau mengajar dan menyampaikan pengajian kepada santrinya tentang surah al-Ma'un secara berulang-ulang, namun kebanyakan mereka kurang paham kenapa Kiyai Dahlan selalu mengulang-ulang kandungan surat tersebut. Dibalik itu semua ada nilai spiritualitas yang ditanamkan di sanubari para santri untuk terus saling menolong dan peduli terhadap masyarakat yang ada disekitarnya untuk membantunya. Disamping itu, kita semua harus memberdayakan kaum miskin dan duafa. Terhadap gagasan ini, sebagian kalangan memberikan beberapa istilah yaitu teologi al-Ma'un, teologi al-Duafa dan etika *welas kasih*. Meskipun demikian tujuannya sama yaitu ingin menguraikan gagasan Kiyai Dahlan yang berkaitan dengan perannya dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Gagasan teologi sosial ini kemudian melahirkan pemikiran bagaimana cara umat Islam tidak bodoh, miskin dan ketinggalan dari masyarakat Eropa. Kunci utama gagasan Dahlan terletak pada realitas kebenaran tafsir al-Qur'an, akal suci, temuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman universal kemanusiaan. Karena Dahlan sendiri telah selesai mempelajari filsafat *neurosains* yang merupakan kunci pengembangan kemampuan akal suci, selain belajar pada pengalaman bangsa yang beragam dan pemeluk agama, baru kemudian bisa memperoleh bagaiamana cara mencapai tujuan penerapan ajaran Islam yaitu penyelamatan kehidupan umat manusia di dunia yang berlandaskan cinta kasih (Ibid Munir Mulkhan, 2010:72).

Dalam kesehariannya, Dahlan telah merealisasikan dengan cara mengembangkan sekolah modern, mendirikan panti asuhan, rumah sakit

dan pemberdayaan kaum *mustadafin* dalam sistem dan manajemen organisasi modern. Hal ini dilakukan sebagai praktik ritual Islam yang difungsikan sebagai dasar teologis. Disamping itu, beberapa cerita menyebutkan bahwa suatu ketika Kiai Dahlan memukul kentongan untuk mengumpulkan tetangganya untuk mau membeli peralatan rumah tangganya seperti kursi, meja, jam dinding dan sebagainya dalam sebuah lelangan spontan. Kiyai Dahlan menjelaskan bahwa perolehan dari lelangan ini akan digunakan untuk *"modal"* perjuangan, termasuk menyantuni *fuqara* (kaum fakir), masakin (kaum miskin), dan aitam (anak-anak yatim). Tak salah kiranya jika Dahlan bisa disebut sebagai *"a man of action"* dan bukan *"a man of thought"* semata.

Bagi Dahlan iman itu harus nampak pada amal shaleh (*action*) bukan sekedar pembenaran dalam hati (*tasdiq*). Kalau pandangan itu dirujuk kedalam paham teologi klasik, sebetulnya inilah konsep yang diajarkan oleh paham teologi rasional (*Mu`tazilah*), bahwa iman tidak hanya *tasdiq* dan *ma`rifah* tetapi adalah amal. Teologi amal atau iman yang membebaskan sehingga Muhammadiyah bisa eksis dan maju sampai saat ini, yaitu *"sedikit bicara banyak bekerja" atau "satu kata dengan perbuatan"*. (Zuly Qadir, 2010:83).

Kerja keras dan disiplin diri yang dilakukan Kiyai Dahlan bukan untuk akumulasi kapital bagi dirinya, tetapi peletakan fondasi gerakan perbaikan kehidupan duniawi umat. Seluruh harta Kiyai Dahlan rela dijual untuk kepentingan dakwah dan membantu umat yang sedang membutuhkan. Hampir seluruh usaha dan kegiatannya merupakan perlawanan takdir, nasib dan fatalistik. Kerja keras mengumpulkan kapital untuk membebaskan kaum tertindas, marjinal dan miskin, ini pandangan Muhammad Iqbal mengenai konsep fakir dalam *tasawuf* yang harus digelorakan pada era modern ini. Dahlan dan tokoh-tokoh awal Muhammadiyah sangat teguh mengamalkan ajaran dalam bermuhammadiyah.

Salah satu ajaran yang ditanamkan Dahlan adalah cinta kasih, bahkan dengan berbekal ajaran ini dia dapat mengajak berpartisipasi para dokter-dokter yang berasal dari Belanda untuk membantu kaum duafa yang memerlukan pengobatan. Bahkan ajaran cinta kasih ini juga, membuat elit *priyayi* dr. Soetomo untuk membantu Kiyai Dahlan mendirikan Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) di Surabaya yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan tertindas. Kiyai Dahlan berpandangan bahwa kerja sosial yang digagasnya merupakan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang harus dipahami dengan akal dan hati suci serta diamalkan

dengan *welas asih* cinta kasih. Dari sini kemudian peradaban dan iptek bisa dikembangkan, keselamatan dunia dan kemanusiaan universal bisa dicapai (Zuly Qadir, 2010:75-84).

Usaha pendiri Muhammadiyah ini untuk membangun Rumah Sakit dan kisah pengajarannya tentang al-Ma'un bisa dipahami sebagai dasar pengembangan kegiatan kesehatan dan panti asuhan, bukan sebagai dasar bagi aksi kebudayaan dan metodologi pemahaman atau tafsir pragmatis atas ayat-layat al-Qur'an, lebih dari itu semua ini merupakan penerapan ajaran Islam secara langsung (Ibid Abdul Munir Mulkhan, 2010:85).

Gagasan yang lahir dari buah pemikiran Kiyai Dahlan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di abad 20 ini bersumber dari gagasan- nya tentang kemanusiaan sebagai kesadaran akan ketimpangan sosial, dasar kerjasama dan kesatuan seluruh umat manusia secara global (Sutarmo, 2005:18).

Kesatuan kemanusiaan merupakan dasar berbagai gagasan kiyai Dahlan tentang sikap kritis terhadap kebenaran yang selama ini diyakini oleh pemeluk agama Islam dan pemimpinnya. Demikian juga, gagasannya pentingnya sikap terbuka dan kesediaannya untuk belajar pada orang lain, walaupun kepada orang yang berbeda agamanya. Baginya, pendidikan yang tinggi adalah pendidikan akal dengan materi utama filsafat, khususnya logika. Kajian filsafat bertujuan untuk kesejahteraan seluruh manusia di dunia, untuk mencapainya semua manusia yang berbeda agama harus saling menghargai dan bekerjasama. Dari sisni akan tampak bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan bagi pencapaian kesejahteraan dan perdamaian seluruh umat manusia (Sutarmo: 2005, h. 18).

Kata tauhid tradisi Islam dipahami sebagai peng-esa-an Allah swt. Dalam Islam, tauhid terbagi dua tauhid *rububiyah* dan tauhid *ilahiyah*. Tauhid *rububiyah* adalah pengesaan Allah disertai bahwa Allah-lah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta ini. Sedang tauhid *ilahiyah* adalah tauhid yang menyadarkan kepada kita bahwa hanya Allah-lah eksistensi tunggal. Tauhid sosial merupakan implementasi dari tauhidullah dalam dimensi social (Sokhi Huda: 2011, h. 345).

Kiyai Dahlan ingin menanamkan suatu pengertian bahwa keadilan sosial adalah realisasi dari tauhid sosial di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensi dari tauhid adalah menuntut ditegakkannya keadilan sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Karena setiap gejala eksploitasi manusia atas manusia lainnya adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai tauhid yang menjunjung keadilan dan persamaan derajat manusia dihadapan Allah SWT (Sokhi Huda, 2011:346).

Pemikiran tauhid sosial ini berupaya untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat dari kondisi-kondisi; ketertindasan aqidah; keterbelakangan dan ketertinggalan; penderitaan ekonomi; penderitaan moral; ancaman teologi dan idiologi falsafat asing terhadap pancasila. Teologi ini kemudian dlandasarkan pada keimanan pada Allah SWT yang dilandaskan dalam praktek sosial (Sokhi Huda, 2011:357).

Sedangkan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Kiyai Dahlan dari teologi ini adalah, *pertama,* terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. *Kedua,* menegakkan tauhid yang murni berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah al-Shahihah/al-Ma'qulah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum. *Ketiga,* pelaksaan programnya adalah (1). Ketauhidan, (2). Keramahan, (3). Kekhalifahan, (4). Kerisalahan amar ma'ruf nahi mungkar, (5). Kemaslahatan, (6). Kemajuan, (7) rasionalitas dan keilmuan, (8) kreativitas lokal dan desentralisasi proporsional (9) fleksibilas, efektivitas dan efesien dan (10) penegakkan hukum dan keadilan. Pada akhirnya gasasan ini menjadi idiologi dan kepribadian organisasi Muhammadiah (Sokhi Huda: 2011, h. 375). Bila dipadatkan dalam empat buah istilah, cita-cita sosial Muhammadiyah berkisar pada *ukhuwah, hurriyah, musawah,* dan *'adaalah* (persaudaraan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan).

Teologi Sosial Sebagai Kepribadian Muhammadiyah

Cita-cita sosial yang berbasis pada teologi sosial yang menjadi kepribadian dan pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Falsafah yang telah diajarkan Dahlan yaitu "*sedikit bicara banyak bekerja*" setidaknya melahirkan tiga prioritas utama Muhammadiyah dalam bidang sosial antara lain: bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah modern (*schooling*), bidang kesehatan mendirikan layanan banyak rumah sakit, rumah bersalin dan poliklinik, sedangkan dalam bidang santunan sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan bantuan kreatif lainnya (Sokhi Huda, 2011:374). Berdasarkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini telah memiliki 161 perguruan tinggi, 5.500 sekolah, lebih dari 300 rumah sakit, dan lebih dari 300 panti asuhan.

Gagasan teologi sosial ini kemudian melahirkan sebuah gerakan dalam Muhammadiyah yaitu majelis Penolong Kesengsaraan *"Oemoem"* memiliki maksud tesendiri bagi Muhammadiyah. Istilah *"Oemoem"* dipilih dengan visi bahwa seluruh kerja dan amal usaha atas nama Muhammadiyah ditujukan

untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi semua manusia tanpa memandang agama, etnik, kultur, ras, kaya, miskin, dan sebagainya (Sokhi Huda: 2011, h. 374).

Berulang kali Kiyai Ahmad Dahlan menyampaikan kepada para santrinya falsafah yang sangat penting yang terkandung dalam surah al-Ma'un, *pendusta agama adalah orang-orang yang shalat namun tidak berpihak dan peduli kepada orang miskin dan menelantarkan anak yatim.* Falsafah al-Ma`un ini sangat sentral dalam teologi sosial Muhammadiyah. Gagasan ini memiliki erat kaitannya dengan etos kerja dan kewirausahaan. Artinya, kerja keras warga Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghasilkan *surplus* pendapatan dan kekayaan. Surplus itu ditujukan untuk melahirkan kebajikan berupa pemihakan, pelayanan dan pemberdayaan atas orang-orang miskin dan tertindas (Zakiyuddin Baidhawy: tanpa tahun)

Ironisnya, belakangan banyak pengikut Muhammadiyah yang tidak tahan godaan materialisme yang semakin merajalela, tarikan hasrat kepada orientasi profit yang menjadi semangat neo-kapitalisme. Spirit al-Ma'un sekarang sudah tergantikan dengan kemewahan-kemewahan, bermegah-megahan dan lalai akan tujuan hakiki. Amal usaha Muhammadiyah yang jumlahnya ribuan berubah menjadi rezim baru "kapitalisme" *an sich*, minus kebajikan. Sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh Muhammadiyah sekarang tidak lagi bisa dinikmati oleh kalangan mustadafin, orang-orang kayalah yang hanya bisa menikmati sekolah ungulan Muhammadiyah. Di samping itu, orang miskin dilarang sakit dan berobat di rumah sakit PKU Muhammadiyah karena dipastikan tidak mampu membayar jasa kesehatan dan tidak ada dispensasi (*ibid*).

Tampaknya ada perubahan dalam spirit yang ditanamkan oleh Kiyai Dahlan kepada para santrinya dan pengikut ajarannya. Sudah selayaknya Muhammadiyah tampil sebagai khittah al-Ma'un melihat kondisi masyarakat saat ini yang sudah rakus akan kekuasaan dan terobsesi dengan kekayaan serta kenikmatan materi yang hedomistik (*ibid*).

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan di era global kapitalisme, adalah apakah pemaknaan teologi al-Ma'un seperti yang dilakukan oleh Kitai Dahlan 100 tahun yang lalu itu masih efektif dan manjur, terutama untuk 100 tahun akan datang? Orang menjadi miskin itu kebanyakan bukan karena mereka malas bekerja. Banyak sekali orang miskin yang justru bekerja banting tulang 24 jam sehari. Mereka menjadi miskin karena hidup di dalam sistem yang menciptakan kemiskinan dan mendukung penindasan terhadap orang miskin, yang dikenal kemiskinan struktural.

Cara-cara tradisional dalam pengentasan kemiskinan, terutama yang bersifat karikatif, terlihat tak berdaya dan kedodoran menghadapi sistem kapitalisme global dan pemiskinan struktural oleh negara terhadap rakyatnya. Karena itu Muhammadiyah harus mempunyai dua kekuatan besar, yaitu memiliki power untuk mempengaruhi kekuasaan negara yang berpihak kepada rakyat miskin dan dhuafa. Dan kedua mempunyai jaringan dan kapital besar untuk untuk menguasi pasar dan sumber-sumber ekonomi yang membebaskan rakyat miskin.

Selain itu, Muhammadiyah harus mencoba mendefinisikan kembali term miskin. Meminjam Moeslim Abdurrahman, yakni *pertama,* definisi orang miskin itu tak boleh dibatasi pada mereka yang miskin secara ekonomi. Orang miskin adalah mereka yang mengalami marjinalisasi sosial, seperti petani, pemulung, dan pelacur, dan mereka yang mengalami subordinasi sosial seperti kelompok agama minoritas (Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya). *Kedua,* bagaimana menerapkan teologi al-Ma'un bagi orang-orang miskin kontemporer itu? Caranya tentu tak bisa dilakukan dengan memberi mereka uang, tapi melawan sebab-sebab yang membuat mereka miskin, seperti kapitalisme global dan budaya kemiskinan (*culture of poverty).*

Pendeknya, jika Muhammadiyah ingin bertahan atau berkembang pada 100 tahun yang akan datang, maka selain mempertahankan upaya-upaya penerjemahan teologi al-Ma'un dalam tiga pilar *healing* (pelayanan kesehatan), *schooling* (pendidikan), dan *feeding* (pelayanan sosial). Organisasi ini perlu juga mengadopsi sistem baru untuk mengejawantahkan teologi al-Ma'un di era kapitalisme global.

Penutup

Teologi sosial yang yang digagas oleh Dahlan diaktualisasi dengan beragama yang rasional, beriman dengan amal, kerja keras untuk menghasilkan surplus pendapatan dan kekayaan agar dapat membebaskan masyarakat miskin, melandaskan cinta kasih dalam kerjasama dengan bermacam orang berbeda keyakinan untuk kemajuan kemanusian. Merupakan ide-ide substansial yang diwariskan oleh Dahlan bergerak membebaskan masyarakat mewujudkan cita-cita Islam yang sebanar-benarnya. Pelanjut Dahlan dan ortom-ortom Muhammadiyah kiranya dapat selalu mewarisi dan mengembangkan secara kontektual dalam berbagai aspek kehidupan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Abdul Munir Mulkhan. 2010. *Kiai Ahmad Dahlan*. Jakarta: Kompas
Harun Nasution. 1996. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan
In'an Esa. 2001. *Teologi Progresif*. Yogyakarta: Remebook
Karel A. Steenbrink. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19*, Jakarta: Bulan Bintang
Sokhi Huda. 2011. *Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian Atas Teologi Muhammadiah*. Jurnal TASAQAFAH Vol 7, No 02
Zuly Qadir. 2010. *Muhammadiyah Studiest: Reorentasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Keduapuluh*. Yogjakarta: Kanisius
Sutarmo. 2005. *Muhammadiyah Gerakan Sosial-Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

GENEALOGI TAJDID MUHAMMADIYAH: Melampaui Batas Pencerahan

Yayan Sopyani Al Hadi

Untuk menjadi muslim yang baik dan lurus, tidak harus menjadi orang Muhammadiyah. Namun sangat pantas untuk *tahadduts bi al-ni'mat* bila ada muslim Indonesia yang mengenal Muhammadiyah, dan lalu menjadi bagian di dalamnya. Menjadi Muhammadiyah, sebagaimana kehendak KH. Ahmad Dahlan, berarti sekuat tenaga, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati menjadi pengikut Muhammad SAW, yang di dalam ajaran Islam, merupakan manusia paling mulia di alam semesta.

Karena itu, menjadi Muhammadiyah sama saja dengan upaya mereguk ajaran Islam dari sumber mata airnya, bukan dari aliran sungai yang sudah bercampur baur dengan limbah sejarah. Menjadi Muhammadiyah, adalah menjadikan Muhammad SAW sebagai *madzhab* dan *marja*, serta mendobrak feodalisme dalam bentuk apapun, maupun fanatisme kepada siapapun.

Paling tidak, ada dua macam nikmat mengapa harus bangga menjadi Muhammadiyah. Nikmat *pertama,* Muhammadiyah digagas dan dilahirkan oleh seorang yang begitu tulus ikhlas mau menghidupkan ajaran Islam, yang saat itu redup oleh gelombang penindasan dari luar maupun berkarat karena kejumudan dari dalam. Dan bukti ketulusan KH. Ahmad Dahlan, diantaranya tak mau menyematkan gerakannya kepada simbol dan nama apapun, selain kepada Kanjeng Rasul.

Nikmat *kedua* adalah nikmat genealogis dan epistemologis. Paham keagamaan Muhammadiyah, karena sekali lagi mau mereguk ajaran agama dari sumbernya, maka otomatis mendobrak sekat ideologis yang lahir dalam konteks sejarah tertentu dan melampaui batas pencerahan Islam

di masa lalu. Mungkin saja, rentetan terakhir kalimat ini, bagi sebagian orang terasa apologetik dan menyimpan benih penyakit fanatisme yang ditentang Muhammadiyah sendiri. Namun ada banyak dasar juga mengapa kebanggaan itu pantas ada dan layak dihidup-hidupkan lagi di tengah gelombang paham keagamaan yang kembali dibelenggu nostalgia masa silam dalam wujud ekstrem baru; *Neo-Muktazilah* dan *Neo-Khawarij.*

Neo-Muktazilah hadir dengan semangat relativisme kebenaran. Kelompok baru ini menolak kejumudan para ulama salaf ber-madzhab kufah, Basrah, Bagdad dan Madinah. Tapi mereka terjebak dalam kejumudan bentuk baru dengan mengadopsi begitu saja pemikiran Madzhab Andalusia dan Eropa pasca-Pencerahan. Mereka mengkritik Imam madzhab masa lalu tapi terjerumus dengan sikap taklid kepada realitas kekinian. Rasionalitas, yang pada mulanya dijadikan pijakan untuk memahami teks, sejarah teks dan hubunganya dengan konteks, menjadi *isme-rasional* yang menegaskan dimensi lain, bahkan menindas teks dengan semena-mena.

Sedangkan *Neo-Khwarij* lahir dengan bentuk-bentuk baru, meski menggunakan doktrin dan modal yang sama, yaitu *La Hukma illa Allah*, yang dirumuskan begitu saja dari QS Al Maidah ayat 44, 45 dan 47. *Neo-Khawarij* sangat patuh kepada teks-teks formal al-Qur'an. Mereka hampir tidak dapat menangkap yang tersirat. Mereka mengambil hanya apa yang tersurat. Mereka merasa paling berpegang kepada al-Qur'an dan paling menjunjung tinggi syariat Islam hanya karena sudah mengutip sepotong ayat yang menunjang pendapat mereka. Tak jarang, mereka menggunakan ayat yang *khitab*-nya orang kafir untuk ditujukan kepada saudaranya yang sesama muslim. Inilah *harakah takfir*, yang wujud halusnya berkeliaran dimana-mana dengan mudah mengkafirkan orang Islam sendiri, dan wujud kasarnya nampak dari gerakan, misalnya, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Kembali pada nikmat ber-Muhammadiyah. Kiyai Dahlan bukan orang sembarangan. Meminjam gambaran ideal tokoh revolusioner Ali Syariati, Kiyai Dahlan adalah sosok *raushan fikr* yang sejati. Kiyai Dahlan bukan semata pemikir, melainkan pemikir yang mencerahkan dan membebaskan. Tidak heran bila namanya masuk dalam deretan utama penggagas gerakan modernisasi Islam di dunia.

Tentu saja, untuk menyerap *ruh tajdid* dari Kiyai Dahlan tak mudah. Terutama bagi kader yang berjarak satu abad dari kehidupan Sang Pencerah. Maka dalam konteks ini, Kiyai Dahlan tidak saja berada dalam posisi sebagai subyek sejarah pembaharuan, melainkan harus ditempatkan sebagai

objek kajian. Kiyai Dahlan sudah menjadi "teks" yang harus dibaca. Dan membaca "teks hidup" seratus tahun lalu tentu bukan sesuatu yang mudah. Selain ada problem otentisitas, rentang waktu yang cukup panjang ini juga membuka ruang untuk sebuah kesalahpahaman.

Agar meminimalisir kesalahpahaman, salah satu metode yang digunakan untuk membaca dan memahami teks bernama Kiyai Dahlan adalah dengan *hermeneutika*. Karena sifat dasar metode ini bukan ilmu alam yang bisa dijelaskan secara pasti (*to ekleren*), maka menafsirkan teks (*verstehen*) dengan cara ini membuka peluang hadirnya pembacaan yang beragam.

Untuk memahami Kiyai Dahlan, menggunakan analisa Friederich Schleiermacher, seorang pembaca dan penafsir harus melakukan dua macam rekonstruksi; rekonstruksi obyektif-historis dan rekonstruksi subyektif-historis. Dengan rekonstruksi obyektif-historis, sebagai teks, sisi kehidupan Kiyai Dahlan harus dibaca secara keseluruhan dan tidak sepotong-sepotong (atau dalam bahasa Ibnu Rusyd, *al-washal ghair al-fashal*).

Sementara dengan rekonstruksi subyektif-historis, sisi psikologis yang melatarbelakangi pikiran-pikiran Kiyai Dahlan tak boleh dilewatkan. Dari satu halaman ke halaman lain dalam perjalanan hidup Kiyai Dahlan harus dibaca bersamaan dengan realitas sosio-kultural yang dilaluinya. Inilah upaya mereproduksi Kiyai Dahlan.

Dengan upaya ini, misalnya, Kiyai Dahlan dihadirkan sebagai sosok yang tegas terhadap perilaku *bid'ah*, *takhayul* dan *churapat* (TBC). Maka para pembaca teks yang juga warga Muhammadiyah, akan merasa telah memperjuangkan apa yang diperjuangkan Ki6yai Dahlan dengan bersikap tegas terhadap ketiga perilaku di atas.

Lain lagi bila menggunakan kacamata Hans George Gadamer. Bagi Gadamer, rentang waktu yang cukup panjang antara permulaan abad 20 dengan abad 21 bukan menjadi persoalan dalam memahami teks. Menurut Gadamer, kesenjangan waktu tersebut justru bisa menjadi titik simpul yang mempertemukan antara satu horison pemahaman teks di satu waktu dengan horison teks di waktu yang lain. Dengan demikian, pembaca bisa membandingkan beberapa realitas sosial ketika Kiyai Dahlan hidup dengan abad dunia maya. Inilah upaya memproduksi Kiyai Dahlan.

Dengan upaya ini, misalnya, pembaca yang juga warga Muhammadiyah tidak terfokus pada kolonialisme waktu itu. Sebab, perlawanan Kiyai Dahlan bukan semata terhadap orang asing, tapi terhadap perilaku dzalim dan penindasan oleh siapapun. Maka pembaca yang hidup dalam kerangka *nation-state*, tentu akan mengkritik kebijakan pemerintah yang dzalim dan

menindas rakyatnya sendiri, sebagai kristalisasi dari wujud *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah dicontohkan Kiyai Dahlan.

Dengan pembacaan ini pula, maka sah-sah saja memproduksi makna baru dari TBC, yang secara substansial berarti ilusi, deviasi dan delusi yang menggerogoti keberagamaan dan kemanusiaan seseorang. TBC kini bisa berwujud dalam neoliberalisme, kapitalisme, dan matrealisme.

Dengan demikian, memproduksi Kiyai Dahlan berarti merekontekstualisasi dan mereaktualisasi gagasan dan pikiran-pikiran Kiyai Dahlan.

Menarik dicatat, dalam upaya memahaminya, Kiyai Dahlan tidak banyak menghasilkan karya tulis sebagaimana ulama zaman itu pada umumnya. Gagasan dan pikiran-pikiran Kiyai Dahlan baru dituliskan dan disistematiskan oleh generasi sesudahnya. Akibat minimnya buah pikiran Kiyai Dahlan dalam bentuk tulisan ini, yang juga karena memang memilih "lebih banyak bekerja daripada bicara", akhirnya membuka lubang penafsiran terhadap gagasan Kiyai Dahlan. Namun demikian, ada semacam benang merah semangat Kiyai Dahlan yang merasuk masuk ke dalam alam bawah sadar setiap warga Muhammadiyah, dalam satu tarikan nafas yang sama; *amar ma'ruf nahi munkar*.

Di sisi lain, karena minimnya karya Kyai Dahlan, ini memberi dampak positif. Seakan-akan Kiyai Dahlan tak mau pikirannya itu diberhalakan di kemudian hari. Ia seakan mempersilakan generasi berikutnya untuk merekonstuksi genealogi *tajdid* Muhammadiyah. Dan inilah nikmat kedua ber-Muhammdiyah.

Tajdid Muhammadiyah seringkali dihubungkan dengan gerakan modernisasi Islam di belahan dunia lain. Lebih-lebih, Dahlan remaja sudah membaca majalah *al-Urwatul Wutsqa* dan *Al Manar*. *al-Urwatul Wutsqa* dikelola oleh dua pembaharu muslim, yaitu Jamaluddin al-Asadabadi dan Muhammad Abduh. Sementara *al-Manar* diterbitkan oleh murid Abduh sendiri, yaitu Muhammad Rasyid Ridha.

Hubungan intelektual lewat bacaan ini membuat Muhammadiyah sering dinilai telah mengambil semangat pembaharuan Islam sebagaimana dikumandangakan Abduh. Namun demikian, Abduh bukan satu-satunya inspirasi. Giora Eliraz bahkan menyimpulkan bila di kemudian hari Muhammadiyah lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran sahabat dan murid Abduh, yaitu Sayyid Rasyid Ridho yang berkarakter salaf. Bahkan lagi Muhammadiyah, kata Giora Eliraz dalam *Islam in Indonesia, has adopted a position of "neo-salafism" including an ideological emphasis on a return to pristine Islam and strict scripturalism.*

Bila mengikuti alur penilaian Giora Eliraz, maka Muhammadiyah melanjutkan tradisi pembaruan kaum skripturalis. Dan ini tak mengherankan bila ditarik ke dalam jargon *al-ruju' ila Quran wa al-Sunnah*. Pembaharuan ini bisa ditarik ke Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan hingga ke abad 14, yaitu kepada Ibnu Taimiyah al Harrani, yang dikenal sebagai *Syaikh al-Islam*. Ibnu Taimiyah juga semasa hidupnya dikenal gencar memerangi penyakit umat, yang kemudian dipopulerkan Muhammadiyah sebagai TBC. Nalar pikir Ibnu Taymiyah sendiri mengikuti nalar Imam Ahmad bin Hanbal (madzhab Hanbali) yang begitu tekstual. Dari titik ini, Muhammadiyah bisa disebut sebagai pelanjut nalar Hanbalian atau tekstualis.

Untuk memahami peta dan posisi nalar tekstualis dalam pemikiran keagamaan, menarik meminjam analisa dari Muhammad Abid al-Jabiri. Al Jabiri menyebut kaum tekstualis-eksplanatif sebagai pengguna nalar *bayani*, yang berbeda dengan *burhani* maupun *irfani*. Pengguna nalar *bayani* selalu menekankan pada penjelasan *nash*. Pendukung utama nalar *bayani* adalah para ahli fikih. Mengkristal di masa *tadwin* (era kodifikasi al-Qur'an), nalar *bayan* difahami sebagai aturan-aturan penafsiran wacana (*qawaanin tafsir al-khithabi*) dan syarat- syarat memproduksi diskursus (*Syuruut intaj al-khitab*).

Dalam hal ini, Imam Syafi'i misalnya, salah seorang ulama madzhab fikih, dan sering dianggap sebagai peletak dasar yurisprudensi Islam, mengungkapkan (mengukuhkan?) metodologi tekstual-ekspalanatif dalam lima tingkatan. 1) Teks al- Qur'an yang tidak memerlukan penjelasan lanjut. 2) Teks al- Qur'an yang beberapa bagiannya masih global dan membutuhkan penjelasan teks sunnah. 3) Teks al- Qur'an yang keseluruhannya masih global sehingga membutuhkan penjelasan teks sunnah. 4)Teks sunnah sebagai penjelas dari sesuatu yang tidak terdapat dalam teks al- Qur'an. 5) Teks *ijtihad* yang dilakukan dengan analogi (*qiyas*) dan induksi tematis (*istiqra*) atas sesuatu yang tidak terdapat dalam teks al- Qur'an maupun sunnah.

Kata Al-Jabiri, para pemikir muslim pengguna nalar *bayani* di lingkaran ahli fikih mengikuti pola pikir yang dibangun Imam Syafi'i, dan kemudian memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah dengan berpegang kepada redaksi teks. Sementara akal, bagi para tekstualis hanya digunakan sebagi pengaman otoritas teks tersebut.

Tentu saja, meski sama-sama merujuk kepada al-Quran dan Sunnah dalam kerangka tekstual-eksplanatif, di kalangan ahli fikih juga terjadi perdebatan sengit dalam hal teks ijtihad. Tawaran *qiyas* Imam Syafi'i di

atas misalnya, disertai dengan serangan kepada Imam Abu Hanifah yang menggunakan metode *ihtihsan*. Kata Imam Syafi'i, *man ihtasana fa qad syara.* Sementara itu, Imam Syafi'i juga mendapat serangan tajam dari Ibnu Hazm, pemikir madzhab Dzahiri, yang secara khusus menulis kitab *Ibthal al Qiyas*.

Bila disimpulkan secara general, di antara empat imam madzhab fikih, aliran yang paling tekstual adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan lalu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad disebut paling tekstual karena bagi Imam Ahmad, agama adalah al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, serta riwayat dari orang-orang terpercaya yang sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Ahmad juga dikenal keras menolak *qiyas*, serta mengecam pelaku *bid'ah*. Imam Ahmad, belakangan menjadi rujukan kelompok salaf.

Dalam konteks inilah dipahami kesimpulan Giora Eliraz, bila Muhammadiyah sangat dipengaruhi tradisi salaf, sehingga kerangka dakwahnya adalah *al-ruju ila al-Quran wa al-Sunnah*. Dan secara faktual, di tingkat akar rumput di beberapa daerah, nalar pikir warga Muhammadiyah, memang sangat khas dengan karakter Hanbalian.

Tentu saja menyimpulkan nalar pikir Muhammadiyah hanya dipengaruhi tradisi Hanbalian melalui jalur Rasyid Ridha, terbantahkan sendiri dengan teori tradisional, yang selalu melibatkan sosok Abduh, yang tak lain juga adalah guru dan sahabat Ridha. Kata Harun Nasution, Abduh adalah seorang pemikir ultra-rasional, atau lebih *mu'tazilah* dari *mu'tazilah* sendiri. Disebut lebih *mu'tazilah* karena selama ini aliran rasional Islam sering direpresentasikan dengan kaum *mu'tazilah*.

Menarik, bila menggunakan analisa Al-Jabiri lagi, yang juga menyinggung soal rasionalisme Islam. Dalam *Bunyah al-Aql al-'Arabi*, Al-Jabiri menjelaskan tentang tiga episteme pemikiran Islam, yang salah satunya, yaitu *bayani*, sudah dijelaskan di awal. Epistem lain yaitu nalar *burhani* dan *irfani*. Bila nalar *bayani* digunakan para fakih, maka nalar *burhani* menjadi nalar kaum filosof-rasionalis, sementara nalar *irfani* menjadi nalar kaum sufistik.

Ketiga nalar ini, dalam sejarahnya, tidak selalu berjalan harmonis, melainkan saling menegaskan satu sama lain. Sufi Imam Ghazali misalnya, dalam *al-Tahafut al-Falasifah* mengafirkan Ibnu Sina dalam tiga hal. Sementara filosof-fakih Ibnu Rusyd dalam *al-Tahafut al-Tafahut* menyebut Imam Ghazali sebagai *al-baththaaluun*, yang derajatnya lebih rendah daripada jahil. Lebih dari itu, al-Hallaj, seorang sufi, harus menerima hukuman mati di tiang gantungan karena ajaran-ajarannya dinilai sesat.

Kata al-Jabiri, untuk meminimalisir perbedaan dan benturan, maka perlu keterbukan beragam epistemologi untuk mencerahkan pemikiran keislaman. Al Jabiri pun melirik dan menawarkan Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm sebagai sosok yang idealis.

Ibnu Rusyd merupakan ahli fikih penulis *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, yang mengikuti madzhab Maliki. Di saat yang sama, Ibnu Rusyd juga seorang filosof, yang pikiran rasionalismenya mempengaruhi Barat, *wa bil khusus* mempengaruhi tradisi filsafat skolatisik dan pemikiran Thomas Aquinas. Bagi Ibnu Ruysd, rasionalisme merupakan instumen penting dalam menemukan kebenaran. Dan, penulis buku *Tahafut al-Tahafut* ini yakin, rasio, akal dan filsafat bisa sejalan dengan Islam.

Sementra Ibnu Hazm adalah pendekar madzhab Dzahiri. Dia sangat literalis, yang bahkan ultra-literalis. Dia lebih literal dibanding Imam Ahmad bin Hanbal, serta menyerang metode *qiyas* tanpa ampun. Dengan kritik tajam dan mematikan, Ibnu Hazm juga menyerang rasionalisme ala *mu'tazilah*. Namun, sebagaimana disebutkan Al Jabiri, literalis Ibnu Hazm ini bukan literalis sembarangan. Ia bahkan menggunakan logika dan rasionalitas bahasa untuk menyerang pengguna nalar *bayani* lain. Ibnu Hazm bisa dikatakan sebagai pemikir rasionalisme tekstualis (*ma'qul-al-lafdzi)*. Rasional namun dengan tetap dalam paradigma teks, atau tekstualis namun menggunakan dasar rasionalitas.

Dari gambaran peta pemikiran di atas, paling tidak bisa ditarik beberapa garis genealogis dan epistemologis. Pertama dari garis Ridho, lalu Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu Ibnu Taimyah hingga ke Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara dari garis Abduh, merujuk kepada rasionalisme Islam. Sementara itu, bila menggunakan alat ukur Al Jabiri, dengan benang merah episteme yang sama, melainkan di belahan bumi yang berbeda, puncak rasionalisme itu ada pada Ibnu Rusyd dan puncak tekstualisme rasional ada dalam pikiran Ibnu Hazm, yang kitab *Al Muhalla*-nya sering digunakan sebagai salah satu sumber rujukan.

Semua nama-nama besar itu merupakan simbol dari puncak pencerahan Islam. Dan menariknya, Muhammadiyah bisa menyerap semua inspirasi pencerahan Islam secara bersamaan, tanpa harus taklid kepada salah satu pemikiran yang juga lahir dari proses sejarah dan konteks sosial tertentu. Lebih-lebih taklid merupakan salah satu sumber kejumudan, yang sangat ditentang Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak tunduk pada siapa yang berpendapat, tapi mengukur dulu (tarjih), apakah pendapatnya itu benar atau tidak. Tak heran bila pemikiran pemikiran Muhammadiyah sangat

dinamis, hidup sesuai dengan kebutuhan zaman.

Di antara bukti betapa Muhammadiyah melampaui pencerahan Islam itu, adalah dengan melihat misalnya prinsip-prinsip Manhaj Tarjih Muhammadiyah; *al mura'ah* (konservasi), *al-tahditsi* (inovatif) dan *al-ibda* (kreasi). Kerangka Manhaj Tarjih pun tak terjebak seperti masa lalu yang menegaskan antar-epistem, melainkan menggabungkan-menghubungkan ketiga nalar, yaitu *bayani, burhani* dan *irfani*.

Dengan kerangka ini, maka Muhammadiyah bisa mengkontekstualisasikan *nash* yang sudah ada dengan melihat makna lahir dan batin; merasionalisasikan pendekatan sufistik dengan tanpa meninggalkan legitimasi dari *nash* (yang oleh Buya Hamka disebut tasawuf modern); melakukan spiritualisasi terhadap *nash* yang selama ini dibaca secara makna lahir dan melakukan spiritualisasi terhadap pendekatan rasional yang sudah mendapat hantaman keras dari postmodernitas; serta tetap mengapreasiasi pendekatan teks-teks yang ada sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam. *Wallahu a'lam.*

MENGGELORAKAN API TEOLOGI HAM MBAH DAHLAN

Maneger Nasution

Dua virus teologi hidup yang ditinggalkan Mbah Dahlan, yaitu teosentrisme dan aktivisme, menular pada orang-orang Muhammadiyah. Teosentrisme itu berakibat bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Artinya yang tidak bertentangan dengan keduanya bisa saja diambil sekalipun bertentangan dengan tradisi. Demikianlah, misalnya, sistem persekolahan, pendidikan perempuan, perumahsakitan, perumahan yatim, kepanduan, dan program kemanusiaan lainnya yang berasal dari Barat Kristen "ditiru" oleh Muhammadiyah. Aktivisme sosial dengan mendirikan bermacam voluntary association *bertentangan dengan kebiasaan cara orang beragama kala itu. Waktu itu agama dihimpun dengan konsep* mechanic solidarity *di sekitar seorang tokoh sentral. Mbah Dahlan melihat bahwa bila tokoh sentral itu sudah meninggal, maka habislah sudah bangunannya. Dia kemudian menggunakan konsep* organic solidarity *dengan mendirikan organisasi supaya dakwah tetap langgeng walaupun tanpa tokoh. "Meskipun mereka menolak teori saya, suatu saat mereka akan menyadari keakuratannya", pekik Mbah Dahlan.*

- Emile Durkheim

Seputar HAM

Hak asasi manusia (HAM) secara alamiah berasal dari berbagai sumber baik berupa ajaran agama, budaya, atau sifat dasar masyarakat tertentu. Jika melihat sejarahnya, HAM internasional banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat di negara-negara Barat yang lebih individu-individu di dalam suatu negara. Hak-hak tersebut cenderung membatasi kekuasaan negara terhadap masyarakatnya (Al-Khanif, 2010:80).

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia (Rasjidi, 2005:56). Walaupun demikian, terdapat kesulitan utama untuk membangun standar universal, yang melintasi batas kultural, khususnya agama, adalah masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan normanya dari sumber-sumbernya sendiri (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2004:267).

Sejak dahulu perdebatan tentang HAM selalu mengemuka; apalagi di jaman sekarang isu HAM telah menjadi isu penting. Hampir semua relasi antarnegara baik secara politik, ekonomi maupun budaya selalu berhimpitan pada HAM (Ahmad Nur Fuad *et al*: 2010). Konsep HAM sebagai salah satu pranata global merupakan instrumen strategis dalam mengawal peradaban modern agar lebih humanis dan bermartabat. Namun ketika HAM di implementasikan pada level pemahaman HAM universal *ala* Barat (Maneger Nasution, 2014) maka HAM dapat mendegradasi kedaulatan negara dan kesucian agama.

Pandangan yang menempatkan HAM sebagai tatanan universal absolut, sebenarnya telah lama ditentang dan dikritik tidak hanya oleh China, Rusia, dan negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga datang dari aktivis HAM sendiri yang melahirkan aliran relativisme dan partikularisme (Maneger Nasution, 2014) HAM. Mereka menilai bahwa penerapan HAM universal *ala* Barat secara absolut, sangat berat *kebablasan*. Memang Barat sendiri sangat sering munafik dalam menerapkan HAM dengan kaca mata standar ganda. Memang terjadi paradoks universalisme dan relativisme budaya dalam HAM (D'Amato, A.A: 1990 h. 131 dan 147-148).

Masalah HAM dalam kaitannya dengan syari'at Islam juga merupakan subyek perdebatan yang penting di kalangan sarjana muslim. Masing-masing telah mengembangkan wacana tentang HAM dan mengajukan berbagai pendapat yang berbeda. Sekalipun hampir semua sarjana muslim merujuk

kepada nilai-nilai dan syari'at Islam, tetapi pemahaman dan penafsiran mereka terhadap syari'at sangat beragam, lebih-lebih jika dikaitkan dengan konsepsi HAM universal *ala* Barat (Ahmad Fuad Nur Fuad, 2010:39).

Perbedaan prinsip antara HAM universal *ala* Islam dan HAM universal *ala* Barat adalah pada cara pandang (*world view*). Menurut pandangan dunia Barat (*western worldview*), HAM bersifat antroposentrik; segala sesuatu berpusat pada manusia. Manusia wajib hukumnya sangat dipentingkan. Manusialah yang menjadi standar dan ukuran segala sesuatu. Sebaliknya menurut pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*), HAM bersifat teosentrik; segala sesuatu berpusat pada Allah. Allah wajib hukumnya sangat dipentingkan. Manusia diciptakan Allah, tiada lain untuk mengabdikan diri bagi Penciptanya. Oleh karena itu HAM dalam Islam tidak hanya menekankan kepada hak-hak asasi manusia (HAM) saja, karena hak-hak itu dibatasi oleh kewajiban-kewajiban asasi manusia (KAM). Manusia memiliki hak, Allah juga punya hak. Hak manusia tidak boleh mengkudeta hak Allah. Dalam *Islamic worldview,* KAM lebih didahukan dari HAM. Dalam pandangan penulis, inilah konsep HAM universal *ala* Islam (Maneger Nasution, 2013).

Satu pihak adanya negara-negara besar, terutama Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan *Country Report on Human Rights Practices* dari banyak negara, demikian pula PBB. Tujuannya tidak lepas dari kepentingan politik, baik terkait dengan bantuan, kerja sama, maupun agenda-agenda lainnya. Dalam laporannya, Amerika Serikat masih menilai Indonesia termasuk negara yang nilai penegakan HAM-nya buruk, terutama kasus kebebasan beragama (Maneger Nasution, 2012). Pemerintah Indonesia pun sudah melakukan protes atas laporan itu. Pemerintah Cina juga melakukan protes (Josef P. Widyatmadja, 2004).

Islam adalah salah satu peradaban utama dunia. Banyak negara anggota PBB adalah negara muslim yang memberlakukan hukum Islam baik secara menyeluruh atau sebagian sebagai hukum domestik. Hukum Islam pun memengaruhi gaya hidup lebih dari satu milyar manusia di planet bumi ini (Freamon, B.K. 1998:1-5). Sementara negara-negara muslim mengambil bagian dalam pencapaian tujuan HAM internasional, mereka mengemukakan deklarasi dan reservasi dengan mendasarkan pada syariat Islam ketika mereka meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional HAM (E.g. PBB, 1999). Dalam laporan-laporan periodik mereka pun untuk badan-badan perjanjian dan piagam HAM PBB, banyak negara Muslim merujuk pada syari'at atau hukum Islam dalam argumen mereka (Baderin, 2000:265-

303).

Di satu sisi, ada pandangan umum, terutama di Barat, bahwa Islam tidak sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM tidak bisa terwujud dalam sistem keagamaan Islam. Di sisi lain, ada sejumlah pesimisme, terutama di dunia Muslim, tentang watak asli dari DUHAM ini. Padahal negara-negara Muslim memiliki hak berdaulat menerapkan hukum Islam dalam yurisdiksi mereka, pertanyaan apakah DUHAM bisa dilindungi melalui penerapan hukum Islam tetap menjadi wacana sangat penting (Mashood A. Baderin [tanpa tahun], h. 2).

Jauh sebelum HAM versi PBB itu dideklarasikan beberapa abad lalu secara paripurna Allah telah mendeklarasikan Islam universal tentang HAM (DIUHAM) yang mengatur tata kelola dunia dan peradaban umat manusia (Ahmad Fuad Nur Fuad, dkk, 2010:1). DIUHAM itu dideklarasikan melalui Nabi dan Rasul-Nya, yang menjadi kunci para Nabi dan Rasul lewat teks-teks al-Qur'an dan Sunnah. Ini merupakan bagian dari deklarasi Islam untuk umat manusia.

Islam tidak hanya menetapkan konsep tingkah laku manusia dalam teks-teks al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga telah membuat suatu contoh dan keteladanan ketaatan yang ideal terhadap pemuliaan HAM melalui kehidupan Rasulullah, metodologi bagaimana Nabi Muhammad, bertindak menghargai dan memuliakan HAM, ini merupakan pemberian keteladanan dalam penafsiran yang terbaik terhadap syari'at.

Kehadiran Islam adalah membawa misi teologi monotheisme (*tauhid*) guna menegakkan kalimat *lâ ilâha illallâh*, tiada Tuhan selain Allah. Makna kalimat singkat ini, jika dikaji secara mendalam, memiliki dampak sosial-politik yang dinamis dan progresif. Artinya bahwa melalui kalimat tauhid ini semua kekuasaan dan kekuatan di muka bumi harus ditiadakan. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak, selainnya nisbi. Konsekuensinya, tidak seorang pun di planet ini diijinkan untuk berkuasa secara lalim dan sewenang-wenang. Seluruh penguasa otoriter dan diktator harus dimusnahkan, karena manusia berkedudukan sama di hadapan-Nya. Yang membedakan hanya kualitas iman, ilmu, dan kualitas penghambaan berupa ketakwaan kepada-Nya (QS. al-Hujurât [49] ayat 13). Tidak salah jika teologi ini sering disebut sebagai teologi pembebasan (Ahmad Fuad Nur Fuad, dkk, 2010:2).

Misi Islam juga tercermin dari firman Allah, *wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lil'âlamîn*, dan Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali

untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (QS.al-Anbiyâ [21] ayat 107). Cakupan rahmat bagi alam seisinya memberi ruang gerak bagi tumbuhnya masyarakat majemuk yang senantiasa cinta damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan peradaban. Hal ini dijelaskan pula dalam salah satu Hadits Nabi Muhammad, *inna mâ bu'itstu liutammima makarimal akhlâq*, Aku (Muhammad) hanya diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak (moral) yang mulia. Moralitas merupakan kunci utama bagi terwujudnya masyarakat. Sebab hanya dengan moral seluruh bidang kehidupan dapat dipayungi dan dilindungi (Ahmad Fuad Nur Fuad, 2010:2).

Melalui misi *tauhid*, dalam sejarah peradaban Islam mampu menapaki kehidupan yang cemerlang dari periode ke periode. Diawali dengan periode Makkah yang mengedepankan paradigma *ukhuwwah Islamiyyah*, persaudaraan internal Muslim, kemudian berlanjut pada periode Madinah yang menekankan *ukhuwwah wathaniyyah*, persaudaraan lintas iman (kebangsaan), dan dipungkasi dengan peristiwa *hajji wada'* yang menjunjung tinggi *ukhuwwah basyariyyah*, persudaraan lintas etnis (HAM).

Teks *khutbah wada'* Nabi Muhammad kala itu, memberikan indikasi bahwa kesempurnaan Keislaman seseorang harus disertai upaya penghormatan atas jiwa dengan menghindari segala bentuk kekerasan dan intimidasi, penghormatan atas hak milik (*property*), serta profesi seseorang. Ringkasnya penghormatan atas nilai-nilai HAM merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut menjadi pilar yang sangat penting bagi terwujudnya bangunan masyarakat. Tanpa adanya HAM kualitas Islam seseorang tidaklah mencapai kesempurnaan (Ahmad Fuad Nur Fuad, 2010:7).

Proses pembentukan masyarakat *mutamaddin* dalam wacana al-Qur'an harus senantiasa berlandaskan, "Maka disebabkan rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap arogan lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesunggunya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali-'Imran [3] ayat 159). Dengan resep ayat di atas Nabi Muhammad mampu menata masyarakat *mutamaddin* di Semenanjung Arab, suatu masyarakat yang awalnya terkenal memiliki tempramen amat labil, emosional, tribal, dan nomaden.

Sebagai agama yang universal dan komprehensif, ajaran Islam meliputi akidah, ibadah, dan muamalah. Dimensi muamalah adalah konsepsi hubungan

manusia dengan sesama manusia atau dengan alam sekitar. Dalam dimensi muamalah itulah terdapat ajaran tentang HAM. Adanya ajaran tentang HAM menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya tanpa terkecuali.

Pasca Perang Dingin arus gelombang HAM semakin kencang melanda seantero dunia. Negara-negara Barat semakin bersemangat memaksakan penerapan konsep DUHAM kepada negara lain, termasuk negara Islam tanpa memperhatikan keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, agama, dan lain-lain yang dimiliki bangsa itu. Meskipun HAM sesungguhnya bersifat universal, yakni di mana dan kapan saja tetap sama. Namun sebagai suatu sistem nilai, penerapannya akan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dengan kata lain, tidak mungkin konsep DUHAM dipaksakan untuk diberlakukan bagi negara lain karena pemaksaan tersebut justru merupakan pelanggaran terhadap HAM itu sendiri. Faktor "pemaksaan Barat" inilah yang masih menjadi ketegangan (*crucials*) antara negara-negara Barat dan negara-negara berkembang *(*Muhammad Tholchah Hasan, *1997:73).* Sebagai contoh dapat dikemukakan dua pasal dalam DUHAM. *Pertama,* Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita bebas melakukan perkawinan tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, dan agama. *Kedua*, Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk dan keluar dari suatu agama.

Penerapan kedua pasal itu bagi masyarakat muslim menimbulkan masalah karena menurut keyakinan umat Islam seorang wanita Muslimah dilarang menikah dengan seorang pria non-Muslim, dan perbuatan keluar dari agama Islam adalah *murtad* yang merupakan dosa besar dan menurut fikih tradisional pelakunya halal untuk dibunuh. Untuk itu, dalam penerapan HAM di suatu negara harus memperhatikan sepenuhnya situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.

Islam sebagai agama selalu terdapat perbedaan cara pandang (*worldview*) tentang HAM; ada yang membedakan antara pandangan dunia Barat (*western worldview*) dan pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*) melalui kerangka deklarasi PBB. Dalam *Islamic worldview*, HAM, di samping mengandung ajaran keimanan, juga ada dimensi yang sudah ditentukan dalam mengatur hak-hak. *Pertama,* hak manusia (*huquq al-insân al-dharuriyah*). *Kedua*, hak Allah (*huquq Allah*) (Ahmad Nur Fuad dkk: 2010:ix).

Secara normatif, tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan tentang kekerasan, kekejaman, maupun bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Dalam Islam, justru ditegaskan pentingnya kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip adil, saling menghormati, dan mengedepankan silaturrahim di tengah-tengah perbedaan keyakinan.

Masalah keyakinan adalah urusan manusia dengan Allah. Manusia sendiri tidak memiliki otoritas untuk mengadilinya (QS.16:125). Pernyataan ini telah mempertegas bahwa harus adanya penghormatan terhadap HAM. Apa yang dimaksud dalam al-Qur'an menjadikan jalan bagi umat Islam untuk menjadi pelopor dalam membangun dan mengembangkan toleransi dan penegakan HAM.

Sebab itu, umat Islam tidak perlu ragu untuk berbicara tentang Dekalarasi Islam Universal tentang HAM (DIUHAM), karena dasar-dasarnya telah diajarkan dalam al-Qur'an 1500 tahun lalu. Keragu-raguan umat Islam untuk mengkampanyekan dan menegakkan DIUHAM di Indonesia akan merugikan posisi umat Islam Indonesia karena membiarkan begitu saja ajaran al-Qur'an *"diaku-aku"* oleh pihak lain sebagai miliknya, padahal jelas dalam al-Qur'an telah diatur sedemikian rupa tentang penegakan dan pemenuhan DIUHAM.

DIUHAM sudah dimulai dari Piagam Madinah. Dalam Deklarasi Madinah yang dikenal dengan *Mitsaq Madinah* yang berisi 47 pasal (Mashood A. Baderin, 2013:245-252) merupakan konstitusi atau UUD bagi negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad sebagai pedoman perilaku sosial, keagamaan, dan perlindungan semua warga negara Madinah (Ahmad Nur Fuad dkk, 2010:xi).

Prinsip dasar dalam Piagam Madinah itu adalah (1) Interaksi secara baik dengan sesama, baik Muslim manupun non-Muslim, (2) Saling membantu dalam menghadapi musuh besama, (3) Membela mereka yang teraniaya, (4) Saling menasihati, dan (5) Menghormati kebebasan beragama. Itu semua merupakan dasar yang diletakkan Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.

Dalam khazanah Islam, selain Deklarasi Madinah juga ada Deklarasi Arafah (632), Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia/ DIUHAM (1981), dan Deklarasi Cairo (1990). Deklarasi Arafah/*Khutbatul Wada'* (632) yang oleh beberapa sejarawan dipandang sebagai pernyataan HAM yang pertama (*The Firs Declaration of Human Rights*) di dunia ini, telah menggariskan hak-hak dan kewajiban pokok bagi tiap-tiap manusia. Apabila disimpulkan, Dekalarasi Arafah itu secara garis besar mengandung

enam pasal (1) Perlindungan terhadap jiwa, harta benda dan lain-lain, (2) Semangat bertanggung jawab, (3) Memelihara dan menunaikan amanah, (4) Menghapus riba, (5) Mengangkat derajat kaum wanita (emansipasi), dan (6) Membentuk persaudaraan Islam.

DIUHAM ini disusun dalam Konferensi Islam di Mekkah pada 1981. DIUHAM ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Allah dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan DIUHAM ini dikemukakan bahwa HAM dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM (Frans Sayogie, 2013:44-45). Salah satu kelebihan dari DIUHAM ini adalah bahwa teksnya memuat acuan-acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam (Abdul Aziz Dahlan (*et.al*), 1996:498).

Selanjutnya juga ada Deklarasi Cairo. Pada 1990, negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menghasilkan "Deklarasi Kairo" (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*), sebagai "tandingan" dari DUHAM yang dikeluarkan di San Francisco pada 10 Desember 1948. Dalam Pasal 25 Deklarasi Kairo, misalnya, menegaskan: "*The Islamic Syariah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration*". (Syariat Islam merupakan satu-satunya sumber rujukan bagi penjelasan atau klarifikasi dari setiap pasal dalam Deklarasi Kairo ini) (Mashood A. Baderin, 2013:252). Jadi, dalam Deklarasi Kairo, negara-negara Islam telah sepakat untuk meletakkan syariat Islam di atas HAM. Bukan sebaliknya: meletakkan Islam di bawah HAM.

Dari gambaran di atas, baik Deklarasi Madinah, Deklarasi Arafah, DIUHAM, maupun Deklarasi Cairo, dapat dipahami betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak kelahiran Islam. Diawali dengan tradisi Islam pada periode Nabi Muhammad, sejarah pemikiran manusia terus berkembang di berbagai belahan bumi ini. Di Barat ada periode Pencerahan (*enlightenment*) yang kemudian melahirkan istilah *human rigths* sebagai ganti dari terminologi *natural rights* dan *rights of man* yang telah muncul sebelumnya. Pemikiran mengenai HAM juga telah muncul pada Abad XIII sebagaimana termuat dalam dokumen *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628), dan *Bill of Rights* (1689). Ujung pemikiran HAM adalah doktrin hukum alam bahwa pada setiap manusia

melekat serangkaian hak alamiahnya yang kekal dan tidak dapat dicabut, ditinggalkan, dan dikurangi oleh apa yang disebut *"hak ilahi"* raja. Hal ini merupakan antitesis bagi doktrin yang sebelumnya menekankan sisi kewajiban dan menafikan ide sentral tentang persamaan dan kemerdekaan (Ahmad Nur Fuad dkk: 2010, h. xiii).

Memperhatikan DUHAM, akan segera terlihat beberapa tahap kesadaran tentang hak-hak itu. Tahap *pertama*, sering kali disebut dengan hak sipil, meletakkan posisi HAM yang menghargai tidak adanya intervensi dari pemerintah terhadap kebebasan manusia untuk meningkatkan martabat manusia. Hak-hak dalam tahap pertama ini dirumuskan pada Pasal 2 sampai 21 DUHAM. Tahap *kedua*, sering disebut dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemunculan tahap ini dipicu oleh kritik terhadap perkembangan Kapitalisme yang mengeksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Hak-hak ini terdapat pada Pasal 22 sampai 27 DUHAM. Tahap *ketiga*, mencakup hak-hak solidaritas, yang merupakan rekonseptualisasi dari tahap pertama dan kedua. Hak ini terdapat pada Pasal 28 DUHAM, yang isinya merefleksikan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan keinginan untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan, dan nilai-nilai lain yang penting.

Ada yang tercantum dalam DUHAM selaras dengan prinsip-prinsip dalam DIUHAM. Namun demikian sering muncul persoalan kontektualisasi dan pelaksanaannya dalam situasi dan tingkat kehidupan yang berbeda karena disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Karena itu, HAM tidak memadai hanya mengacu pada DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan instrumen-instrumen pendukungnya. Akan tetapi, juga harus mengacu pada Piagam Madinah, Deklarasi Arafah, DIUHAM, dan Deklarasi Kairo serta istrumen-instrumen turunannya.

Teologi HAM Mbah Dahlan, HAM yang Adil dan Beradab

Lalu, bagaimana dengan teologi HAM Mbah Dahlan? Teologi HAM Mbah Dahlan di sini maksudnya adalah pandangan dan keyakinan keislaman dan keindonesiaan Mbah Dahlan mengenai HAM. Pandangan dan keyakinan Mbah Dahlan itu kemudian melembaga menjadi paham Muhammadiyah. Teologi HAM Mbah Dahlan itulah selanjutnya yang secara organik diperjuangkan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam menyusun Pancasila sedari awal. Otentisitas teologi HAM Mbah Dahlan itu sudah terpatri dalam Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia kedudukan Pancasila sangat penting. Pancasila

adalah dasar negara. Kelima silanya merupakan rumus berpikir dan bersikap rakyat di Indonesia. Semakin terasa lebih penting bila membicarakan Pancasila berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selama ini dimunculkan stigma bahwa terjadi pertentangan antara dasar hukum yang dipegang umat Islam dengan Pancasila. Hal ini adalah sebuah kekeliruan atau bisa disebut pengeliruan pihak tertentu.

Pada dasarnya mayoritas Muslim di Indonesia tidak bertentangan atau menentang Pancasila. Sebab, para penyusun dasar negara ini pun mayoritas kaum Muslim. Apalagi bila dilihat bahwa asal atau "ruh" Pancasila adalah Piagam Jakarta. Piagam ini merupakan buah pikir cendikiawan Muslim pada masa itu. Piagam ini merupakan piagam yang sangat memfasilitasi keinginan umat Islam dalam berpegang pada syariatnya, bahkan sebetulnya ia juga memfasilitasi umat lainnya. Tetapi, tidak sedikit orang yang melupakan bahwa justru Piagam inilah yang dengan tegas-tegas menyebut kelima sila dalam Pancasila mendahului UUD 1945 itu sendiri. Pendek kata, seperti kata Soekarno, Piagam ini adalah hasil kompromis yang sebaik-baiknya (Adian Husaini, 2009:17-18).

Namun, selalu saja ada yang salah paham dengan keinginan hakiki umat Islam ini. Ada pihak-pihak yang mengkampanyekan stigma bahwa umat Islam itu anti Pancasila. Juga, muncul berbagai tuduhan lain yang sangat memojokkan umat Islam. Keutamaan (*core*) Pancasila itu, kata Ahmad Tafsir, adalah pada sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Ahmad Tafsir, 1982:47-53). Pendapat pakar Filsafat Pendidikan Islam yang sangat penting itu dapat disimpulkan dari **Gambar: 1.3** berikut ini:
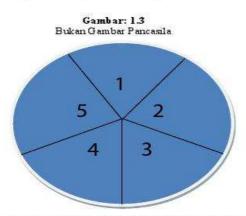
Gambar: 1.3. Gambar di atas Bukanlah Gambar Pancasila (Diadaptasi dari Ahmad Tafsir, 2012)

Angka 1 (sila 1) Pancasila pada **gambar 1.3,** di atas terletak sejajar dengan angka (sila) 2, 3, 4, dan (sila) 5, menegaskan bahwa sila pertama, sama dengan sila-sila lainnya. Ini adalah cara yang keliru dalam membaca Pancasila dan cara pandang yang salah dalam memahami Pancasila; ini bukanlah Pancasila. Sesungguhnya Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah *core* Pancasila. Bila sila pertama itu adalah *core* Pancasila maka cara membaca yang tepat dan cara pandang yang benar dalam memahami Pancasila

haruslah seperti **gambar 1.4,** berikut (*Ibid.*, h. 73-74).

Angka (sila) 1 pada **gambar 1.4.** di atas terletak di tengah menegaskan bahwa sila pertama itu adalah *core*-nya Pancasila. Bila sila pertama adalah *core*-nya Pancasila maka cara membaca Pancasila yang benar itu haruslah sebagai berikut (*Ibid.*):

Gambar: 1.4
Gambar Pancasila

Gambar: 1.4. Gambar Pancasila Yang Benar
(Diadaptasi dari Ahmad Tafsir, 2012)

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. Persatuan Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *core* Pancasila, (dan memang ya), maka seluruh turunannya (UUD 1945, UU, PP, SKM, JUKNIS) haruslah menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *core*. Sedangkan landasan HAM Indonesia adalah sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Konsep "adil" dan "beradab" pada sila kedua itu seharusnya dipahami sebagai konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, kata "adil" dan "adab" belum dikenal, sehingga untuk memahaminya seharusnya dirujuk kepada makna-makna yang dipahami dalam konsep Islam, bukan pada pandangan dunia lainnya.

Setelah mencermati berbagai fakta di atas, patutlah dipertanyakan kembali, benarkah Pancasila dan sila-sila Pancasila harus ditafsirkan secara netral agama, sebagaimana diajukan oleh beberapa tokoh di Indonesia? Jika ditelusuri, tampak, pandangan ini sebenarnya kurang memiliki basis ilmiah yang kuat, tetapi lebih merupakan harapan dan keinginan. Seperti disebutkan sebelumnya, rumusan "Yang Maha Esa" dalam Pancasila adalah hasil kesepakatan Hatta dengan para tokoh Islam yang menegaskan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah konsep Ketuhanan menurut Islam (tauhid)

(Adian Husaini, 2009:214).

Tafsir otentik para perumus Pancasila ini tidak bisa diabaikan begitu saja dalam memahami makna Pancasila. Juga, keberadaan lafaz Allah di dalam Pembukaan UUD 1945 memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa lebih tepat dipahami dalam perspektif pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*), dan bukan dari sudut pandang zaman keaslian budaya Hindu, pra-Hindu atau budaya netral agama yang dibawa oleh kaum penjajah Barat seperti tesisnya Soekarno yang dikenal dengan teori "lapis budaya" (Soekarno, 1960:47-48). Teori *"lapis budaya"* Soekarno itu juga pernah diungkap oleh Pendeta Eka Darmaputera dengan tiga lapisan budaya di Indonesia, yaitu asli, India, dan Islam (Eka Darmaputera, 1997:41).

Jika benar, bahwa Pancasila digali dari zaman pra-Hindu, dan bukan berasal dari zaman Hindu, Islam, atau penjajah Barat maka, patut dipertanyakan, bagaimana dengan aspirasi para tokoh Islam pada perumusan Piagam Jakarta dalam Pancasila di sidang BPUPK tahun 1945? Apakah benar, konsep itu murni hanya digali dari zaman pra-Hindu? Tentu saja pandangan semacam ini tidak mudah dibuktikan kebenarannya dan lebih merupakan sebuah dogma. Sebab, kehebatan peradaban zaman pra-Hindu di Indonesia sendiri tidak mudah dibuktikan secara ilmiah.

Itulah pemahaman Bung Karno tentang Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Persoalannya kemudian, Bung Karno mengakomodasi kekuatan komunis yang ditolak keras oleh kaum beragama di Indonesia. Kaum komunis juga mempunyai pemahaman sendiri tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan lebih memilih penafsiran yang mengarah pada kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk juga kebebasan untuk *"tidak beragama"*.

Model penafsiran sila pertama semacam ini, juga kini banyak digunakan kaum liberal yang *"merujuk"* kepada DUHAM Pasal 18, "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, di muka umum maupun sendiri" (Komnas HAM, 2008: 6).

Jika teori *"lapis budaya"* Soekarno ini diterima kebenarannya dan diaplikasikan dalam pemaknaan terhadap Pancasila, maka siapa pun kemudian layak bertanya lebih jauh: jika agama di zaman pra-Hindu, yakni pada

lapisan asli Indonesia, adalah animisme, maka apakah konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sekarang harus dikembalikan pemaknaannya pada konsep animisme? Tentu saja tidak! Soekarno sendiri menegaskan, "Kalau saudara tanya kepada saya *persoonlijk*, apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan? Ya, saya ini percaya, saya ini orang Islam. Bahkan, saya betul-betul percaya kepada agama Islam" (Soekarno, 1960:58).

Indikasi yang lebih jelas tentang kuatnya pandangan-pandangan dunia Islam pada rumusan Pancasila adalah terdapatnya sejumlah istilah kunci yang maknanya sangat khas Islam. Ambillah contoh, kata "adil", "adab", "hikmah", dan "musyawarah". Dua kata *adil* dan *adab* ini jelas berasal dari kosakata Islam, yang memiliki makna khusus (*Istilâhan*) dan hanya bisa dipahami dengan tepat jika dirunut pada pandangan dunia Islam.

Kedua istilah tersebut jelas tidak ditemukan dalam tradisi Indonesia asli, sebelum kedatangan Islam (Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 214). Adil adalah istilah *khas* yang terdapat dalam banyak sekali ayat al-Qur'an. Sebagai contoh dalam al-Qur'an disebutkan, *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"* (QS.al-Nahl/16:90).

Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar*, menjelaskan tentang makna *adil* dalam ayat ini, yaitu "menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya". Lawan dari *adil* adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. "Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai" (Hamka, 1964).

Jadi, adil bukanlah sama rata-sama rasa. Konsep adil adalah konsep khas Islam yang oleh orang Islam, seharusnya dipahami dari perspektif pandanagn dunia Islam, karena konsep ini terikat dengan konsep-konsep Islam lainnya. Jika konsep adil dipahami dalam kerangka pandangan dunia Barat (*western worldview*), maka akan berubah maknanya.

Sejumlah aktivis Kesetaraan Gender, yang berpedoman pada "setara" menurut *western worldview,* misalnya, mulai menggugat berbagai ajaran Islam yang dinilai menerapkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Dipertanyakan, mengapa *aqiqah* untuk bayi laki-laki, misalnya, adalah dua ekor kambing dan *aqiqah* untuk bayi perempuan adalah satu ekor kambing. Konsep itu dinilai tidak adil dan diskriminatif. Dalam Islam, laki-laki berhak menjadi imam shalat bagi laki-laki dan perempuan adalah adil.

Menurut konsep yang lain, bisa dikatakan tidak adil. Dalam pandangan demokrasi Barat, tidak ada pembedaan antara hak "orang baik" dengan "orang jahat" dalam kesaksian dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Bagi hukum pidana yang berlaku sekarang, dianggap adil jika Presiden yang tidak ada hubungan keluarga apa pun berhak memberikan grasi kepada seorang terhukum. Tetapi, dalam Islam, yang lebih adil adalah jika hak pengampunan itu diberikan kepada keluarga korban kejahatan.

Jadi, kata adil, memang sangat beragam maknanya, tergantung pandangan dunia apa yang digunakan. Sejumlah kalangan dengan alasan HAM, menilai aturan Islam tidak adil, karena melarang wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Juga dengan dasar yang sama, mereka menuntut keadilan agar kaum homoseksual dan lesbian (LGBT) juga diberikan hak yang sama untuk diakui keabsahan perkawinan mereka, sebagaimana pernikahan kaum hetero. Lama-lama, bisa juga mereka menuntut hak untuk pengesahan perkawinan manusia dengan binatang, dengan alasan, tidak mengganggu orang lain. Ada juga tuntutan hak untuk mati, sebagaimana hak untuk hidup. Dan sebagainya. Karena itu, jika istilah "adil" dalam sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dilepaskan maknanya dari sudut pandangan dunia Islam, maka akan terlepas pula maknanya yang hakiki, sebagaimana dimaksudkan oleh para perumus Pancasila itu sendiri.

Bagi kaum muslim, Naquib al-Attas mengingatkan perlunya memperhatikan masalah penggunaan bahasa atau istilah-istilah dasar dalam Islam dengan benar agar jangan sampai terjadi kekeliruan yang meluas dalam memahami Islam dan pandangannya tentang hakikat kebenaran.

Menurut al-Attas, banyak istilah kunci dalam Islam yang kini menjadi kabur dipergunakan sewenang-wenang sehingga menyimpang dari makna yang sebenarnya. Ia menyebutnya sebagai *"penafi-Islaman"* bahasa (*de-Islamization of language*) (Adian Husaini: 2009:216). Contoh kasus *de-Islamization of language* adalah pemaknaan istilah "keadilan" yang diartikan sebagai *"tiada menyebelahi mana-mana pihak, dan menyamaratakan taraf tanpa batasan, atau sebagai tata cara belaka"*. Contoh lain penyalahpahaman makna istilah *adab*, yang diartikan hanya sebagai adat peraturan mengenai

kesopanan, yang lazimnya merupakan amalan berpura-pura sopan" (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2007:60).

Terminologi *adab* juga merupakan salah satu istilah dasar dalam Islam. Para ulama telah banyak membahas makna *adab* dalam pandangan Islam. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, menulis sebuah buku berjudul *Âdabul Âlim wa al-Muta'allim* (Hasyim Asy'ari: 2007). Terejemahan: *Adab Guru dan Murid*. Buku ini secara panjang lebar mengupas tuntas tentang masalah *adab*. Hasyim Asy'ari membuka kitabnya dengan mengutip hadits, *"Haqqu al-waladi 'alâ wâlidihi al-yuhsina ismahu, wa yuhsina murdhi'ahu, wa yuhsina adabahu"* (Hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, pengasuhan yang baik, dan adab yang baik).

Dikutip juga perkataaan sejumlah ulama. Hasan al-Bashry misalnya, yang menyatakan, *"In kâna al-rajulu layakhruja fi adabi nafsihi al-sinîna tsumma sinîna"* (Hendaknya seseorang senantiasa mendidik dirinya dari tahun ke tahun). Habib bin al-Syahid suatu ketika menasihati puteranya, *"Ishhabi al-fuqahâ-a wa ta'allam minhum adabahum, fainna dzâlika ahabbu ilayya min katsîrin minal hadîtsi"* (Bergaullah engkau dengan para *fuqaha* serta pelajarilah adab mereka. Sesungguhnya yang demikian itu akan lebih aku cintai daripada banyak hadits).

Ruwaim juga pernah menasihati puteranya, *"Yâ bunayya ij'al 'ilmaka milhan wa adabaka daqîqan"* (Wahai putraku, jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu sebagai tepung). Ibnu al-Mubarak menyatakan, *"Nahnu ilâ qalîlin minal adabi ahwaja minnâ ilâ katsirin mina 'ilmi"* (Mempunyai adab meskipun sedikit lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu pengetahuan).

Suatu ketika Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, "Sejauh manakah perhatianmu terhadap adab? Beliau menjawab: Setiap telingaku menyimak suatu pengajaran budi pekerti meski hanya satu huruf, maka seluruh organ tubuhku akan ikut merasakan (mendengarnya) seolah-olah setiap organ itu memiliki alat pendengaran (telinga). Demikianlah perumpamaan hasrat dan kecintaanku terhadap pengajaran budi pekerti". Beliau ditanya lagi, "Lalu bagaimanakah usaha-usaha dalam mencari adab itu?" Beliau menjawab, "Aku akan senantiasa mencarinya laksana usaha seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang".

Maka, dalam bukunya ini, Hasyim Asy'ari membuat kesimpulan yang menarik:......."Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagaian ulama lain menjelaskan, "Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah mengharuskannya beriman kepada Allah (yakni dengan

membenarkan dan meyakini Allah tanpa sedikit pun keraguan). Karena, apabila ia tidak memiliki keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat (hukum-hukum Islam) dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Begitupun dengan pengamalan syariat, apabila ia mengamalkannya tanpa dilandasi adab, maka pada hakikatnya ia belum mengamalkan syariat, dan belum dianggap beriman serta bertauhid kepada Allah".

"Berdasarkan beberapa hadits Rasulullah dan keterangan para ulama di atas, kiranya kita tidak perlu ragukan lagi betapa luhurnya kedudukan *adab* di dalam ajaran Islam. Karena, tanpa *adab* dan perilaku yang terpuji maka apa pun amal ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan diterima di sisi Allah (sebagai satu amal kebaikan), baik menyangkut amal *qalbiyah* (hati), *badaniyah* (badan), *qauliyah* (ucapan), maupun *fi'liyah* (perbuatan). Dengan demikian, dapat kita maklumi bahwa salah satu indikator amal ibadah seseorang diterima atau tidak di sisi Allah adalah melalui sejauh mana aspek *adab* disertakan dalam setiap amal perbuatan yang dilakukannya" (Hasyim Asy'ari, 2007).

Dalam pandangan Muhammadiyah dijelaskan bahwa makna *adab* dipersamakan dengan makna akhlak yang berarti tabiat, watak perangai, dan budi pekerti. Akhlak/*adab* bisa didefinisikan sebagai sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan tertentu secara spontan dan konstan. Yang menjadi standar nilai akhlak/*adab* adalah al-Qur'an dan Sunnah. Ruang lingkupnya dapat dikelompokkan akhlak/*adab* kepada Allah dan Rasul-Nya (*al-diniyah*), pribadi (*al-fardiyah*), keluarga (*al-usrawiyah*), masyarakat (*al-ijtima'iyah*), negara dan dunia internasional (*al-daulah*), dan kepada alam lainnya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 2000 dan Haedar Nashir dkk: 1994:57-58).

Demikianlah pandangan Muhammadiyah dan Hasyim Asy'ari (mewakili pandangan NU) tentang adab. Mencermati pandangan Muhammadiyah dan NU tentang adab tersebut, maka tidak bisa tidak, kata adab memang merupakan istilah yang khas maknanya dalam Islam. Adab terkait dengan iman dan ibadah dalam Islam. Adab bukan sekedar *"sopan santun"*.

Maka, tentunya sangat logis jika orang Islam memahami makna adab dalam sila kedua itu sebagaimana dipahami oleh sumber-sumber ajaran Islam dan para ulama Islam. Sebab, memang itu istilah yang sangat khas dalam Islam. Jika adab hanya dimaknai sebagai "sopan santun", maka bisa-bisa ada orang yang mengatakan, Nabi Ibrahim sebagai orang yang tidak beradab,

karena berani menyatakan kepada ayahnya, *"... Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata"* (QS.6:74). Bisa jadi, jika hanya berdasarkan sopan santun, tindakan mencegah kemunkaran (*nahyu 'anil munkar*) akan dikatakan sebagai tindakan tidak beradab. Sebagian malah ada yang menganggap, menanyakan identitas agama pada seseorang dianggap tidak sopan. Banyak yang menganggap enteng dosa zina, dan dianggap tidak etis jika masalah itu diangkat ke permukaan, sementara masalah korupsi harta bisa diangkat ke permukaan.

Karena itulah, menurut Islam sekali lagi menurut ajaran Islam harkat dan martabat sesuatu adalah berdasarkan pada ketentuan Allah, dan bukan pada kesepakatan manusia. Sebagai contoh, kriteria orang yang mulia, menurut al-Qur'an adalah orang yang paling takwa (QS.49:13). Maka, seharusnyalah dalam masyarakat yang beradab, kaum Muslim harus menghormati seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Bukan karena jabatannya, kekayaannya, kecantikannya, atau popularitasnya. Itu baru namanya beradab, menurut al-Qur'an. Begitu juga ketika al-Qur'an memuliakan orang yang berilmu (QS.35:28, QS.3:7, dan QS.58:11), maka sesuai konsep adab, seorang Muslim wajib memuliakan orang yang berilmu dan terlibat dalam aktivitas keilmuan. Masyarakat yang beradab juga masyarakat yang menghargai aktivitas keilmuan. Tentu menjadi tidak beradab, jika aktivitas keilmuan dikecilkan, sementara aktivitas hiburan diagung-agungkan. Tidak mungkin suatu bangsa akan maju jika tidak menjadikan tradisi ilmu sebagai bagian dari tradisinya.

Imam Syafi'i dalam sejumlah sya'irnya bersenandung: *Wa'lam bi anna al-ilma laysa yanâluhu, man hammuhu fi math'amin aw malbasin.* (Ketahuilah, ilmu itu tidak akan didapat oleh orang yang cita-cita hidupnya hanya untuk makanan dan pakaian); *Falaw lâ al-ilmu mâ sa'idat rijâlun, wa lâ 'urifa al-halâlu wa lâ al-harâmu.* (Andaikata tanpa ilmu, maka seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram (Adian Husaini, 2009:220).

Bangsa Indonesia tidak mungkin akan menjadi bangsa besar jika mengabaikan tradisi ilmu ini. Jika budaya santai, budaya hedonis, budaya jalan pintas, terus dikembangkan, maka hanyalah mimpi saja untuk berangan-angan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar yang disegani dunia. Dalam perspektif Islam, manusia beradab haruslah yang menjadikan aktivitas keilmuan sebagai aktivitas utama mereka. Sebab seorang Muslim senantiasa berdo'a, *"Rabbi zidnî 'ilman"* (Ya Allah, tambahkanlah ilmuku). Lebih dari itu, Rasulullah juga mengajarkan do'a, agar ilmu yang dikejar

dan dimiliki seorang Muslim adalah ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan ilmulah, maka manusia dapat meraih adab, sehingga dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan ketentuan Allah. Inilah konsep adab sebagaimana dipahami oleh kaum Muslim.

Maka, jika ditelaah, adalah sangat logis menghipotesakan, bahwa masuknya kata *adil* dan *adab* dalam sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab* adalah gagasan para tokoh Islam yang duduk dalam Panitia Sembilan. Perlu dicatat, bahwa sebelum Panitia Sembilan bermusyawarah, Soekarno dan Muhammad Yamin sudah mengajukan asas atau dasar "peri-kemanusiaan" sebagai salah satu asas atau dasar dari Dasar Negara Indonesia. Mengapa, misalnya, sila kedua itu tidak berbunyi: *Kemanusiaan yang sopan dan berbudi?* Atau *Kemanusiaan yang sopan dan santun?* Atau, hanya berhenti pada istilah *kemanusiaan*. Jika demikian, maka akan sangat mungkin kata ini dimaknai secara fleksibel dan netral agama. Inilah yang secara mendasar digugat oleh Natsir dalam pidatonya di Majelis Konstituante, "Di mana sumber perikemanusiaan itu?" Bagi yang menganut nilai-nilai relativisme dalam kebenaran dan moral, maka makna "kemanusiaan" akan memiliki makna yang nisbi dan tidak absolut, tergantung pada tradisi atau kesepakatan suatu masyarakat (*Ibid.*, h. 222).

Seperti disinggung sebelumnya, jika masyarakat tidak berkeberatan dengan budaya pornografi dan pornoaksi, maka nilai itu akan dianggap sebagai kebenaran. Orang yang menentang tradisi masyarakat tersebut bisa dikatakan manusia tidak beradab. Begitu juga ketika suatu masyarakat menerima praktik pelacuran, perjudian, atau minuman keras, maka itu dianggap sebagai nilai yang benar. Menurut kaum relativis ini, tidak ada nilai yang tetap sepanjang zaman dan sembarang tempat. Nilai selalu berubah. Batasan aurat wanita misalnya, menurut mereka, tidak ada yang tetap, tetapi berdasarkan budaya setempat. Apa yang sopan dan tidak sopan, ditentukan oleh tradisi dan kesepakatan dan konsensus. Tentu saja, konsep semacam ini sangat berbeda dengan konsep Islam.

Karena itulah, masuknya kata *adil* dan *adab* dalam sila kedua Pancasila semakin memperkuat bahwa Pancasila bukanlah konsep yang netral agama. Tampak, pandangan dunia Islam yang dibawa oleh para tokoh perumusnya Wachid Hasyim, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abikoesno Tjokrosoeyoso sangat mewarnai rumusan Pancasila, sehingga sangat tidak keliru jika umat Islam memberi makna *adil* dan *adab* sesuai dengan makna dalam Islam, bukan makna yang netral agama. Sebab, jika istilah *adil* dan *adab* diletakkan dalam perspektif dunia sekular atau

netral agama, maka kata itu juga tidak akan bermakna sesuai dengan makna asalnya. Dengan demikian, adalah tidak *fair*, tidak adil, dan tidak beradab, jika orang Islam memberi makna *adil* dan *adab* dilepaskan dari pandangan dunia Islam. Bisa dipastikan, sebelum kedatangan Islam di Nusantara ini, kedua istilah tersebut tidak dikenal di wilayah ini (*Ibid.*, h. 213-227). Cobalah cari, apa terjemahan yang tepat dari kata *adil* dan *adab* ke dalam bahasa Jawa, Sunda, Minang, Batak, Mandailing, Bugis, Makasar, Banjar, Dayak, Papua, dan sebagainya?

Uraian yang lebih rinci tentang konsep adab dalam Islam disampaikan oleh Naquib al-Attas. Menurut al-Attas, *adab* adalah "pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam rencana susunan berperingkat martabat dan derajat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta". Pengenalan adalah ilmu; pengetahuan adalah amal. Maka, pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal; dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu. "Keduanya sia-sia karena yang satu mensifatkan keingkaran dan keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan ketidaksadaran dan kejahilan" (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2007: 60).

Lebih jauh, al-Alatas menjelaskan, bahwa jatuh bangunnya umat Islam, tergantung sejauh mana mereka dapat memahami dan menerapkan konsep adab ini dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, pakar Filsafat Islam dan Sejarah Peradaban Melayu ini menjelaskan:

"Ta'rif adab yang dikemukakan di sini dan yang lahir dari pengertian Islam, dengan sendirinya menjelaskan bukan sahaja harus dia itu ditujukan maksud pengenaannya pada bangsa insan belaka; bahkan dia juga harus dikenakan pada keseluruhan alam tabi'i dan alam ruhani dan alam ilmi. Sebab, adab itu sesungguhnya suatu kelakuan yang harus diamalkan atau dilakukan terhadap diri, dan yang berdasarkan pada ilmu, maka kelakukan atau amalan itu bukan sahaja harus ditujukan kepada sesama insan, bahkan pada kenyataan makhluk jelata, yang merupakan ma'lumat bagi ilmu. Tiap sesuatu atau seseorang memiliki hak yang meletakkannya pada keadaan atau kedudukan yang sesuai bagi keperluannya. Ilmulah, dibimbing serta diyakini oleh hikmat, yang memberitahu atau memperkenalkan sehingga ketara tentang hak yang menafsirkan sesuatu atau seseorang itu; dan keadilan pula yang menjelaskan hukum tentang di manakah atau bagaimanakah letak keadaan atau kedudukannya. Apabila paham adab itu dirujukkan kepada sesama insan, maka dia bermaksud pada kesusilaan akhlakiah yang mencarakan kewajiban diri berperangai mengikut keperluan haknya dalam susunan berperingkat

darjat yang terencana, umpamanya, dalam keluarga, dalam musyarakat, dalam berbagai corak pergaulan kehidupan. Apabila dia dirujukkan pada alam ilmi pula, maka dia bermaksud pada ketertiban budi menyesuaikan haknya pada rencana susunan berperingkat martabat yang mensifatkan ilmu; umpamanya pengenalan serta pengakuan akan ilmu bahwa dia itu tersusun taraf keseluruhan serta keutamaannya, dari yang bersumber pada wahyu ke yang perpunca pada perolehan dan perolahan akal; dari yang fardu ain ke yang fardu kifayah; dari yang merupakan hidayah bagi kehidupan ke yang merupakan kegunaan amali baginya. Dan adab terhadap ilmu itu iatu mengenali serta mengakui taraf keluhuran serta keutamaan yang terencana pada ilmu, niscaya dapat menghasilkan dalam diri pencapaian yang seksama terhadap meramukan, menurut taraf keperluannya, pelbagai macam ilmu yang membina keadilan dalam diri. Dan keadilan dalam diri itu menyesuaikan haknya pada keadilan dalam diri itu menyesuaikan haknya pada kewajiban membimbingnya ke arah pengenalan serta pengakuan akan ilmu yang bersumberkan wahyu, yang menyesuai hak diri jua, dan dengannya dapat menjelmakan akibat amali dalam diri sehingga menyelematkannya dunia akhirat" (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2001:118-120).

Jadi, dalam Islam, konsep adab memang sangat terkait dengan pemahaman tentang wahyu. Orang beradab adalah yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah. Di dalam Islam, orang yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, bisa dikatakan tidak adil dan tidak beradab. Sebab, di dalam al-Qur'an, syirik dikatakan sebagai kezaliman besar, seperti dikatakan Lukman kepada anaknya (QS.31:13). Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban Islam di Madinah, yakni suatu masyarakat yang menegakkan adab dalam kehidupan mereka. Masyarakat beradab menurut Islam adalah masyarakat yang memuliakan orang yang berilmu, orang yang shalih, dan orang yang takwa; bukan orang yang kuasa, banyak harta, keturunan raja, berparas rupawan, dan banyak anak buah.

Karena itu, jika ingin merujuk kepada konsep Islam tentang *adab*, pemimpin yang baik adalah yang mampu mengembangkan masyarakat yang beradab. Maka, seharusnya, dalam masyarakat yang beradab, derajat orang yang berilmu dan shalih dibedakan dengan derajat para penghibur. Manusia memang sama-sama manusia, tetapi Allah sudah membeda-bedakan harkat dan martabat manusia sesuai dengan keilmuan, keimanan, dan ketakwaannya. Inilah *adab* dalam konsep Islam.

Jika konsep ini diletakkan pada sila kedua, logis jika dipahami, sila

kedua ini bukan mengada-ada dan sekadar melegitimasi bahwa Pancasila adalah sesuai dengan Islam. Sejarah dan makna kosa kata-kata dasar dalam Islam menunjukkan, bahwa masuknya istilah dan konsep adil dan adab dalam Dasar Negara RI, bisa dikatakan sebagai hasil perjuangan para tokoh Islam pada waktu itu.

Pandangan-pandangan itu tentu saja sah dari sudut pandang Islam, bagi umat Islam. Umat lain dipersilakan memahami sesuai dengan kemauan dan visi mereka sendiri. Tetapi, juga tidak pada tempatnya jika mereka memaksakan pandangan komunis atau sekular (netral agama) kepada umat Islam, dengan menyatakan, bahwa pemahaman yang benar terhadap Pancasila adalah yang netral agama, dan bukan menurut pemahaman satu agama saja. Umat Islam juga akan menghormati jika kaum Kristen menyatakan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah rumusan konsep ”Alah-Tritunggal”. Itu hak kaum Kristen, yang tentunya juga tidak dapat dipaksakan kepada kaum Muslim. Jika kaum Kristen ingin mengajukan RUU Makanan Halal bagi Kristen, RUU Perkawinan Kristen, pun juga boleh-boleh saja. Yang keliru adalah jika menganggap seolah-olah konsep netral agama adalah konsep yang lebih baik dari konsep Islam, dan menuduh umat Islam anti-Pancasila jika menolak pemahaman netral agama. Adalah sangat tidak masuk akal, bahwa hukum kolonial Belanda dikatakan sebagai hukum yang lebih baik dari hukum Islam. Sebab, hukum kolonial Belanda tidak memihak satu agama. Jika suatu konsep keluar dari konsep satu agama, bukankah konsep itu berarti konsep netral agama, alias ”konsep tanpa agama?”. Cara pandang sekular inilah yang sejak awal berdirinya negara RI sudah dijelaskan kekeliruannya oleh para tokoh Islam.

Dan memang, sejak pandangan dunia sekular yang dibawa oleh penjajah Barat mendominasi dunia, maka seluruh dunia, termasuk umat Islam juga dipaksa untuk menerima pandangan dunia sekular tersebut. Dalam lapangan kenegaraan, mereka juga memaksa kaum Muslim untuk melepas aspek agama dengan politik, yang sangat sulit diterima oleh kaum Muslim. Kasus Turki membuktikan, selama puluhan tahun Turki dipaksa menjadi sekular oleh Kemal Ataturk dan sejumlah pelanjutnya, kaum Muslim tetap melakukan perlawanan secara konsisten, dengan berbagai cara.

Di Indonesia, usaha sekularisasi negara yang sangat ketat di awal-awal Orde Baru, akhirnya justru menuai arus balik. Jilbab yang dulunya ”diharamkan” di sekolah-sekolah, akhirnya menjadi hal yang biasa dikenakan oleh kaum Muslimah diberbagai instansi pemerintah. Dakwah Islam, meskipun terus dihambat dan dihalangi, adalah laksana air yang meskipun

dibendung, akan mencari celah untuk mengalir.

Sebenarnya *founding father* telah merumuskan konsep HAM Indonesia yang tidak sekular, yaitu konsep HAM yang Adil dan Beradab. Di Majelis Konstituante, pada 12 November 1957, tokoh-tokoh nasionalis Muslim seperti Natsir, misalnya, menyampaikan pidatonya yang bersejarah yang dengan tegas menolak sekularisme dalam ketatanegaraan.

Ketika itulah, Natsir mengupas tuntas kelemahan sekularisme, yang dia sebut sebagai paham tanpa agama (*lâ dîniyah*). Sekularisme, kata Natsir, adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap hanya di dalam batas keduniaan. Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam kehidupan sekarang ini belaka. Jika dibandingkan dengan sekularisme yang paling terbaik pun, maka adalah agama masih lebih dalam dan lebih dapat diterima oleh akal.

Setinggi-tinggi tujuan hidup bagi masyarakat dan perseorangan yang dapat diberikan oleh sekularisme, tidak melebihi konsep dari apa yang disebut *humanity* (kemanusiaan/HAM). Yang menjadi soal adalah pertanyaan, "Di mana sumber HAM itu?". Bahaya sekularisme bukan hanya dalam lapangan politik juga dalam lapangan ilmu pengetahuan. Ilmu dipisahkan dari etika dan agama, dan semata-mata digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri (*science for the sake of science*). Ilmu sekular semacam ini akan menimbulkan kerusakan umat manusia. Sekularisme juga tidak memberikan kepastian nilai. Ada yang berpandangan bahwa hidup bersama laki-laki dan perempuan tanpa nikah tidak melanggar kesusilaan. Bagi suatu negara, menentukan sikap yang tegas terhadap hal ini adalah penting. Sekularisme dalam hal tidak dapat memberi pandangan yang tegas, sedangkan agama dapat memberi keputusan yang terang. Di ujung pidatonya yang lebih dari 13.000 kata itu, Natsir menyampaikan QS. Fushshilat ayat 53. Lalu, ditutuplah pidato itu dengan ajakan kepada segenap bangsa Indonesia agar meninggalkan sekularisme dan kembali kepada agama *fithrah* (M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*: 2000).

Maka, sungguhlah menarik menyimak argumentasi Natsir ketika mengkritik sekularisme sebagai dasar negara. Natsir bukan hanya berbicara tentang penyatuan antara agama dan negara, tetapi dia juga berbicara tentang dasar dari konsep nilai dan kebenaran. Natsir, misalnya, menyinggung konsep HAM. Semua setuju dengan konsep HAM. Soekarno, dalam sidang

BPUPKI, 1 Juni 1945, juga mengusulkan dasar HAM. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945, juga mengusulkan konsep HAM. Tetapi, yang disentuh oleh Natsir adalah "kemanusiaan" berdasarkan apa? Di mana sumber HAM itu?" Pertanyaan Natsir ini sangat mendasar. Sebab, HAM yang sekular tidak memiliki landasan wahyu. Nilainya relatif, tergantung kesepakatan dan kondisi suatu masyarakat.

Atas nama HAM, masyarakat Barat mengizinkan bahkan mengesahkan perkawinan homoseksual. Atas nama HAM, ada yang mengusulkan agar hukuman mati dihapuskan. Atas nama HAM, para pelacur diberi kebebasan untuk "mencari nafkah". Atas nama HAM, pemeran porno diizinkan menjalankan profesinya. Atas nama HAM, pelaku zina tidak dijatuhi hukuman mati dan pemakai khamar/Narkoba dibebaskan menjalankan aksinya, dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Jadi, lagi-lagi, seperti pertanyaan Natsir, "Di mana sumber HAM itu?" (Adian Husaini, 2009: 161-162).

Konsep sekular itulah yang sebenarnya digugat oleh Natsir dan para tokoh nasionalis Muslim lainnya. Ketika Pancasila diseret ke kutub sekularisme, bahkan ke kutub sekularisme ekstrim, seperti komunisme, maka para tokoh nasionalis Muslim berteriak lantang menentangnya. Adalah menarik, bahwa Panitia Sembilan yang memutuskan Piagam Jakarta termasuk Pancasila kemudian menambahkan kata *"adil dan beradab"* pada sila kedua. Konsep *"adil"* dan *"adab"* seharusnya dipahami sebagai konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Sebelum kedatangan Islam di Nusantara ini, kata *"adil"* dan *"adab"* belum dikenal, sehingga untuk memahaminya seharusnya dirujuk kepada makna-makna yang dipahami dalam konsep Islam, bukan pada pandangan dunia lainnya. Masuknya kedua konsep *"adil"* dan *"adab"* ini mengindikasikan kuatnya pengaruh empat tokoh nasionalis Muslim Wachid Hasyim, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abikoesno Tjokrosoeyoso dalam perumusan Pancasila. Masuknya dua istilah itu sebenarnya menutup rapat bagi konsep HAM sekular yang bisa dilekatkan pada kata "perikemanusiaan" saja (*Ibid.*).

Penulis ingin mengakhiri tulisan ini dengan menjawab pertanyaan, "Bagaimana konsep teologi HAM Mbah Dahlan untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945? Jawabannya adalah konsep teologi "HAM yang Adil dan Beradab". Konsep inilah yang sesuai dengan cita rasa budaya Indonesia. Ini konsekuensi logis karena landasan HAM Indonesia adalah sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Konsep "adil" dan "beradab" pada sila kedua itu seharusnya dipahami sebagai

konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, kata "adil" dan "adab" belum dikenal, sehingga untuk memahaminya seharusnya dirujuk kepada makna-makna yang dipahami dalam konsep Islam, bukan pada pandangan dunia lainnya. Masuknya dua istilah itu dalam Pancasila sebenarnya telah menutup pintu rapat-rapat bagi masuknya konsep "HAM Sekular" yang bisa dilekatkan pada kata "perikemanusiaan" saja. Dengan demikian, konsep "HAM Sekular" bukan saja tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan budaya Indonesia, tetapi juga tdak sejalan dengan teologi HAM Mbah Dahlan. *Fastabiqu al-khairât.* [ ]

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan (*et.al*). 1996 *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

Abdullahi Ahmed An-Na'im. 2004. *Dekonstruksi Syariah,* Cet IV, terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rany. Yogyakarta: LKIS, 2004

Adian Husaini. 2009. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam,* Jakarta: Gema Insani

Ahmad Nur Fuad dkk. 2010. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Malang: Madani

Ahmad Tafsir. 1982 *Ilmu Pendidikan Islami,* h. 73; Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam,* h.21; Lihat juga, Saifuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik di Indonesia* Jilid 3, Jakarta: Gunung Agung.

Al-Khanif. 2010. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia.* Yogyakarta: LaksBang Grafika

al-Na'im, A.A., dan Deng, F.M. 1990. (*ed.*), *Human Rights in Africa, Cultural Perspectives* (1990), h. 131 dan 147-148.

Anonim. 2008. *Kompilasi Instrumen HAM Internasional,* Jakarta: Komnas HAM

Baderin, MA. 2001 "A Macroscopic Analysis of the Practice of Muslim State Parties to International Human Rights Treaties: Conflict or Congruence?' 1 *Human Rigths Law Review,* no. 2

D'Amato, A.A. 1997. *Collected Papers, International Law Studies.* Vol.2, hlm. 139-140;

E.g. PBB. 1999 *Multilaterals Treaties Deposited with the Secretary Geneal,*

Status as at 31/12/1999, vol.1 bagian 1, bab 1 hingga XI.
Eka Darmaputera. 1997. *Pantjasila: Identitas dan Modernitas*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia
Frans Sayogie, *Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam dan HAM Universal*, Jakarta: Trans Pustaka
Freamon, B.K. 1998. 'Slavery, Freedom, and the Doctrine of Consensus in Islamic Jurisprudence'. *Harvard Human Rights Journal.*
Hasyim Asy'ari. 2007. *Etika Pendidikan Islam* (terj.), Yogyakarta: Titian Wacana
Hasyim Asy'ari. 2007. *Âdabul Âlim wa al-Muta'allim* (edisi Indonesia: *Etika Pendidikan Islam*), Yogyakarta: Titian Wacana
Josef P. Widyatmadja. 2004. *Suara Pembaruan*.
Komnas HAM, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional,* Jakarta
M. Natsir. 2000. *Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Media Dakwah
Maneger Nasution, *Harian Republika*, 13 Desember 2013.
Maneger Nasution. 2012 *"Membangun HAM Konstitusional, HAM Perspektif Indonesia",* Harian Pelita
Maneger Nasution. 2014. *Pendidikan HAM di Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Islam.* Disertasi
Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, h. 2.
Mashood A. Baderin. 2013. *International Human Rights and Islamic Law*, Jakarta
Muhammad Tholchah Hasan. *1997 "HAM dan Pluralisme Agama Tinjauan Kultural dan Teologi Islam"* dalam *Anshari Thayib, HAM dan Pluralisme Agama, Jakarta: PKSK*
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1994. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000. Lihat juga, Haedar Nashir dkk, *Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah*, Yogyakarta: BPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah
QS. al-An'âm/6 ayat 74.
QS. al-Hujurât [49] ayat 13.
QS. al-Hujurat/49 ayat 13.
QS. Ali Imran/3 ayat 7.
QS. Ali-'Imran [3] ayat 159.
QS. al-Mujâdilah/58 ayat 11.
QS. Fushshlat [41] ayat 53.
QS. Luqman/31 ayat 13.

QS.al-Anbiyâ [21] ayat 107.

QS.Fâthir/35 ayat 28.

Rasjidi. 2005. *Sumbangan Agama Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum dan Masyarakat*, dikutip oleh Majda El-Muntaj dalam bukunya, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana

Soekarno. 1960 *Pantjasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta: Jajasan Empu Tantular

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 2001. *Risalah untuk Kaum Muslimin*, Kuala Lumpur: ISTAC

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 2007. *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam*, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia

Zainuddin Hamidy dkk. 1992. *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid II, Jakarta: Widjaya

POTRET RADIKALISASI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Sholihul Huda

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang memotret fenomena transisi ideologi Muhammaaiyah-FPI di Pantura Lamongan. Fenomena kebangkitan Islam dewasa ini menjadi fokus kajian yang cukup luas di Indonesia. Kebangkitan Islam adalah formulasi dari gejala-gejala keagamaan (*religiusitas*) yang ditandai oleh menguatnya kecenderungan orang Islam untuk kembali kepada ajaran Islam secara formal dalam semua aspek kehidupan. (Imdadun Rahmat: 2002). Sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara pengamat/pemikir Islam tentang satu istilah untuk menggambarkan fenomena kebangkitan Islam. Namun, ada sebagian pengamat dan pemikir Islam menggambarkan kebangkitan Islam tersebut dengan istilah *revivalisme Islam*, *fundamentalisme Islam*, *radikalisasi Islam*, *Islamisme*, *puritanisme Islam* dan *ekstremisme Islam*.

Meskipun fundamentalisme memiliki konotasi baru di Barat yang berarti radikalisasi dan terorrisme serta mempunyai sebutan beragam tentang kebangkitan Islam bertemu pada satu titik yaitu semangat transnasionalisme Islam atau ide tentang kesatuan Islam secara internasional melalui penerapan sistem syariat Islam dan negara Islam (*Dawlah Islamiyah*) dengan kepemimpinan *Khilafah* (Deni Al As'ary: 2009: 21).

Hrair Dekmejian menggunakan terma *revivalisme* Islam untuk menunjuk fenomena munculnya gerakan keagamaan Islam kontemporer di Timur Tengah. Menurutnya kebangkitan Islam menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam dan rangkaian kesatuan yang dinamis antara spiritualisme *pasif-apolitis* dengan militansi dan radikalisasi (Shireen T Hunter, 2001: 3).

Oliver Roy menggunakan terma *Islamisme* dan *Neo-Fundamentalisme* untuk menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir (Oliver Roy, 1994: 2-4). Sementara John L. Esposito memberikan pengertian *fundamentalisme* dicirikan pada sifat kembali kepada kepercayaan fundamental agama. Mereka mendasarkan aktivitasnya pada pemahaman literal dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW (John L Esposito, 1992: 7-8).

Kebangkitan Islam terjadi di seluruh Dunia Islam terutama di Timur Tengah. Kebangkitan Islam tersebut dipresentasikan dengan munculnya beberapa organisasi Islam seperti Neo-*Ikhwanul Muslimin* di Mesir, *Jama'at al-Islami* di Pakistan, *HAMAS* di Palestina, *Hizbullah* di Lebanon. Di Indonesia kebangkitan Islam dipresentasikan oleh kemunculan ormas keagamaan seperti *Ikhwanul Muslimin-Tarbiyah*, *Front Pembela Islam* (FPI), *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI), *Majelis Mujahidin Indonesia* (MMI), JAT (*Jama'ah Anshoru Tauhid*) dan Laskar Jihad. Kelompok Islam di atas cenderung menampilkan ideologi dakwah yang radikal-fundamental dan mengusung tema ideologi Islam dalam setiap aksi dengan suatu tujuan menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif (Jajang Jahroni, 2004: 19).

Kemunculan gerakan Islam radikal merupakan hal wajar akibat dari eskalasi dunia global saat ini yang tidak ada sekat tradisi, teritorial dalam akses informasi dan wacana (ideologi). Seperti pandangan Ian Adams, kemunculam gerakan Islam radikal merupakan hal wajar karena fundamentalisme dapat di temukan dalam berbagai macam lingkungan dan tampil dalam berbagai bentuk yang beragam termasuk wajah agama (kelompok agama) (Ian Adams, 2004: 426).

Gerakan Islam di atas walaupun gerakan dakwahnya di Indonesia, namun secara geneologis gerakan ini memiliki akar paham keislaman (ideologi) dari Timur Tengah. Ach. Muzakki, berpandangan bahwa kemunculan gerakan Islam radikal atau dikenal dengan *Islam Transnasional* tidak lebih dari representasi total Islam Timur Tengah (Ach. Muzakki, 2007). Pandangan ini diperkuat oleh Haidar Nashir bahwa kemunculan Islam *Transnasional* atau Islam yang mengusung gagasan syariat Islam merupakan bentuk reproduksi gagasan dan ideologis Islam *salafiyah* Timur Tengah di Indonesia (Haidar Nashir: 2007: 8).

Salafisme adalah suatu keyakinan yang didirikan pada akhir abad ke-19 oleh para reformis Muslim seperti Muhammad 'Abduh (w.1905M), Jamal al-Din al-Afghani (w.1935 M) bahkan dikaitkan dengan Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Istilah *salaf* berati pendahulu dan

dalam konteks Islam pendahulu itu merujuk pada periode Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan *tabi'in*. Selain itu ada istilah *salafi* (pengikut kaum salaf) memiliki arti yang fleksibel dan lentur serta memiliki daya tarik natural sebab ia di lambangkan *autentisitas* dan keabsahan. Sebagai istilah salafi dimanfaatkan oleh setiap gerakan yang ingin mengklaim bahwa gerakan itu berakar pada *autentisitas* Islam.

Salafisme menyeruh untuk kembali pada konsep yang sangat dasar dan fundamental di dalam Islam, bahwa umat Islam seharusnya mengikuti preseden Nabi dan para sahabatnya yang mendapatkan petunjuk (*al-salaf al-shalih*) dan generasi awal yang saleh. Salafisme menegaskan bahwa dalam menghadapi semua persoalan, umat Islam seharusnya kembali pada sumber tekstual asli yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam melakukannya umat Islam harus menginterpretasikan sumber-sumber asli itu berdasarkan kebutuhan dan tuntutan modern tanpa harus mutlak pada produk penafsiran generasi muslim awal. Salafisme tidak tertarik pada sejarah, dengan menekankan asumsi "zaman keemasan" di dalam Islam mengidealisasi zaman Nabi dan Sahabatnya dan menolak atau tidak tertarik pada warisan sejarah Islam yang lebih besar (Haidar Nashir, 2007: 8).

Geneologi ideologi gerakan radikal dapat dilacak dari pemahaman *literal-tekstual* terhadap tradisi kaum Salaf. Tradisi kaum Salaf oleh kelompok ini dijadikan pijakan ideal dalam berfikir maupun bertindak, baik dalam kehidupan keagamaan maupun interaksi sosial (*mua'malah).* Mereka memahami bahwa tradisi kaum Salaf merupakan tradisi paling sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengatur kehidupan (Jajang Jahroni: 2004). Untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut kelompok ini cenderung menggunakan model dakwah radikal-fundamental.

Pendapat di atas diperkuat oleh Jajang Rohani bahwa, kemunculan kelompok Islam radikal di dunia Sunni sekarang ini berkaitan dengan reformulasi ideologi salaf. Sebuah paham yang mengajarkan umat Islam agar meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ideologi salaf yang pada awalnya menekankan pada pemurnian aqidah mengalami metamorfosis pada abad ke-20. Salafisme tidak hanya gerakan purifikasi keagamaan semata tetapi menjadi ideologi perlawanan terhadap berbagai paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (*Ibid.*, h. 252).

Selain ideologi salafi geneologi radikal juga berasal dari ideologi *wahhabi* (Khaled, 2006: 93). Sebagaimana pandangan Khaled Abou El Fadl, bahwa kaum wahhabi jelas-jelas mempengaruhi setiap gerakan puritan/radikal di

dunia Islam di era kontemporer. Setiap gerakan Islam yang dilabeli radikal seperti al-Qaedah dan Ikhwanul Muslimin, sangat kuat dipengaruhi oleh ideologi wahhabi (*Ibid.,* 61).

Ideologi salafi dan wahhabi secara metodologis memiliki kemiripan, kecuali *wahhabi* kurang toleran terhadap keragaman dan perbedaan pendapat. Sementara *salafisme* tidak serta merta anti intelektualisme seperti *wahhabisme* yang cenderung tidak tertarik pada sejarah (*Ibid.*, 94). Dari pemetaan tersebut kedua ideologi mempunyai spirit yang sama yaitu ingin mengembalikan ajaran Islam secara murni dan sesuai dengan zaman Nabi dan sahabat dengan pemahaman yang literal-tekstual serta kurang dapat menerima kelompok di luarnya.

Gerakan Islam radikal juga menjadikan terma jihad sebagai salah satu landasan perjuangan. Konsep jihad mengalami pergeseran pemahaman makna (Natana J Delong-Bas, 1992: 278). Konsep jihad cenderung ditafsiri secara literal dan sempit, jihad yang semula dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menggerakan segala tenaga, pikiran, harta untuk kemajuan Islam melalui dakwah, ternyata bergeser ke makna artifisial dan fisikal. Pergeseran makna jihad ini terjadi terutama para pengikut Wahhabi yang identitik dengan *neo fundamentalisme* atau *neo-salafi*. Wahhabi awal memaknai jihad adalah perjuangan menegakkan *monoteisme*. Namun, belakangan bergesar pada gerakan perlawanan global tanpa kompromi mereka melawan / menentang siapa saja yang secara ideologi berbeda,termasuk perang melawan Yahudi, Kristen dan Barat secara global, sehingga sering berbenturan dengan kelompok non Islam bahkan dengan sesama kelompok Islam sendiri (Zuly Qadir, 2008: 2).

Konsepsi jihad seperti ini tampak terus berkembang di Indonesia, di mana jihad identitik dengan jalan kekerasan, teror, bom di tempat umum. Konsep inilah yang kemudian dikritik oleh Fazlur Rahman sebagai bentuk "salafi sempit" bukan salafi yang mengambil semangat Ibnu Taymiyyah yang menyatakan perbuatan manusia tidak yang bersifat zahiri, tampak sebagai kebaikan (jihad) tetapi ada perbuatan yang bersifat batiniah, inilah sesungguhnya yang menjadi bagian terpenting dalam iman pada Tuhan (Fazlur Rahman, 2001: 163).

Gerakan Islam *transnasional* yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan gerakan Islam yang terlebih dahulu eksis di Indonesia. Gerakan Islam awal seperti NU, Muhammadiyah dianggap mewakili gerakan Islam moderat. Gerakan Islam moderat adalah gerakan Islam yang menjunjung tinggi *tasammuh, tawazun, tawasuth,* menghargai perbedaan (toleran), menjunjung

perdamaian, santun dan terbuka dalam berdakwah di masyarakat (Choirul Anam: 1985), salah satunya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Sementara gerakan Islam *transnasional* lebih cenderung berideologi radikal-fundamental dan sering menampilkan wajah dakwah yang keras dan tertutup.

Muhammadiyah telah meneguhkan diri sebagai gerakan Islam yang menampilkan paham agama (ideologi) yang *rahmatalil'alamin* (Haedar Nashir: 2007:31). Muhammadiyah sampai saat ini tetap konsisten sebagai gerakan Islam moderat dengan mengusung gerakan pembaharuan (*tajdid*) dan pemurnian (*tanzih*). Ideologi Muhammadiyah menasbihkan gerakan yang anti kekerasan, anti pemaksaan dan berorientasi pada humanisme. Orientasi dakwah yang humanis dan menghargai tradisi lokal di atas sering disebut dengan dakwah kultural.

Ideologi Muhammadiyah berasal dari ajaran dan spirit jiwa perjuangan Kyai Ahmad Dahlan yang telah mengispirasi aktivis Muhammadiyah dalam bergerak mengembangkan Islam di Indonesia. Prinsip dasar dari ajaran Kyai Ahmad Dahlan adalah memadukan kesalehan individual dan kesalehan sosial yang berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Bercita-cita mewujudkan masyarakat yang utama yang di ridhoi Allah SWT (Haedar Nashir: 2007: 4).

Ideologi Muhammadiyah terbentuk melalui proses sejarah panjang dan dipengaruhi oleh situasi lingkungan sekitar (baca: Kauman Yogyakarta). Sebagaimana pendapat Louis Althusser, bahwa proses terbentuknya ideologi diantaranya karena faktor historis (Syamsul Arifin: 2005: 45). Artinya ideologi terbentuk tidak di ruang hampa tetapi melalui proses dinamika persoalan di masyarakat yang terkonsepsikan dan mengkristal menjadi sebuah prinsip-prinsip kehidupan.

Begitu juga ideologi Muhammadiyah dibentuk sebagai respon terhadap perkembangan sejarah. Ia dirumuskan dan dikembangkan tidak dalam ruang hampa tetapi diruang realitas masyarakat (baca: Kauman Yogyakarta) yang dinamis. Ideologi Muhammadiyah memiliki karakter yang menjadi sistem paham, visi, misi dan strategi perjuangan yang khas yang membedakan dengan ideologi gerakan Islam yang lain. Artinya yang membedakan gerakan Muhammadiyah dengan gerakan Islam lain adalah karena orientasi ideologi dan strategi dakwahnya.

Belakangan ada fenomena menarik di kalangan aktivis Muhammadiyah, ada sebagian aktivis Muhammadiyah terlibat aktif maupun simpatisan pada gerakan-gerakan Islam transnasional-radikal (Miftachul Huda: 2007: 4). Padahal antara gerakan Muhammadiyah dengan gerakan Islam transnasional-

radikal mempunyai ideologi berbeda bahkan mungkin berbenturan.

Fenomena tersebut digambarkan oleh penulis sebagai gejala *radikalisasi ideologi*. Fakta di atas tentu sulit dipahami, sebab Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan yang sudah mapan baik secara ideologi maupun dakwah bahkan merupakan salah satu penyanggah kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, tetapi kenapa para aktivisnya mudah terpengaruh bahkan berlahan meninggalkan ideologi Muhammadiyah dan pindah ke ideologi gerakan lain.

Fenomena tersebut terjadi di kalangan aktivis Muhammadiyah di Pantura Lamongan. Ada sebagian aktivis Muhammadiyah menjadi penggerak atau simpatisan gerakan Front Pembela Islam (FPI). Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu gerakan Islam transnasional-radikal yang cenderung berideologi radikal-fundamental.

Pergeseran ideologi tersebut berdampak pada gerakan Muhammadiyah yang mulai di tinggalkan. Padahal di daerah Pantura merupakan basis massa terbesar pengikut Muhammadiyah di Lamongan bahkan di Jawa Timur Indonesia yang melahirkan banyak tokoh dan aktivis Muhammadiyah. Di samping itu Pantura juga merupakan wilayah awal masuk dan perkembangan Muhammadiyah di Lamongan (Fathurrahman Syuhadi: 2006: 13).

Fenomena radikalisasi ideologi yang terjadi di Muhammadiyah Pantura Lamongan sedikit banyak akan mempengaruhi gerakan Muhammadiyah ke depan dan wajah gerakan Islam di Indonesia. Hal itu di sebabkan posisi Muhammadiyah merupakan salah satu Ormas besar di Indonesia yang mempunyai pengaruh dan jaringan di seluruh Indonesia.

Cermin gerakan Islam di Indonesia adalah tergantung dari bagaimana cermin gerakan dakwah NU dan Muhammadiyah di masyarakat. Kalau cermin dakwah yang di tampilkan adalah radikal-fundamental maka cermin gerakan Islam di Indonesia juga radikal-fundamental dan begitu juga sebaliknya. Maka pada tulisan ini akan dibahas proses dan dampak transformasi radikalisasi ideologi Muhammadiayah.

Potret Radikalisasi Ideologi Muhammadiyah

Fenomena radikalisasi ideologi di kalangan aktivis Muhammadiyah dipengaruhi oleh dinamika sosio-ideologis yang terjadi di sekitarnya. Proses radikalisasi ideologi di kalangan aktivis Muhammadiyah Pantura Lamongan tidak dapat dipastikan kapan persis terjadinya, tetapi yang jelas proses tersebut melalui tranformasi lama dan lewat saluran media yang beragam. Proses radikalisasi ideologi tersebut dipengaruhi tidak hanya satu faktor

tetapi banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut dapat dipetakan pada dua aspek, yaitu *aspek sosiologis* dan *aspek ideologis.*

Aspek sosiologis dipengaruhi dari kondisi eksternal dikalangan aktivis Muhammadiyah yang resah melihat keadaan sosio-kultur masyarakat Pantura Lamongan yang semakin jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. *Pertama* tradisi kemaksiatan semakin merajalela dimana orang sudah tidak malu lagi melakukan kemaksiatan (pacaran, minum-minuman keras, pesta ganja, perzinahan), padahal sebelumnya masyarakat Pantura Lamongan dikenal sebagai masyarakat religius yang kuat dan taat. Kondisi ini diperparah dengan sikap aparat keamanan yang seharusnya bertugas memberantas kejahatan malah menjadi bagian dari proses kemaksiatan dengan menjadi *backing.* Kondisi ini menjadikan krisis kepercayaan terhadap aparatur negara, sehingga prilaku kemaksiatan di masyarakat semakin tidak terkendali karena tidak ada yang ditakuti. Fenomena ini dapat digambarkan seolah telah terjadi kemufakatan untuk melakukan kemungkaran yang sistematis di wilayah tersebut.

Melihat kemungkaran sosial tersebut, sebagian aktivis Muhamamdiyah merasa resah dan ingin bergerak melakukan perlawanan terhadap situasi yang terjadi. Sementara gerakan Islam (Baca; Muhammadiyah) yang sudah ada di Pantura Lamongan tidak merespon secara langsung, sehingga terkesan membiarkan tradisi kemaksiatan tersebut. Kondisi kegagapan gerakan Islam yang tidak merespon secara jelas dan tegas terhadap kondisi sosial tersebut menjadikan para aktivis Muhammadiyah mencari altrenatif gerakan. Maka bertemulah dengan gerakan FPI (Front Pembela Islam) yang mengusung strategi dakwah "konkrit" membrantas kemaksiatan Al Zastrow, Ng: 2006). Model gerakan yang dikembangkan oleh FPI seolah mejawab keresahan dan kegelisahan yang dirasakan oleh aktivis Muhammadyah. Proses inilah kemungkinan kuat menjadi pendorong proses sosiologis dari proses transformasi radikalisasi ideologi ke tubuh Muhammadiyah.

Kedua, pergeseran tradisi masyarakat Pantura dari kultur tradisional (*nelayan*) ke kultur industrial (*buruh*). Proses tersebut hingga saat ini sedang berjalan, indikatornya dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dan derasnya investasi yang masuk di kawasan Pantura Lamongan. Seperti pembangunan Industri pariwisata (Wisata Bahari Lamongan/WBL), Maharani Zoo Goa, industri perhotelan dan restoran (Lamongan Resort Beach), industri pangkalan minyak *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS). Pembangunan tersebut membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat

Lamongan terutama terhadap tradisi sosio-keagamaan.

Konsekuensinya adalah longgarnya ikatan solidaritas keagamaan di masyarakat. Hal itu tampak adanya pergeseran karakter masyarakat Pantura menjadi individualistik, orientasi hidup materialistik dan longgarnya solidaritas keagamaan. Pergeseran ini berdampak pada sikap apatis terhadap persoalan kemaksiatan, slogan yang berkembangan di masyarakat adalah "yang penting bukan saya yang melakukan". Prinsip dan prilaku tersebut menjadikan proses kemaksiatan semakin masif dan dianggap wajar.

Industrialisasi juga berdampak pada masyarakat Pantura mulai "melak" terbuka terhadap informasi. Artinya kesadaran akan pentingnya informasi dari dunia luar di masyarakat Pantura Lamongan sangat tinggi, sehingga arus transformasi informasi ideologi dari luar (baca: ideologi gerakan Islam Timur Tengah) juga tidak dapat terhindari masuk ke daerah Lamongan. Ideologi-ideologi Islam baru (termasuk FPI) memberikan nuansa gerakan keagamaan baru dikalangan masyarakat Pantura Lamongan. Sehingga kajian-kajian ideologi gerakan radikal semakin tumbuh, karena ada semacam kejenuhan terhadap gerakan-gerakan Islam yang sudah ada sebelumnya (Muhammadiyah-NU).

Ketiga bertemunya karakter masyarakat Pantura (Nelayan) dengan karakter gerakan FPI. Mayoritas pekerjaan masyarakat pesisir didominasi bekerja Nelayan. Mereka bergelut dengan laut yang tidak pasti karena tergantung alam. Sehingga pendapatannya tidak bisa di kontrol. Nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat *open acces* dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir memiliki karakter yang tegas, keras, terbuka (Nur Syam: 2004, h. 241). Karaketer tersebut tersalurkan dalam wadah sosial kelompok-kelompok "Geng" anak muda Pantura, diantaranya adalah Geng KREATOR, RIBEN, EXSODUS dan sebagainya. Sebagian besar anggotanya adalah anak-anak Muhammadiyah. Aktivitas kelompok "Geng" ini lebih cenderung kepada tindakan kemaksiatan dan menganggu ketentraman masyarakat, seperti berkelahi antar "Geng" pada saat ada acara di Tanjung Kodok atau di sekitar Pantura, minum-minuman keras, pesta ganja dan sebagainya (Yoyon Suudi: 2010).

Di pihak lain, karakter gerakan FPI menawarkan konstruk ideologi radikal-keras (Andri, Rosadi: 2008). Dua konstruk yang sama-sama keras memudahkan proses transformasi ideologi radikal FPI masuk dengan mudah ke kalangan masyarakat Pantura (Baca: Muhammadiyah). *Image* keras yang terbangun di masyarakat menemukan saluran yang lebih agamis lewat FPI. Maksudnya aksi-aksi kekerasan yang dilakukan minimal ada

landasan ajaran Islam dan mendapatkan legitimasi agama dengan menjadi aktivis FPI.

Aspek ideologis adalah aspek yang dipengaruhi dari kritik kondisi internal Muhammadiyah. Sebagian aktivis Muhammadiyah resah dan jenuh melihat gerakan Muhammadiyah yang dianggap gagap dan kurang peka terhadap kemungkaran sosial di wilayah sekitar. Ideologi *amar ma'ruf nahi mungkar* Muhammadiyah dianggap masih sebatas retorika belum diwujudkan secara total. Sehingga Muhammadiyah dianggap tidak mempunyai formulasi gerakan yang jelas dalam merespon kemaksiatan dan sikap yang tegas terhadap kemungkaran sosial yang terjadi di masyarakat, bahkan cenderung membiarkan. Muhammadiyah seakan hanya sibuk dan puas mengurusi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) saja (Khanif: 2010).

Aktivis Muhammadiyah di FPI menganggap ideologi *amar ma'ruf nahi mungkar* Muhammadiyah baru teraplikasi pada ideologi *amar ma'ruf* (mengajak kebaikan) dengan terwujudnya gerakan amal sholeh yang kemudian menjadi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Seperti amal di bidang pendidikan (Sekolah dan PTM), amal kesehatan (Rumah Sakit), amal sosial (Panti Asuhan), amal ekonomi (Bank Persyarikatan, BMT). Sementara ideologi *nahi mungkar* seakan terlupakan dan tidak memiliki formulasi yang jelas dan tegas, sehingga terkesan gerakan Muhammadiyah tidak respon dan gagap terhadap persoalan kemaksiatan di masyarakat (*Ibid.*).

Kegagapan dan ketidak jelasan formulasi dari aktualisasi ideologi *nahi mungkar* dalam merespon aksi kemaksiatan menjadikan sebagian aktivis Muhammadiyah mencari formulasi sendiri di luar ideologi Muhammadiyah. Situasi ini kemudian menjadikan ideologi FPI yang mengusung ideologi *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan strategi dakwah anti kemaksiatan dengan mudah masuk dan merembas dikalangan aktivis Muhammadiyah di Lamongan. Proses tersebut menjadikan aktivis Muhammadiyah merasa lebih nyaman aktif di gerakan FPI daripada di Muhammadiyah (Burhan: 2010).

Fenomena gerakan radikal di tubuh Muhammadiyah seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat membakar. Metafor ini nampak pada fenomena di lapangan relasi gerakan FPI dan Muhammadiyah di Pantura Lamongan. Awalnya kedua kelompok ini berjalan harmonis saling menghormati, menghargai dengan strategi dakwah masing-masing. Kedua gerakan tersebut dapat berjalan sinergi dan saling mendukung dalam pemberantasan kemungkaran sosial di masyarakat terutama di wilayah Pantura. Karena pada awalnya ide pembentukan FPI dipahami oleh para aktivis Muhammadiyah, sebagai alat untuk memberantas kemungkaran

sosial. Menurut mereka, Muhammadiyah belum memiliki formulasi yang jelas dan tegas seperti strategi FPI sehingga keberdaan FPI banyak didukung oleh aktivis dan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Lamongan (*Ibid.*).

Namun pada perkembangan selanjutnya hubungan secara organisasi maupun individu (sesama aktivis) terjadi ketegangan (disharmonis). Hal itu terjadi disebabkan adanya pergeseran orientasi gerakan dakwah FPI yang semakin menunjukan watak asli karakter ideologinya, yaitu radikal-eksterim. Hal ini tentu berbeda dengan ideologi dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini dengan cara santun-damai (*Ibid.*).

Akumulasi gesekan tersebut menyebabkan terjadi polarisasi pandangan aktivis Muhammadiyah terhadap FPI. Ada beberapa bentuk polarisasi pandangan para aktivis Muhammadiyah terhadap FPI. *Pertama*: aktivis Muhammadiyah aktif di FPI melihat Muhammadiyah terbagi ke dalam dua kelompok pandangan:

1) *Positif-akomodatif* melihat Muhammadiyah. Pandangan dan sikap kelompok ini cenderung "*menduakan*" Muhammadiyah, maksudnya mereka secara ideologi dan organisasi masih aktif di Muhammadiyah tetapi mereka juga aktif (bahkan menjadi pengurus) FPI. Pandangan kelompok ini terhadap keberadaan FPI dan Muhammadiyah, diantaranya:
   a) FPI sebagai pelengkap gerakan Muhammadiyah. Terutama dalam mengaplikasikan ideologi *nahi mungkar* yang dinilai kurang jelas dan tegas selama ini,
   b) Citra Muhammadiyah perlu dijaga. Selama ini dakwah Muhammadiyah terkenal dengan cara-cara santun, maka yang cara keras biar menggunakan nama FPI,
   c) Terdapat kesamaan dan perbedaan antara Ideologi FPI dan Muhammadiyah. Persamaannya adalah sama-sama mengusung ideologi *amar ma'ruf nahi mungkar* adapun perbedaanya adalah terletak pada strategi dakwah dilapangan, Muhammadiyah lebih santun dengan cara *amar ma'ruf* (hikmah) sedangkan FPI lebih keras *nahi mungkar*. FPI lahir tidak mereduksi gerakan Muhammadiyah, menjelek-jelekkan Muhammadiyah, tetapi masing-masimg memiliki jalan dakwahnya sendiri (Khanif: 2010).

Beberapa kelompok yang berkembang dalam muhammadiyah adalah *pertama* kelompok *positif-akomodatif* memahami bahwa gerakan FPI yang

cenderung menggunakan strategi dakwah secara keras merupakan reaksi dari aksi kemaksiatan yang merajalela di masyarakat Lamongan. Artinya semakin banyak aksi kemaksiatan dan sulit diperingatkan maka FPI akan merespon semakin keras.

Sikap ini merupakan pemahaman dari makna dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Mereka memahami gerakan FPI merupakan "Jihad Baru", artinya munculnya FPI dipahami sebagai alternatif gerakan baru disaat gerakan Islam yang dominan (NU-Muhamamdiyah) yang kurang begitu serius dan tidak memperhatikan masalah kemaksiatan.

Kedua, kelompok *Negatif-disintegratif* melihat Muhammadiyah. Sikap *negatif-disintegratif* merupakan kelompok yang berpandangan negatif terhadap ideologi dan pola dakwah Muhammadiyah. Mereka tidak puas dan jenuh melihat gerakan Muhammadiyah yang dianggap tidak peka terhadap kemaksiatan. Secara organisasi dan ideologi mereka tegas memisahkan diri dari gerakan Muhammadiyah dan pindah ke gerakan FPI. Mereka memandang ideologi Muhammadiyah dianggap tidak relevan lagi dalam menyikapi persoalan masyarakat terutama masalah kemaksiatan.

Mereka mengkritik Muhammadiyah dari sudut negatif, padahal sebelumnya mereka adalah bagian dari Muhammadiyah. Pandangan mereka terhadap ideologi dan strategi dakwah Muhammadiyah dianggap tidak jelas dan tegas dalam membrantas kemaksiatan. Muhammadiyah dianggap terlalu akomodatif dengan Pemerintah dan terkesan tidak peduli terhadap aksi kemaksiatan pemerintah. Padahal pemerintah dianggap bagian dari penyokong kemaksiatan (Zainal Anshori: 2010).

Mereka menganggap konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* di Muhammadiyah hanya separuh tidak utuh. Konsep *amar ma'ruf dan nahi mungkar* harus dipisah, artinya *amar ma'ruf* adalah mengajak kepada kebaikan dan berbuat baik, sedangkan *nahi mungkar* melarang secara tegas terhadap aksi kemaksiatan. Sementara di Muhammadiyah bentuknya belum jelas dan tegas saat ini, padahal dulu jelas dan tegas dalam aplikasi ideologi *nahi mungkar* adalah melawan *Takhayul, Bid'ah, Churafat* (TBC).

Kedua aktivis Muhammadiyah yang tidak ikut FPI, memandang FPI ke dalam dua bentuk:

1) *Reaksioner-posistif* melihat FPI. Kelompok ini kebayakan dari kalangan intelektual. Mereka dapat memilih dan memilah aktifitas gerakan FPI dan tidak menggeneralkan semua aksi kekerasan FPI murni kesalahan dan arogansi FPI. Mereka memahami bahwa kemungkaran sosial di wilayah Lamongan sudah memprihatinkan sehingga butuh gerakan

seperti yang dilakukan FPI walaupun tidak semuanya di sepakati.

2) *Reaksioner-negatif* melihat FPI. Pandangan ini sebagian besar dari kalangan masyarakat awam yang cenderung negatif melihat gerakan yang di lakukan oleh FPI. Mereka beranganggapan gerakan FPI itu arogan, keras, tidak kasihan, dan merusak citra Muhammadiyah.

Jalur radikalisasi ideologi Muhammadiyah tidak hanya lewat satu jalur tetapi tersebar luas dari berbagai jalur. Pemetaan ini hanya sebagian jalur yang dapat teramati, diantaranya: *Pertama*, jalur pengajian berupa majelis ta'lim (*halaqa)* dan tabliqh akbar. Melalui jalur ini proses penyebaran ideologi FPI ke Muhammadiyah sangat efektif, sebab jalur ini indoktrinasi dan infiltrasi ideologi FPI sangat leluasa masuk tanpa disadari aktivis Muhammadiyah. Dampak dari proses ini adalah adanya pergeseran kerangka berfikir yang berbeda dengan Muhammadiyah.

Kedua, jalur olah raga pencak silat. Lewat jalur ini sangat masif dan efektif dalam penggalangan massa, sebab kebanyakan kader dan simpatisan FPI merupakan anggota yang ikut latihan olah raga pecak silat. Adapun tradisi pada olah raga pencak silat posisi pelatih (Guru) sangat disegani dan dihormati bahkan di takuti. Sehingga terkadang setiap perintah dan perilaku para pelatih (Guru) harus diikuti. *Ketiga*, jalur jaringan alumni pesantren. Jalur ini sangat efektif disebabkan pengurus Muhammadiyah dan pengurus FPI alumni Pesantren sama. Sehingga ada semacam ikatan emosional di antara mereka untuk saling membantu atau mendukung antar sesama alumni. *Keempat*, jalur organisasi Pelajar-Mahasiswa. Jalur ini juga efektif disebabkan para pengurus dan aktivis Muhammaadiyah dan FPI berasal dari organisasi pelajar-Mahasiswa yang sama, sehingga ada semacam ikatan emosional organisasi di antara mereka untuk saling membantu atau mendukung antara sesama alumni.

Media yang digunakan dalam pembentukan radikalisasi ideologi Muhammadiyah beragam, di antaranya adalah: *Pertama:* melalui media pamflet, brosur, selebaran, surat himbuan yang berisi tentang informasi kegiatan dakwah, opini dan sikap politik terhadap aksi-aksi kemaksiatan. *Kedua:* media majalah dan buletin merupakan media informasi yang dikirim dari FPI Pusat berisi informasi kegiatan FPI secara nasional, penyebaran dan indoktrinasi ideologi FPI. *Ketiga:* media buku-buku yang berisi tentang ideologi *ahlu sunnah wal jama'ah* versi FPI. Tulisan tokoh-tokoh salafi seperti buku *Dialog FPI: Amar Maruf Nahi Mungkar* ditulis oleh Habib Rizieq (Muhammad Rizieq Syihab: 2004: 1). *Keempat:* media aksi *sweeping*

merupakan media yang paling dikenal dan seolah sudah menjadi *brand image* FPI. Artinya "FPI ya *Sweeping*" (Andri, Rosadi: 2008). Aksi *sweeping* ini menjadi media yang paling disukai, karena kebanyakan dari simpatisan FPI adalah anak-anak muda. Sehingga bisa jadi aksi *sweeping* dijadikan dalih berlindung, bahwa aksi kekarasan yang dilakukan merupakan dalam rangka membela ajaran agama.

Dampak Radikalisasi Ideologi Muhammadiyah

Fenomena radikalisasi ideologi di kalangan aktivis Muhammadiyah di Pantura Lamongan merupakan sebuah potret pergulatan perebutan pengaruh ideologi dan sosio-kultur dikalangan organisasi sosial keagamaan di masyarakat Proses radikalisasi ideologi disadari maupun tidak, cenderung menimbulkan pergeseran baik secara ideologi maupun tradisi sosial keagamaan di kalangan aktivis Muhammadiyah. Gejela pergeseran ideologi tersebut memang tidak tampak begitu mencolok di permukaan karena memang proses ini berjalan pelan, samar tapi pasti.

Proses radikalisasi ideologi di Muhammadiyah merupakan dampak dari proses *infiltrasi* yang dilakukan oleh kelompok radikal (FPI) ke Muhammadiyah. Proses tersebut bertujuan untuk perebutan hegemoni ideologi dan kuasa sosial yang selama ini dimiliki Muhammadiyah. Proses radikalisasi ideologi bertujuan untuk mengembangkan ideologi radikal pada Muhammadiyah dan masyarakat. Hal itu tampak dari strategi dakwah yang dilakukan kelompok radikal dengan masuk ke basis Muhammadiyah dengan membawa ideologi radikal lewat pengajian, pendidikan, sebaran informasi (majalah, buletin). Strategi dakwah kelompok radikal (FPI) melalui media seberan pengetahuan (pengajian, informasi) bertujuan untuk proses indoktrinasi ideologi di kalangan Muhammadiyah agar terpengaruh baik secara ideologis maupun perilaku sosial keagamaanya. Sebagaimana pandangan Marx bahwa ideologi merupakan alat untuk melakukan dominasi antara kelompok (baca: Muhammadiyah dengan FPI) (Ken Budha Kusumandaru: 2003). Walaupun perebutan dominasi tersebut sangat samar dan tanpa kekerasan namun efeknya sangat terasa di kalangan aktivis Muhammadiyah.

Perebutan dominasi ideologi yang dilakukan oleh kelompok radikal/ FPI bertujuan untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan dalam arti luas, tidak harus politik kekuasaan. Salah satu dari efek prsoses radikalisasi ideologi adalah terjadi proses pergeseran pola pikir (paradigma) dan basis massa di kalangan Muhammadiyah. Pengaruh yang paling besar adalah

lewat kuasa pengetahuan (*ideologisasi*) terhadap aktivis Muhammadiyah, dengan tujuan terjadi perubahan dan terpengaruh ikut FPI. Sebagaimana pandangan Foucault bahwa pengetahuan/wacana selalu berbanding lurus (berelasi) dengan kekuasaan. Artinya penguasaan pengetahuan merupakan alat yang paling efektif untuk mendominasi kelompok lain (Michel Foucault: 1980).

Radikalisasi ideologi merupakan sebuah protet perebutan dominasi antara Muhammadiyah dengan FPI. Perebutan dominasi tersebut dapat dipetakan ke dalam dua aspek: *Pertama,* perebutan pengaruh ideologi merupakan proses perebutan dominasi kebenaran ajaran-ajaran keagamaan (FPI) yang dianggap lebih benar daripada ajaran keagamaan Muhammadiyah. Sehingga harapan dari proses perebuatan tersebut ideologi FPI dapat masuk dan menggantikan ideologi Muhammadiyah di kalangan aktivis Muhammadiyah yang selama ini sudah diyakini kebenarannya.

Efek dari proses perebutan ideologi adalah terjadi gejala radikalisasi ideologi di kalangan aktivis Muhammadiyah. Gejala ini sudah tampak dengan bergesernya paradigma aktivis Muhammadiyah lebih radikal-formal dalam memahami ajaran Islam dengan konteks sosial. Gejala radikalisai ideologi inilah yang diharapakan oleh kelompok radikal (FPI) dikalangan aktivis Muhammadiyah agar kepentingan-kepentingan politik FPI mudah masuk dan tercapai tanpa harus berbenturan atau berhadapan secara *face to face* dengan Muhammadiyah.

Kedua, perebutan pengaruh sosio-kultur merupakan proses perebutan dominasi tradisi sosial keagamaan antara tradisi sosial keagamaan FPI dengan Muhammadiyah. Kelompok radikal (FPI) menganggap tradisi sosial keagamaannya (*manhaj dakwah*) lebih baik dan sesuai dengan tradisi *salafus as-salih* daripada tradisi sosial keagamaan Muhammadiyah yang dianggap kurang mengikuti tradisi *salafus as-salih.* Efek dari proses ini adalah pembangkangan aktivis Muhammadiyah terhadap aturan, intruksi organisasi persyarikatan Muhammadiyah, mereka lebih patuh dan suka mengikuti tardisi sosial keagamaan FPI. Pembangkangan tradisi sosial-keagamaan diharapkan oleh kelompok radikal (FPI) supaya kepentingan politiknya lebih muda masuk dan minimal dapat menguasai dakwah Muhammadiyah di Pantura Lamongan dan di Indonesia pada umumnya.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan yang bersifat terbuka, menjadikan peluang terjadinya proses infiltrasi dan hegemoni sosio-ideologis dalam tubuh Muhammadiyah lebih mudah. Fenomena tersebut terpotret pada Fenomena radikalisasi ideologi di kalangan aktivis

Muhammadiyah ke gerakan FPI. Dimana secara sosio-ideologis proses radikalisasi ideologi Muhammadiyah akan berdampak pada gerakan Muhammadiyah. Sebab proses tersebut secara berlahan namun pasti akan merubah karakter ideologi dan *manhaj* dakwah Muhammadiyah.

Proses radikalisasi ideologi di kalangan aktivis Muhammadiyah mempunyai dua dampak yaitu dampak ideologis dan sosiologis, yakni *Pertama,* dampak ideologis merupakan proses perubahan paradigma, pola pikir, cara pandang aktivis Muhammadiyah terhadap sistem dan karakter ideologi Muhammadiyah yang selama ini diyakininya. Dampak ideologis dari proses radikalisasi ideologi tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan gerakan Muhammadiyah yang selama ini dikenal memiliki ideologi dakwah yang santun, moderat dan toleran berubah menjadi karakter ideologi dakwah yang keras, radikal dan intoleran.

Dampak ideologis dari proses radikalisasi ideologi berakibat pada penggerusan (*erosi*) ideologi Muhammadiyah. Proses erosi ideologi tersebut akan berdampak pada melemahnya komitmen bermuhammadiyah dan melemahnya militansi bermuhammadiyah. Menurut Haedar Nashir, bahwa kelahiran Muhammadiyah memiliki keterkaitan dan persentuhan erat dengan ideologi, yaitu ide-ide dan cita-cita tentang masyarakat Islam oleh KH. Achmad Dahlan yang kemudian pada giliranya membentuk alam pikiran dan cara pandang (*world view*) Muhammadiyah (Haedar Nashir, 2007: 19). Cita-cita ini yang akan tergerus digantikan dengan cita-cita ideologi yang lain (FPI).

Kedua, dampak sosiologis merupakan proses perubahan pola perilaku, interaksi sosial-keagamaan aktivis Muhammadiyah yang aktif di FPI terhadap sistem dan tradisi sosial-keagamaan Muhammadiyah. Dampak sosiologis dari proses radikalisasi ideologi sangat berbahaya bagi kelangsungan gerakan Muhammadiyah yang selama ini dikenal memiliki sistem dan tradisi sosial-keagamaan yang mapan dan baik. Dan memiliki kader-kader dakwah yang militin dalam memperjuanganka Muhammadiyah di masyarakat.

Dampak sosiologis dari proses radikalisasi ideologi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Mengganggu program kerja dakwah Muhammadiyah
b) Mengganggu sistem kerja organisasi Muhammadiyah terutama pada sistem kerja Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)
c) Mencederai tradisi sosial-keagamaan persyarikatan Muhammadiyah yang sudah mempunyai tradisi sendiri.

Selain berdampak pada internal gerakan Muhammadiyah, fenomena radikalisasi ideologi dikalangan aktivis Muhammadiyah juga berdampak terhadap wajah geraka Islam di Indonesia. Implikasi tersebut perlahan tapi pasti akan merubah wajah gerakan dakwah Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi Islam yang moderat, toleran, santun dan cinta damai berubah wajah menjadi gerakan yang keras, radikal, fundamental, dan intoleran.

Wajah dakwah sebuah organisasi adalah tergantung dari paradigma (ideologi) para pengurusnya. Artinya paradigma-ideologi seseorang akan mempengaruhi perilaku sosial yang ditampilkan, apabila paradigma-ideologi keagamaan yang dipahami cenderung tekstual, formalitas, radikal dan fundamental maka tampilan dari prilaku sosial keagamaanya juga seperti itu kaku, keras, radikal dan intoleran dan begitu juga sebaliknya. Apabila ideologi keagamaan toleran, moderat, cinta damai maka prilaku sosial-keagamaan yang ditampilkan juga toleran, santun, moderat dan cinta damai.

Perebuhan wajah dakwah Muhammadiyah pada gilirannya akan mempengaruhi wajah gerakan Islam di Indonesia. Implikasi tersebut sangat mungkin terjadi sebab Muhammadiyah dan NU merupakan salah satu presentasi atau (barometer) gerakan Islam di Indonesia. Artinya wajah gerakan Islam di Indonesia tergantung dari wajah gerakan dari organisasi-organsasi Islam besar yang ada di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Gerakan Islam Indonesia lebih dikenal sangat moderat, santun, toleran dan menghargai tradisi lokal berubah wajah menjadi gerakan Islam Indonesia yang radikal, keras, fundamental dan anti tradisi lokal (*arabisme*).

Refleksi Gerakan

Berdasarkan potret di atas maka diperlukan refleksi gerakan untuk membentengi ideologi Muhammadiayah dari rongrongan ideologi gerakan radikal Islam. Refleksi tersebut harus berorientasi masa depan dan berangkat dari permasalahan yang terjadi dan tantangan problematika dunia global-kontemporer umat Muslim. Kedepan Muhammadiyah harus melakukan:

Pertama, Resoliditasi gerakan yaitu "merapatkan-melurusakan" *shoff* warga Muhammadiyah yang sering "renggang-berbelok". Seiring berkembang dan besarnya organisasi Muhammadiyah maka sering terjadi konflik kepentingan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan (jabatan Kepala Sekolah, Rektor, Direktur RSM, Pergantian Ketua Persyarikatan, dll), baik secara

samar mapun terbuka. Konflik tersebut cenderung melemahkan ideologi dan militansi ber-Muhammadiyah. Ketika asyik berkonflik menjadikan kita kurang waspada terhadap *infiltrasi* atau *transformasi* ideologi lain ke Muhammadiyah. Situasi ini yang mendorong percepatan proses radikalisasi ideologi di Muhammadiyah, maka ke depan saya kira perlu resoliditasi gerakan di internal Muhammadiyah.

Kedua, Rekontekstualisasi gerakan, yaitu melakukan progresifitas gerakan Muhammadiyah dengan melakukan rekonstruksi paradigma dan metodologi gerakan Muhammadiyah dalam menghadapi problematika dunia *kontemporer-global.* Perkembangan pemikiran dan gerakan di Dunia Muslim kontemporer memberikan pengaruh luar biasa bagi perkembangan gerakan Islam di Indonesia (Baca: termasuk Muhammadiyah). Sementara kita masih menggunakan paradigma dan metodologi lama dalam melihat realitas problematika masyarakat Muslim, sehingga tidak heran kita terkesan gagap menghadapinya. *Transnasionalisasi* ideologi Islam merupakan salah satu wacana yang menjadi pusat perhatian dunia Muslim kontemporer. Wacana ini mendorong *Pan-Islamisme* ideologi gerakan Umat Islam pada satu ideologi politik "*Dawlah Islamiyah*" dengan system *Khilafah Islamiyah.* Namun terkadang metode yang digunakan dengan cara-cara radikal dan kekerasan. Wacana inipun tak lepas telah merasuki ke tubuh Muhammadiyah, maka kedepan perlu kiranya dilakukan untuk rekontekstualiasi gerakan Muhammadiyah agar warga Muhammadiyah tidak merasa terasing dan gagap dengan dunia luar.

Ketiga, Pribumisasi gerakan adalah mengembalikan posisi awal Muhammadiyah yang lebih peka, peduli, dan *welas asih* terhadap problematika para warganya, terutama pada kalangan anak muda dan kelompok termarginalkan.

Muhammadiyah terkesan kurang memperhatikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi para anak muda. Mereka merasa sudah tidak nyaman beraktivitas di Muhammadiyah. Anak muda ini merasa para elit-elit Muhammadiyah lebih sibuk mengurus Amal Usaha daripada merawat "ngaramut" para jama'ahnya, sehingga, mereka mencari gerakan alternatif. Hal itu dilakukan oleh mereka, karena bagi mereka merasa "teropeni" dan diperhatikan kebuthan dan persoalanya oleh gerakan alternatif.

Selain itu, stigma ideolog "welas asih" Muhammadiyah yang dulu menjadi modal gerakan untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah hingga bertahan diusianya yang ke 100 tahun mulai bergeser. Muhammadiyah saat ini terkesan "elitis-biokratis" dan cenderung "pragmatis-materialistik"

dalam memahami Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Sekolahan, Perguruan Tinggi), sehingga kelompok Marginal atau "Mustdha'afin" semakin menjauh karena tidak mampu menggapainya "*melangit*". Padahal mereka inilah awal dari sasaran dakwah Muhammadiyah yang menjadikan Muhammadiyah bisa berjaya hingga saat ini. Maka ke depan saya kira perlu ada *pribumisasi* gerakan Muhammadiyah dengan tetap memegang teguh *teologi al-Ma'un.*

Daftar Pustaka

Abou El Fadl, Khaled. 2006. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (terj), penerjemah Helmi Musthofa. Jakarta: Serambi.

Adams, Ian. 2004. *Ideologi Politik*. Yogyakarta: Qalam

Al As'ary, Deni. 2009. *Selamatkan Muhammadiyah: Agenda Mendesak.* Yogyakarta: Kibar Press

Al-Jabiri, Muhammad Abid. 2001. *Agama, Negara dan Penerapan Syariah.* Yogyakarta: Pustaka

Al-Symawi, Muhammad Said. 1987. *Al-Islam Al-Siyasi,* Kairo: Sina li al-Nasyr

Al Zastrow, Ng. 2006. *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI.* Yogyakarta: LKiS

Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU.* Solo: Jatayu

Arifin, Syamsul. 2005. *Ideologi Praksis Gerakan Sosial kaum fundamentalisme,* Malang: UMM Press

Budha Kusumandaru, Ken. 2003. *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme.* Yogyakarta: Resit Book.

Choueiri, Youssef M (terj). 2003. *Islam Garis Keras: Melajak akar gerakan Fundamentalsime.* Yogyakarta: Qonun Press

Delong-Bas, Natana J. 1992. *Wahhabi Islam: From Revival and Reform Global Jihad*, London: Oxford University Press, tt

Esposito, John L, *The Islamic Threat Myth or Reality,* Oxford: Oxford University Press

Fealy, Greg. 2005. *Jejak Khalifah: pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* Bandung: Mizan.

Hadjid, KRH. 2008. *Pelajaran KH. Ahmad Dahlan: 7 falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al Qur'an*, Yogyakarta: LPI PP Muhammadiyah

Huda, Miftachul. 2007. *Ikhwanul Muhammadiyah,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Kibar Press

Hunter, Shireen T. 2001. *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan* (terj), Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana

Jahroni, Jajang. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press

Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani* Bentang: Yogyakarta

Nashir, Haidar. 2007. *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia,* Jakarta: PSAP

______________. 2007. *Kristalisasi Ideologi Muhammadiyah dan Komitmen BerMuhammmadiyah,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2005. *Dakwah Kultural Muhammadiyah,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Rahman, Fazlur. 2001. *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamentalisme Islam* (ter), Aam Fahmia, Jakarta: Rajawali Press

Rahmat, Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radika: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,* Jakarta: Erlangga

Rizieq Syihab, Muhammad. 2004. *Dialog FPI: Amar Maruf Nahi Mungkar.* Jakarta: Pustaka Ibnu Sida.

Roy, Oliver. 1994. *The Failure of Political Islam*, London: I.B Tauris&Co. Ltd

Rosadi, Andri. 2008. *Hitam-Putih FPI (Mengungkap Rahasia-rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial.* Jakarta: Nun Publisher

Sumaji, Ma'in Abd. 2006. *Mengembalikan Gerakan: Sejarah IMM Lamongan 1985-2006.* Lamongan: IMM Cabang Lamogan

Syam, Nur. 2004. *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LKiS

Syuhadi, Fathurrohim. 2004. "*Laporan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah Kabupaten Lamongan.* Lamongan: Naskah

___________________. 2006 Mengenang Perjuangan: Sejarah Muhammadiyah Lamongan. Surabaya: Java Pustaka

Jurnal:

Ach. Muzakki. 2007. "Importasi dan Lokalisasi Ideologi Islam: Ekspansi Gerakan Islam Pinggiran Pasca Soeharto", *Jurnal MAARIF,* Vol. 2, No.4, Juni 2007

Zuly Qadir. 2008. "Gerakan salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia", *Jurnal Islamica,* Vol.3, No.1, September 2008, 2.

Wawancara:
Zainal Anshory, *Wawancara*, Paciran, (2 Juli 2010)
Burhan, *Wawancara*, Paciran, (3 Juli 2010, 3 Agustus 2010)
Yoyon Suudi, *Wawancara*, Paciran, (3 Agustus 2010)
Khanif, *Wawancara,* Paciran, (3 Agustus 2010)

JIHAD MUHAMMADIYAH:
Antara Konsep dan Penerapan

Zakiya Darajat

Sebenarnya, tulisan ini adalah sub tema dari disertasi saya tentang *"Jihad dalam Sejarah Islam Indonesia Kontemporer; Kajian Atas Wacana dan Praksis Jihad Gerakan Sosial"*. Semula disertasi saya ini hanya akan menyoroti konsep jihad yang dipraktikkan beberapa gerakan sosial Islam Indonesia yang oleh sementara kalangan dianggap bercorak radikal fundamentalis, seperti Laskar Jihad pimpinan Ja'far Umar Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang sempat dipimpin Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, serta ideologi jihad kelompok Bom Bali yang antara lain beranggotakan Imam Samudra, Mukhlas, Amrozi, Doktor Azahari, Noordin M. Top, dan sebagainya. Selanjutnya dengan diperkuat beberapa teori gerakan sosial (*social movement theories*), saya ingin menunjukkan bahwa ideologi jihad yang dipahami dan dipraktikkan beberapa gerakan sosial Islam Indonesia ini bukanlah semata-mata ekspresi dari tindakan emosional yang tidak memperhitungkan aspek rasionalitas seperti yang disangkakan para teoritis *collective behaviour theories*, tetapi merupakan tindakan yang dianggap rasional, memiliki kalkulasi untung dan rugi, namun dengan tetap menyandarkan pada tindakan mencari kesyahidan (*istisyhad/martyrdom*). Inilah yang kemudian saya sebut sebagai *Religio-Rational Action Theory*.

Prof. Dr. Azyumardi Azra selaku promotor penelitian saya selanjutnya menyarankan agar tema penelitian diperluas dan ditambah dengan pembahasan tentang jihad dalam perspektif *mainstream* umat Islam Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa cendekiawan Muslim Indonesia.

Dengan pertimbangan bahwa penelitian akan lebih *balance* jika menganalisis jihad dalam perspektif dua arus utama gerakan sosial Islam Indonesia, yaitu kelompok salafi jihadis yang diwakili LJ, MMI dan kelompok Bom Bali, serta kelompok modernis-tradisionalis yang direpresentasikan Muhammadiyah dan NU, serta kelompok yang berperan sebagai fasilitator aspirasi Umat Islam Indonesia dan pemerintah yaitu MUI, maka saya pun dengan penuh antusias melakukan riset tentang jihad dalam pandangan Muhammadiyah, NU, MUI dan beberapa cendekiawan Muslim Indonesia.

Dalam perjuangan melakukan riset tentang jihad Muhammadiyah inilah saya banyak dibantu oleh Bang Zainal, penanggung jawab perpustakaan Gedung Dakwah Muhammadiyah Jln. Menteng Raya, Jakarta Pusat, juga *deep interview* dengan Buya Yun (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih, Prof. Dr. Yunahar Ilyas, MA). Sedangkan riset tentang jihad dalam pandangan NU saya banyak dibantu oleh Haji Syathiri, penanggung jawab perpustakaan PBNU di Jln Kramat Raya Jakarta Pusat dan *deep interview* dengan Mas Abdul Mun'im Dz, Wakil Sekjend PBNU. Sementara itu, Dr. Amirsyah Tambunan selaku Wakil Sekjend MUI Pusat juga banyak membantu saya dalam mengakses data-data dan interview tentang jihad dalam pandangan MUI. Kepada beliau-beliau setulusnya saya menghaturkan banyak terima kasih atas segala bantuannya sehingga penelitian saya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *syukron jazakumullah.* Dengan melakukan sedikit tambahan dan improvisasi, tulisan ini saya persembahkan untuk Muhammadiyah yang akan mengadakan hajatan besar lima tahunan di Makassar bulan Syawal mendatang.

Sekilas Jihad dalam Perspektif Dua *Mainstream* Umat Islam Indonesia

Dua kelompok umat Islam memiliki perspektif yang berbeda tentang konsep dan praktik jihad. Kelompok pertama, yaitu komunitas salafi jihadis tidak sepakat dengan penggunaaan arti etimologis jihad yaitu bersungguh-sungguh atau berjuang keras dalam pelaksanaan ibadah, baik *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah.* Mereka hanya meyakini jihad secara syar'i seperti yang telah didefinisikan empat mazhab utama, yaitu jihad sebagai perang. Jihad perang tidak hanya ditujukan sebagai upaya defensif saja, melainkan bisa juga ditujukan sebagai tindakan offensif. Dengan mengambil argumentasi dari perkataan Umar bin al-Khattab, bahwa *khairud difâi al-hujûmu* (sebaik-baik pertahanan adalah penyerangan), salah satu pelaku bom Bali, yaitu Imam Samudra menyerukan apa yang ia sebut sebagai

defoffensif (pertahanan sekaligus penyerangan). Pengeboman terhadap dua lokasi wisata di Bali pada Oktober 2001 yang ia lakukan bersama dengan beberapa anggota komunitas salafi jihadis, yang mereka sebut sebagai operasi jihad ini, dilakukan dengan strategi defoffensif. (Imam Samudra, 2004)

Kelompok kedua adalah *mainstream* umat Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menegaskan bahwa jihad tidak mesti bermakna perang. Segala kesungguh-sungguhan dan kerja keras dalam setiap kebaikan adalah salah satu bentuk jihad. Termasuk bersungguh-sungguh memerangi kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan bentuk kedzaliman yang lain, bisa dimaknai sebagai jihad. Jihad berbentuk perang dilakukan ketika umat Islam diserang oleh pihak musuh, sebagai tindakan defensif, bukan offensif.

Demikian juga dengan konsep *dâr al-harb* dan *dâr-al-Islâm,* keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menegaskan bahwa wilayah di mana syariah Islam belum ditegakkan, maka ia disebut sebagai *dâr al-harb,* meski penguasanya Muslim, yang oleh karena itu wajib ditegakkan jihad atasnya.

Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa di wilayah manapun umat Muslim bisa beribadah dengan bebas maka ia adalah *dâr-al-Islâm* yang tak boleh diperangi. Pendapat kelompok ini sejalan dengan pandangan ulama klasik seperti Abdul Qahir al-Baghdadi dan ulama lainnya seperti yang dikutip Madjid Khaddûri yang berpendapat bahwa suatu wilayah dianggap sebagai *dâr-al-Islâm* ketika umat Islam dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas. Pandangan ulama klasik ini menunjukkan bahwa klasifikasi wilayah masuk ke dalam *dâr al-harb* atau *dâr-al-Islâm* dapat dilihat dari jangkauan pelaksanaan hukum Islam dalam wilayah tersebut, dan bukan terletak pada penguasanya, Muslim ataukan non-Muslim. Definisi ini diterima oleh sebagian ulama Muslim selama paruh abad ke-19 dan 20, antara lain Sayyid Ahmad Khan dan beberapa sarjana dan ulama Deoband dan *Nadwat al-Ulamâ* dari India, ketika India dikuasai Inggris. Begitu juga ulama NU yang menyebut Indonesia sebagai negoro Islam pada masa penjajahan Belanda (sebelum kemerdekaan RI tahun 1945) (Madjid Khadduri: 2006).

Jihad versi Muhammadiyah

Sebagai salah satu organisasi bertipikal moderat, Muhammadiyah tidak pernah merasa memiliki persoalan dengan paham dan praktik jihad. Jika dianalisis sejarah perkembangannya, Muhammadiyah agaknya lebih

menekankan *jihâd akbar* dari pada *jihâd asghar*.

Hal ini bisa ditelusuri dari pandangan-pandangan para tokoh Muhammadiyah maupun literatur-literatur dan produk-produk organisasi yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan formal Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak sepakat jika jihad semata-mata dimaknai dengan perang saja. Tidak semua perang adalah jihad. Hanya perang *fî sabîlillâh* sajalah yang menjadi bagian dari jihad, dan bukan sembarang perang. Dalam pandangan Muhammadiyah, jihad harus dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hal ini penting diketahui untuk bisa menentukan mutu dan metode jihad. Maka Jihad pada masa penjajahan boleh jadi berbeda dengan jihad pada masa kemerdekaan. Jihad yang dilakukan atas masyarakat pedesaan berbeda dengan jihad atas masyarakat perkotaan dan sebagainya.

Sama dengan pemahaman jihad secara umum, Buya Haji Ahmad Rasyid Sutan Mansyur, atau yang lebih dikenal dengan H.A.R Sutan Mansur, Ketua Umum Muhammadiyah periode tahun 1956-1959 mendefinisikan jihad sebagai bekerja sepenuh hati, yang harus melalui tiga tahapan dan syarat yang harus ditempuh, yaitu adanya roh suci yang menghubungkan makhluk dengan khaliqnya, selanjutnya roh suci itu menimbulkan tenaga dinamis aktif yang tahu berbuat sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan, dan terakhir dimulai dengan *'ilmu yaqin* dengan peningkatan iman hingga sampai kepada *'ainul yaqin.* (HAR Sutan Mansur: 1984)

Dalam pandangan Sutan Mansur, pelaksanaan perintah jihad sangat berkaitan dengan niat, kemauan dan petunjuk dari Allah SWT, yang kemudian menimbulkan sebuah gerakan yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing masyarakat. Berkaca dari kekalahan umat Islam dalam Perang Uhud akibat tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, Sutan Mansur dalam salah satu Sidang Majelis PP Muhammadiyah berpendapat bahwa mentaati *ulil amri* juga bagian dari jihad. Disiplin yang kokoh dan persatuan yang erat harus dilatih dalam jihad. Maka dalam kondisi perang, jihad yang dilakukan umat Muslim tidak semata-mata berusaha mengalahkan musuh, tetapi juga berjihad dalam mentaati perintah pemimpin. Mentaati pemimpin adalah bagian dari kedisiplinan, dan kedisiplinan sangat mutlak dalam perjuangan.

Akan tetapi, jika dalam keadaan damai, maka jihad bermakna membangun

dan menegakkan kebaikan dan kebenaran. Dalam pandangan Muhammadiyah, jihad dalam kondisi damai justru lebih berat dibandingkan dalam kondisi perang. Ia menuntut adanya kekuatan otak, keikhlasan dalam berkorban, juga mengisi jiwa dan mendidik masyarakat. Permasalahan yang begitu pelik datang silih berganti dihadapi umat, baik di bidang politik, liberalisasi ekonomi yang berujung pada kemorosotan ekonomi masyarakat, penyakit sosial, membanjirnya kebudayaan Barat, demoralisasi, dan sebagainya.

Sebagai sebuah organisasi modernis, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang sangat *welcome* dengan jihad pemikiran, atau yang lebih dikenal dengan istilah ijtihad. Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong bagi Muhammadiyah untuk mengembangkan sikap kritis terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan yang banyak mendapatkan inspirasi dari pemikiran Muhammad 'Abduh dan Rasyîd Ridhâ, telah mencontohkan bagaimana rasionalitas sangat diperlukan dalam menafsirkan dan mempraktikkan ajaran Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an tidak cukup dibaca dan dihafalkan, tetapi lebih jauh harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Teologi Al-Mâ'ûn yaitu bagaimana keberagamaan seseorang diukur ketika ia bisa mentransformasikan dalam amalan sosialnya, yang dikembangkan Ahmad Dahlan pada akhirnya menjadi inspirasi landasan gerak Muhammadiyah, bahwa cita-cita Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islami dan penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Karena yang dituju adalah masyarakat Islami, dalam hubungannya dengan negara, meski tokoh-tokoh Muhammadiyah pernah memiliki saham dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam BPUPKI, PPKI maupun Majelis Konstituante, akan tetapi pada hakikatnya Muhammadiyah dalam Anggaran Dasarnya tidak mencantumkan istilah Negara Islam (*Ad-Daulah Al-Islamiyyah*). (A. Syafi'i Ma'arif, 2000). Watak ideologis ini dalam perkembangannya mengalami transformasi, dari perjuangan legal-formal syariat Islam menjadi penyadaran umat akan kehidupan yang dilandasi nilai-nilai Islam, sehingga terwujud masyarakat yang Islami.

Hal ini bukan berarti Muhammadiyah menolak pemberlakuan syariat Islam, seperti yang disuarakan organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan sebagainya. Akan tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, pelegal-formalan Islam dalam konstitusi harus mempertimbangkan situasi dan kondisi politik umat Islam, ruang dan waktu dewasa ini.

Dalam kenyataannya, Muhammadiyah justru berada di garis terdepan dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam, seperti yang tertuang dalam Penjelasan PP Muhammadiyah, "*...Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Islam, tentu saja Muhammadiyah berada di garis depan untuk segala usaha penegakkan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, karena kewajiban menjalankan syariat Islam adaah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita terhadap kebenaran Islam sebagai agama*" (Syarifuddin Jurdi: 2010, h. 321).

Meski dalam hal-hal tertentu Muhammadiyah lebih dekat dengan pemahaman keagamaan salafiyah, namun dalam gagasan teologi politik Muhammadiyah berbeda dengan teologi kaum salaf. Dalam amatan Azyumardi Azra, inilah yang membedakan antara teologi politik kaum salaf dengan teologi politik Muhammadiyah. Jika para tokoh salaf seperti Sayyid Quthb dan Abû al-A'la al-Maudûdi menggagas khilafah dengan khalifah sebagai penguasa tertingginya, maka dua istilah ini nyaris absen dalam wacana Muhammadiyah.(Azyumardi Azra, 2000).

Karena itu, dalam pandangan Muhammadiyah, upaya pencapaian terwujudnya suatu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya tetap harus dilakukan dengan memperhitungkan taktik dan strategi, juga ruang dan keadaan Muhammadiyah itu sendiri. Perjuangan Rasulullah SAW era Mekkah di mana Allah melarang jihad perang berbeda dengan perjuangan di Madinah ketika Allah kemudian memperbolehkan jihad perang. Inilah analogi yang dipakai Muhammadiyah dalam menentukan strategi perjuangan. Bagi Muhammadiyah, keyakinan akan kebenaran ajaran Islam dan kewajiban menjalankannya adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Akan tetapi pengaplikasiannya bisa saja berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umat Islam. (Syarifuddin Jurdi: 2010).

Karena fokus perjuangan Muhammadiyah adalah masalah-masalah sosial keagamaan, dalam sejarahnya Muhammadiyah tidak pernah terlibat dalam perjuangan fisik dengan pihak lain, baik dalam masa revolusi maupun masa-masa sesudahnya. Berbeda dengan ormas lain seperti NU yang secara institusi pernah menyerukan jihad fisik (Resolusi Jihad) melawan kolonial Belanda dan sekutu, Muhammadiyah lebih memilih untuk mendelegasikan perjuangan dan jihad fisik ini ke laskar-laskar yang sudah ada, di mana Muhammadiyah juga menjadi salah satu perintisnya, seperti Laskar Hizbullah dan Sabilillah.

Sebagai salah satu unsur utama dalam Masyumi, Muhammadiyah mendukung sepenuhnya Resolusi Jihad yang dihasilkan dalam Muktamar Umat Islam yang dilaksanakan tanggal 1-2 Dzulhijjah 1364 H/ 7 November

1945 di Yogyakarta yang menghasilkan keputusan pembentukan partai Islam sebagai satu-satunya wadah yang yang merepresentasikan aspirasi politik umat Islam bernama Masyumi, juga pernyataan bahwa Barisan Sabilillah merupakan barisan istimewa Tentara Kemanan Rakyat (TKR). Dalam Muktamar ini pula, dimaklumatkan bahwa "*60 Milyoen kaoem Moeslimin Indonesia siap berjihad fî sabîillâh, perang di jalan Allah oentoek menentang tiap-tiap penjajahan*". (AM Suryanegara: 1998).

Dalam komposisi kepengurusan Laskar Hizbullah yang dibentuk Masyumi pada 14 September 1944 inilah terlihat perpaduan antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU. Ketua Laskar Hizbullah dari unsur NU, yaitu Zainul Arifin, sedangkan wakilnya dari Muhammadiyah, yaitu Mohammad Roem. Di daerah-daerah di mana Muhammadiyah memiliki basis massa banyak, antara lain Yogyakarta, warga Muhammadiyah juga banyak yang kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota Laskar Hizbullah. Selain itu, rekrutmen anggota Hizbullah juga berasal dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, seperti pelajar dari Mu'alimin Muhammadiyah Patangpuluhan Yogyakarta, dan Mu'alimin Muhammadiyah Wal Fajri Karanganyar, Surakarta, juga para guru agama dan *muballigh* dari Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan sebagainya. Motivasi mereka ikut bergabung dengan Laskar Hizbullah hanya satu, yaitu berjihad di jalan Allah demi mengusir penjajahan dari bumi Indonesia, disertai niat *Li'lâi kalimâtillâh* serta menegakkan keadilan dan kebenaran.(Ahmad Adabi Darban, 2005).

Oleh karena itu, meski secara organisatoris administratif Muhammadiyah tidak secara resmi menyerukan jihad aktif, akan tetapi keterlibatan Muhammadiyah dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah adalah melalui tokoh-tokohnya dan warganya yang mendapat restu dan legitimasi dari Muhammadiyah. Dari sinilah Muhammadiyah memilah dan memilih makna dan konsep jihad fisik yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Karena bagaimanapun Muhammadiyah menyadari bahwa kelahiran Muhammadiyah tidak ditujukan sebagai wadah politik, melainkan organisasi keagamaan yang bergerak dalam jalur kultural, bukan struktural, dengan tetap selalu responsif terhadap masalah-masalah bangsa, termasuk masalah politik. Hal ini bisa dilihat dalam sejarahnya, bahwa pada masa kolonial Belanda Muhammadiyah tidak pernah melakukan perlawanan konfrontatif dengan Belanda, dan bahkan sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak mengadopsi sistem pendidikan yang banyak diterapkan kolonial Belanda. KH Ahmad Dahlan juga banyak bergaul dengan kalangan Belanda dan bahkan menjadi guru di salah satu sekolah

Belanda di Yogyakarta.

Masa Orde Baru dan masa-masa selanjutnya menjadi penegasan Muhammadiyah sebagai organisasi yang mentradisikan jihad pemikiran (ijtihad) kolektif dalam menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks. Pada masa Orde Baru, ketika rezim Soeharto memaksakan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa yang kemudian menimbulkan resistensi di tengah umat Islam, Muhammadiyah melakukan ijitihad politik dengan menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Ketua Umum Muhammadiyah ketika itu, KH Abdur Razak (AR) Fakhruddin dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 1985 memberikan perumpamaan penerimaan Pancasila oleh Muhammadiyah ini dengan orang yang bersepeda motor dengan menggunakan helm. Bahwa bisa saja orang bersepeda motor tidak menggunakan helm, tetapi akan lebih aman jika pengendaranya memakai helm.

Di penghujung Orde Baru, Muhammadiyah melalui Ketua Umumnya, Amien Rais menjadi pelopor lahirnya Orde Reformasi di Indonesia yang berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari tiga dasa warsa. Ijtihad politik Muhammadiyah terbesar kala itu adalah ketika Muhammadiyah dalam Sidang Tanwirnya yang diselenggarakan di Semarang tahun 1998 memutuskan untuk merelakan Ketua Umumnya untuk berkiprah lebih luas lagi dalam rangka terus mempelopori dan mengawal proses reformasi yang baru saja bergulir. Kelahiran Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Amanat Nasional pada tanggal 23 Agustus 1998 tidak bisa dipungkiri tidak bisa dilepaskan dari ijtihad politik Muhammadiyah. Meski secara institusi Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai bentukan Amien Rais ini, namun basis massa partai ini adalah warga Muhammadiyah.

Berikut ini adalah penerapan jihad yang telah dilakukan Muhammadiyah sebagai bagian keikutsertaan Muhammadiyah dalam mengatasi persoalan bangsa :

1. Konflik Komunal dan Respons Muhammadiyah

Konflik komunal yang terjadi di Papua, Aceh, Ambon dan Poso di awal masa reformasi, merupakan konflik yang dipicu oleh berbagai macam faktor, di antaranya faktor ketidakadilan, diskriminasi sosial politik, faktor kesenjangan ekonomi, dan sebagainya. Selain prakarsa pemerintah melalui pertemuan Malino I dan II, Muhammadiyah juga telah melakukan serangkaian kegiatan untuk merespons konflik yang terjadi di daerah-daerah tersebut, berupa kegiatan seminar, temu elit Muhammadiyah nasional, serta dialog

elit lokal. Tidak hanya bertumpu pada pemberitaan di media massa, untuk memperoleh data yang lebih akurat dan obyektif, Muhammadiyah juga membuat beberapa tim yang ditugaskan untuk terjun langsung ke daerah konflik untuk selanjutnya merumuskan peran apa yang tepat untuk dilakukan Muhammadiyah. Hal ini adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah dalam masalah integrasi sosial dan pentingnya sebuah kohesi sosial.(Syarifuddin Jurdi, 2010)

Dari hasil pertemuan dengan elit lokal dan hasil kajian yang dilakukan Muhammadiyah, disimpulkan bahwa pada ketiga daerah yang berpotensi disintegrasi tersebut, yaitu Papua dengan Gerakan Papua Merdeka (GPM), Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Ambon dengan Republik Maluku Selatan (RMS), perlu diupayakan program-program resolusi konflik, antara lain dengan pemberlakuan otonomi daerah, khususnya bagi Papua dan Aceh. Muhammadiyah juga berkesimpulan bahwa harus dilakukan dialog antar berbagai kelompok sosial kemasyarakatan dan agama secara terus menerus sebagai upaya membangun tatanan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara secara lebih baik dengan mengintensifkan komunikasi, jaringan, dan kerja sama. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan ekonomi dan politik, mengambil sikap tegas terhadap pihak-pihak yang bersalah, dan melaksanakan program pembangunan dan rehabilitasi dengan serius, serta merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat, seperti kesepakatan Malino I untuk Ambon dan Malino II untuk kasus Poso. (Syarifuddin Jurdi: 2010).

2. Jihad Melawan Korupsi

Dalam pandangan Muhammadiyah, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan sesuatu melalui pola dan modus memanfaatkan kedudukan. Dari perspektif agama, korupsi jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Karena itu, melalui berbagai ayat dan hadith, Islam memberikan kecaman dan ancaman serius terhadap para pelaku korupsi. Kenyataannya, meski mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, akan tetapi tindakan korupsi, kolusi dan beserta jelmaannya seperti nepotisme, suap menyuap, monopoli, oligopoli, penyelundupan, penyunatan, *mark up*, pungutan liar, penjualan sumber daya alam secara ilegal, dan perampokan hak-hak rakyat adalah sejumlah tindakan curang yang semakin marak terjadi di Indonesia.(PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, 2006)

Selanjutnya, PP Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang menginventarisir bahwa setidaknya terdapat sebelas wilayah yang menyatu dengan sistem kehidupan masyarakat dan menjadi medan korupsi, yaitu *pertama*, wilayah penegakan hukum, berupa keadilan diperdagangkan, campur tangan politik, dan lemahnya yurisdiksi. *Kedua*, wilayah bisnis, yaitu adanya campur tangan politik, manajemen yang buruk, dan kekebalan hukum pada perusahaan-perusahaan besar. *Ketiga*, wilayah partai politik, berupa sumbangan yang tidak terpantau, memeras uang dari pelaku bisnis, dan tidak adanya kebijakan apapun dari partai yang berkenaan dengan hal-hal yang berpeluang terjadinya distorsi. *Keempat*, wilayah kepegawaian, meliputi patronase dan nepotisme, skala gaji yang kacau, kelebihan pegawai, dan jual beli posisi. *Kelima*, wilayah lembaga legislatif, meliputi anggota DPR yang menerima suap, tidak punya kode etik, tidak mewakili pemilih, dan tidak adanya pengawasan terhadap anggota DPR. *Keenam*, wilayah kelompok masyarakat sipil, berupa campur tangan politik, modalitas yayasan digunakan dengan curang, dan LSM plat merah atau LSM non sipil.

Selanjutnya *ketujuh*, wilayah pemerintah daerah, berupa warisan korupsi dari pemerintah pusat, eksekutif menyuap legislatif, dan DPRD tidak melakukan supervisi kepada eksekutif. *Kedelapan*, wilayah sikap dan perilaku, berupa kelemahan dalam pelaksanaan standar-standar etika, toleransi terhadap perilaku ilegal, penerimaan terhadap orang atau institusi yang kebal hukum, dan kelemahan dalam menjalankan kekuasaan. *Kesembilan* adalah manajemen SDM, manajemen pengeluaran publik, manajemen tata peraturan, dan wilayah audit publik seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga audit lainnya. (Syarifuddin Jurdi: 2010)

Muhammadiyah juga menilai bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, struktur pemerintahan dan organisasi yang tidak transparan, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat sebagai penyeimbang lembaga eksekutif, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi yang tidak menjerakan pelaku korupsi, serta minimnya keteladanan pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. (PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid: 2006)

Begitu kronisnya masalah korupsi di Indonesia, diperlukan jihad dari berbagai elemen bangsa untuk memerangi penyakit korupsi yang diibaratkan seperti sebuah lingkaran setan, karena ia telah sedemikian meraja lela dan melibatkan hampir setiap lini kehidupan masyarakat. Ia

menimbulkan dampak negatif luar biasa berupa lenyapnya uang rakyat, rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, hilangnya sumber daya alam, bencana alam akibat rusaknya alam yang akan menimbulkan kerugian jiwa dan materi, ekonomi biaya tinggi, rapuhnya *law enforcement*, runtuhnya moral bangsa, dan sebagainya. Oleh karena itu, Muhammadiyah menawarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya jihad mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, melalui berbagai jalur dan pendekatan, seperti budaya, sosio-kultural, pendidikan, keagamaan, pendekatan hukum dan politik, dan sebagainya. (PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid: 2006).

Melalui jalur budaya, strategi pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan memberantas budaya kultus dan paternalistik yang melahirkan sikap *ewuh pekewuh* atau rikuh. Menjadi hal yang sangat memprihatinkan terjadi di tengah masyarakat manakala orang yang sudah tercemar pidana korupsi justru dihormati dan disanjung. Memberantas budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki wewenang tertentu dengan urusan publik, juga membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberi penjelasan secara terus menerus kepada masyarakat bahwa sebagian sikap, kebiasaan, dan perilaku koruptif dan kolutif seperti harus dicegah dan diberantas.

Upaya memberantas korupsi melalui jalur pendidikan dapat dilakukan dengan cara merumuskan mata pelajaran *civic education* dan kurikulum antikorupsi untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik akan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Melakukan reformasi silabus pendidikan keagamaan yang lebih menekankan kesalehan individu menuju kesalehan sosial, dengan melakukan reinterpretasi teks-teks keagamaan yang lebih kontekstual khususnya yang terkait dengan isu-isu korupsi. Begitu juga dengan membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktik-praktik korupsi, seperti pungutan yang berlebihan dengan dalih sumbangan gedung, seragam, praktikum, dan sebagainya, serta merealisasikan amanat undang-undang yang mengalokasikan anggaran negara 20% untuk pendidikan.

Melalui jalur kegamaan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan mendorong para tokoh agama untuk mengeluarkan fatwa tentang korupsi serta sanksi moral bagi pelaku korupsi, mendorong para pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya melalui majlis-majlis ta'lim, dan metode dakwah lainnya, serta mengoptimalkan potensi institusi sebagai pusat pembinaan umat. Cara ini paling tidak bisa membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat akan bahaya

korupsi bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dengan menggunakan pendekatan hukum dan politik, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan mendorong aparat birokrasi agar mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang, perlunya menyusun anggaran yang rasional dan proporsional dalam setiap mata anggaran, merevisi Undang-undang Anti korupsi yang mengedepankan asas pembuktian terbalik, memperluas horizon makna korupsi bahwa korupsi bukan hanya korupsi uang saja, tetapi juga waktu, kesetiaan, informasi, martabat kemanusiaan, dan lain-lain, mendorong semua komponen masyarakat untuk melakukan koalisi bersih lintas agama, lintas ormas, dan lintas parpol, serta meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui berbagai sarana dan media.

Selain itu, hal lain yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pentingnya keteladanan dari pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, adil, amanah dan jujur. Ia juga harus memiliki kapabilitas dalam mengelola anak bangsa yang begitu beragam, visioner, berjiwa negarawan, tegas dan berani dalam memberantas kejahatan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Hal-hal inilah yang coba ditawarkan Muhammadiyah dalam upaya jihad melawan korupsi. Dalam sidang Tanwir tahun 2003 di Makassar, Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi yang menyerukan kepada seluruh jaringan pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga ranting untuk menjalankan peran-peran baru dalam gerakan pemberantasan korupsi, membangun *good governance*, advokasi dan pelayanan publik terutama pada masyarakat akar rumput, penguatan *civil society*, program-program aksi untuk membangun tatanan nasional baru yang lebih maju, demokratis, damai, adil, dan berkeadaban (PP Muhammadiyah, 2003).

3. Jihad Melawan Rokok

Pada 24 Juni 2013, bersama dengan aliansi beberapa LSM antara lain Aliansi Pengendalian Tembakau dan tokoh masyarakat, Muhammadiyah menerbitkan *Peta Jalan Pengendalian Produk Tembakau di Indonesia.* Dalam pengembangannya, *road map* ini melibatkan seluruh jaringan pengendalian tembakau baik LSM maupun *civil society* dan pemerintah yang bertujuan sebagai media edukasi dan komunikasi bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk jihad Muhammadiyah dalam rangka memerangi rokok yang memiliki dampak sangat serius bagi kesehatan manusia. Data

dari WHO menyebutkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun karena penyakit kanker paru dan jantung serta penyakit lain yang disebabkan oleh rokok. Ini berarti terdapat satu kematian dalam setiap 5,8 detik.

Berbeda dengan pandangan mayoritas umat Islam Indonesia yang berpendapat bahwa hukum rokok adalah *makruh* (dibenci), maka posisi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan produk tembakau atau rokok selangkah lebih '*ekstreem*'. Melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid No. 6/SM/MTT/III/2010, Maret 2010 Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa hukum merokok adalah haram. Muhammadiyah menilai bahwa merokok, apalagi sampai ke tingkat kecanduan ketergantungan pada rokok merusak kesehatan dan menghilangkan nalar sehat. Segala hal yang merusak kesehatan dan nalar sehat jelas bertentangan dengan tujuan syariah (*maqâid syarî'ah*). Bahkan kesalehan sosial dari perokok juga hilang, karena asap rokok yang dihisapnya menganggu orang lain dan merusak bagi kesehatan umum.

Meski mengundang polemik dan kontroversi dari berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah menegaskan bahwa dikeluarkannya fatwa haram rokok ini bertujuan untuk mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Dalam tulisannya, Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Yunahar Ilyas mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang bisa diajukan sebagai pertimbangan dikeluarkannya fatwa haram rokok oleh Muhammadiyah, antara lain (Yunahar Ilyas, 2013) :

a. Merokok masuk katagori perbuatan *khabâith* atau merusak diri sendiri yang dilarang Allah (Q.S. 7:157).
b. Merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, bahkan merupakan usaha bunuh diri secara perlahan (Q.S. 2:195 dan 4:29)
c. Merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok.
d. Rokok mengandung zat adiktif dan unsur racun yang karsinogenik yang membahayakan walau tidak seketika.
e. Karena rokok membayakan diri sendiri dan orang lain, maka pembelanjaan untuk membeli rokok adalah perbuatan mubazir atau pemborosan yang dilarang Allah (Q.S. 17:26-27).
f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur syariah (*maqâid al-syarî'ah*) yaitu (i) perlindungan agama (*hifz al-dîn*), (ii) perlindungan jiwa/raga

(*hifz al-nafs*), (iii) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (iv) perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*), dan (v) perlindungan harta (*hifz al-mâl*).

Sebaliknya, dalam pandangan PBNU, tidak mudah untuk membuat fatwa haram, kecuali untuk hal-hal yang sudah *qâ'i*, seperti babi, *khamr*, dan darah. Rokok dalam pandangan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj tidak bisa disamakan dengan tiga hal tadi. Selain itu, efek yang dimunculkan dari fatwa ini cukup serius, khususnya yang menyangkut para petani dan buruh pabrik rokok, yang sebagian besar adalah warga NU. Oleh karena itu, melalui Ketua Komisi *Bahthul Masâil Dîniyah Waqî'iyah* KH Saefuddin Amsir, NU menegaskan tidak akan meninjau kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada *'illat* (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum. NU tetap mengukumi makruh bagi rokok, atau tidak mengapa dilakukan meski lebih baik ditinggalkan.

Fatwa haram yang dikeluarkan Muhammadiyah ini semakin memperjelas posisi Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah akan bergerak bersama pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi masyarakat, khususnya gerenasi muda, dari ancaman bahaya rokok yang semakin meluas mengancam anak bangsa ini. Muhammadiyah setuju dengan pandangan bahwa bukan hanya narkoba yang sudah sampai ke tingkat darurat nasional, tapi konsumsi rokok yang sudah mencapai 302 miliar batang per tahun, sungguh merupakan situasi darurat nasional. Ancaman terhadap bahaya rokok ini mengingatkan kita dalam Perang Candu di China, yakni Perang Candu I (1839-1842) dan Perang Candu II (1856-1860), di mana Dinasti Qing berusaha menentang upaya Inggris, yang kemudian didukung Perancis, yang ingin menjadikan China sebagai pasar opium Eropa. Perang Candu merupakan agenda Inggris untuk menjadikan China tidak saja sebagai pasar opium, tapi sekaligus ingin memperlemah daya juang rakyat China. (Yunahar Ilyas: 2013).

Oleh karena itu, Muhamadiyah menilai bahwa merokok tidak hanya sangat merugikan secara kesehatan dan berimbas pada masalah ekonomi, tetapi ada agenda terselubung dibalik kapitalisme perdagangan rokok yaitu sebagai upaya tersistematis untuk merusak dan menghancurkan moral anak bangsa melalui nikotin dan tembakau. Akhirnya Muhammadiyah berharap bahwa jihad melawan rokok seperti yang tertuang dalam *Road Map* Pengendalian Produk Tembakau ini, sesuai dengan tujuan penyusunan dan penerbitannya, benar-benar akan berhasil memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan ancaman bahaya rokok, dan selanjutnya

mendorong bagi tumbuh kembang serta terkoordinasikan semua upaya pengendalian rokok di tanah air. Bentuk keseriusan Muhammadiyah diwujudkan dengan membentuk Gerakan Pengendalian Produk Tembakau (GP2T) pada tanggal 28 Januari 2015.

4. Jihad Konstitusi Melawan Liberalisasi

Pasca reformasi, banyak pengamat yang menilai bahwa kondisi Negara Indonesia justru lebih mengkhawatirkan dibanding masa-masa sebelumnya. Orde Reformasi yang melahirkan kebebasan di berbagai bidang pada akhirnya telah kehilangan arah dan bahkan menjerumuskan bangsa ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Kedaulatan negara semakin dirongrong oleh kekuatan asing yang datang menyelinap ke segala sektor kehidupan. Intervensi asing untuk menguasai sumber-sumber kehidupan bangsa ditengarai bahkan telah sampai ke level pembuatan keputusan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Ini semua adalah dalam rangka melindungi dan semakin memperkuat cengkeraman hegemoni dan kepentingan asing di Indonesia. Mental pemimpin yang korup dan tidak bermoral menjadi penyebab dari merosotnya kedaulatan bangsa yang berimbas pada semakin jauhnya rakyat Indonesia dari kesejahteraan.

Maka tak heran jika kemudian banyak peraturan dan Undang-Undang yang dihasilkan tidak hanya mengkhianati amanat UUD 1945, tetapi juga sama sekali tidak pro rakyat, dan bahkan sebaliknya, sangat bernuansa kapitalis-liberal yang melindungi kepentingan pihak asing. Dalam disertasinya berjudul "*Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*", Elli Ruslina, dosen hukum Universitas Pasundan mencatat lebih dari 20 undang-undang telah melanggar semangat UUD 1945. Antara lain UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan betapa tidak terkendalinya kekuatan asing dalam memasuki berbagai sektor di Indonesia, seperti sektor ekonomi, sosial, dan politik melalui saluran undang-undang.(Gatra, 2013).

Berkaitan dengan hal ini, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* terpanggil untuk ikut dalam upaya kembali meluruskan arah perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita dan amanat konstitusi serta upaya menegakkan kedaulatan negara. Untuk itu, Muhammadiyah menyerukan jihad konstitusi dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas beberapa undang-undang yang dinilai sangat merugikan

rakyat, dan sebaliknya, menguntungkan investor asing. Undang-undang yang digugat antara lain adalah UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) yang justru memperkokoh cengkeraman swasta dan asing dalam menanamkam modal di sektor migas, sekaligus menghilangkan peran negara secara langsung dalam pengelolaan energi migas dan digantikan oleh swasta, karena negara hanya berfungsi sebagai regulator.

Munculnya indikasi keterlibatan asing dalam penyusunan produk beberapa undang-undang Indonesia, dalam amatan pakar ekonomi kerakyatan UGM Revrisond Baswir memang nampak sangat jelas. Ia memberikan informasi bahwa situs USAID, lembaga federal Amerika Serikat yang bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara lain termasuk Indonesia, jelas-jelas menyatakan bahwa UU Migas dibuat oleh USAID dan World Bank dengan biaya US$ 40 juta. Bahkan secara spesifik USAID menyebut beberapa nama pejabat Indonesia yang datang dan meminta bantuan ke lembaga tersebut. Bagi Baswir, liberalisasi ekonomi dan intervensi asing dalam penguasaan ekonomi yang seharusnya dikuasai oleh negara yang terjadi di Indonesia kali ini sejatinya telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Ketika itu, perusahaan asing di Hindia Belanda banyak menguasai perkebunan dan pertambangan. Hanya saja di era reformasi sekarang ini, kekuatan kapital asing semakin nyata kembali mendominasi dengan banyak melakukan intervensi terhadap amandemen UUD 1945, khususnya pasal 33.(Gatra, 2013).

Akhirnya, setelah sekitar enam bulan berjuang di Mahkamah Konstitusi, pada bulan November 2012, MK mengabulkan *judicial review* yang diajukan oleh Muhammadiyah bersama dengan 42 pemohon yang lain, antara lain 10 mewakili lembaga, dan 32 orang mewakili individu. Selain Muhammadiyah organisasi yang turut mengajukan *judicial review* atas UU Migas ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Syarikat Islam Indonesia, Persaudaraan Muslimin Indonesia, dan Al-Irsyad al-Islamiyah. Atas dikabulkannya permohonan tersebut, Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan pemerintah dan DPR harus segera merespon putusan MK ini, dan berharap putusan tersebut akan memunculkan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan migas dalam negeri. Selanjutnya Din juga menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan berhenti dalam memperjuangkan jihad konstitusi agar aset bangsa Indonesia dapat dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang lain yang menjadi sasaran jihad konstitusi Muhammadiyah adalah Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA). Pada tanggal 24

September 2013 Muhammadiyah secara resmi mengajukan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang dinilai membuka peluang sumber daya air untuk diekspor, penguasaan negara atas air diterjemahkan dengan pemberian hak guna pakai air dan hak guna usaha air, sekaligus menunjukkan penguasaan air berorientasi komersial. Dalam analisis pakar hukum Universitas Pasundan, Elli Ruslina, UU ini telah sangat menyimpang dari semangat UUD 1945 melalui pasal-pasal yang bersifat liberalisasi dan komersial. Dimulai dari pasal 7 yang mengatur hak atas air dan hak guna usaha air. Kemudian pada pasal 9 dijelaskan bahwa hak guna usaha air bisa diberikan kepada perseorangan atau badan usaha. Pasal ini jelas memberikan peluang bagi terjadinya privatisasi air, padahal pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa air dikuasai negara. Maka dengan menyerahkannya ke swasta, negara telah kehilangan hak kepemilikan atas air, karena swastalah yang secara riil bisa menentukan kebijakan, harga air, dan sebagainya.(Gatra, 2013).

Oleh karena itu kemudian, dimotori oleh Muhammadiyah, beberapa ormas dan individu juga mendukung uji materi yang dilakukan atas UU SDA ini. Dengan Koordinator kuasa hukum dipercayakan kepada Wakil Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah yang juga Dekan Fakultas Hukum UMJ, Syaiful Bachri, S.H (kini Rektor UMJ), selanjutnya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin langsung menyerahkan berkas uji materi ini ke Ketua Mahkamah Konstitusi (saat itu), Aqil Muchtar. Dalam pernyataannya, Din menegaskan bahwa jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah ini bukanlah keinginan dan prakarsa pribadi/individu tokoh Muhammadiyah semata, melainkan amanat Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2009 yang diadakan di Lampung. Dalam forum ini dihasilkan buku kecil berjudul "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa" yang secara spesifik menegaskan adanya penyimpangan dalam beberapa undang-undang seperti UU Migas, UU Kelistrikan, UU Minerba (Mineral dan Batu Bara), UU SDA, dan sebagainya. Beberapa UU ini dinilai telah menyimpang dari semangat UUD 1945 dan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan ekonomi. Keputusan tanwir ini kemudian dikuatkan lagi dengan amanat muktamar 2010 di Jakarta yang secara jelas mengamanatkan pengajuan uji materi bagi beberapa produk UU tersebut.

Berikutnya adalah UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sebagai ormas keagamaan yang memiliki banyak amal usaha di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki puluhan rumah sakit di berbagai daerah. Muhammadiyah berkepentingan untuk melakukan

judicial review terhadap UU. Hal ini dikarenakan UU ini mensyaratkan bahwa yang bisa menjadi pengelola rumah sakit hanyalah sebuah yayasan yang berbadan hukum. Sementara dalam pandangan Muhammadiyah, Muhammadiyah berbentuk persyarikatan dan bukanlah sebuah yayasan yang identik dengan kepemilikan pribadi maupun keluarga. Kepemilikan dan pengelolaan rumah sakit di bawah naungan sebuah yayasan sangat rentan dengan konflik dan interes pribadi. Sedangkan pengelolaan rumah sakit milik Muhammadiyah dikelola oleh persyarikatan di bawah koordinasi Badan Pengelola Amal Usaha Muhammadiyah. Begitu juga dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas adalah salah satu UU yang dikritisi Muhammadiyah. Karena UU ini ingin menempatkan ormas di bawah kontrol dan hegemoni penguasa. Muhammadiyah merasa tidak ada yang perlu diawasi oleh pemerintah dan dewan dari ormas ini, juga ormas-ormas Islam yang lain seperti Nahdlatul Ulama dan sebagainya.

Sikap kritis Muhammadiyah terhadap produk UU ini semata-mata bukanlah karena adanya kepentingan Muhammadiyah yang dirugikan, tetapi lebih luas lagi Muhammadiyah lebih menjadikan upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa Indonesia sebagai motif utama dalam jihad kontitusi ini. Meski memerlukan curahan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit, paling tidak Muhammadiyah telah memainkan perannya sebagai bagian dari gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Demikian penting dan mendesaknya agenda penyelamatan aset-aset bangsa ini, Muhammadiyah menyadari bahwa jihad konstitusi ini tidak bisa dijalankan sendiri, melainkan diperlukan kerja sama dan komitmen bersama dengan komponen bangsa yang lain. Karena itu, Muhammadiyah kemudian melakukan mobilisasi dan aliansi dengan organisasi lain maupun perorangan yang *concern* dengan masalah ini. Terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas misalnya, Muhammadiyah mengggandeng 10 organisasi dan 32 perorangan dengan kuasa hukumnya berjumlah 22 advokat. Begitu juga dengan pengajuan *judicial review* UU No. 7 Tahun SDA, Muhammadiyah melakukannya bersama dengan 5 organisasi dan 6 perorangan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan upaya jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah beserta dengan sejumlah ormas dan beberapa tokoh masyarakat ini, MUI memberikan apresiasi, karena bagaimanapun ini adalah sebagai rangkaian menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Berbagai macam produk hukum haruslah dikawal agar tidak menyimpang dari semangat untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman (Amirsyah Tambunan: 2014).

Mengamati fenomena aktifnya beberapa ormas Islam dalam gerakan

anti liberalisasi ini, pengamat *International Crisis Group*, Sidney Jones mengatakan bahwa jika di luar negeri gerakan anti-globalisasi dimotori oleh para LSM berideologi kiri, maka di Indonesia gerakan anti-globalisasi justru banyak dilakukan ormas-ormas Islam. Sementara itu, cendekiawan Muslim Indonesia, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat mendukung upaya jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah ini. Dalam pandangan Komarudin Hidayat, penggunaan istilah jihad dalam program *judicial review* ini sangatlah tepat dikarenakan konstitusi sedang berada dalam ancaman, sehingga memerlukan perjuangan yang serius, *all out.* (Gatra: 2013)

5. Respons Muhammadiyah terhadap Gerakan Radikal

Menanggapi banyaknya aksi radikalisme yang mengatasnamakan jihad yang dilakukan beberapa kelompok umat Islam, sekali lagi Muhammadiyah menegaskan bahwa makna dan praktik jihad harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konflik Ambon di mana beberapa komunitas Muslim berinsiatif membentuk laskar paramiliter dalam rangka ikut membantu saudara-saudaranya yang tertindas di sana misalnya, Muhammadiyah berpendapat bahwa tindakan mereka bisa dimaklumi namun sejatinya tidak bisa dibenarkan. Meski banyak simpatisan warga Muhammadiyah yang menjadi anggota laskar, Muhammadiyah tetap berprinsip bahwa negara dan aparat kemanan-lah yang tetap berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin dan menegakkan kemanan setiap warga negara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Secara hukum, kewajiban sebuah institusi yang tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan tidak bisa secara otomatis kemudian mengesahkan pihak lain untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Untuk itu, sebagai bagian dari anggota masyarakat Indonesia, peran serta Muhammadiyah untuk menyelesaikan konflik horizontal ini adalah dengan membentuk tim yang berusaha melakukan mediasi diantara pihak-pihak yang tengah bertikai di beberapa daerah konflik seperti di Ambon, Poso, dan sebagainya.

Begitu juga dengan aksi-aksi lainnya, seperti aksi Bom Bali, dan sebagainya. Muhammadiyah mengutuk keras tindakan ini dengan alasan apapun. Meskipun Imam Samudra beranggapan aksinya ini memiliki landasan teologis baik dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, akan tetapi dalam pandangan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih, Yunahar Ilyas, bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadith tentang jihad berbicara secara umum. Hanya saja penerapannya bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan

kondisi yang dihadapi umat Islam. Persoalannya adalah, jika diterapkan di Indonesia, apakah Indonesia sudah masuk dalam kategori *dâr al-harb* sehingga pantas untuk dijadikan sebagai sasaran perang *fî sabîlillâh*. Apalagi jika alasannya adalah melawan hegemoni pemerintah AS dan sekutunya, maka sangat tidak tepat jika mereka melakukannya di Indonesia, yang kemudian sasarannya adalah warga yang tidak berdosa dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintahan AS dan sekutunya. Demikian juga jika alasannya adalah karena mereka sedang berada di tempat maksiat, dalam pandangan Guru Besar 'Ulumul Qur'an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini, sangat tidak pas jika menangani orang-orang ini dengan tindakan main hakim sendiri.

Menghadapi kenyataan bahwa beberapa pelaku aksi Bom Bali berasal dari keluarga persyarikatan, Muhammadiyah menyadari betul kurangnya pembinaan dan kontrol terhadap warganya, sehingga banyak warganya yang pemahaman keagamaannya disusupi oleh paham keagamaan lainnya. Yunahar mengakui perhatian Muhammadiyah lebih banyak tersedot untuk mengurusi amal usaha yang begitu banyak dimiliki Muhammadiyah sehingga nyaris melupakan pembinaan warganya, dan kurang dalam gerakan ilmu. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah kini telah kembali menggalakan dan menghidupkan program-program pembinaan umat melalui program Baitul Arqam dan Darul Arqam yang dilaksanakan di hampir setiap ranting dan ortom Muhammadiyah juga Perguruan Tinggi millik Muhammadiyah di seluruh tanah air.

Di luar semua itu, meski Muhammadiyah mempercayakan penanganan kasus terorisme kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akan tetapi Muhammadiyah tidak sepakat dengan cara yang ditempuh oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam melumpuhkan para teroris yang tidak menggunakan cara-cara persuasif. Dalam beberapa kali aksi penyergapan terhadap terduga terorisme, Densus 88 dindikasikan melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan langsung melakukan penembakan terhadap pelaku atau perlakuan tak manusiawi lainnya. Bahkan di beberapa daerah, Densus 88 melakukan salah tangkap terhadap orang yang disangka teroris, pada hal tidak terbukti sama sekali. Contoh kasus salah tangkap terjadi pada Sapari dan Mugi Hartanto, dua orang Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur. Mereka menjadi korban salah tangkap saat penggerebegan terduga teroris di sebuah warung di Tulungagung pada Senin, 22 Juli 2012. Mereka ikut dibekuk dan bahkan diumumkan sebagai bagian dari jaringan teroris Poso. Menghadapi tindakan

Densus 88 ini PP Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur segera bertindak dan mununtut dibebaskannya dua warga Muhammadiyah ini, karena memang mereka tidak terkait sama sekali dengan jaringan terorisme manapun. Setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, keduanyapun dibebaskan beberapa hari kemudian.

Belum lagi upaya penyiksaan yang disinyalir dilakukan lembaga ini dalam mengungkap dan menginterogasi para terduga teroris. Oleh karena itu kemudian, pada tanggal 1 Maret 2013 Muhammadiyah bersama dengan MUI dan ormas Islam yang lain mengusulkan pembubaran institusi yang konon dibiayai oleh AS ini serta melaporkan tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan Densus 88 ke pihak kepolisian. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin selanjutnya mempertanyakan kasus-kasus penembakan yang dilakukan para anggota TNI di beberapa tempat seperti di Papua dan sebagainya yang bisa dikategorikan tindakan terorisme namun tidak diusut secara tuntas. Ditambah lagi stigmatisasi yang dilakukan media yang selalu mengkaitkan aksi terorisme dengan agama Islam.

Muhammadiyah sepakat jika pada masa-masa sekarang, jihad lebih tepat jika diaplikasikan dengan tindakan nyata di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, kesehatan, hukum, dan sebagainya. Bentuk ekspresi *ukhuwah Islamiyah* yang ingin ditunjukkan umat Muslim Indonesia kepada saudara-saudaranya di belahan dunia lain seperti di Palestina, Afghanistan, dan sebagainya tidaklah harus ditunjukkan dengan langsung berjihad secara fisik pergi ke sana, karena menurut pengalaman justru akan menambah permasalahan baru di sana, seperti kendala bahasa, tempat tinggal bagi mujahid, juga persediaan logistik. Karena itu, bentuk solidaritas bisa ditunjukkan dengan mengirimkan obat-obatan dan tim medis seperti yang telah dilakukan Mer-C, dana, dan sebagainya. Bagi Muhammadiyah, umat Islam telah ditakdirkan sebagai *umatan wasathan,* umat pertengahan yang tidak hanya diperintahkan memikirkan kehidupan akhirat tetapi juga memikirkan kehidupan dunia, menjadi penunggang kuda di waktu siang, dan menjadi ahli ibadah di malam hari. Berjuang tidak hanya untuk keluarga tetapi juga untuk masyarakat, *syuhadâ'alannâs.* Bagi Muhammadiyah, semua ajaran Islam mengajarkan keseimbangan (*tawazun*) dan kemoderatan (*tawasuth*). Islam tidak mengajarkan mencari mati demi alasan syahid (*istisyhâd*). Tetapi jika situasi dan kondisi menghendaki umat untuk berjihad di medan perang, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk lari dari kewajiban jihad.

Akhirnya, sebagai organisasi yang bahkan usianya lebih tua dari negeri ini, Muhammadiyah diharapkan terus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia. Kinerja Muhammadiyah memang telah melampaui apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Akan tetapi aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar* tidak mengenal kata berhenti. Inilah prasayarat agar Muhamadiyah tetap eksis untuk bisa disebut sebagai sebuah gerakan.

Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat bagi upaya meluruskan makna jihad yang sebenarnya dalam perspektif Muhammadiyah. Semoga warga Muhammadiyah tidak terjebak dalam pandangan sempit kelompok tertentu yang hanya memaknai jihad sebagai tindakan kekerasan apalagi teror yang menghalalkan segala cara dan mencederai rasa kemanusiaan, apalagi dengan motif-motif kekuasaan seperti yang digaungkan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syiria*), dan sebagainya. Alhamdulillah, warga persyarikatan adalah warga yang bisa secara jernih membaca kondisi global sehingga bisa memilah dan memilih mana tindakan yang benar dan mendapat legitimasi dari agama dan persyarikatan. Semoga.

Daftar Pustaka:

A. Syafi'i Ma'arif. 2000. *Hubungan Muhammadiyah dan Negara: Tinjauan Teologis*, dalam *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*, Yogyakarta: UII Press

A.M. Suryanegara. 1998. *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia,* Bandung: Mizan

Amrozi bin Nurhasyim. 2009. *Senyum Terakhir Sang Mujahid,* Jakarta: Ar-Rahmah Media

Azyumardi Azra. 2000. *Muhammadiyah dan Negara: Tinjauan Teologis-Historis,* dalam *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban,* Yogyakarta: UII Press

H.A.R Sutan Mansur. 1982. *Jihad*, Jakarta: Pustaka Panjimas

Imam Samudra. 2004. *Aku Melawan Teroris,* Solo; Jazeera

Madjid Khadduri. 2006. *War and Peace ind The Law of Islam,* New Jersey: The John Hopkins University Press

Syarifuddin Jurdi. 2010. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ahmad Adaby Darban. 2005. *Kaum Santri Melawan Kolonial; Dari Hizbullah hingga Angkatan Perang Sabil (APS) di Yogyakarta,* makalah telah dipresentasikan dalam Forum Diskusi dan Pameran 60 tahun

Indonesia Merdeka dalam Lintasan Sejarah yang diselenggarakan Kemendikbudpar Deputi Bidang Sejarah & Purbakala, di Bandung, 11-12 Agustus 2005.

PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid. 2006. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah,* Jakarta: PSAP

PP Muhammadiyah. 2003. "Tanfidz Sidang Tanwir 2003: Rekomendasi Internal", dalam Berita Resmi Muhammadiyah (BRM), No.04/2003, Rajab 1424 H/September 2003

Anonim. 2015 *Fatwa Muhammadiyah Rokok Haram; Dalil dan Kontroversinya,* http://www.IndonesianChildren.com. Diakses pada tanggal 14 Mei 2015

Yunahar Ilyas, *Jihad Melawan Rokok*, PP Muhammadiyah

Anonim. 2015. *PBNU Tidak Sepakat Fatwa Haram Rokok Muhammadiyah.* http://nunline.com, Diakses pada tanggal 14 Mei 2015

Anonim. 2013. *Rezim Liberal Lahirkan UU Pro-Liberalisasi*, *Gatra* edisi 24-30 Oktober 2013.

Anonim. 2015 *Muhammadiyah Bertekad Lanjutkan Jihad Konstitusi,* www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 14 Mei 2015

Summary Report Perkembangan Pelaksanaan Jihad Konstitusi, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah.

JIHAD KONSTITUSI:
Masyarakat Sipil dan Perjuangan Menegakkan Kedaulatan Bangsa

Pramono U. Tanthowi

Setelah berakhirnya Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu, mulai muncul kesadaran di kalangan sebagian politisi kita bahwa banyak produk legislasi di Indonesia selama pasca reformasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 karena mengusung misi liberalisasi ekonomi. Pada saat membuka acara Orientasi Anggota DPR periode 2014-2019 dari Koalisi Merah Putih (26/9/2014), Aburizal Bakrie sebagai Ketua Presidium KMP menyatakan bahwa terdapat 122 Undang-Undang yang harus ditinjau kembali agar sesuai dengan demokrasi Pancasila. Di antaranya adalah UU Perbankan, UU Minerba, dan UU Telekomunikasi yang mengakibatkan runtuhnya kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Aburizal menyatakan bahwa merupakan tugas mulia dari KMP untuk mengubah semua UU yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tersebut (Rmol: 2014).

Terlepas dari motivasi politik apapun yang melatarinya, dan seolah-olah beberapa partai politik yang tergabung dalam KMP tidak turut bertanggung jawab dalam proses legislasi pada awal-awal era reformasi yang melahirkan berbagai UU tersebut, namun harus diakui bahwa kedaulatan bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya telah sejak lama tergadaikan pada kekuatan ekonomi asing. Atas nama "pasar bebas" dan "persaingan sehat", modal asing dan perusahaan multinasional tersebut telah sejak lama menjadi pemain utama dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk dibawa

ke luar negeri dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Akibatnya, kekayaan alam kita tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat, dan bangsa Indonesia mengalami apa yang sering disebut sebagai "kutukan sumber daya alam (*resource curse*)".

Jika sebagian kalangan politisi telah menyadari akibat-akibat negatif dari lahirnya sejumlah besar produk legislasi yang tidak pro pada kedaulatan bangsa (namun tidak juga segera memasukkan agenda tersebut dalam program legislasi nasional; sebaliknya malah mendahulukan rencana revisi beberapa UU politik yang bahkan belum sempat diterapkan), lalu peran apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah? Langkah-langkah politik-hukum apa harus dilakukan oleh masyarakat sipil untuk dapat berperan dalam mengembalikan kedaulatan bangsa di bidang ekonomi? Apa argumen moral-politik yang melandasi Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil berbasis agama untuk melakukan langkah politik-hukum tersebut?

Tulisan singkat ini akan mengulas mengenai upaya Muhammadiyah, sebagai bagian dari masyarakat sipil, dalam menegakkan kedaulatan bangsa di bidang ekonomi melalui uji materi (*judicial review*) sejumlah UU ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan difokuskan pada uji materi atas dua UU saja, yakni UU Migas dan UU Sumber Daya Air, meskipun Muhammadiyah telah berhasil menggugat beberapa UU lain.

Hukum dan Liberalisasi Ekonomi

Krisis ekonomi-politik yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 pada akhirnya berimbas ke Indonesia yang menyeret bangsa kita ke arah krisis multidimensional. Dibanding negara-negara Asia lain, Indonesia terkena dampak paling parah dari krisis tersebut. Akibatnya, Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu macan ekonomi Asia jatuh menjadi salah satu yang terpuruk (Hill: 2000). Karena tidak berdaya mengatasi sendiri krisis tersebut, pemerintah Indonesia, sebagaimana negara-negara Asia lain, kemudian berpaling ke IMF dan Bank Dunia untuk mendapatkan bantuan (Grenville: 2004; Robison dan Rosser: 1998).

Untuk mendapatkan pinjaman hutang guna melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang terjun bebas, pemerintah Indonesia menyetujui program reformasi ekonomi secara menyeluruh yang didesain oleh IMF untuk memulihkan ekonomi Indonesia dalam jangka watu tiga tahun. Dengan dalih untuk memulihkan ekonomi Indonesia, maka IMF dan Bank Dunia mengajukan beberapa agenda yang manjadi landasan bagi

reformasi ekonomi berorientasi pasar. Karena itu pemerintah dituntut untuk menerapkan kebijakan makroekonomi yang hati-hati berupa disiplin fiskal, deregulasi, desentralisasi, privatisasi, serta liberalisasi perdagangan, investasi, dan keuangan. Pada akhirnya, undangan masuk bagi IMF dan Bank Dunia inilah yang ternyata menjadi pintu masuk agenda-agenda kebijakan neo-liberal untuk mentransformasikan rezim politik dan ekonomi Indonesia (Robison dan Hewison: 2005).

Namun program reformasi ekonomi tidak lantas berhenti di situ. Agenda ekonomi neo-liberal tidak sekedar mensyaratkan deregulasi, tetapi juga diperlukan regulasi (pengaturan). Bahwa ekonomi pasar menganut paham "mengatur dirinya sendiri" (*self-regulating*), itu hanya ada dalam teori. Untuk berfungsi secara efektif, pasar ternyata memerlukan seperangkat regulasi (Hill, Park dan Saito: 2012, h. 18).

Relasi erat antara hukum dan pembangunan ekonomi bermula dari kebutuhan ekonomi pasar dan transaksi kapitalis akan prediktabilitas. Argumennya, penyebab utama krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia adalah ketiadaan akuntabilitas dan transparansi institusional, dan lebih umum lagi karena absennya *rule of law*. Sehingga obat paling manjur adalah mengadopsi praktik-praktik yang diasosiasikan dengan tradisi hukum (Woo: 2007: 8-9).

Kaitan antara hukum dan pembangunan ekonomi ini berlangsung secara bersamaan dengan munculnya ide (yang semakin diterima oleh Bank Dunia) bahwa terdapat hubungan yang terbukti secara empiris antara pembangunan ekonomi dan tradisi hukum. Argumen tersebut menyatakan bahwa hukum bukan hanya terkait dengan pertumbuhan, namun juga dengan tata kelola korporasi dan pasar keuangan (La Porta dkk: 1998, 1999).

Terdapat beberapa kajian tentang privatisasi (Guriev and Megginson 2007; Megginson 2005; Roland 2008) yang menjelaskan bagaimana divestasi aset menghasilkan keuntungan tidak optimal, dan bahkan membahayakan, jika dilakukan dalam kondisi aturan-aturan hukum yang lemah. Sehingga keberhasilan reformasi ekonomi pasar dikaitkan dengan kemampuan pemerintah untuk memperkuat kerangka secara menyeluruh tentang standar akuntansi, keterbukaan informasi, dan proteksi investasi, yang kesemuanya sangat penting bagi berfungsinya pasar modal yang terbuka dan liberal. Demikian juga, privatisasi dapat berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal jika dibarengi dengan upaya untuk melahirkan dan menegakkan aturan-aturan hukum yang didesain untuk mencegah

praktik-praktik oligopoli dan monopoli di sektor-sektor yang terprivatisasi (Zhang: 2011: 6-7).

Berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka muncul tekanan kepada pemerintah Indonesia paska reformasi untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali selama periode 1999-2002 (Horowitz: 2014). Amandemen tersebut diikuti dengan perubahan pada level UU dan kebijakan lainnya (Arizona: 2008). Dalam bidang sumber daya alam saja, terdapat 12 (dua belas) UU yang disusun pada periode paska Orde Baru, yaitu: (a) UU Kehutanan; (b) UU Perlindungan Varietas Tanaman; (c) UU Minyak dan Gas Bumi; (d) UU Ketenagalistrikan; (e) UU Panas Bumi; (f) UU Sumber Daya Air; (g) UU Perkebunan; (h) UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan; (i) UU Perikanan; (j) UU Penanaman Modal; (k) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (l) UU Energi. Belum lagi UU pada sektor keuangan, lalu lintas devisa, dan sebagainya.

Secara umum, berbagai UU yang lahir paska reformasi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, memiliki corak yang seragam, yakni membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi swasta dan asing, yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari negara. Dengan terbukanya sumber daya alam Indonesia pada ekonomi pasar, serta meningkatnya keterlibatan asing dan swasta dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia, maka bangsa dan negara secara praktis telah kehilangan kedaulatan (Cohen: 2012) dalam "menguasai" "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" yang seharusnya "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Banyak kelompok yang berupaya untuk meluruskan kembali kekeliruan paradigma ini melalui berbagai langkah akademis, politik, maupun hukum, namun tidak banyak yang berhasil. Dan salah satu yang berhasil adalah Muhammadiyah yang melakukan uji materi terhadap beberapa UU yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Bagian berikut akan menguraikan secara lebih detail mengenai upaya Muhammadiyah dalam meluruskan kiblat bangsa tersebut.

Muhammadiyah Uji Materi: Mencari Landasan Moral Organisatoris

Inisiatif Muhammadiyah untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam mulai muncul sejak Tanwir Muhammadiyah Lampung tahun 2009, ketika Muhammadiyah merumuskan

dan menetapkan konsep "Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan" (PP Muhammadiyah: 2009). Konsep ini dirumuskan oleh Muhammadiyah untuk diserahkan kepada (siapapun yang terpilih menjadi) Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilu 2009. Inisiatif ini lantas mendapat landasan hukum yang semakin kokoh karena menjadi salah satu program unggulan yang ditetapkan melalui keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 (PP Muhammadiyah: 2010), baik dalam "Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua" maupun "Program Muhammadiyah 2010-2015" (PP Muhammadiyah: 2010).

Sejak Tanwir 2009 tersebut, Muhammadiyah menyadari bahwa di balik berbagai kemajuan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan dan stabilitas indikator makro ekonomi, sesungguhnya masih jauh dari memadai dan tidak mencerminkan fakta-fakta ekonomi yang ada. Hal ini diakibatkan, salah satunya, karena paradigma ekonomi yang tidak sepenuhnya mengacu dan menganut paradigma perekonomian sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Orientasi pembangunan ekonomi di Indonesia, menurut Muhammadiyah, lebih menekankan pada aspek pertumbuhan, bertumpu pada investasi asing, utang luar negeri, dan konglomerasi. Sebagai akibatnya, pengelolaan sumber daya alam belum memberi manfaat optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Muhammadiyah mengusulkan revitalisasi visi dan karakter bangsa, yang dalam bidang ekonomi, diperlukan penguatan ekonomi nasional yang dicirikan oleh terciptanya struktur ekonomi yang adil, mandiri, berdaya saing, dan memihak kepada rakyat demi tercapainya kemakmuran bangsa. Revitalisasi ekonomi ini, menurut Muhammadiyah, mensyaratkan beberapa hal, yakni: (a) pengakuan akan pentingnya peran negara dalam mengatur alokasi sumber daya ekonomi, selain pasar dan masyarakat; (b) keberpihakan (*affirmatif action*) pemerintah guna mewujudkan struktur ekonomi yang lebih sehat dan kuat; dan (c) partisipasi yang luas dari masyarakat dalam keseluruhan proses ekonomi.

Selain beberapa agenda revitalisasi ekonomi yang lain, Muhammadiyah juga mengusulkan perlunya menguatkan sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945. Agenda tersebut dilakukan melalui penyusunan UU tentang demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Di samping itu perlu dilakukan revisi terhadap UU yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Ketiadaan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945, menurut Muhammadiyah,

merupakan penyebab utama penyimpangan sistem ekonomi nasional saat ini yang berdampak pada tidak terciptanya keadilan dan pemerataan.

Sebagai salah satu komponen bangsa, Muhammadiyah merasa turut bertanggung jawab atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Konstitusi, yakni terwujudnya: (a) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (b) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan (c) Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan inisiatif tersebut Muhammadiyah menggunakan dan mengaktualisasikan term "jihad" sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan permusuhan. Umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-muaradhah*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama.

Berdasarkan atas landasan-landasan moral-organisatoris di atas, maka kepengurusan PP Muhammadiyah periode 2010-2015 melakukan analisis terhadap berbagai UU yang ada, dan menemukan sekurang-kurangnya 115 UU yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Namun mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, maka PP Muhammadiyah memprioritaskan beberapa UU pokok yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan paling berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Beberapa UU prioritas tersebut antara lain: UU Minyak dan Gas, UU Sumber Daya Air, UU Mineral dan Batubara, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, serta UU Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Bagi Muhammadiyah, uji materi atas beberapa UU ini bukan untuk kepentingan sempit subyektifnya sendiri. Muhammadiyah dalam hal ini tidak bicara dalam konteks "apa yang baik buat Muhammadiyah". Karena memang tidak ada kepentingan langsung antara keberlangsungan organisasi Muhammadiyah dengan beberapa UU di atas. Namun Muhammadiyah

tampaknya ingin memperluas kepeduliannya pada persoalan-persoalan yang lebih bersifat publik yang berdampak pada persoalan kesejahteraan umum dan kedaulatan bangsa. Dalam hal ini Muhammadiyah telah melampaui pembicaraan soal "apa yang baik bagi Muhammadiyah," dan telah menuju pembicaraan mengenai, apa yang disebut Ackerman sebagai, "apa yang baik bagi bangsa" (Ackerman: 1999).

Mengenai bagaimana proses Muhammadiyah dalam melakukan uji materi UU Migas dan UU Sumber Daya Air akan diuraikan di bagian berikut.

Uji Materi UU Migas

Pada awal 2012 pemerintah berencana untuk mencabut subsidi BBM serta menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500. Alasannya karena kenaikan harga minyak dunia yang melebihi asumsi pada APBN 2012. Kebijakan ini mengundang aksi protes massa di berbagai daerah, hingga akhirnya ditunda pengesahannya melalui proses politik yang panjang di DPR.

Rencana pencabutan subsidi BBM itu tentu kembali mengingatkan masyarakat Indonesia mengenai berbagai problem dalam pengelolaan migas di Indonesia, terutama kebijakan di sektor produksi. Melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak terbesar dibanding negara-negara Asia Tenggara lain, maka logika kenaikan harga BBM karena kenaikan harga minyak dunia justru tidak masuk akal, sebab seharusnya Indonesia menikmati keuntungan sebagai negara penghasil minyak.

Oleh sebab itu, sejak awal tahun 2012 PP Muhammadiyah mulai mewacanakan untuk mengajukan uji materi UU Migas ke MK. Beberapa kali rapat dilakukan secara maraton, bukan saja melibatkan beberapa Majelis dan Lembaga di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga mengundang para pakar ekonomi-politik serta pakar hukum tata negara untuk membicarakan peluang mengajukan uji materi ini. Beberapa hal yang diperbincangkan secara matang antara lain: *legal standing* pemohon, kerugian konstitusional pemohon, pokok permohonan, dan petitum permohonan.

Dalam proses pengajuan uji materi ini, PP Muhammadiyah juga bergerak secara taktis dengan melibatkan beberapa ormas Islam lain, tokoh agama, intelektual, dan beberapa anggota DPD RI sebagai Pemohon. Hal ini penting untuk memperlihatkan kepada Hakim MK maupun kepada publik bahwa upaya untuk meluruskan kiblat bangsa dalam pengelolaan migas ini bukan hanya dilakukan Muhammadiyah, tetapi oleh banyak organisasi dan tokoh yang mewakili kepentingan masyarakat yang beragam. Pada

akhirnya, permohonan uji materi ini diajukan pada 17 April 2012 dengan Pemohon berjumlah 42 pihak, terdiri dari 10 pemohon badan hukum dan 32 perorangan. Bertindak sebagai kuasa hukum adalah beberapa advokat yang tergabung dalam Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Untuk memperkuat argumen dalam permohonan ini, Muhammadiyah menyatakan dalam Pokok Permohonan bahwa: UU Migas sejak awal pembentukannya menuai kontroversi, dikarenakan tidak dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal pembentukan hukum dalam perspektif keindonesiaan adalah penjabaran Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu suatu Undang-Undang tidak boleh tidak harus dijiwai Pancasila.

Menurut Muhammadiyah, pembentukan UU Migas adalah hasil desakan internasional untuk mereformasi sektor energi khususnya Migas, dan dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia. Sehingga monopoli pengelolaan migas melalui BUMN (Pertamina) yang pada saat berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya UU Migas.

Dengan demikian, kepentingan internasional yang menyusup dalam proses penyusunan UU Migas tersebut menjadikan pembentukan UU Migas (meskipun telah melalui prosedur formal yang benar) menjadi cacat ketika niat pembentukan UU Migas adalah untuk menciderai amanat Pasal 33 UUD 1945. Sehingga penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak hanyalah menjadi sebuah ilusi konstitusional semata.

Hal ini dibuktikan oleh fakta di lapangan, bahwa Pertamina sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam pengelolaan migas hanya menguasai 12,2% dari 275 wilayah pertambangan Migas. Sementara itu, total pengelolaan migas Pertamina juga hanya mencapai kurang dari 20%. Hal ini memperlihatkan bahwa kedaulatan negara Indonesia, yang diwakili oleh Pertamina, telah dilucuti oleh BP Migas dan hanya menjadi 'pemain' semata. Ia harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang berinvestasi di wilayah kerja Migas Indonesia. Muhammadiyah berkesimpulan bahwa UU Migas telah mendegradasikan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan telah "mempermainkan" kedaulatan hukum sehingga menjadikan suatu UU yang tidak adil terhadap bangsa Indonesia sendiri.

Menurut Muhammadiyah, negara seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi Indonesia. Namun ternyata harus tersandera

dan terdikte oleh tamu asing yang seharusnya patuh dengan aturan tuan rumah. Kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dengan korporasi-korporasi internasional tak ubahnya seperti membentuk konstitusi di atas UUD 1945 yang merupakan konstitusi bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Untuk memperkuat Pokok Permohonan ini, Muhammadiyah mengajukan beberapa ahli yang diminta memberikan keterangan di muka Mahkamah. Mereka terdiri dari ahli ekonomi-politik, hukum tata negara, dan mantan menteri pada era pembentukan UU Migas tersebut, yakni: Dr. Kurtubi, Dr. Ichsanudin Noorsy, Kwik Kian Gie, Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, dan Rizal Ramli.

Setelah melalui proses persidangan yang memakan waktu kurang lebih 6 bulan, akhirnya MK mengambil keputusan pada tanggal 13 November 2012 (MK: 2012), yang pada intinya: (a) mengabulkan sebagian besar pokok permohonan Muhammadiyah; dan (b) membubarkan Badan Pelaksana (BP) Migas yang sebelumnya dibentuk oleh Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini MK beralasan bahwa, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara telah kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya MK menyatakan bahwa fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian ESDM, sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut.

Dikabulkannya permohonan uji materi atas UU Migas oleh Muhammadiyah ini cukup membuat tercengang banyak pihak, terutama disebabkan karena berakibat pada dibubarkannya BP Migas, yang selama ini memegang kekuasaan sangat besar dalam pengelolaan Migas, dan bahkan mengebiri kewenangan negara. Selain itu, banyak pihak tidak menyangka bahwa uji materi ini akan dikabulkan oleh MK. Karena UU Migas ini sebelumnya telah mengalami 2 kali uji materi, sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2005.

Dalam amar putusan uji formil maupun materiil perkara Nomor 002/PUU-I/2003, MK menyatakan menolak permohonan para Pemohon dalam uji formil. Sedangkan dalam putusan Nomor 20/PUU-V/2005, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinyatakan tidak memiliki *legal standing*.

Uji Materi UU Sumber Daya Air

Tidak dapat dipungkiri bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Bahkan, kebutuhan manusia terhadap air terus-menerus akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ragam kebutuhan manusia terhadap air dan juga karena meningkatnya jumlah populasi bumi. Di sisi lain, air yang tersedia di alam ini berpotensi mengalami penurunan volumenya, atau paling tidak jumlahnya tetap.

Hal ini tentu saja mengakibatkan ancaman kelangkaan air, yang berimplikasi pada semakin tingginya nilai ekonomi air. Tidak ayal, proses pengelolaan sumber daya air menjadi isu politik-ekonomi-hukum yang semakin signifikan, karena muncul pertentangan orientasi antara dua kutub: apakah air merupakan barang ekonomi atau hak sosial-ekonomi.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka pada tanggal 23 September 2013 PP Muhammadiyah kembali mengajukan permohonan uji materi atas UU Sumber Daya Air ke MK. Sebagai Pemohon, PP Muhammadiyah juga kembali melibatkan beberapa ormas keagamaan, tokoh agama, intelektual, dan anggota DPD RI, sehingga secara resmi permohonan ini diajukan 11 Pemohon, 4 organisaasi, 7 perorangan. Dan kembali bertindak sebagai kuasa hukum adalah beberapa advokat yang tergabung dalam Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Sebagai alasan dan pokok permohonan, Muhammadiyah menyatakan sebagai berikut. *Pertama,* meskipun UU Sumber Daya Air pernah diuji materi oleh sejumlah pihak dan MK telah memutuskan untuk menolak permohonan tersebut, dan menyatakan bahwa UU tersebut konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dengan putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, namun Muhammadiyah tetap mengajukan kembali permohonan uji materi atas UU ini. Muhammadiyah berpendapat bahwa penafsiran atas UU tersebut telah diselewengkan sehingga seolah-olah memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas yang telah ditetapkan MK.

Faktanya, pengelolaan sumber daya air telah dilakukan secara privatisasi yang melahirkan cara berfikir yang berorientasi keuntungan semaksimal mungkin bagi pemegang saham. Padahal UU ini mengamanatkan bahwa pengelolaan air dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN/BUMD. Alasan klise pemerintah yang tidak memiliki biaya untuk mengelola sumber daya air hanyalah semata-mata alasan untuk menghindari tanggung jawab pengelolaan air yang adil bagi warga negara, karena pengelolaan air tidak

serumit pengelolaan migas yang memang memerlukan biaya tinggi dan penguasaan teknologi tinggi.

Kedua, UU Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penguasaan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Ketiga*, UU Sumber Daya Air mengandung muatan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial. *Keempat*, UU Sumber Daya Air juga mengandung potensi konflik horisontal antar wilayah sungai, khususnya antar wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif.

Kelima, UU Sumber Daya Air menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air bagi warga negara. *Keenam*, UU Sumber Daya Air mengandung karakter diskriminatif karena melanggar prinsip pokok dalam penegakan hukum yakni pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini disebabkan karena UU Sumber Daya Air hanya membolehkan organisasi-organisasi yang memenuhi syarat tertentu untuk mengajukan gugatan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya.

Untuk memperkuat argumen atas Pokok Permohonan, Muhammadiyah juga menghadirkan 7 orang ahli yang dimintai keterangan di muka sidang, yakni: Prof. Dr. Suteki, SH. MH., Prof. Dr. Absori, SH. MH., Dr. Dea Erwin Ramedhan, Dr. Aidul Fitriciada Azhary, SH. MH., Dr. Hamid Chalid, SH. LLM., Dr. Irman Putra Sidin, dan Salamudin (Daeng).

Setelah melalui serangkaian sidang dan mengalami penundaan selama 5 bulan sejak diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim, akhirnya MK membacakan putusan pada tanggal 18 Februari 2015 yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (MK: 2013). Dengan tidak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2004, maka MK juga menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berlaku kembali.

Sebagaimana UU Migas, beberapa pihak sebelumnya juga telah melakukan uji materi terhadap UU Sumber Daya Air ini, karena sejak awal UU ini menyulut kontroversi dalam masyarakat. Terdapat sekitar 5 permohonan di MK untuk melakukan pengujian terhadap UU ini, yakni PUU Nomor 58/PUU-II/2004 yang diajukan oleh YLBHI dengan beberapa ormas lainnya; PUU Nomor 59/PUU-II/2004 yang diajukan

oleh Walhi dan beberapa ormas lain; PUU Nomor 60/PUU-II/2004 oleh Zumrotun, dkk. dari kelompok petani; PUU Nomor 63/PUU-II/2004 oleh Suta Widhya dari masyarakat; dan PUU Nomor 08/PUU-III/2005 oleh Suyanto, dkk. sebanyak 2063 orang pemohon.

Atas beberapa permohonan tersebut, MK memutuskan menolak permohonan para pemohon, dan MK menyatakan bahwa UU Sumber Daya Air tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK beralasan bahwa peran swasta masih dapat dilakukan di dalam pengelolaan sumber daya air, selama peran negara masih ditunjukkan dengan (1) merumuskan kebijaksanaan (beleid), (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) dan hal ini ditunjukkan di dalam pasal-pasal UU Nomor 7 Tahun 2004.

Jika permohonan para pemohon terdahulu ditolak oleh MK, lalu mengapa permohonan Muhammadiyah kali ini dikabulkan? MK beralasan bahwa dasar pengujian konstitusionalitas antara permohonan Muhammadiyah dan permohonan para pemohon sebelumnya adalah sama. Akan tetapi dalam putusan sebelumnya, yang juga dijadikan dalil dalam permohonan Muhammadiyah, MK mempertimbangkan, "...apabila UU a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap UU a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*)." Dan ternyata, dalam pelaksanaannya (paska putusan tahun 2004 dan 2005 di atas), MK melihat bahwa pemerintah telah menafsirkan secara berbeda dari pertimbangan MK. Oleh karena itu MK memutuskan bahwa permohonan Muhammadiyah dapat diterima.

Ekonomi Konstitusional

Putusan MK atas permohonan uji materi yang dilakukan Muhammadiyah terhadap beberapa UU di atas memunculkan kembali diskursus lama mengenai bagaimana ekonomi bangsa ini dikelola: bagaimana peran negara? Seberapa besar peran pasar dan sektor swasta? Dan siapa yang paling berhak untuk menikmati hasil-hasil ekonomi tersebut?

Para bapak bangsa Indonesia sejak lama telah mengatur bagaimana perekonomian Indonesia diselenggarakan, dan hal itu dituangkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ".

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan tersebut, UUD 1945 juga menetapkan bagaimana bangsa Indonesia dapat mencapainya melalui pembangunan ekonomi. Rumusan Pasal 33 UUD 1945 telah mengatur secara jelas mengenai perekonomian negara yang akan dibangun, yakni: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 ini merupakan amanat konstitusional di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini tidak saja memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan suatu keyakinan yang harus diperjuangkan secara konsisten oleh negara. Amanat konstitusional tersebut jelas, bahwa kebijakan ekonomi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sehingga para penentu kebijakan ekonomi tidak boleh membuat kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 tersebut (Asshiddiqie: 2010).

Meskipun amanat konstitusi di atas telah sangat jelas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mudah bagi negara untuk konsisten dalam menjalankan amanat tersebut. Hal itu disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, pemerintah sejak era Sukarno hingga sekarang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan: tanggung jawab negara yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya berakibat membengkaknya anggaran belanja negara. *Kedua*, dinamika politik-ekonomi global telah memberikan tekanan yang sangat besar bagi negara-negara yang masih mencoba menerapkan sistem tersebut. Tekanan global tersebut mengarahkan negara-negara di dunia untuk menganut sistem politik tunggal, yakni demokrasi liberal (Fukuyama: 1992), dan menganut sistem ekonomi pasar. Akibatnya, sejak lama pemerintah Indonesia telah

memberlakukan proses liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi (Robison: 1986; Mallarangeng: 2002; Robison and Hadiz: 2004).

Oleh karena itu, menarik untuk menguraikan pokok-pokok pikiran yang menjadi argumen bagi MK dalam mengabulkan dua uji materi di atas. Karena pokok-pokok pikiran tersebut kembali menegaskan mengenai konsep ekonomi konstitusional dan demokrasi ekonomi.

Menurut MK, ketiga ayat pertama Pasal 33 UUD 1945 merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan kata lain, sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai dasar negara yang diimplementasikan dalam UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat adil dan makmur.

Dalam perspektif demikian, menurut MK, maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dengan demikian maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam rangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Mengenai peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, MK telah memberi makna mengenai "penguasaan negara" dalam Pasal 33 UUD 1945, dengan menyatakan bahwa, "...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik,

dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama."

MK juga menyatakan bahwa makna "dikuasai oleh negara" tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam konstitusi. Oleh karena itu, MK mempertimbangkan bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya".

Rakyat secara kolektif itu, menurut MK, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk: mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kelima bentuk penguasaan negara tersebut ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat

diartikan bahwa negara tidak menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Karena fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945.

Menurut MK, Pasal 33 UUD 1945 menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengertian "dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Bagi MK, anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut MK, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, menurut MK, kelima peranan negara/pemerintah di atas, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut MK, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang

secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui BUMN.

Peran Swasta

Mengenai peran swasta dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, MK dengan merujuk peda Hatta, menyepakati bahwa cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan modal pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri.

Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat, bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang. Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi Negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam.

Mengenai keterlibatan swasta tersebut, menurut MK hubungan antara negara dengan swasta tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam. Menurut MK, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS) antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana berlaku selama ini adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Untuk menghindari hubungan yang demikian, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola sumber daya alam di wilayah hukum pertambangan Indonesia atau di wilayah kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Menurut MK pengaturan ini bersifat umum yang apabila tidak dikaitkan dengan BP Migas selaku Pemerintah adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

Keberhasilan jihad konstitusi Muhammadiyah ini telah memberikan beberapa pelajaran penting terkait dengan pola relasi antara negara dan masyarakat, tentang MK dan pemerintah, dan tentang MK dan parlemen. Uraian mengenai hal-hal tersebut akan diletakkan pada bagian berikut.

Jihad Konstitusi dan Politik

Keberhasilan uji materi yang dilakukan Muhammadiyah atas dua UU ini memberikan pelajaran penting, setidak-tidaknya pada dua hal, yakni: masyarakat sipil dapat melawan kesewenang-wenangan pemerintah eksekutif maupun legislatif dengan menggunakan kewenangan MK untuk melakukan uji materi atas UU yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Dua hal ini akan diuraikan lebih detail di bawah ini.

Membatasi kekuasaan eksekutif

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai corak pemerintahan yang secara umum memiliki karakter yang sama, yakni dominasi pemerintah eksekutif atas masyarakat tanpa penyeimbang yang sepadan dari parlemen maupun kekuasaan yudikatif. Hal itu telah berlangsung sejak era Sukarno hingga akhir Orde Baru (Feith: 1962; Mas'oed: 1989). Dalam posisi dominatif demikian, pemerintah eksekutif tersebut dapat melancarkan kontrol otoriter secara luas terhadap seluruh institusi politik, sosial, kebudayaan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Dalam hal ini kewenangan *judicial review* yang dimiliki MK memiliki peran untuk membatasi kesewenang-wenangan eksekutif yang melakukan dua tindakan: eksesif dan deviasi (Rawlings: 1986). Membatasi tindakan eksesif pemerintah eksekutif dapat berarti dimana MK menjalankan jurisdiksinya untuk mencegah pemerintah melaksanakan kewenangan-kewenangan yang secara hukum tidak dimilikinya. Sedangkan "deviasi tindakan pemerintah" dapat berarti penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, yang pada dasarnya

menjadi kepedulian utama dari sistem hukum administrasi yang efektif.

Putusan MK yang membatalkan UU Sumber Daya Air dapat menjadi contoh yang jelas bagaimana MK menjalankan kewenangannya dalam menghentikan tindakan pemerintah yang melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air. Pada tahun 2004 dan 2005 MK memang pernah memutuskan untuk menolak permohonan uji materi atas UU Sumber Daya Air. MK menyatakan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang pengelolaan air sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Karena itu MK menetapkan beberapa pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Pembatasan tersebut antara lain: (1) setiap penguasaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; (2) negara harus memenuhi hak rakyat atas air, karena akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; (3) sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak; dan (4) prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Dalam pelaksanaan dari Putusan MK ini, pemerintah ternyata telah mengeluarkan enam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU SDA. Dan MK memandang bahwa enam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air di atas. Padahal, MK telah menyatakan bahwa "penguasaan negara" harus dimaknai bahwa rakyat secara kolektif telah memberikan mandat kepada negara untuk: mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika pada pelaksanaan UU SDA ini pemerintah tidak menjalankan fungsi "penguasaan" atas sumber daya alam, sehingga tidak tercapai "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", maka wajar jika MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan Muhammadiyah untuk membatalkan UU SDA.

Putusan MK ini memberi contoh bahwa kebutuhan akan uji materi muncul dari keadaan yang umum terjadi dalam masyarakat industri maju, yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap perilaku pemerintah dan birokrasi yang menyeleweng. Warga negara membutuhkan proteksi dari

segala bentuk bahaya yang mungkin muncul dari penyelewengan kekuasaan, dan hal ini membutuhkan pemberian kewenangan kepada lembaga tertentu yang tidak melalui proses pemilu. Karena warga negara biasanya takut terhadap kekuasaan pemerintah yang hegemonik (Ginsburg: 2008, h. 89). Dalam hal ini, jika ada warga nagara diperlakukan secara tidak layak oleh tindakan atau kebijakan pemerintah, maka MK akan berperan untuk memberikan proteksi melalui prosedur-prosedur hukum (Rose-Ackerman: 1992, h. 191).

Membatasi kekuasaan legislatif

Sejak reformasi 1998, memang telah banyak dilakukan perbaikan atas sistem politik dan tata kenegaraan di Indonesia. Salah satu yang paling penting adalah pembatasan kekuasaan eksekutif, sebagai respon atas dominasi rezim-rezim sebelumnya, dan memulihkan fungsi-fungsi lembaga legislatif. Dalam banyak hal, fungsi lembaga legislatif saat ini telah jauh lebih besar dibanding era sebelumnya, meskipun belum secara optimal dapat dijalankan. Dan salah satu fungsi tersebut adalah dalam bidang legislasi.

Secara konstitusional, UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang legislasi berada di tangan DPR, namun dalam pembahasannya dilakukan secara bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (Asshiddiqie: 2006, h. 136-139). Karena dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, maka dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut DPR secara legal mewakili rakyat dalam mengagregasikan kepentingan-kepentingannya. Sehingga DPR seharusnya memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat (karena mereka dipilih oleh rakyat) dalam bentuk produk-produk legislasi.

Namun sayangnya, tidak semua produk UU yang dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat sesuai dengan aspirasi rakyat. Karena para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu belum tentu secara nyata mencerminkan keinginan mayoritas rakyat (Eule: 1990; Hilbink: 2008). Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara representasi substantif (ide, gagasan) dengan jenis representasi deskriptif (aspirasi dan kepentingan suatu kelompok masyarakat diwakili oleh seorang atau lebih dari kelompok tersebut). Di atas kertas, representasi secara substansial seharusnya berbanding lurus dengan representasi deskriptif. Tetapi faktanya, masalah keterwakilan politik tidak sederhana (Surbakti, dkk: 2011, h. 14-15).

UU Migas menjadi contoh dimana para wakil rakyat di DPR, dalam

melaksanakan fungsi penyusunan UU, tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat, namun lebih mengakomodasi kepentingan swasta dan asing. Kekeliruan konsepsional yang dianut oleh UU Migas dalam memaknai "dikuasai oleh negara", telah diluruskan kembali dengan uji materi ini. Konsep "dikuasai oleh negara", menurut MK, memiliki makna lebih tinggi dan lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, yang pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasannya dapat diserahkan kepada pihak manapun dengan sistem kontrak karya.

Dengan uji materi ini, MK telah menyadarkan kita semua bahwa para wakil rakyat belum tentu sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat, meskipun mereka duduk di lembaga perwakilan melalui proses pemilu (Miller dkk: 1999; Przeworski, Stokes, Manin: 1999; Strom, Mueller, Bergman: 2003). Banyak studi yang berulang kali menjelaskan bahwa tidak semua suara dihitung (karena rusak atau kesengajaan), tidak semua suara dikonversi menjadi kursi (karena tidak mencapai satu harga kursi atau mencapai ambang batas parlemen), dan bahkan banyak wakil rakyat yang bertindak untuk menghambat perkembangan demokrasi (Frymer: 2006).

Uji materi ini seharusnya juga menyadarkan para wakil rakyat bahwa UU yang dihasilkan oleh mayoritas wakil-wakil rakyat belum tentu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dalam menyusun sebuah UU, para wakil rakyat harus menyerap seluas-luasnya aspirasi masyarakat, sehingga produk legislasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas (Van Hoecke: 2001; Waldron: 1998), karena betul-betul mencerminkan aspirasi mayoritas rakyat.

Oleh karena itu para wakil rakyat dalam menyusun sebuah produk UU seharusnya tidak mengabaikan aspirasi rakyat sebagai pemilik mandat politik. Jika hal tersebut terjadi, maka para wakil rakyat perlu menyadari bahwa MK, yang terbebas dari politik partisan, memiliki kewenangan untuk meluruskannya (Hirschl: 2009). Kewenangan MK ini tidak dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebaliknya, MK berfungsi sebagai *checks and balances* bagi kekuasaan mayoritas, yang mungkin menyeleweng (Ginsburg: 2003, h. 21). Lebih dari itu, pembatalan UU, sebagai produk wakil rakyat, yang dilakukan oleh MK dapat dikatakan merupakan upaya konstitusional atas nama rakyat untuk menghalangi keinginan para wakil rakyat yang bertentangan dengan aspirasi rakyat (Tremblay: 2005, h. 621).

Penutup dan Agenda Ke Depan

Proyek jihad konstitusi Muhammadiyah tidak diragukan lagi merupakan inisiatif dari sekelompok masyarakat sipil yang sadar akan tanggung jawabnya untuk bukan saja memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh berbagai UU yang tidak pro-rakyat, tetapi juga memperjuangkan kedaulatan bangsanya dalam mengelola kekayaan alamnya. Namun bukan berarti bahwa jihad konstitusi saja telah cukup. Beberapa agenda berikutnya perlu juga dilakukan, sebagai tindak lanjut dari inisiatif mulia ini. Beberapa agenda tersebut antara lain:

Pertama, Muhammadiyah ke depan perlu bersikap proaktif memberikan masukan selama proses legislasi berlangsung di DPR. Lahirnya beberapa UU yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 selama ini disebabkan karena selain para legislator yang kurang menyerap aspirasi masyarakat, juga karena kelompok-kelompok masyarakat sipil kurang memiliki perhatian dan kurang memberikan masukan selama proses pembahasan UU di parlemen.

Kedua, Muhammadiyah perlu memperluas fokus jihad konstitusi di luar UU yang mempromosikan liberalisme ekonomi, namun juga UU lain yang berpotensi merugikan hak-hak sipil lain. Selama ini Muhammadiyah, sebagaimana kelompok masyarakat sipil lain, hanya fokus pada UU yang berkaitan langsung dengan *core business*-nya saja, yakni keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Muhammadiyah perlu mempergunakan bobot moral dan politiknya untuk lebih peduli pada persoalan-persoalan kebangsaan dan kemanusiaan secara umum, sehingga kehadiran Muhammadiyah lebih terasa memberi manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ketiga, sebagai kelanjutan dari upaya uji materi beberapa UU yang telah berhasil, Muhammadiyah ke depan perlu menindaklanjutinya dengan menyediakan alternatif *draft* RUU (*counter legal draft*) yang lebih mengakomodasi kepentingan nasional dan berpihak pada kepentingan ummat. Hal ini penting agar dibatalkannya sebuah UU tidak lantas hanya kembali ke UU lama (sebelumnya), atau dibubarkannya sebuah lembaga negara tidak lantas hanya diganti dengan lembaga sejenis yang pada dasarnya sama saja. Muhammadiyah perlu mempertimbangkan secara serius untuk menawarkan konsep kepada parlemen, dan bahkan beradu argumen dalam proses legislasi atas berbagai UU yang telah dibatalkan.

Keempat, Muhammadiyah ke depan perlu mendorong PWM dan PDM

untuk melakukan uji materi atas beberapa regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Karena jika dilakukan penelitian lebih mendalam akan ditemukan banyak sekali Perda-Perda yang sangat eksploitatif, eksesif, dan memiliki karakter yang sama dengan beberapa UU di tingkat nasional yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Sehingga gerakan "jihad konstitusi" tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, namun juga berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif di seluruh wilayah Indonesia. *Wallahu a'lam.*

Daftar Pustaka

Ackerman, Bruce. 1999.. "Constitutional Economics-Constitutional Politics," *Constitutional Political Economy*, Vol. 10, 1999.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

------------. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konpress

Arizona, Yance. 2008. "*Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*," Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia.

Cohen, Jean L.. 1990. *Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism*, (New York: Cambridge University Press, 2012).

Eule, Julian N. 1990. "Judicial Review of Direct Democracy," *The Yale Law Journal*, Vol. 99, No. 7, May 1990.

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press

Frymer, Paul. 2006. "Distinguishing Formal from Institutional Democracy," *Maryland Law Review*, Vol. 65, 2006.

Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press

Ginsburg, Tom. 2003. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, (New York: Cambridge University Press

------------. 2008. "*The Global Spread of Constitutional Review," dalam Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, dan Gregory A. Caldeira (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics.* New York: Oxford University Press

Guriev, Sergei, dan William L. Megginson. 2007. *Privatisation: What have we learned?', dalam François Bourguignon dan Boris Pleskovic (eds.), Beyond Transition,* (Washington DC: World Bank

Hilbink, Lisa. 2008. "*Assessing The New Constitutionalism,*" *Comparative Politics*, Vol. 40, No. 2, January 2008.

Hill, Hal. 2000. *Indonesia: The Strange and Sudden Death of a Tiger Economy.* Oxford Development Studies, Vol. 28, No. 2, 2000.

Hill, Richard Child, Bae-Gyoon Park, dan Asato Saito. 2012. *Introduction: Locating Neoliberalism in East Asia," dalam Bae-Gyoon Park, Richard Child Hill, dan Asato Saito, Locating Neoliberalism in East Asia: Neoliberalizing Spaces in Developmental States.* West Sussex: Wiley-Blackwell

Hirschl, Ran. 2009. *The Realist Turn in Comparative Constitutional Politics.* Political Research Quarterly, Vol. 62, No. 4, 2009.

Horowitz, Donald L. 2014. *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar

La Porta, Raphael, et al. 1997. *Legal Determinants of External Finance.* Journal of Finance, Vol. 52, No. 3, 1997.

La Porta, et al. 1998. *Law and Finance.* Journal of Political Economy, Vol. 106, No. 6, 1998.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.

Mahkamah Konstitusi, putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 008/PUU-III/2005.

Mallarangeng, Rizal. 2002. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, Jakarta: KPG

Mas'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES

Megginson, William L. 2005. *The Financial Economics of Privatisation.* Oxford: Oxford University Press,

Miller, Warren, et al. 1999. *Policy Representation in Western Democracies.* New York: Oxford University Press

PP Muhammadiyah. 2009. *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan*. Yogyakarta

PP Muhammadiyah. 2010. *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta

Przeworski, et al. 1999. *Democracy, Accountability, and Representation*. New York: Cambridge University Press

RMOL. Didownload dari http://politik.rmol.co/read/2014/09/26/173648/Ical:-Tugas-KMP-Merevisi-122-UU-yang-Tidak-Sesuai-Mukadimah-UUD-45- Senin, 18 Mei 2015, Pukul 14.30 WIB.

Robison, Richard. 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sidney: Allen & Unwin

Robison, Richard dan Andrew Rosser. 1998. *Contesting Reform: Indonesia's New Order and the IMF*. World Development, Vol. 26, No. 8, 1998.

Robison, Richard dan Kevin Hewison. 2005. "*Introduction: East Asia and the Trials of Neo-Liberalism,*" The Journal of Development, Vol. 41, No. 2, February 2005.

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. New York: RoutledgeCurzon

Roland, Gérard (ed.). 2008. *Privatisation: Successes and Failures*, New York: Columbia University Press

Rose-Ackerman, Susan, 1992. *Judicial Review and the Power of the Purse*, International Review of Law and Economics, Vol. 12, 1992.

Stephen Grenville. 2004. *The IMF and The Indonesia Crisis*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 40, No. 1, 2004.

Strom, Kaare, et al. 2003. *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies*. New York: Oxford University Press

Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan

Tremblay, Luc B.. 2005. *The Legitimacy of Judicial Review: The Limits of Dialogue Between Courts and Legislatures,*" I-CON, Vol. 3, No. 4, 2005.

Van Hoecke, Mark. 2001. *Judicial Review and Deliberative Democracy: A Circular Model of Law Creation and Legitimation*. Ratio Juris, Vol. 14, No. 4, December 2001.

Waldron, Jeremy. 1998. *Judicial Review and The Condition of Democracy*.

The Journal of Political Philosophy, Vol. 6, No. 4, 1998.
Woo, Meredith Jung-En. 2007. *Neoliberalism and Institutional Reform in East Asia: A Comparative Study*. New York: Palgrave Macmillan
Zhang, Xiaoke. 2011. *The Political Economy of Capital Market Refoms in Southeast Asia*. New York: Palgrave MacMillan

TEOLOGI SOSIAL AHMAD DAHLAN: Dakwah dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Sirajjudin Abdul Wahab

Gerakan pembaruan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan upaya mengembalikan kembali pemahaman umat muslim atas ajaran Islam dengan menggunakan ukuran kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman. Karena pada dasarnya gerakan pembaruan selalu menekankan konteks yang sedang dihadapi serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada, baik yang sifatnya domestik keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan.

Gerakan pembaruan ini terjadi karena didasarkan pada satu asumsi bahwa Islam merupakan agama yang memiliki semangat pembaruan yang tinggi. Semangat ini juga memiliki landasan yang tegas yang bersumber pada beberapa isyarat yang terdapat dalam sumber Islam itu sendiri, yaitu al-Qur`an dan Hadits. Aktualisasi nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits tersebut dalam wilayah kehidupan umat manusia dilakukan dengan tetap memelihara keutuhan dan kemurnian ajaran Islam itu sendiri.

Mengutip salah satu ayat yang terkandung di dalam kitab suci al-Qur`an bahwa tidaklah semata-mata Islam hadir di muka bumi ini terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, dimana pun dan kapan pun (*wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lil `âlamîn*). Pernyataan itulah yang menjadi landasan dasar bahwa sesungguhnya keberadaan Islam harus berkesesuaian dengan fitrah asalnya, yaitu rahmat bagi semesta alam.

Islam bukanlah agama yang lebih mengutamakan ibadah ritual semata yang bersifat individual (*habl min Allah*), akan tetapi Islam pun ikut serta dalam mengatur tatanan masyarakat (*habl min al-nâs*) supaya mengarah

kepada keteraturan sosial dan keadilan ekonomi.

Zakat misalnya, merupakan salah satu bentuk ibadah yang bersifat sosial. Isyarat perintah zakat di dalam Al-Qur`an selalu disandingkan dengan perintah shalat. Hal tersebut, tampak jelas bahwa mendirikan shalat, dan membayar zakat adalah ibadah yang memiliki kesatuan yang kuat dan *integrated*, tidak bisa dilepaskan begitu saja antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, inti pesan-pesan ajaran Islam memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kemanusiaan atau sosial. Dalam konteks perintah menunaikan zakat, jangan sampai niat ibadah zakat tersebut hanya menjadi ritus yang kosong belaka, yaitu mempunyai aspek kesucian tetapi tak punya efek kepada perbaikan masyarakat.

Islam adalah agama dinamis, yang selalu merespon setiap perubahan yang terjadi dalam sistem kehidupan ini. Mengutip salah satu pemikir Islam ternama, Muhammad Iqbal (1877) menyatakan "sebagai sebuah pergerakan kultural, Islam menolak pandangan lama yang statis tentang alam semesta, dan memberikan sebuah pandangan yang dinamis." Atas dasar itulah, Ahmad Dahlan (1868-1923) mendirikan organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang bernama Muhammadiyah pada tahun 1912.

Muhammadiyah sampai saat ini masih tetap eksis dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski usianya sudah lebih dari satu abad, namun keberadaannya masih tetap kokoh di tengan situasi kebangsaan yang memprihatinkan. Salah satu faktor mengapa Muhammadiyah cepat berkembang dan bertahan di Indonesia tak lepas dari pribadi pendirinya, yaitu Ahmad Dahlan yang menjadi panutan.

Ahmad Dahlan adalah figur yang toleran, pengertian dan terbuka kepada siapa saja. Dalam pemahaman keagamaan sekalipun sudah biasa berbeda dan beliau biasa memberi kelapangan pemahaman kepada orang lain mempraktekan amalan agama yang berbeda dengan pendapatnya (Deliar Noer, 1996:93). Sikap seperti itulah yang dijadikan contoh oleh para penganut Muhammadiyah di Indonesia sampai saat ini.

Dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan (2010), Headar Nashir menggambarkan Ahmad Dahlan sebagai sosok yang gemar beramal sehingga ia dijuluki *man of action.* Ahmad Dahlan berdakwah kepada masyarakat dengan tindakan nyata atau amal kebaikan, dan hal seperti itu merupakan dakwah yang paling efektif. Ahmad Dahlan sangat menyadari betul bahwa dakwah dengan amal perbuatan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat dibanding dengan dakwah melalui ucapan.

Senada dengan Nashir, cendekiawan muslim Indonesia Nurcholis

Madjid (1983) juga mengakui bahwa Ahmad Dahlan merupakan sosok yang senantiasa mencari kebenaran yang hakiki, yang secara cerdas ia mampu untuk menangkap setiap makna yang tersirat dalam tafsir al-Manar. Bagi Cak Nur (panggilan akrab) konsep pembaharuan yang ditawarkan oleh Ahmad Dahlan memiliki corak amal perbuatan nyata yang hal tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai keislaman yang benar. Maka tidaklah salah, dengan kebesaran nama Ahmad Dahlan, Perserikatan Muhammadiyah menjadi organisasi yang berkembang dengan pesat.

Dalam sejarahnya, organisasi Muhammadiyah telah mewarnai arah perkembangan agama dan pergerakan bangsa di Indonesia. Muhammadiyah memiliki dukungan sistem organisasi, amal usaha dan etos amaliah yang tinggi sehingga organisasi Muhammadiyah berproses secara intensif dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga mendapatkan tempat dan pengakuan di dalam masyarakat dan berhasil menempatkan diri sebagai salah satu poros kepemimpinan sosial di luar sektor pemerintahan.

Sejarah juga mencatat bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam modernis, karena dalam kiprah perjuangannya Muhammadiyah banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan. Islam modernis merupakan atribut yang melekat sangat erat pada tubuh Muhammadiyah, sehingga kita mau tak mau harus menerimanya sebagai hal yang bersifat *given*, yang menjadi bagian dari citra kemuhammadiyahan.

Lantas pertanyaannya adalah apa yang menjadi landasan dasar (*asâs*) organisasi Muhammadiyah sehingga sampai saat ini keberadaannya masih tetap kuat bertahan, dan tak hanya sebatas itu, sepanjang perjalanannya, perjuangan Muhammadiyah mampu untuk berkontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa ini? Jawabannya adalah atas dasar tauhid.

Pada Mulanya Tauhid

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Persyarikatan Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M. Pendirinya adalah Muhammad Darwis yang dikemudian hari berganti nama menjadi KH. Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan sendiri merupakan sosok yang sangat berpengaruh di kalangan umat Islam, khususnya lingkungan Muhammadiyah.

Ahmad Dahlan merumuskan sebuah konsep ketuhanan (teologis) yang berimplikasi pada aspek sosial kemasyarakatan. Surat Al-Ma`un yang terdapat di dalam Al-Qur`an ia reinterpretasikan sehingga pada akhirnya

ia berpendapat bahwa surat tersebut menyangkut masalah tanggung jawab sosial. Munculnya rumusan konsep Tauhid Sosial ini bermula dari seringnya beliau melakukan suatu pengkajian tafsir ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan tauhid.

Muhammadiyah, dalam hal ini, merupakan contoh gerakan sosial-kemasyarakatan yang berhasil memberikan solusi atas pelbagai macam masalah di negeri ini. Maka dari itu, tidaklah heran ketika organisasi ini lahir, yang pertama kali didirikan adalah lembaga pendidikan modern. Sebab, menurut Ahmad Dahlan, yang dibutuhkan pada waktu itu adalah jawaban atas segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial, khususnya pendidikan.

Dalam keberadaannya, Muhammadiyah buatan Ahmad Dahlan ini memainkan peranan penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu gerakan pembaruan keagamaan, pelaku perubahan sosial, dan kekuatan politik. Muhammadiyah hadir menawarkan sebuah konsep Islam yang dinamis dalam merespon setiap permasalahan yang terjadi pada masa itu. Dr. Haedar Nashir dalam bukunya Muhammadiyah Gerakan Pembaruan (2010), menggambarkan bahwa Muhammadiyah telah berhasil mengantarkan kaum Muslim Indonesia menjalankan perubahan yang dahsyat, dari masyarakat yang tradisional menjadi yang lebih modern, agraris menjadi industrial, pedesaan menjadi perkotaan, feodalistik menjadi lebih egaliter.

Azyumardi Azra (2009) menyebutkan bahwa kelahiran Muhammadiyah pada awal abad ke 20 itu juga merupakan respon terhadap gagasan-gagasan Islam transnasional dari para pemikir Islam dan pembaharu seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha. Kesemuanya itu berangkat dari keprihatinan terhadap realitas sosial yang jumud (kaku) sehingga pada akhirnya gampang ditindas dan dijajah oleh orang asing. Mereka juga melihat kenestapaan umat Islam di berbagai bagian dunia di bawah ancaman dan cengkeraman kolonialisme Eropa. Para pembaharu dan aktivis Islam ini kemudian menyeru kaum Muslim untuk bangkit memajukan diri dalam berbagai bidang sejak dari keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan politik.

Sedangkan dalam catatan yang berjudul Dari Tauhid Sosial ke Tauhid Wahabi (2010), M. Dawam Rahardjo menyatakan bahwa Muhammadiyah, pada mula berdirinya tergolong dalam ruang publik sosial (*social public sphere*) dengan motif berdirinya didasarkan atas konsep "Tauhîd Sosial" dengan menggunakan teori ***habl min Allah wa habl min an-nâs*** (hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia). Dengan

kata lain, menghubungkan aspek keimanan dengan tanggung jawab sosial, dan inilah yang dinamakan dengan istilah "Tauhid Sosial".

Tauhid adalah pengesaan kepada Allah Swt. Tuhan yang menciptakan semesta alam ini, Tuhan Sang Maha Benar, Maha Baik, lagi Maha Indah. Ketundukan dan kepasrahan jiwa dan raga hanya pantas kepada-Nya. Dialah Tuhan yang pantas dijadikan sebagai sandaran hidup. Inilah yang dinamakan dengan konsep tauhid, yang kemudian dirumuskan dalam kalimat *lâ ilâha illâ Allah* (tiada tuhan melainkan Allah).

Allah adalah Kebenaran Mutlaq yang pantas untuk disembah. Sikap seperti itu yang pada akhirnya menghasilkan keterhubungan individu manusia dengan-Nya (*habl min Allah*). Ia yang bertuhan kepada Allah akan selalu tunduk dan patuh atas setiap bentuk perintah dan larangan-Nya, dan itulah yang dinamakan dengan sikap taqwa.

Keterhubungan antara aspek kemanusiaan dengan ketuhanan itu merupakan konsep tauhid yang bersifat individual, dengan kata lain, manusia mengesakan Allah sebagai Sang Maha Benar, Maha Baik, dan Maha Indah yang kemudian Dia-lah satu-satunya yang layak untuk dipertuhankan. Implikasi dari Tauhid tersebut adalah ibadah secara langsung kepada Allah (*`ibadah mahdloh*), seperti Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji. Melampaui hal itu, Tauhid Sosial merupakan konsekuensi logis ketika secara individu seseorang telah bertauhid. Hubungan manusia dengan Allah atas dasar iman tauhid itu menghasilkan hubungan manusia dengan manusia yang lain.

Ahmad Dahlan mencoba untuk melakukan pembaharuan dalam wilayah akidah yang dianut oleh umat Islam Indonesia pada saat itu. Ia berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari *takhayul, bid`ah*, dan *khurafat*, yang selama ini telah bercampur baur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Pemurnian akidah tauhid inilah yang menjadi titik awal perjuangan Ahmad Dahlan selanjutnya. Dalam khazanah pemkiran, Ahmad Dahlan ingin mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran yang bersifat tradisional. Ia menyarankan agar dilakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh nalar manusia.

Tauhid Sosial: *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Secara normatif dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, berasas Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Muhammadiyah

didirikan dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, tentu jalan yang harus ditempuh adalah dengan cara bergerak dan berdakwah secara terus-menerus.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar,* serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan masyarakat yang dihadapi. Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan di atas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat dunyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam *menjadi rahmatan lil-'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini.

Dakwah adalah medium untuk menyampaikan pesan kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dalam hal ini, dakwah merupakan ajaran agama yang ditujukan sebagai rahmat untuk semua, yang membawa nilai-nilai positif dan memberikan rasa aman, tentram, sejuk kepada orang yang didakwahi.

Dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik, dan yang lebih baik. Dalam dakwah ada ide tentang progresivitas, yaitu sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga dalam dakwah terkandung suatu ide yang dinamis sesuai dengan kontek ruang dan waktu.

Dakwah, menurut Ibn Rusyd haruslah dengan cara *hikmah,* yakni menempatkan nasihat kebaikan sebagai inti dari dakwah tersebut. Ibn Rusyd menyebut metode dakwah seperti itu dengan istilah *khitabî,* yang berarti dengan menggunakan retorika yang efektif dan populer sesuai dengan bahasa dan tingkat pemahaman masyarakat tertentu.

Menurut Kuntowijoyo (2002), dakwah haruslah berpihak kepada nilai-nilai universal kemanusiaan, menerima kearifan dan kecerdasan lokal, dan mencegah kemunkaran dengan memperhatikan keunikan sifat manusia secara individual dan sosial. Artinya, bukanlah disebut dakwah yang benar jika pada kenyataannya menggunakan cara-cara kekerasan, pemaksaan,

dan intimidasi.

Ada dua segi dakwah yang meskipun tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan, yaitu menyangkut isi dan bentuk, substansi dan formal, pesan dan cara penyampaian, esensi, dan metode. Dakwah tentu menyangkut kedua-duanya sekaligus, dan sebenarnya tidak terpisahkan. Hanya perlu disadari bahwa isi, substansi, pesan, dan esensi senantiasa mempunyai dimensi universal, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini substansi dakwah adalah pesan keagamaan itu sendiri *al-dîn al-nashîhah*, yaitu agama adalah pesan (Budhy Munawar Rachman, 2011).

Sesuai dengan *khittahnya*, Muhammadiyah sebagai Persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam yang mengutamakan jalan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam lingkungan masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Islamiyah. Penyelenggaraan amal usaha yang didasarkan atas ajaran dakwah Islamiyah dan *amar ma`ruf nahi munkar* tersebut merupakan sebagian ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam, dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Jadi, inti dari perjuangan Muhammadiyah terletak pada *amar ma'ruf dan nahi munkar*, sebagai wujud dari usaha dalam menggapai tujuan. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan Rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Adapun pengertian *nahi munkar* menurut Ibnu Taimiyyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan *amar ma'ruf* berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah (Abu Fahmi: 1995).

Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama saja atau ideologi semata. *Amar ma'ruf nahi munkar* juga bisa saja berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, budaya maupun hukum. Dengan kata lain bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan perwujudan dari sikap tauhid yang dijelmakan dalam kontek sosial kemasyarakatan. Dalam masyarakat muslim *amar ma'ruf dan nahi mungkar* merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, ia merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, al-Qur'an dan hadits nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintah orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta

penjelasan hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau mengingkari hal-hal yang tidak menjadi maslahat bagi rakyat.

Kesadaran Sosial dan Kontekstualisasi Surat Al-Ma`un

Sesuai dengan fitrah Islam sebagai agama *rahmat lil `alamin*, Muhammadiyah lahir dan berkembang bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran kebangkitan nasional setelah organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam (SI). Lahirnya organisasi ini bermuara pada kenyataan di masyarakat. Terjadinya kekeliruan-kekeliruan dalam memahami ajaran agama Islam. menjamurnya tindakan-tindakan *Bid`ah, Khurafat* dan *Tahayul.*

Di tengah perilaku masyarakat Indonesia pada saat itu yang dipandang menyimpang dari ajaran agam Islam, Ahmad Dahlan meletakkan dasar-dasar pembaharuan keagamaan secara pribadi maupun menggunakan media organisasi Muhammadiyah. Pembaruan Islam yang cukup orisinal dari Ahmad Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengamalan Surat Al-Ma'un.

Surat Al-Ma`un sampai saat ini masih dianggap sebagai basis perjuangan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan senantiasa mengujarkan secara berulang-ulang surat ini kepada santrinya. Hal tersebut dilakukan sebagai penanda bahwa sesungguhnya ada makna yang sangat mendalam di dalamnya. Ahmad Dahlan bukan saja mengajarkan kepada santrinya supaya hafal QS. al-Ma`un, tetapi ia selalu mengingatkan bahwa isi kandungan surat tersebut harus senantiasa diamalkan. "*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna*"

Surat ini sangatlah pendek namun memiliki kedalaman makna yang sangat tajam. Dari surat ini Ahmad Dahlan mendapatkan sebuah pemahaman bahwa sejatinya beragama yang benar bukan hanya hubungan antara individu dengan Tuhannya, melainkan bahwa kepekaan individu terhadap realitas sosial, sehingga pada akhirnya terbangun sebuah tanggung jawab untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Al-Qur`an mengisyaratkan bahwa sejatinya ibadah itu memiliki dua aspek, yakni aspek lahiri dan aspek batini. Di sini Ahmad Dahlan ingin membawa umat Islam kepada pemahaman yang lebih mendalam atas ritual ibadah shalat, karena pada kenyataannya Tuhan masih mengutuk orang yang shalat, "*Celakalah orang-orang yang shalat itu!*". Pernyataan tersebut berarti ada dua persoalan, yaitu pesan yang bersifat lahiri dan batini, atau

formali dan maknawi.

Pemahaman Ahmad Dalam mengenai surat al-Ma`un tersebut merupakan contoh lain yang paling bersejarah dari pembaruan yang berorientasi pada amal sosial-kesejahteraan. Berkenaan dengan ayat tadi maka bisa ditarik kesimpulan dalam konteks keseluruhan firman itu, bahwa yang diharapkan dari shalat adalah memerhatikan anak yatim, orang miskin, dan permasalahan sosial lainnya. Ahmad Dahlah sangat menyadari bahwa Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual ibadah yang sifatnya "*hablu min Allah*" (hubungan dengan Allah) semata, akan tetapi justru Islam dituntut untuk peduli dan terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Inilah dasar inti dari ajaran yang digaungkan oleh Ahmad Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah.

Kehadiran Ahmad Dahlan dengan pembaharuan pemikiran keagamaanya tidak terlepas dengan gejala pudarnya struktur sosial tradisional. Perubahan struktur sosial tradisional menempatkan kehadiran Muhammadiyah sebagai simbol manifestasi kesadaran kolektif dalam masyarakat. Selain itu juga sebagai penolakan terhadap paternalis tradisional maupun birokrasi para penjajah.

Atas dasar spirit Al-Ma`un tersebut, Muhammadiyah berada dalam lanskap organisasi Islam yang bersifat sosial dan pelayanan, seperti mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, dan panti asuhan untuk mereka yang tidak mampu, yatim piatu, dan orang-orang pinggiran. Inilah buah hasil dari pemikiran Ahmad Dahlan yang senantiasa mengamalkan semangat surat al-Ma`un yang baginya menjadi surat yang sangat penting di dalam al-Qur`an yang ditujukan kepada umat muslim agar tidak menjadi para pendusta agama.

Penutup

Beruntunglah bangsa ini yang telah melahirkan tokoh besar, yaitu Ahmad Dahlan. Sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau mampu untuk menelaah dan menganalisa secara mendalam prihal kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa ini. Di saat masyarakat terjajah oleh pikiran-keagamaan (seperti takhayul) dan terjajah secara fisik oleh para kolonialis, Ahmad Dahlan mencoba bertindak melampaui masyarakat umum pada saat itu. Walaupun pada kenyataannya tidak sedikit orang yang bertentangan paham dengannya atas pembaharuan-pembaharuan yang telah ia lakukan.

Ahmad Dahlan mampu melihat konteks tanpa meninggalkan teks.

Dengan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang dinamis serta menjadi rahmat, tentu keberadannya harus senantiasa memberikan rasa aman dan keselamatan bagi lingkungan sekitarnya. Tauhid, dakwah, dan *amar ma`ruf nahi munkar* adalah satu kesatuan yang utuh yang tak bisa terpisahkan untuk mewujudkan realitas masyarakat yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat adil, makmur yang diridhai Allah SWT.

Merujuk pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, bahwa tujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu: Hidup manusia harus berdasar tauhid, 'ibadah, dan ta'at kepada Allah; Hidup manusia bermasyarakat; Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat; Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhsan kepada kemanusiaan; Dan *ittiba'* kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Muhammadiyah sejatinya selalu meninjau ulang rumusan ajaran Islam, baik dalam wilayah *mahdlah* maupun *ghair mahdlah*. Peninjauan ulang ini dimaksudkan untuk menakar relevansi serta kesanggupan para pemeluk Islam untuk melaksanakan setiap tuntutan ajaran sesuai dengan realitas yang dihadapi. Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pencerahan berikhtiar untuk mengembangkan strategi perjuangan dengan cara menguatkan kembali identitas diri ke arah perubahan yang dinamis, untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak kaum *dhu'afa* dan *mustadh'afin* serta memperkuat *civil society* bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. *Wallahu `alam.*

MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN, MENEGAKKAN PEDAGOGI YANG BERKEMANUSIAAN

Refleksi untuk Muhammadiyah

Ahmad Fuad Fanani

Pendidikan adalah tema yang menarik untuk didiskusikan, dibincangkan, dikaji, dan diteliti terus menerus sepanjang waktu. Sebab, pendidikan adalah unsur yang sangat menentukan bagi kemajuan sebuah bangsa. Jika dunia pendidikan di sebuah negara mengalami kemunduran, maka secara tidak langsung negara itu juga akan mengalami kemunduran. Dengan pendidikanlah, sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas generasi bangsa di masa depan akan mudah dilakukan dan didesiminasikan. Sebagai organisasi yang sudah lahir sebelum Negara Indonesia merdeka, tentunya Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan dunia pendidikan yang selama ini juga menjadi salah satu inti gerakan dan sarana pembumian pembaharuan keagamaannya.

Namun, sayangnya selama ini pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu tampak tak beranjak dari titik peraduannya. Bahkan, dalam ungkapan Ahmad Syafii Ma'arif, sejak kita merdeka, belum ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk membenahi dunia pendidikan yang sudah lama menjadi yatim piatu. Padahal, salah satu diktum Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa". Tetapi, lagi-lagi belum terjadi perencanaan yang berkesinambungan pada soal yang sangat urgen dan signifikan ini.

Akibat dari belum adanya kebijakan dan perencanaan serius dan berkesinambungan itu, maka dunia pendidikan di Indonesia telah lama tiarap dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Padahal, sekedar untuk

perbandingan, jika kita buka kembali lembaran sejarah pendidikan pada zaman lampau, negara Malaysia pernah mengirimkan banyak mahasiswa dan para dosennya untuk belajar sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, para pakar pendidikan, teknologi, sastra, budaya, dan sosial lainnya, pernah juga diundang secara khusus ke negeri jiran tersebut untuk membantu mengajar dan memajukan sistem dan kualitas pendidikan di sana. Namun, keadaan di Indonesia sekarang tampak berbalik berpuluh derajat dibandingkan zaman itu. Sekarang ini, justru banyak siswa dan mahasiswa Indonesia yang berbondong-bondong menuntut ilmu ke negara Malaysia tersebut. Selain karena sistem dan kualitas pendidikannya yang lebih bagus, biaya kuliah di sana lebih murah dibandingkan dengan umumnya sekolah sejenis di Indonesia.

Dalam Seminar "Sewindu Reformasi, Mencari Visi Indonesia 2030" yang diselenggarkan oleh Kompas pada 8-9 Mei 2006, salah satu pembahasan penting di dalamnya adalah soal nasib pendidikan Indonesia yang masih kedodoran. Keadaan pendidikan yang tidak menentu dan tidak jelas arah tujuannya itu, tentu disebabkan oleh banyak faktor. Namun, salah satu faktor yang penting di antara faktor-faktor lainnya adalah belum adanya upaya yang tegas dan jelas dari pihak pemerintah dan pelaku pendidikan tentang akan dibawa kemana pendidikan di Indonesia ini. Dengan pendidikan yang kedodoran itu, bangsa kita terlihat banyak limbung dan mengalami kebingungan mengikuti berbagai perubahan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada kesempatan itu, Azyumardi Azra menyatakan, bahwa pencapaian pendidikan nasional kita masih jauh dari harapan, apalagi untuk bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pendidikan pada tingkat global. Baik secara kuantitatif dan kualitatif, pendidikan nasional juga masih memiliki banyak kelemahan mendasar. Bahkan, menurut banyak kalangan, pendidian nasional bukan hanya belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anak didik, tetapi juga gagal dalam membangun karakter dan kepribadian *(nation and character building).* Pembentukan karakter dan kepribadian bangsa itu sangat penting dan mendesak dilakukan guna segera mengentaskan krisis multidimensi yang sampai hari ini masih melanda Indonesia.

Persoalan lain yang juga penting untuk dikemukakan di sini, adalah soal fenomena kapitalisasi pendidikan yang dibiarkan terjadi begitu saja. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pendidikan sudah lama menjadi komoditas yang menarik perhatian banyak kalangan. Hal itu terlihat dari banyaknya pihak yang tidak enggan dan tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan

modalnya guna membangun apa yang disebut dengan industrialisasi sekolah. Sekolah yang dianggap sebagai sekolah plus, unggulan, bertaraf atau berkurikulum internasional, biasanya adalah sekolah yang mahal dan hanya bisa dimasuki oleh anak orang yang berduit. Anehnya, semakin mahal suatu sekolah, maka semakin laku juga sekolah itu. Seakan sudah menjadi jaminan mutu, bahwa harga menentukan kualitas. Jika ini yang terjadi, maka apa bedanya lembaga pendidikan ini dengan supermarket atau kedai makanan yang menentukan mutunya berdasarkan tinggi atau rendahnya harga? Namun, sekarang ini pemain bisnis sudah masuk begitu mendalam ke ranah pendidikan ini. Hal ini terlihat dengan fenomena pengalihan perhatian dan investasi mereka pada industri persekolahan. Era globalisasi dan cengkeraman neoliberalisme di dunia pendidikan tampak semakin susah dibendung. Otonomi pendidikan tinggi pun, pada akhirnya banyak dimanfaatkan oleh para pengelola lembaga itu untuk membisniskan lembaganya dan mengeruk dana dari berbagai pihak tanpa begitu peduli lagi dengan peningkatan mutu di dalamnya.

Berbagai fenomena di atas tentu harus membuat kita semua sedih, prihatin, dan harus segera mencari alternatif visi, misi, dan strategi baru guna mengentaskan problem pendidikan di Indonesia yang sudah semakin parah itu. Maka, sebagai upaya untuk menanggulanginya, ada baiknya kita renungkan kembali nilai signifikan pendidikan, lalu kita mencari model pendidikan yang cocok dengan kondisi bangsa yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan itu, dan terakhir akan kita tawarkan beberapa catatan penting. Dengan beberapa formula itu, setidaknya kita sudah mempunyai rumusan yang sangat berarti untuk merumuskan model pendidikan di masa yang akan datang yang sesuai dengan geopolitik dan kondisi sosial budaya bangsa kita ini.

Nilai Signifikan Pendidikan

Tidak diragukan lagi, posisi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang privat atau publik, sangatlah penting. Karena sedemikian pentingnya, maka Rasulullah sendiri memerintahkan kepada umatnya agar belajar sejak dari buaian hingga masuk liang lahat. Dan juga memerintahkan agar kita semua terus menuntut ilmu, walaupun hingga ke negeri Cina. Proses belajar yang terus menerus sepanjang hidup itulah, yang dalam istilah dunia pendidikan disebut sebagai *on going formation* dan *long life education.* Dengan proses yang sedemikian itu, maka pendidikan yang kita pelajari, baik bersifat formal maupun informal, tidaklah hanya

untuk mengejar *semat* (titel), pangkat, dan harta saja. Namun, lebih dari itu, pendidikan mengajarkan kita untuk mencari tahu apa yang belum diketahui dan mendalami apa yang sudah kita ketahui. Artinya, dengan begitu manusia akan terus menerus berusaha mencari tahu dan tidak lekas puas dengan apa yang telah diketahuinya. Sehingga, ia menjadi sosok manusia yang arif, bijaksana, mau berdialog dengan siapa saja, tidak merasa paling pintar sendiri, dan bisa bersikap seperti Sokrates yang meski sudah pandai dan mahir segala sesuatu, tetap menyatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa.

Menurut Nurcholish Madjid (*Indonesia Kita*, 2003: 121-123), di antara berbagai macam investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif, dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Dengan bercermin pada pengalaman berbagai negara, secara sederhana dapat dikatakan bahwa seluruh krisis yang menimpa bangsa sekarang ini adalah akibat rendahnya mutu pendidikan warga negara kita dan tidak meratanya pendidikan itu dari daerah ke daerah. Akibatnya, kekuasaan dan informasi hanya dikuasai segelintir orang dan kelompok yang tega membohongi dan berdiri di atas penderitaan saudaranya sendiri. Makanya, tidak jarang terdengar penilaian orang luar, bahwa kita adalah bangsa yang berpikir sederhana (*simple minded*), tidak ada sofistifikasi, dan sangat kurang minat untuk membaca serta untuk belajar secara mendalam dan luas. Gejala itu tampak dari fenomena "premanisme" yang tidak hanya ada di masyarakat bawah, tapi juga merambah kalangan atas, mulai dari lembaga peradilan, partai politik, departemen pemerintahan, hingga para anggota dewan.

Sebagai upaya pengentasan krisis dan investasi masa depan bangsa ini, pendidikan di negara kita harus mendapat perhatian yang besar dan penanganan yang serius. Berkaitan dengan itu, pendidikan sebagai investasi modal manusia secara garis besar memiliki dua dampak positif. Yaitu, *pertama* ialah dampak peningkatan kemampuan kerja dengan keahlian dan profesionalisme, yang bersangkutan dengan tujuan pokok pendidikan itu sendiri menurut bidang-bidang yang dikembangkannya. Misalnya: teknologi, kesehatan, manajemen, pertanian, keguruan, dan sebagainya. *Kedua,* meningkatkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak rasional, untuk menyerap informasi itu secara sistematis, untuk menggunakannya secara efektif, dan mengartikulasikannya dengan bahasa yang fasih dan kuat.

Perdebatan soal signifikansi pendidikan yang terjadi di antara para pejuang kemerdekaan dan *founding father* negeri tercinta ini layak juga dikemukakan di sini. Pada waktu itu, di satu pihak berdiri Soekarno yang gencar menggemborkan semboyan "merdeka atau mati" dengan pembentukan partai massanya, di pihak lain berdiri Hatta dan Sjahrir yang mengkritik pendirian yang berbau agak fatalistis itu dengan mengkampanyekan pentingnya pendidikan dan pembentukan partai kader. Menurut Sjahrir, pemuda Indonesia pasca Perang Dunia II jangan dibiarkan begitu saja semuanya larut dalam perjuangan senjata melawan penjajah demi mencapai satu di antara dua kata "merdeka atau mati" itu. Namun, mereka harus dididik dan dilatih juga untuk mendayagunakan akal dan rasionya guna mencari jalan alternatif yang strategis jika diantara dua pilihan itu belum berhasil dilakukan. Menurut Sjahrir, sikap "merdeka atau mati" itu lebih mencerminkan sikap *nekad* dan keragu-raguan. Lama kelamaan, hal itu bisa menjadi perangkap kejiwaan. Sebab, selagi menyaksikan kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud dan kesempatan untuk berperang atau mati belum juga tiba, maka para pemuda itu bisa terombang-ambing dalam kebimbangan yang tak menentu. Itu semua terjadi, karena selama Jepang berkuasa para pemuda kita tidak pernah dilatih untuk memimpin dan berpikir, tapi hanya dilatih untuk berbaris dan berkelahi. (Sutan Sjahrir, *Perjuangan Kita* (Edisi khusus mengenang 90 tahun Sutan Sjahrir)).

Agar para pemuda itu mampu menjadi pemimpin dan menggunakan daya pikirnya agar tercipta sebuah barisan partai kader, Sjahrir melihat bahwa politik adalah sikap mempertaruhkan hidup untuk memenangkan hidup. Baginya, politik lebih dari pragmatisme simplistis, tetapi mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau *Wertraditionalitaet* dalam pengertian Max Weber. Karena itulah, menurut Ignas Kleden, politik Sjahrir lebih dari sekedar matematika tentang hubungan mekanis di antara tujuan dan cara mencapainya. Politik lebih mirip suatu etika yang menuntun agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat diuji dengan kriteria moral (Ignas Kleden, *Sutan Sjahrir: Etos Politik dan Jiwa Klasik*, 2006: 1). Politik yang semacam itu, sangat penting guna menciptakan revolusi sosial sebagai kelanjutan revolusi nasional yang lebih bersifat fisik yang telah dilakukan oleh para pejuang sebelum, menjelang, dan sesudah kemerdekaan. Revolusi sosial ini, dapat membebaskan rakyat dari kungkungan feodalisme lama dan dari jebakan-jebakan ke arah fasisme yang muncul bersama kapitalisme

yang tak terkendali. Kemerdekaan nasional janganlah dijadikan tujuan akhir dari perjuangan politik, tetapi harus menjadi jalan bagi rakyat untuk merealisasikan diri dan bakat-bakatnya dalam kebebasan tanpa halangan dan hambatan.

Maka, bagi Sjahrir lebih lanjut, politik adalah usaha dan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai martabat dan kesejahteraan manusia. Namun, upaya ke arah situ tidak cukup hanya dengan melakukan revolusi sosial, namun ada hal yang lebih signifikan dari hal itu. Yaitu edukasi, pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Penekanan pada edukasi inilah yang membuat Sjahrir begitu aktif mendidik anak bangsa, baik ketika dalam pembuangan maupun setelah dibebaskan. Ia terkenal mendidik para anak bangsa di Banda Neira dan menjadi mentor para pemuda revolusioner yang kelak menjadi para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia. Selain itu, di tengah kesibukannya sebagai orang pergerakan, ia masih rajin menulis berbagai karangan tentang seni, sastra, ilmu sosial, filsafat, dan sebagainya. Suatu yang hal jarang kita jumpai pada orang pergerakan dan politisi pada masa sekarang. Hal ini bisa terjadi karena, politik bagi Sjahrir adalah pertama-tama berarti mendidik suatu bangsa dan rakyatnya untuk mandiri dan bebas. Kemandirian adalah lawan dari ketidakmatangan dan kebebasan adalah lawan dari ketergantungan (*Ibid*: 4-5).

Sayangnya, sebagaimana kita lihat dalam perjalanan sejarah, secara kuantitatif pihak yang berdiri di belakang Soekarno memang lebih besar. Sedangkan pihak yang berdiri di belakang Hatta dan Sjahrir tidaklah sebesar pihak yang pertama. Akibatnya, dunia pendidikan kita sekarang ini masih mengejar kuantitas dan simbolik sebagaimana model politik zaman kemerdekaan yang hingga sekarang masih terus diawetkan dan dinikmati dengan gembira. Makanya, tidak heran jika para pemegang kebijakan pendidikan kita tidak atau kurang menyadari arti pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk memerdekakan bangsa dari kebodohan, penindasan, kesengsaraan, dan kemunafikan yang bisa jadi berasal dari bangsanya sendiri. Pendidikan akhirnya hanya mengejar aspek-aspek simbolik dan angka-angka sebagaimana pendidikan gaya bank yang sering dikritik Paulo Freire sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan kemanusiaan berkedok pendidikan.

Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan

Menurut Moeslim Abdurrahman, dalam filosofi pedagogi transformatif, pembelajaran sebetulnya merupakan pembongkaran terhadap semua bentuk

kesadaran budaya dalam rangka menumbuhkan kesadaran budaya yang baru. Kerja pedagogis tidak lain adalah bentuk upaya memfasilitasi setiap subyek agar tumbuh dan berkembang sebagai *human agency* atau *personal creativita*, yang sadar akan habitus-nya masing-masing dan bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengubahnya sehingga subyek-subyek ini tidak mati dan menyerah terhadap jebakan struktural yang diwarisinya sejak lahir. Namun, sekarang ini praktik "pendidikan" yang identik dengan menyelenggarakan "sekolah", bahkan juga pendidikan "luar sekolah", biasanya mengabaikan bangunan konsep pedagogis yang utuh. Seolah-olah pembelajaran adalah sama halnya berhubungan dengan proses belajar mengajar dalam bingkai silabus atau kurikulum agar murid dapat mengonsumsi ilmu pengetahuan sekenyang-kenyangnya dalam ruang belajar yang terikat. Begitu pula pendidikan *life skill* yang sekadar memberikan ilmu keterampilan dalam balai latihan tertentu yang dirancang dari luar dan sama sekali tidak ada proses kontrak belajar yang lebih partisipatoris dan dialogis (*Pedagogi Kaum Pinggiran*, 2006). Anak didik yang dihasilkan dari proses itu, adalah mereka-mereka yang kebanyakan siap untuk memasuki pasar kerja dan menjadi abdi pemerintah, tapi lemah dalam hal pembentukan karakter kepribadian yang mandiri dan peka terhadap penderitaan orang lain.

Memang, pada dirinya sendiri, dalam pandangan Freire, pendidikan itu bersifat ambigu. Di satu sisi, pendidikan dapat menjadi praktek "penindasan", tetapi pada sisi lainnya ia juga dapat menjadi praktek "pembebasan". Seperti pada fenomena praktek pendidikan sekarang, mungkin anak didik mengalami "pembebasan" karena dia setelah sekolah bisa mendapatkan kerja, baik di pabrik, pasar, maupun instansi pemerintah. Dengan begitu ia dapat meringankan kebutuhan ekonomi keluarga dan mencukupi dirinya sendiri. Namun, di sini lainnya, ia juga dianggap masih mengalami "penindasan", artinya mereka yang dididik di sekolah guna menjadi manusia yang mandiri dan peduli pada yang lainnya, malah tercerap arus kapitalisme global yang kelihatannya nyaman dan enak, tapi pada dasarnya banyak merugikan orang-orang pinggiran. Sebagai seorang "pendidik radikal", kebalikan dari "pendidik liberal", Freire sering menggunakan kedua kata itu sebagai bentuk penegasan posisi dirinya. Jika di kalangan ahli pendidikan liberal pendidikan hampir selalu dilihat sebagai sebuah transformasi pengetahuan, maka menurut menurut ahli pendidikan radikal, pendidikan selama ini hanya sekedar transformasi pengetahuan yang dilakukan dengan ideologi yang tidak memihak. Pendidikan yang benar, menurut Freire adalah

pendidikan yang direncanakan sebagai proses perubahan, dalam rangka menciptakan struktur-struktur sosial yang tidak adil, menjadi lebih adil dan manusiawi. Oleh karenanya, pendidikan harus berpretensi politik, jadi pendidikan mesti sarat dengan kepentingan politik. Sebab, jika pendidikan tidak berpolitik, kita akan dipolitikkan oleh pendidikan (*Cultural Action for Freedom*, 1972: 30)

Politisasi pendidikan seperti yang dikhawatirkan Freire di atas, sebetulnya sudah terjadi di Indonesia selama ini. Selama Orde Baru, sekolah merupakan instrumen negara untuk mencetak warga yang patuh dan menjadi alat kekuasaan negara. Sekolah sudah berperan besar dalam proyek kooptasi rezim. Bahkan, menurut Anita Lie (2006), aliran kurikulum "developmentalisme konformis" sangat mewarnai proses belajar mengajar di sekolah. Kucuran dana program Inpres pada era 1970-an dan 1980-an, merupakan sarana negara merawat instrumen kooptasi ini dan memastikan mekanisme kontrolnya berjalan lancar. Pada masa reformasi, fenomena instrumentalisasi sistem pendidikan terjadi pada hal pemilihan birokrat pendidikan dan penggunaan dana-dana pendidikan. Birokrat pendidikan biasanya ditunjuk dan diganti berdasarkan pergantian pimpinan yang berasal dari partai tertentu. Proyek-proyek ujian dan sertifikasi guru, baik di tingkat nasional maupun daerah, terbukti hanya membatasi guru hanya sebagai operator kurikulum. Hal ini belum lagi ditambah politisasi anggaran rutin, program tertentu, maupun tahunan yang biasanya banyak dipotong oleh para birokrat terkait, di antaranya mengakibatkan banyak sekolah roboh karena bantuannya tidak datang-datang. Pergantian kurikulum yang meniscayakan pergantian buku ajar yang tentu sangat membebani rakyat kebanyakan karena anaknya tidak bisa lagi menggunakan buku kakaknya, semakin menambah pemandangan tentang maraknya politisasi pendidikan di Indonesia.

Ketidakseimbangan antara kekuasaan dan kewajiban yang dijalankan pemerintah dalam menangani pendidikan, adalah penyebab terbesar terjadinya semua dampak negatif itu. Padahal, mestinya antara wacana dan praksis pendidikan harusnya terpadu, sesuai, dan menjadi satu. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan pelaku pendidikan akan tumbuh dengan baik dan kritis. Berkaitan dengan ini, bagi Freire, hubungan antara filsafat dan praktek pendidikan di satu sisi, dengan filsafat secara umum, terutama filsafat manusia pada sisi lain, sebenarnya mencerminkan hubungan yang pasti dan menentukan. Hubungan keduanya, menurut Freire merupakan hubungan yang tak dapat disangkal, meskipun dalam

praktek penyelenggaraan pendidikan sehari-hari, sering tidak dianggap atau tidak disadari secara jelas. Suatu praktek pendidikan mengandaikan pendirian teoritis. Suatu pendirian teoritis pada gilirannya mengandaikan suatu interpretasi tentang manusia dan dunia (Budi Munawar-Rachman, *Islam Pluralis*: 370). Bila para pendidik dan penyelenggara pendidikan kita mau benar-benar memahami dan menjalankan filsafat pendidikan Freire ini, maka kesenjangan antara wacana dan praksis pendidikan yang selama ini tampak sering terjadi dan menimbulkan kekacauan itu, sedikit banyak tentu bisa dikurangi dan tidak perlu terjadi terus menerus. Sebab, jika dibiarkan, maka slogan yang sering dibunyikan orang bahwa "ganti menteri ganti kebijakan, kurikulum, dan proyek", akan terus menerus terjadi dan berbunyi dengan ramai.

Pada filsafat pendidikan Paulo Freire, mengandaikan adanya keterpaduan dan keterikatan antara teori dan praktek. Dalam pandangannya, metode pendidikan harus berorientasi pada pengenalan diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan diri ini, menurut Freire tidak cukup bersifat subjektif saja, tapi juga harus secara obyektif. Kebutuhan obyektif untuk merubah keadaan dunia yang tidak manusiawi, selalu memerlukan kemampuan subyektif. Maka, obyektifitas dan subyektifitas bukan dua entitas yang saling bertentangan, tapi keduanya merupakan dialektika yang berjalan konstan dalam diri manusia, dalam hubungan dengan kenyataan yang saling bertentangan (*Pendidikan Kaum Tertindas*, 1985). Bila kedua fungsi dialektis ini tidak melakukan dialektika, justru akan menjebak kita pada "kesalahan berpikir". Contohnya, objektifitas dalam pengertian penindas, bisa jadi subjektifitas dalam pengertian tertindas. Model pendidikan ini, bukan hanya diciptakan untuk kaum tertindas dalam rangka memulihkan sisi kemanusiaan mereka yang hilang, namun untuk suatu perjuangan melawan penindasan dalam sebuah situasi ketika manusia dan dunia berinteraksi. Dalam konteks perjuangan itulah, diperlukan sebuah praksis. Pada praksis itu sendiri terdapat unsur yang penting, yaitu pengembangan kesadaran.

Dasar pemikiran yang digunakan Paulo Freire dalam mencentuskan filsafat pendidikannya adalah ide bahwa masyarakat terbagi atas golongan tertindas dan penindas. Golongan tertindas harus diteliti dan dianalisis demi usaha-usaha pembebasan. Maka, pendidikan bagi kaum tertindas harus dirancang sebagai perlawanan yang membebaskan mereka. Metodologi Freire dimaksudnya untuk mengolah bagaimana penindasan dapat berpartisipasi langsung dalam pendidikan. Oleh karenanya, model pendidikannya bersifat

aktif dan secara tidak langsung merefleksikan apa yang sedang terjadi di dunia nyata. Sebab, manusia adalah makhluk eksistensial yang ada dalam dan bersama dunia. Interaksi dengan dunia adalah wadah atau sarana atau tempat bagi perenungan manusia. Inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Freire dengan pendidikan sebagai proses pembebasan. Maka, pilihan terbaik bagi strategi pembebasan dari piramida penindasan adalah penyatuan tindakan praksis pembebasan, yaitu melalui refleksi-kritis dan aksi-reflektif secara simultan. Dan integrasi ini, hanya dapat dilakukan secara efektif melalui pendidikan (*Pendidikan Alat Perlawanan*: 61-62). Makanya, jika kita lihat pada model pengembangan model pendidikan Freire, dialektika antara guru-murid-realitas dan kejadian-refleksi-aksi adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam dunia pendidikan.

Lingkaran dialektika ketiga hal itu penting, karena pada dasarnya kesadaran yang tumbuh pada masyarakat kita, termasuk di dalamnya kaum pendidik dan anak didik, masih dilingkupi oleh kesadaran palsu. *Nah,* kesadaran seperti itu tentu saja harus dirubah, jika tidak, nafsu para penguasa dan manusia yang culas untuk menguasai sesama tentu akan lebih lama terjadi dan keadaan *status quo* ini dengan nyaman mereka nikmati. Paulo Freire membagi kesadaran manusia menjadi tiga, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Dalam kesadaran magis, penindasan atau penderitaan yang mereka alami dianggap sebagai sebuah takdir atau ujian Tuhan YME yang harus diterima begitu saja tanpa bisa memprotes pada siapapun. Paling-paling, yang bisa mereka lakukan hanyalah meratapi nasib dan berdoa kepada Tuhan agar pada kehidupan selanjutnya mereka diberikan kehidupan yang lebih baik daripada yang dialami di dunia sekarang. Biasanya, manusia yang mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya dan mau membuka matanya, kesadaran dia akan meningkat ke tahap kesadaran naif. Kesadaran jenis ini, sudah mulai mengerti masalah ketertindasan yang menimpa dirinya, namun sikapnya masih berupa menyalahkan pihak lain, trauma pada masa lalu, merasa inferior, gampang meremehkan orang, dan tidak bersedia berdialog. Bila kesadaran semacam ini mampu dilewati dan dilampaui dengan dialog, menganalisis permasalahan secara serius, serta bergabung dengan komunitas yang lebih maju, maka seseorang akan mencapai sebuah kesadaran kritis. Kesadaran kritis adalah kesadaran ketika seseorang sudah mampu melihat apa masalah yang sebenarnya terjadi, mampu melihat struktur penindasan yang dialami dirinya dan komunitasnya, mau bertanggung jawab dan bertindak, terbuka terhadap pembaharuan, serta berani memprotes dan

melawan penindasan yang terjadi di depan mata.

Perubahan tahap kesadaran dari satu ke berikutnya itu, tidak akan terjadi dengan begitu saja tanpa dibutuhkan sebuah proses dan usaha yang serius. *Nah,* konsientisasi (*conscientizacao* atau *conscientization*) dalam rumusan Paulo Freire, adalah proses dimana manusia mendapatkan kesadaran yang terus semakin mendalam tentang realitas kultural dan sosial yang melingkupi hidupnya dan akan kemampuannya untuk merubah realitas itu. Konsientisasi adalah metode yang harus dilakukan sebagai proses menjadi manusia yang lebih penuh atau suatu proses perkembangan kesadaran melalui tiga tahap yang berbeda tapi saling berhubungan, yaitu magis, naif, dan kesadaran kritis (William A. Smith, 1976: 41). Berkaitan dengan ini, maka Freire membedakan antara sistem pendidikan gaya bank dan sistem pendidikan "hadap-masalah". Dalam gaya bank, peserta didik hanya menyerap realitas dengan hafalan dan menjadi obyek. Sedangkan pada model yang kedua, berlangsung proses penamaan sekaligus sintesa makna dunia dan kesadaran. Di sini, perkembangan yang aktif dan hidup dari kesadaran peserta didik menjadi inti dasar pendidikan. Sebagai konsekuensinya, pendidik hanya berdiri sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi yang memungkinkan proses bangkitnya kesadaran peserta didik. Ia tidak mendikte, apalagi mencetak atau menyamakan kesadaran peserta supaya sama dengan dirinya. Yang dilakukan pendidik di sini adalah menjadi rekan peserta didik dalam merumuskan realitas dunia. Dengan begitu, peserta didik akan bisa mempunyai sikap kritis terhadap dunia dan realitas-realitas di sekitarnya yang menindas, kemudian secara progresif berusaha mengubah dunia ini lewat tindakan dan aksi. Model pendidikan semacam inilah yang diharapkan akan melahirkan manusia-manusia baru yang mampu menciptakan dunia baru pula.

Di Indonesia, model pendidikan pembebasan atau pendidikan kaum tertindas ala Freire ini, masih banyak tumbuh dan berkembang di kalangan LSM saja, sedangkan di kalangan sekolah umum kurang begitu diminati. Sebabnya, pendidikan ini dianggap lebih bersifat androgogi (pendampingan kaum dewasa) lewat *popular education* dibanding sebagai pedagogi (pendidikan generasi muda) di sekolah formal. Anggapan seperti ini muncul, karena ssitem pendidikan yang ada selama ini, terutama pada masa Orde Baru, lebih bersifat menanamkan hegemoni dan dominasi negara terhadap rakyat. Oleh karenanya, yang diharapkan muncul dan dianggap peserta didik yang baik adalah mereka yang rajin masuk sekolah, sopan, tidak suka protes, pintar menghitung, membaca, dan menulis.

Peserta didik tidak pernah dihadapkan pada realitas timpang yang terjadi di sekitarnya untuk dirubah atau sekedar dikritisi. SMP Alternatif Qaryah Thayyibah di Kalibening Salatiga, sebetulnya bisa dikatakan sebagai sebuah model institusi pendidikan yang sudah berusaha mengembangkan model pendidikan yang membebaskan ini. Terlebih lagi, latar belakang anak didik di sekolah ini berbasis pada komunitas masyarakat yang sebagian besar hidup dalam situasi keterasingan dan ketertindasan, baik secara sosial maupun ekonomi. Makanya, di sekolah itu diajarkan bagaimana murid mampu memiliki keberanian dan kemandirian dalam menghadapi realitas hidup. Selain itu, pendidik di sana sudah bisa berfungsi menjadi seorang fasilitator, dinamisator, dan motivator yang mendorong peserta didik untuk lebih berani, mandiri, terbuka, menghargai orang lain, serta memiliki kepekaan terhadap penderitaan saudaranya yang lain. Eksperimen seperti ini tentu patut kita jadikan contoh dan perbandingan dalam melakukan pembaharuan pendidikan atau menyelenggarakan pendidikan di Indonesia ke depan.

Catatan Akhir

Pendidikan yang membebaskan, sebetulnya tidak hanya membuat anak didik mampu membebaskan dirinya saja. Namun, lebih dari itu, visi yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana agar kesadaran kritis itu bisa diproliferasikan sehingga melahirkan kesadaran kolektif yang mampu melahirkan sebuah gerakan yang mengubah wajah dunia yang tidak ramah dan tidak adil menjadi lebih adil, egaliter, dan demokratis. Dengan begitu, maka tujuan pendidikan yang pada dasarnya untuk membebaskan peserta didiknya dari kebodohan, mampu betul-betul menciptakan spirit baru untuk merubah keadaan yang melanggengkan kebodohan. Sikap menerima *status quo* kebodohan atau bisa disebut sebagai *al-qana'ah bil jahli,* ini adalah sikap hidup yang tidak peduli terhadap penderitaan saudara sendiri, membiarkan anak jalanan tambah memenuhi pemandangan jalanan, perdagangan perempuan (*traficking*) yang sering menyesakkan dada, TKI yang sering dianiaya majikannya, buruh pabrik yang keringatnya dihisap kapitalisme industri, suku-suku terasing yang tidak pernah disapa peradaban, paham keagamaan di luar mainstream yang sering menjadi obyek kekerasan dan pemaksaan, dan kaum marginal lainnya.. Padahal, sejatinya fungsi pendidikan atau pedagogi adalah agar peserta pendidik dan peserta didik mampu melakukan proses pembelajaran "hadap-masalah" terhadap realitas sehari- hari. Dengan begitu, anak didik bisa mengetahui

bagaimana memahami tantangan material ekonomi, kritik politik-ideologis, dan tekanan-tekanan hidup yang bersifat psikologis. Maka, bagi orang-orang yang mau, mampu, dan bisa melakukan model pembelajaran kritis ini, ilmu pengetahuan yang diperolehnya dapat sungguh-sungguh berarti (*of making knowledge meaningful)* dalam memberikan spirit hidup baru yang berwatak transformatif. Tentu saja, untuk melahirkan sikap seperti, dibutuhkan sebuah kesadaran kritis, keberanian, dan sikap kemandirian

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai banyak institusi pendidikan yang lebih mengakar dan dekat dengan rakyat kecil, semestinya mau dan mampu mengembangkan model pedagogi yang membebaskan seperti itu. Sebab, dengan kelebihan yang dimilikinya itu, maka penghadapan peserta didik terhadap realitas kehidupan lebih mudah dipupuk dan dikembangkan. Dengan begitu, kesadaran kritis peserta didik akan peran transformatif yang harus mereka jalankan dan mainkan sebagai kader-kader umat dan bangsa akan muncul sebagai kekuatan kolektif umat yang bisa menghadapai tantangan zaman dan menghadang penindasan sosial-ekonomi-budaya. Akhirnya, saya kira benar apa yang dinyatakan oleh Moeslim Abdurrahman, bahwa sekarang ini adalah saatnya kita semua harus lebih serius bekerja sama untuk mengembangkan konsep dan model praksis "pedagogi kaum pinggiran" atau pendidikan yang membebaskan itu. Hal itu bisa dilakukan dengan menggabungkan semua perspektif humanisme, apakah yang berasal dari teologi, kritik-ideologi, atau dari tradisi pemikiran sosial emansipatoris. Sehingga, rakyat Indonesia nantinya mampu memiliki pemahaman sendiri mengapa mereka terpinggirkan dan dengan praksis apa mereka mempunyai harapan untuk memberdayakan diri dan kelompoknya. Jika tidak, saya khawatir meski telah dilakukan berbagai perubahan kurikulum, peningkatan anggaran, pergantian buku ajar, hingga bentuk model pendidikan, namun pendidikan di Indonesia tetap saja stagnan, jalan di tempat, dan kedodoran. Mudah-mudahan Muhammadiyah bisa menjadi pelopor untuk pengembangan pendidikan yang membebaskan dan menjadi garda depan untuk pedagogi yang berkemanusiaan. *Wallahu A'lam Bisshawab*

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Moeslim. 2006. *Pedagogi Kaum Pinggiran.* Kompas, 2 Mei 2006

Azra, Azyumardi. 2006. *Reformasi Pendidikan Nasional: Masalah dan Agenda Menuju Visi 2030.* Makalah Seminar "Sewindu Reformasi: Mencari Visi 2030, Kompas, Jakarta, 8-9 Mei 2006.

Freire, Paulo. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*, Utomo Dananjaya, dkk (Penerjemah), Jakarta: LP3ES

----------------. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Alois A. Nugroho (penerjemah), Jakarta: Gramedia

----------------. 1972. *Cultural Action for Freedom*, Harmonndsworth: Penguin

Kleden, Ignas. 2006. *Sutan Sjahrir: Etos Politik dan Jiwa Klasik.* Orasi mengenang Sutan Sjahrir, 8 April 2006, TIM Jakarta

Lie, Anita. 2006. *Reformasi Pendidikan Nasional dalam Dinamika Demokratisasi.* Makalah Seminar "Sewindu Reformasi: Mencari Visi 2030", Kompas, Jakarta, 8-9 Mei 2006.

Madjid, Nurcholish. 2003. *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina

Murtiningsih, Siti. 2004. *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*, Yogyakarta: Resist Book

Rachman, Budi Munawar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina

Smith, William A. 1987. *The Meaning of Conscientizacao, The Goal of Paulo Freire's Pedagogi*, Massachusetts: University of Massachusetts Amherst

Sjahrir, Sutan, *Perjuangan Kita*, (Edisi khusus mengenang 90 tahun Sutan Sjahrir), Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur, t.t.

Zaman, Muhammad Qasim. 2005. *Pluralism, Democracy, and the 'Ulama", in Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization,* Robert W. Hefner (Editor), Princeton: Princeton University Press

PERAN GENERASI MUDA MUSLIM DALAM MEMBANGUN PERADABAN YANG SEJAHTERA DAN DAMAI DI ASIA TENGGARA

R. Alpha Amirrachman

"Older men declarer war. But it is youth that must fight and die."
– Herber Hoover

Gerakan dakwah geokultural (Rusdianto 2015:32-40) Muhammadiyah untuk turut menyemai perdamaian dunia tidak hanya mengandalkan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) atau diplomat Muhammadiyah yang terdapat di berbagai negara, namun juga dapat dilakukan di tanah air melalui berbagai ortom dan juga lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi Muhammadiyah. Upaya yang ditempuh bukan hanya sekedar merujuk pada otentisitas gerakan Muhammadiyah, namun membawa otenisitas itu dalam gerakan dakwah yang mengglobal untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di berbagai belahan dunia. Bukan hanya itu, tapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas terutama non-Muslim mengenai apa sebenarnya yang Muhammadiyah aspirasikan sebagai masyakarat Muslim yang berkemajuan. Menjelang abad kedua ini, Muhammadiyah telah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan gerakan pencerahan *(tanwir)*. Gerakan pencerahan ini adalah wujud dari Islam yang berkemajuan merupakan jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan dari berbagai bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan dan ketidakadilan hidup umat manusia.

Karena itu, belum lama ini Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berinisiatif menyelenggarakan seminar internasional dengan

topik *The Role of Muslim Youth in Building Just and Peaceful Civilisation in Southeast Asia*, dan untuk pertama kalinya menyelenggarakan Darul Arqam Dasar Internasional secara terpusat di Jakarta bagi mahasiswa-mahasiswa asing, terutama mereka yang berasal dari kaun Muslim minoritas di Selatan Thailand yang menempuh studi di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah di berbagai pernjuru di tanah air dengan beasiswa dari Persyarikatan. Jelas bahwa upaya PP Muhammadiyah memberikan beasiswa bagi saudara-saudara Muslim ini merupakan gerakan tanwir yang trans-negara, berupaya membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan mereka dari berbagai bentuk ketertindasan dan ketidakadilan yang mereka alami sebagai Muslim minoritas di tanah air mereka. Karena itu, inisiatif DPP IMM untuk mengkader mereka melalui Darul Arqam Dasar (DAD) perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Dengan kata lain, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak ketinggalan mengambil peran yang tidak kalah strategis bagi masa depan dakwah Muhammadiyah.

Upaya pelaksanaan DAD mahasiswa asing ini sangat bernilai strategis. Mengapa demikian? Karena Darul Arqam Dasar (DAD) merupakan bagian hulu dari proses kaderisasi untuk menjadi aktivis mahasiswa di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam modernis terbesar di dunia. Darul Arqam, yang berarti *'rumah Arqam'*, merupakan rumah Arqam Ibnu Abil Arqam, yang digunakan Rasulullah SAW untuk mendidik dan mengkader para pemimpin Islam dalam generasi pertama seperti Abu Bakar, Ali Ibnu Thalib, dan lain sebagainya.

Kini Darul Arqam Dasar dalam konteks Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, merupakan langkah pertama dan pondasi dari sebuah pengkaderan untuk menjadi pemimpin perstarikatan, umat dan bangsa. Pelatihan ini digunakan bukan hanya untuk memperkenalkan IMM kepada calon mahasiswa di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah, tetapi juga untuk memperdalam Al-Islam Kemuhammadiyahan, ketauhidan dan materi sosial kemasyarakatan. Tujuan dari Darul Arqam Dasar adalah untuk membangun karakter, kepribadian dan kualitas aktivis mahasiswa untuk bergabung di dalam organisasi IMM yang akan memiliki perspektif sangat luas dan mampu menghayati nilai-nilai keIslaman dan ketauhidan maupun untuk membangun dasar (fondasi) intelektualisme mahasiswa. Di samping itu, perkaderan juga berupaya memandu untuk mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai mahasiswa baik secara akademik mapupun sosial, terutama bagi mahasiswa yang menempuh studi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).

Walaupun upaya ini dilakukan di tanah air, namun dengan peserta mahasiswa asing pada akhirnya kader-kader Muhamamadiyah ini akan menghantarkan gerakan dakwah Persyarikatan pada tataran global yang lebih luas jika ini terus dilakukan rutin dan terukur dengan dukungan penuh dan kuat dari PP Muhammadiyah. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya signifikansi peran generasi muda dalam geokultural dan ekonomi terutama di kawasan ASEAN di mana perekonomian dan demokrasi terus berkembang secara dinamis di kawasan ini.

Nah, tulisan ini berupaya menyoroti peran generasi muda muslim dalam membangun peradaban yang sejahtera dan damai di Asia Tenggara dan bagaimana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagian bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah dapat turut berperan menghantarkan dakwah Persyarikatan pada tataran global. Paling tidak, gerakan diplomasi Muhamadiyah yang nyaris bersih dari carut-marut kehidupan politik praktis dalam negeri ini akan turut memberikan kontribusi bukan hanya dalam upaya meneguhkan perdamaian dan keadaban masyarakat global, namun juga dalam menegaskan kepada dunia internasional bahwa Muhammadiyah sebagai *the biggest modernist Islamic organization in the world* adalah representasi penting Islam moderat dari Indonesia untuk dunia.

Islam dan Buddha Sebagai Dua Agama Terbesar di ASEAN

Perlu digarisbawahi bahwa 10 bangsa yang terhimpun di ASEAN ini adalah tempat tinggal bagi satu dari sepuluh warga dunia. Kurang-lebih dua-pertiga dari populasi Asia Tenggara berusia di bawah 35 tahun. Ini adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang dinamis dengan keberagaman yang begitu kaya meliputi agama dan suku yang berbeda-beda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini akan turut berperan penting dalam membentuk wajah dunia di abad ke-21.

Mengapa Islam penting dalam konteks Asia Tenggara dan mengapa mahasiswa atau dalam pengertian yang lebih luas bahwa generasi muda Muslim tidak memiliki pilihan kecuali mengambil peran dalam membangun peradaban yang adil, sejahtera dan damai di kawasan ini? Saat ini Islam adalah agama yang dipeluk dan dipraktikkan dengan luas di Asia Tenggara dengan populasi kurang lebih 240 juta. Jumlah ini merupakan 40% dari keseluruhan populasi, dengan mayoritas berada di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Sementara kaum Muslim minoritas dengan jumlah signifikan juga terdapat di beberapa negara di kawasan ini. Sementara Buddha merupakan juga agama dengan pengikut dengan jumlah besar di

kawasan ini. Hingga saat ini, kurang lebih 190 hingga 205 juta pemeluk Buddha di Asia Tenggara, membuatnya agama dengan pengikut kedua terbesar di kawasan ini setelah Islam. Dengan demikian, Asia Tenggara merupakan 'rumah' dari sekitar 35% hingga 38% populasi umat Buddha dunia. Di kawasan ini, Thailand memiliki jumlah umat Buddha terbesar dengan sekitar 95% dari populasinya yang berjumlah 67 juta, kurang lebih 63.75% juta jiwa. Myanmar memiliki 59 juta umat Buddha, dengan 89% dari 66 juta jiwa mempraktikkan Buddha Theravada. Dengan demikian, Islam dan Buddha merupakan dua agama besar di kawasan ini dan umat kedua agama ini memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk sama-sama memastikan Asia Tenggara yang adil, sejahtera dan damai.

Islam di Asia Tenggara unik karena memiliki sifat *multi-faceted* dan *multi-layered*. Berbagai kelompok yang kita saksikan saat ini merupakan buah dari berbagai interpretasi terhadap agama ini. Di Indonesia, misalnya, kita memiliki Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di samping kedua ormas keagamaan ini, kelompok Muslim lainnya juga memainkan peran yang penting dalam masyarakat Indonesia, baik di bidang politik maupun ekonomi, dengan sebagian pengikut membentuk kelompok-kelompok *civil society* ber-basis Islam sementara yang lain bahkan membentuk partai politik. Dunia menyaksikan kebangkitan Islam di Asia Tenggara yang menggeliat sejak akhir 1970-an. Gerakan-gerakan dakwah menjamur di kawasan yang dinamis ini. Gerakan-gerakan ini mengarah pada konstruksi identitas Islam yang kuat di antara umat Muslim di kawasan ini. Sebagai konsekuensi logis, Islam mulai mengambil peran besar dan penting dalam kehidupan publik. Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan membaiknya kesejahteraan yang berwujud pada meningkatnya berbagai 'investasi', seperti haji, penerbitan buku-buku Islam dan terbentuknya bank shariah, sebagai contoh. Perlu juga dicatat bahwa perempuan-perempuan Muslim memiliki peran yang lebih besar dan penting dibanding mereka di Timur Tengah. Karena itulah *employment rate* wanita Muslim di Asia Tenggara yang tinggi menjadi pembeda budaya antara mereka dan perempuan Muslim Timur Tengah.

Akan tetapi ketegangan dan gesekan sosial tetap dapat terlihat di antara kelompok beragama yang ada, khususnya antara mayoritas dan minoritas. Beberapa negara di kawasan ini, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina dan Myanmar, misalnya, mengalami konflik di antara kelompok beragama, yang tidak selalu bermotifkan agama namun juga politik dan ekonomi. Gesekan ini terjadi bersamaan dengan tumbuhnya radikalisme

agama. Di Indonesia, misalnya, kekahawatiran mengenai radikalisme Islam mencuat setelah pemilihan umum menyusul ledakan bom di dua hotel mewah di Jakarta pada Juli 2009 yang dicurigai dilakukan oleh pengikut Jemaah Islamiyah. Serangan ini merupakan serangan teror yang pertama sejak serangan terhadap turis di Bali pada 2005. Walaupun sebagai besar rakyat Indonesia mengutuk serangan bom tersebut, namun insiden ini menunjukkan kelompok utama Muslim radikal tetap bergerak dan aktif di dalam negeri, walaupun beroperasi di bawah tanah dan di bawah tekanan aparat keamanan. Sebenarnya kebangkitan Islam sudah terjadi di berbagai belahan bumi terutama tentu di Timur Tengah dengan munculnya berbagai organisasi Islam seperti 'neo' Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jama'at al-Islami di Pakistan, HAMAS di Palestina, Hizbullah di Lebanon, sebagai contoh. Di Indonesia kita menyaksikan tumbuhnya ormas-ormas keagamaan seperti Ikhwanul Muslimin-Yarbiyah, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'ah Anshoru Tauhid dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini mememiliki kencederungan untuk menunjukkan ideologi dakwah yang radikal dan selalu menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif (Jahroni, 2004). Paham dan gerakan Islam radikal ini juga menggunakan jihad sebagai salah satu dasar perjuangan. Konsep jihad di-interpretasi secara sempit dan tekstual, yang awalnya dipahami sebagai upaya serius dalam penggunaan seluruh tenaga, pikiran, harta untuk kemajuan Islam melalui dakwah, bergeser menjadi jalan kekerasan yang identik dengan teror dan bom dengan target masyarakat sipil. Ironisnya, gerakan Islam transnasional yang berkembang di tanah air ini memiliki karakter yang berbeda dengan gerakan Islam yang lebih dulu lahir seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan Islam moderat yang menghargai tasammuh, tawazun, tawasuth, menjunjung toleransi dan mengutamakan perdamaian, kesantunan dan keterbukaan dalam berdakwah di tengah masyarakat. Dalam tataran global, tantangan kontemporer yang tidak kalah serius juga muncul dengan terbentuknya ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham), yang menjadi magnet bagi sebagian generasi muda Muslim di beberapa penjuru dunia untuk ikut terlibat. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan pemimpin agama terutama di Asia Tenggara di mana kelompok radikal menggunakan berbagai cara untuk merekrut generasi muda Muslim yang masih begitu bergelora dalam mencari identitas diri.

Bukan hanya Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara juga menyaksikan meningkatnya radikalisme agama dengan derajat dan

tantangan yang berbeda. Misalnya ketegangan antara Muslim Rohingya dengan penduduk native di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha di mana pembunuhan dan pengusiran terhadap Muslim Rohingya yang tidak diakui kewarganegarannya oleh pemerintah dan sebagian masyarakat Myanmar menimbulkan kecemasan meningkatnya radikalisme Buddha. Pemerintah Myanmar sendiri berketetapan untuk menghentikan eksodus dari puluhan ribu warga Rohingya yang berusaha melarikan diri menghindari terror dan ketidakpastian hidup, namun tidak memberikan ketegasan sikap apakah pemerintah Myanmar akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Puluhan ribu ethnik Rohingya berusaha melarikan diri dari negeri seribu pagoda ini memincu krisis regional ketika perahu yang dipenuhi oleh mereka terombang-ambing di tengah samudera bahkan ada yang disandera oleh para mafia perdagangan manusia. Pemeritah Myanmar berkeras bahwa mereka bukanlah warganegara Myanmar, dan meyebut mereka sebagai 'Bengalis'. Pemerintah Myanmar juga tidak akan merubah kebijakannya yang telah mencabut hak dasar mereka sebagai warganegara Myanmar, bahkan mengumpulkan lebih dari 140.000 ethnik Rohingya dalam sebuah kamp pengungsi yang sangat sempit (Fuller, 2015). Tindakan diskriminasi dan serangan teror terhadap Muslim Rohingya ini tentu saja turut menyulut ketegangan diplomatik di beberapa negara dengan mayoritas Muslim seperti di Indonesia. Belum lama lebih dari 1000 ethnik Rohingya terdampar di Indonesia setelah mereka mengarungi laut dengan perahu. Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin meminta agar pemerintah Indoneisa menerima pengungsi ini dengan menyediakan pulau, sebagaimana yang pernah Indonesia lakukan dulu ketika menerima pengungsi Vietnam (Fiardini, 2015).

Sebenarnya, sebelum tragedi Rohingya, beberapa negara di Asia Tenggara sudah menyelesaikan konflik internal mereka (baik secara parsial ataupun menyeluruh) melalui cara politik, ekonomi maupun pendekatan keamanan. Di Filipina misalnya, upaya perdamaian terus diupayakan antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF), walaupun timbul ketegangan di dalam MNLF yang akhirnya memunculkan kelompok baru MILF (Moro Islamic Liberation Front) yang tidak serta-merta menerima tawaran perdamaian dari pemerintah Filipina. Di Thailand, pemerintah terus menempuh upaya untuk mengintegrasikan masyarakat Muslim di Selatan dengan mayoritas masyarakat beragama Buddha melalui pendekatan pendidikan, sosial dan ekonomi. Pemerintah Thailand membentuk Southern Border Provinces Adminsitration Centre (SBPAC) khusus untuk menjawab

berbagai tantangan yang timbul di kawasan selatan ini. Di Indonesia, pihak-pihak yang bertikai, seperti antara umat Muslim dan Kristen di Maluku, misalnya, juga sudah menemnpuh perjanjian perdamaian dan radikalisme agama dari dua pihak Islam dan Kristen juga sudah dijawab secara bertahap bukan hanya melalui pendekatan keamanan tapi juga pendidikan, sosial dan ekonomi. Program Pendidikan Orang Basudara, misalnya, walaupun terdapat simplifikasi budaya, merupakan upaya menumbuhkan perdamaian dengan merujuk pada apa yang dianggap sebagai kearifan lokal yang juga sudah menjadi referensi perdamaian para leluhur mereka (Amirrachman, 2014).

Pada tataran yang lebih luas dan pada level kepemimpinan, dialog dan kerjasama antara para pemuka agama di Asia Tenggara juga terus ditingkatkan untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan perdamaian peradaban di kawasan ini. Misalnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkerjasama dengan Cheng Ho Multi Culture Trust dari Malaysia, dengan dukungan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) telah menyelenggarakan World Peace Forum (WPF, Forum Perdamaian Dunia) lima kali sejak 2006. Di bawah semangat *One Humanity, One Destiny and One Responsibilities*, pemuka agama, pembuat kebijakan, intelektual, politisi dan aktivis perdamaian dari berbagai macam latar belakang dan kebangsaan melakukan dialog dan menjajagi kerjasama untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai untuk seluruh umat manusia. Dalam beberapa kali kesempatan bahkan PP Muhammadiyah memfasilitasi pertemuan mereka yang masih terlibat konflik, terutama antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front dan Moro Islamic Liberation Front.

Sementara WPF yang sebelumnya memberikan penekanan pada konsolidasi demokrasi multikultural, WPF kelima yang belum lama diselenggarakan pada Deseber 2014 memberikan penekanan pada *Quest for Peace: Sharing Lessons from Conflict Resolution*. Perlu digarisbawahi bahwa tantangan konsolidasi demokrasi multikultural di negara demojrasi maju maupun berkembang, terutama di wilayah berkonflik ada;ah dalam upaya mendesain dan mengimplementasikan resolusi konflik. Resolusi konflik ini, yang dikonseptualisasikan sebagai metode dan proses dan digunakan dalam memfasilitasi pennyelesaian yang damai merupakan prasayarat dari rekonsiliasi mereka yang bertikai karena perbedaan prinisp terhadap nilai, motivasi, persepsi ataupun ide. Berbagai wilayah yang rentan konflik seperti Kosovo di Eropa Tenggara, Pattani di Selatan Thailand, Mindanao di Filipina Selatan, Aceh dan Ambon di Indonesia, Afrika Selatan, Nigeria

dan ketegangan antara umat Buddha dan Muslim di Myanmar dalam proses kondolidasi demokrasi mereka memperlihatkan dalam derajat tertentu keberhasilan (*success stories*) dan kegagalan (*failed stories)* dalam upaya resolusi konflik. Resolusi konflik ini biasanya mengambil bentuk deklarasi gencatan senjata, pelucutan senjata, penarikan pasukan atau reformasi kepolisian.

Beberapa kasus resolusi konflik yang melibatkan pemerintah, organisasi dan aktivis perdamaian maupun pakar menimbulkan determinasi dan optimisme atas keberhasilan yang ada, namun kasus-kasus yang lain menimbulkan rasa frustasi berkepanjangan atas kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan ini sebagai esensi menjadi *lessons learned* dalam upaya kita menciptakan perdamaian yang langgeng. Ini, pada gilirannya, menjadi penting untuk memastikan setiap pihak memiliki komitmen, tanggung jawab dan kesamaan persepsi bagaimana hubungan yang damai dan interaksi yang produktif antar berbagai pihak dapat dikelolala, dipelihara dan dipertahankan.Tentu saja, sementara setiap kasus dan konteks resolusi konflik memberikan kita tantangan yang unik dan khusus, praktik-praktik baik atau *success stories* sudah seyogyanya dapat diserbarkan ke setiap pihak yang terlibat karena ini memiliki nilai strategis dalam upaya menciptakan dunia yang aman dan damai.

Praktik-praktik baik ini dapat kita temukan sebagai prakarsa baik antara pemuka agama maupun antar kelompok masyarakat. Misalnya, pada 3-4 Maret 2015 yang lalu pemimpin umat Muslim dan Buddha berkumpul di Yogyakarta. Pertemuan tingkat tinggi umat pemimpin umat Buddha dan Muslim ini mengambil tema *Overcoming Extremism and Advancing with Justice* dan diselenggarkan oleh core groups dari International Forum on Buddhist-Muslim Relations (BMF) (Blumberg, 2015). Group inti dari BMF ini terdiri dari International Network of Engaged Buddhists, International Movement for a Just World, Muhammadiyah dan Religions for Peace. Yang menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi di Yogyakarta ini adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) and Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mereka mendeklarasikan Pernyataan Yogyakarta, yang berisi; k*ami, pemimpin Buddha dan Muslim, memahami* bahwa para pendukung kami telah membangun hubungan yang harmonis, yang menjadi dasar untuk membangun perdamaian dan kemakmuran di berbagai belahan dunia. Dalam masing-masing teks kitab sucinya, Buddha dan Islam sama-sama menekankan pentingnya perdamaian yang menyeluruh dan positif, yang merengkuh perdamaian diri, perdamaian antar sesama manusia dan perdamaian

dengan alam. *Kami kembali menekankan* bahwa Islam dan Buddha adalah agama yang penuh kesih sayang dan welas asih yang memiliki komitmen pada keadilan bagi seluruh umat manusia.

Kedua tradisi dari kedua agama ini menghormati kesucian kehidupan dan mewarisi martabat dan kehormatan manusia, sebagai pondasi seluruh hak-hak asasi manusia tanpa pembedaan suku, warna kulit, bahasa atau agama. *Kami menolak* penyalahggunaan agama untuk mendorong diskriminasi dan kekerasan. Buddha dan Islam telah disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk tujuan politik mereka dengan menyulut prasangka dan stereotip, dan memantik diskriminasi serta kekerasan.

Dengan tegas, menolak penyalahgunaan tersebut dan menyerukan untuk melawan tafsir dan aksi keagamaan yang ekstrim melalui narasi perdamaian otentik kami. *Kami juga memahami* perlunya memperkuat peran pemerintah untuk menolak diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Berdasarkan instrumen hukum yang telah diterima secara universal seperti Artikel 20 dari International Covenant on Civil and Political Rights dan United Nations Human Rights Council Resolution 16/18, *kami menyerukan* kepada seluruh negara untuk memenuhi tanggungjawab mereka dalam melindungi segenap warga negaranya dari kebencian agama dan suku, dan dari dorongan untuk diskriminasi dan kekerasan atas nama agama.

Kebebasan berekspresi mencakup kewajiban untuk saling menghormati. *Kami kembali menekankan* nilai-nilai dasar bersama yang terdapat dalam teks-teks kitab suci kami sebagai berikut: Kebhinnekaan Agama dan Kehidupan Bersama yang Damai, Pemaafan dan Kasih Sayang Universal, Keadilan Universal, Martabat Manusia dan Nir-Kekerasan, Hidup Harmonis dengan Lingkungan, Pluralisme, Toleransi, dan Kebebasan Beragama, Menolak Kebencian, Khotbah Kebencian, Pembalasan Dendam, dan Pentingnya Introspeksi-Diri. (Sumber: International Network of Engaged Buddhist, 2015).

Tentu saja pernyataan di atas tidak akan berbuah apa-apa tanpa ada keterlibatan sayap-sayap muda dari setiap organisasi yang terlibat yang bukan hanya akan mendiseminasi tapi juga 'mendidik' mereka yang berada di akar rumput atau mereka yang memliki pemahaman keagamaan yang sempit dan cenderung radikal. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, misalnya, bukan hanya dapat membantu menyebarkan pernyataan ini ke akar rumput di kalangan internal, namun juga dapat mendesiminasi pernyataan ini sebagai bagian dari kegiatan Darul Arqam Dasar kepada mahasiswa-mahasiswa Muslim asing yang berasal dari Thailand Selatan. Pada saat yang sama generasi muda dari organisasi-organisasi keagamaan

Buddha di Indonesia dan Thailand dapat menyebarkan pernyataan ini hingga ke akar rumput yang pada nantinya nanti akan terjadi *encounter* yang positif antara generasi muda Muslim dan Buddha di Thailand Selatan sebagai upaya mengurangi ketegangan-ketegangan yang masih ada antara kedua umat beragama terbesar di Asia Tenggara ini.

Peran Generasi Muda

Sebagaimana disebutkan di atas, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan ekonomi dan demokrasi yang sedang tumbuh dengan dinamis yang terdiri dari masyarakat yang begitu beragam dari sisi etnik dan agama. Islam dan Buddha adalah dua agama dengan pengikut terbesar di kawasan ini. Sudah merupakan konsekuensi logis bahwa umat dari kedua agama terbesar ini memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang juga besar dalam berperan menciptakan kawasan yang berkemajuan, sejahtera, adil dan damai.

Tidak dapat dipungkiri kedua umat besar di kawasan ini akan turut berperan strategis dalam membentuk wajah kawasan ini sekarang maupun masa yang akan datang. Di sinilah pentingnya peran generasi muda di Asia Tenggara, terutama generasi muda umat Muslim, mengingat dua pertiga populasi di kawasan ini adalah mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Memastikan bahwa generasi muda ini mengenyam pendidikan yang memadai hingga dapat memasuki dunia kerja yang produktif untuk meningkatkan kesejahterannya merupakan hal yang mutlak untuk diperhatikan.

Sejak tahun 1990an, tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menghadapi masa transisi dari sekolah ke dunia kerja menjadi kian jelas. Dalam studi-studi literatur dalam bidang antropologi, geografi kependudukan dan bidang-bidang terkait menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memasuki dunia kerja dengan tantangan yang jauh berbeda dengan generasi orang tua mereka. Studi-studi ini dimulai dari ide bahwa reformasi sosial dan ekonomi global menyuguhkan kesempatan dan dilema baru bagi kehidupan dan gaya hidup generasi muda. Karena itulah kajian-kajian akademik kontemporer seringkali menghubungan generasi muda dengan globalisasi (misalnya Cole dan Durhan, 2008 dalam Naafs, 2012).

Yang digarisbawahi di dalam literatur ini adalah *movement* yang cepat dari komoditas, manusia dan ide di seluruh dunia tanpa dibatasi lagi oleh sekat-sekat negara, terlebih anak-anak muda biasanya tumbuh di dalam sebuah sistem referensi dari budaya yang berbasis komsumen global. Lamanya periode antara pubersitas dan pernikahan menyediakan market yang khas

untuk konsumerisma dan gaya hidup anak muda. Periode inilah yang seharusnya dapat disii oleh pengayaan yang efektif terutama bagi generasi muda di negara-negara berkembang seperti di kawasan Asia Tenggara untuk dapat menjadikan mereka manusia yang produktif, bukan hanya sekedar menjadi konsumen dari produk atau ide global yang diserbarkan oleh negara-negara yang sudah lebih dahulu maju dan menguasai teknologi informasi dan teknologi dalam menyebarkan ide dan produk mereka. Pengalaman menjadi 'muda' sendiri dibentuk oleh keterlibatan di dunia sekolah dan kerja atau lingkungan di mana ia beraktifitas dan ketegantungan pada orang tua mereka (Naafs, 2012).

Jelas bahwa lingkungan tempat mereka dibesarkan akan membentuk karakter dan kepribadian mereka. Diharapkan karakter dan kepribadian ini akan terbentuk ketika mereka menimba ilmu di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah dan turut dibesarkan di lingkungan Persyarikatan melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan Ikatan Mahasiswa Muhanmadiyah. Banyaknya mahasiswa-mahasiswa Muslim dari Thailand Selatan yang mengambil bidang-bidang studi non-agama di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah selain akan meningkatkan kapasitas mereka juga akan membantu upaya de-radikalisasi di kalangan Muslim minoritas di negera tersebut dan mendorong integrasi mereka ke dalam masyarakat Thailand yang lebih luas dan beragama mayoritas Buddha dalam upaya pembangunan dan penghilangan sekat-sekat ketegangan antara umat Muslim dan Buddha, tentu kelak ketika mereka pulang ke tanah air dan terlibat di dalam pembangunan di daerah dan tanah airnya. Nilai-nilai kemuhammadiyahan diharapkan akan menggantikan ideologi konsumerisme yang dihantarkan melalui proses globalisasi di mana arus manusia tidak lagi terbendung oleh sekat-sekat negara.

Karena itulah upaya pengkaderan mereka salah satunya melalui Darul Arqam Dasar ketika mereka masih menjadi mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan periode yang strategis untuk pada akhirnya nanti turut memjadi kader Muhammadiyah di tanah air mereka. *Life style* anak-anak muda Barat sebagai episentrum peradaban sekaligus kapitalisme dunia yang merangsek dan menyebar menembus batas-batas negara melalui globalisasi diharapkan dapat tergantikan dengan nilai-nilai Al-Islam yang mereka dapatkan ketika menjadi mahasiwa di perguruan-perguruan tinggi Muhamamadiyah dan ketika menempuh proses pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Namun demikian semua upaya ini bukanlah tanpa tantangan, selain

masalah kualitas pendidikan dan kesempatan untuk bekerja, paham radikalisme agama juga sedikit-banyak digandrungi oleh sebagian generasi muda di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Muhammad Najib Azca (2013), misalnya, mengkaji fenomena radikalisme di kalangan generasi muda Muslim di Indonesia pasca Orde Baru dengan menggunakan perspektif teori gerakan sosial (*social movement theory*).

Melalui pendekatan *passionate politics* dalam teori gerakan sosial, Najib beragumentasi bahwa gejala radikalisme di kalangan generasi muda Muslim Indonesia dapat dilihat sebagai 'aksi identitas' yang dilakoni dalam upaya menyikapi dan menjawab 'krisis identitas'yang mereka alami di tengah perubahan dramatis ketika jatuhnya rezim Orde Baru dan pada fase awal terbentuknya negara demokrasi Indonesia. Sementara Zuly Qodir (2013) melakukan analisis terhadap gerakan radikalisme agama dengan menggunakan pendekatan gerakan sosial keagamaan. Zuly Qodir mengkaji literature konseptual tentang generasi muda dan radikalisme agama yang dipadukan dengan analisis survei lapangan. Zuly menyimpulkan berbagai faktor yang selama ini dianggap dominan dalam memberikan pengaruh bagi tumbuhnya radikalismen agama dan bagaimana sebagian generasi muda menjadi menggandrunginya, faktor-faktor kondisi sosial juga berpengaruh dan dapat menjadi akar permasalahan yang paling utama. Faktor-faktor tersebut adalah ketimpangan ekonomi, situasi sosial-politik dan komitmen keagamaan. Untuk dapat menghalau gerakan radikalisme di kalangan generasi muda ini, jika kita mengikuti argumentasi Zuly Qodir, maka faktor-faktor tersebut sangat penting untuk segera dijawab dengan konkrit. Kalau tidak, alih-alih semangat dan otentisitas KH Ahmad Dahlan dalam menghargai pluralisme, namun semangat anti-pluralisme atau anti Bhinneka Tunggal Ika akan tersebar melalui jejaring sosial media dan media mainstream dan diserap juga oleh mahasiswa-mahasiswa asing yang sedang mendapatkan beasiswa untuk studi di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena itulah Zora A. Sukabdi (2013) menyarankan agar fungsi pendidikan agama segera dikembalikan untuk memperkokoh pembangunan karakter dan mentalitas generasi muda.

Membangun Peradaban Masyarakat Sejahtera dan Damai di ASEAN

Dari uraian di atas, kita dapat melihat betapa penting dan strategis peran generasi muda di kawasan ini. Secara umum, generasi muda Asia memiliki karakter positif dalam hal berkaitan dengan studi. Secara khusus, mahasiswa Asia Tenggara memiliki reputasi memliki sikap yang positif

terhadap pendidikan dan memiliki prestasi akademik yang membanggakan. Karena itulah kita patut berkeyakinan bahwa para mahasiswa dari Asia Tenggara, termasuk mereka sekarang yang sedang menempuh studi di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah – terutama mereka yang berasal dari minoritas umat Muslim di Thailand yang mayoritas beragama Buddha – dapat meraih presitasi gemilang dan nantinya dapat memberikan sumbangan penting bagi masing-masing masyarakat dari mana mereka berasal. Setelah berbicara dengan mereka, saya dapat merasakan dorongan dan semangat yang begitu kuat untuk menyelesaikan studi mereka di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah. Selain memperdalam berbagai pokok studi yang berkaitan dengan agama Islam, banyak di antara mereka juga memperdalam ekonomi syariah, teknik, pendidikan dan lain sebagainya. Saya yakin apa yang mereka lakukan sekarang sangat strategis, bukan saja dilihat dari sisi pembangunan perdamaian antara para pemuda Muslim minoritas dengan pemuda Buddha mayoritas di negara asal mereka, tapi juga dilihat dari sisi integrasi ekonomi di mana kita semua sedang bergerak menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

KTT ASEAN ke 9 di Bali tahun 2003 menyepakati Bali Concord II untuk membentuk ASEAN Community dalam rangka mempererat integrasi ASEAN. Ada tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan dengan tiga pilar didalam ASEAN Vision 2020, yaitu pada bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community).

Sebagaimana tercantum pada ASEAN Vision 2020, MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomim yaitu.... *"To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is free flow of goods, services, investment, skill labor and free flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020."*

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint pun disusun untuk membantu tercapainya intgerasi ekonomi ASEAN melalui AEC. Blueprint ini terdiri dari empat pilar utama: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dengan dukungan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdirik dan aliran modal; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi dengan elemen perauran kompetensi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan

dengan pertumbuhan ekonomi yang errata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan upaya integrasi ASEAN bagi Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi seara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan koheran dalam konektifitas ekonomi dengan daerah luar kawasan dan peningkatan peran dalam jejaring produksi dalam tataran global (Wangke, 2014).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir yang dilandaskan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Untuk menempuh ini, ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, berorientasi keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral. MEA akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal yang akan membuat ASEAN lebih kompetitif dan dinamis pada level global. Adapun bentuk kerjasamanya adalah: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi professional, konsultasi mendalam terkait kebijakan nakro ekonomi dan keuangan, pembiayaan perdagaangan, peningkatan ketersediaan infrasturktur, pengembangan transaksi melalui e-ASEAN dan peningkatan keterlibatan sektor swasta. Karakteristik utama MEA adalah: pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang kompetitif dan wilayah pembangunan ekonomi yang merata, terintegrasinya secara penuh daerah daerah dengan ekonomi global (lihat juga Kadin Indonesia, 2013).

Menilik dari upaya perdagangan bebas, hampir 80 persen perdagangan Indonesia sudah terbebas dari hambatan dengan demikian produk Indonesia tidak akan menemui berbagai masalah yang serius. Bahkan produk dari ekonomi berbasis kerakyatan memiliki peluang besar untuk dapat menembus pasar negara ASEAN. Pemerintah Indonesia juga telah mendorong upaya percepatan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dengan memberikan insentif *tax holiday* bagi investasi-investasi di luar Pulau Jawa antara tahun 2011-2013, dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak terpusat hanya di Pulau Jawa saja (Wangke, 2014).

Secara keseluruhan, dilihat dari aspek antropologis dan sosiologis, upaya menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN sebenarnya bukanlah perkara yang ringan, tantangan sosial cukup berat dan kompleks, namun ini bukannya tidak mungkin untuk dihadapi. Terlebih peradaban yang adil dan damai hanya dapat dibangun dalam masyarakat yang sejahtera dan memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang tinggi. Dengan kata lain, kesejahteraan ekonomi dan sosial merupakan prasyarakat bagi terjalinnya

hubungan yang harmoni antara kelompok masyarakat termasuk antara umat beragama.

Lebih jauh lagi, hubungan sosial dan ekonomi juga diperkuat dengan semakin berkembangnya penggunaan Information and Communication Technology (ICT). MEA telah menargetkan transaksi perdagangan melalui e-ASEAN. Di tahun 2001, hanya ada 114.304.000 pengguna internet di Asia. Jumlah ini meningkat menjadi 1.016.799.079 pada bulan Maret 2011. Dalam rentang waktu 10 tahun, lebih dari 24% dari 4 miliar manusia di Asia telah menggunakan internet. Sementara di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari *We are Social* yang dirilis pada bulan Maret 2015, dari 74 juta pengguna media sosial di Indoneia yang paling banyak digunakan adalah Facebook (14%), WA (12%), Twitter (11%). Meningkatnya penggunaan internet menunjukkan bahwa ICT dapat memberikan alternatif ruang dan saluran untuk pembangunan partisipasi keagamaan, budaya dan politik, yang juga akan memperkuat masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi.

Akan tetapi, untuk dapat menempuh *upper social mobility* di kawasan yang begitu dinamis ini, para generasi muda termasuk mahasiswanya harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai dan sesuai. Dalam hal ini Muhammadiyah telah mengambil peran yang terhormat dengan menyediakan beasiswa bagi pada generasi muda di kawasan ini, terutama generasi muda Muslim dari kawasan rentan konflik di Thailand Selatan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara memiliki reputasi memiliki sikap positif terhadap pendidikan dan memiliki prestasi akademik yang juga membanggakan. Kita perlu optimis bahwa mereka yang sekarang menempuh studi di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah nantinya akan meraih prestasi gemilang dan berperan penting dalam pembangunan masyarakat di tanah airnya. Di samping itu ini pun menjadi tantangan bagi para mahasiswa dari tanah air karena dengan MEA maka *people's mobility* akan menjadi sangat dinamis dan peluang pekerjaan di tanah air akan menjadi kompetitif dengan masuknya tenaga asing dan terbukanya juga peluang-peluang karir di negara-negara ASEAN lainnya bagi para mahasiwa dari tanah air.

Akhirul Kalam

Karena itulah seminar internasional *The Role of Muslim Youth in Building Just and Peaceful Civilisation in Southeast Asia* yang akan diikuti oleh Darul Arqam Dasar Internasional ini penting untruk meningkatkan kesadaran para pemuda Muslim di Asia Tenggara yang sedang menempuh studi di

perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah mengenai dinamika kontelasi politik, ekonomi dan budaya terkait dengan tantangan kehidupan harmoni antar umat beragama dan MEA dan peran yang akan mereka proyeksikan di masa yang akan datang sebagai pemimpin Muslim yang mumpuni. Memasuki abad kedua ini, Muhammadiyah telah menegaskan kembali komitmennya untuk terus melakukan gerakan pencerahan (tanwir).

Gerakan pencerahan ini adalah wujud dari Islam yang berkemajuan merupakan jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan dari berbagai bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan dan ketidakadilan hidup umat manusia. Di sinilah peran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam memupuk kader-kader internasional yang kompeten bukan hanya dalam menyebarkan syiar Islam tapi juga bersaing secara positif dan produktif di tengah masyarakat yang semakin terintegrasi secara sosial dan ekonomi. Alih-alih tergelincir ke lembah radikalisme agama yang penuh aksi kekerasan, para generasi muda Muslim di Asia Tenggara akan menjadi lapisan masyarakat usia produktif dan kapabel yang bukan hanya memiliki keshalehan individu tapi juga keshalehan sosial.

Daftar Pustaka

Amirrachman, R. A. (2014). Education in the conflict-affected Moluccas: Local tradition, identity politics and school principal leadership. *South East Asia Research, 22*(4), 561-578. Diakses pada 4 Juni 2015 dari http://www.ingentaconnect.com/content/ip/sear/2014/00000022/00000004/art00007?crawler=true

Azca, M. N. (2013). Yang muda, yang radikal: Refleksi sosiologis terhadap fenomena radikalisme kaum muda Muslim di Indonesia pasca Orde Baru. *Maarif Arus Pemikiran islam dan Sosial, 8*(1), 14-44.

Blumberg, A. (2015). Buddhist, Muslim leaders push for peace in conflict areas. *The Huffington Post.* Diakses pada 13 Juni 2015, dari http://www.huffingtonpost.com/2015/03/20/yogyakarta-statement-peace_n_6896576.html

Fiardini, R. (2015). Din Syamsuddin: Sediakan pulau warga Rohingya. *Okezone.* Diakses pada 9 Juni 2015, dari http://news.okezone.com/read/2015/06/09/337/1162624/din-syamsudin-sediakan-pulau-untuk-warga-rohingya

Fuller, T. (2015). Myanmar to bar Rohingya from fleeing, but won't address

their plight. *New York Times*. Diakses pada 13 Juni 2015, dari http://www.nytimes.com/2015/06/13/world/asia/myanmar-to-bar-rohingya-from-fleeing-but-wont-address-their-plight.html?_r=0

International Network of Engaged Buddhist. (2015). Yogyakarta Statement-Buddhist Muslim Summit [Electronic Version]. Diakses pada 4 Juni 2015, dari http://www.inebnetwork.org/component/content/article/44-bmf-article/622-yogyakarta-statement-buddhist-muslim-summit-march-4-2015

Jahroni, J. (2004). *Gerakan salafi radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Kadin Indonesia. (2013). *Masyarakat Ekonomi ASAN 2015: Peluang dan tantangan bagi UMKM Indonesia*: Kadin Indonesia dan European Union.

Naafs, S. (2012). *Youth, work and lifestyles in an Indoneia industrial town (unpublsihed dissertation)*. International Institute of Social Studies, The Hague.

Qodir, Z. (2013). Perspektif sosiologi tentang radikalisme agama kaum muda. *Maarif Arus Pemikiran islam dan Sosial, 8*(1), 45-66.

Rusdianto. (2015). Kebudayaan Muhammadiyah: Diplomasi geokultural perdamaian dunia internasional, menciptakan keadaban masyarakat global. *Jurnal Diplomasi*, 7(2), 32.

Sukabdi, Z. A. (2013). Kaum muda dan radikalisme. *Maarif Arus Pemikiran islam dan Sosial, 8*(1), 82-96.

Wangke, H. (2014). Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Info Singkat Hubungan Internasional: Kajian Singkat terhadap isu-isu Terkini*. Diakses pada 5 Juni 2015, dari http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-4.pdf

STRATEGI KEBUDAYAAN MUHAMMADIYAH

Sudarnoto Abdul Hakim

Topik tentang kebudayaan, terutama kaitannya dengan Muhammadiyah, nampak masih jarang diberi perhatian secara serius padahal tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Masyarakat telah dan terus menciptakan kebudayaan dan kebudayaan akan terus mengalami perjalanannya bersentuhan, berinteraksi, berakomodasi atau berasimiliasi dengan elemen-elemen kebudayaan lain. Kebudayaan terkadang juga mengalami benturan, sebagaimana yang pernah dibahas oleh Samuel P. Huntington. Ada perubahan-perubahan yang sifatnya evolusioner, ada juga yang revolusioner. Yang pasti bahwa ada banyak faktor penting yang ikut mengiringi dan mewarnai gerak kebudayaan masyarakat antara lain tokoh. Tokoh menjadi faktor penting memainkan peran sebagai trend setter mengarahkan perubahan.

Sejak awal pengembaraan intelektual dan keagamaannya dari Kauman hingga Mekah hingga kiprahnya merintis dan memimpin Persyarikatan Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan telah memberikan sinyal kuat adanya langkah-langah penting dalam meletakkan landasan memperkokoh dan mengembangkan kebudayaan. Artikel ini berusaha mengeksplorasi *Dahlan's ways* membangun kebudayaan yang mencerahkan.

Monoteisme Liberatif

Kemurnian akidah diyakini merupakan langkah awal yang sangat penting didalam menyiapkan bangunan kebudayaan yang kokoh. Sebagaimana yang dicontohkan Nabiyullah Ibrahim dan kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Rasulullah menata cara pandang atau *way of life* sangatlah

penting karena cara pandang inilah yang akan mengarahkan gerak kehidupan. Tauhidlah pilihannya. Memasrahkan dan menggantungkan diri kepada hal-hal temporal duniawi sehingga meyakini sikap itulah yang akan menyelamatkan kehidupan adalah menyesatkan dan membelenggu. Karena itu harus ada kesadaran mendalam sekaligus keberanian untuk memotong urat nadi leher kebudayaan duniawi sekular --yang digambarkan dengan memotong patung dan leher kambing--dan menggantinya dengan paradigma baru kebudayaan alternatif yang jauh lebih menjanjikan dan mencerahkan (*al-Hadhoroh wa al-Tsaqafah al-Munawiroh*) yaitu sebuah kebudayaan luhur yang dibangun di atas landasan Tauhid. Nurcholish Madjid menyebutkan Tauhid itu adalah langkah sekularisasi yaitu memisahkan yang sakral tetap sakral jangan diprofankan dan yang profane tetap profane jangan disakralkan. Atau, dalam satu ungkapan bahwa pemurnian akidah atau gerakan purifikasi (*purifying the faith)* itu bermakna desakralisasi alam, jangan menuhankan alam dan hal-hal temporal duniawi lainnya. Mendamba-dambakan duniawi material akan menjebak ke dalam prilaku koruptif, hedonis, menumpulkan sensitifitas nurani dan mendangkalkan akal, mendorong terciptanya ketidak adilan.

Memurnikan dan memantapkan Tauhid, sebagai salah satu perhatian penting Ahmad Dahlan melalui Persyarikatan Muhammadiyah, bermakna; (1) Menata hati dan cara pandang supaya tertib dan tidak terjadi penyelewengan. Hati yang menyeleweng akan mengakibatkan angkara murka, kerakusan, hawa nafsu yang tak terkendali dan permisif. Akal yang menyeleweng akan mendorong filsafat, rasionalitas dan produk ilmu pengetahuan dan teknologi sangat eksploitatif, bukan untuk kemaslahatan bersama (*Maslahah Ammah*). Atau, sebaliknya, akal yang menyeleweng akan mengakibatkan kegelapan karena ilmu pengetahuan tidak tumbuh dengan sehat. Lalu, penyelewengan cara pandang akan mengakibatkan tidak jelasnya arah atau tujuan panjang dari kehidupan. Makna hidup atau hidup yang bermaknapun menjadi tidak jelas. (2) Membebaskan dari belenggu filsafat duniawiyah (materialisme, hedonisme) dengan segala akibat yang ditimbulkan misalnya eksploitasi, ketidakadilan, kerakusan, korupsi, penindasan, diskriminasi. (3) Membangun dan memperkokoh spirit *al-Ma'iyah* (kebersamaan atau *togetherness*), menolak dan melawan *al-Tafaruq* (pertentangan, konflik atau antagonisme untuk alasan dan atas nama apapun), memperkokoh *al-Musawat* (kesamaan, kesederajatan, *equity* atau *egaliter*), *al-Tawazun* (berimbang atau *equilibrium*), *al-Adalah* (keadilan atau *justice*), *al-Wasth* (moderat) dan penghormatan terhadap perbedaan. Inilah yang juga dibangun

oleh Muhammadi Rasul saat memimpin Madinah.

Itulah "esensi" dari gerakan purifikasi yang dilancarkan oleh Ahmad Dahlan dan kemudian Muhammadiyah tidak saja memberantas *Takhayul, Bid'ah* dan *Churafat.* Purifikasi adalah menawarkan Tauhid yang liberatif (membebaskan) karena tiga prinsip di atas yang sangat kuat khususnya kepada mereka yang secara sosial dan ekonomi dan bahkan kemudian secara kultural, intelektual dan politik terpinggirkan secara sistemik. Ekspresi *behavioral* atau manifestasi dari Tauhid ini ialah membebaskan siapa saja yang bermartabat dan kedaulatannya telah terbelenggu dan terinjak-injak. Penggunaan nama Muhammadiyah bagi persyarikatan ini berarti mengikuti langkah-langkah Muhammad Rasulullah melakukan gerakan sosial keagamaan yang membebaskan, memerdekakan dan mencerahkan. Filsafat kebudayaan yang ditancapkan sangat jelas, prinsip-prinsip dasar apa dan ke mana arah kebudayaan juga jelas. Atas dasar ini juga Muhammadiyah saat ini menggelorakan *Jihad Konstitusi* agar: (1) masyarakat, negara dan bangsa terbebaskan dari belenggu kenestapaan strukturalnya dalam bidang apapun, (2) kedaulatan dan martabat masarakat, negara dan bangsa terlindungi. Jihad ini secara teologis memiliki landasan yang kuat dan secara kebangsaan juga sangat relevan dan benar-benar dibutuhkan.

Renaissans Pendidikan

Sejak awal berdirinya Muhammadiyah mempelopori untuk menawarkan sebuah model baru pendidikan sebagai alternatif dari pendidikan dikotomik sekular di pusat-pusat perkotaan di bawah kontrol pemerintah Belanda pada waktu itu dan pendidikan Islam yang dikembangkan di lingkungan pondok-pondok pesantren di desa-desa. Pendidikan gaya baru ini menawarkan beberapa hal strategis yaitu berorientasi kepada upaya-upaya mengangkat derajat dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan sebagai akibat dari sikap atau kebijakan pendidikan pemerintah yang diskriminatif. Tidak sedikit masyarakat yang tidak memperoleh akses pendidikan yang wajar karena diskriminasi ini dan Muhammadiyah menyediakannya. Orientasi humanistik ini menjadi sangat khas di Muhammadiyah. Pendidikan memang pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya. Kepribadian diperkuat, wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan dan integritas diperkokoh. Pendidikan tidaklah sesederhana dipahami atau diperlakukan sebagai mesin pencetak atau alat industri yang melahirkan pekerja yang mampu meraup keuntungan-keuntungan atau kenikmatan-kenikmatan ekonomi (*economic advantages*) sebesar-besarnya. Ada tujuan-

tujuan moral yang sangat panjang dari Muhammadiyah. Di pendidikan ada soal Tuhan, soal kepribadian, soal moralitas, soal ilmu yang integratif dan ada soal pertanggung jawaban untuk membangun kemakmuran atau kesejahteraan yang sejati.

Kebudayaan yang memberikan tempat bagi kemanusiaan harus dibangun melalui pendidikan paradigmatik seperti ini. Spirit dan kepeloporan Muhammadiyah menawarkan pendidikan yang membebaskan dan humanistik ini tentu merupakan langkah yang cukup berani pada waktu itu dan tentu menjanjikan sebuah perubahan penting (kemajuan) dalam kehidupan masyarakat. Gerakan pendidikan ini dibangun dengan spirit filantropis yang sangat luar biasa. Meskipun pada kenyataannya Muhammadiyah menerima subsidi dari pemerintah dan menuai pro dan kontra sebetulnya, namun watak dan kepejuangan filantropik warga Muhammadiyah ini telah ikut mendorong secara sangat signifikan bagi perkembangan pesat dan massif pendidikan Muhammadiyah bahkan hingga hari ini. Karena itu tidak berlebihan untuk ditegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki pengalaman yang sangat penjang dalam mengelola pendidikan modern dengan modal spirit pembebasan, kemanusiaan, kemajuan dan filantropik. Ini adalah kepeloporan Muhammadiyah untuk *renaissans* pendidikan sebagai salah satu pilar penting kebudayaan berkemajuan.

Problemnya adalah bahwa soal-soal atau prinsip-prinsip pendidikan sebagaimana yang diuraikan di atas nampaknya semakin tidak terasa di lingkungan pendidikan kita saat ini. Disamping berbagai progres yang telah diraih, masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan justru telah menjadi tempat eksploitasi termasuk korupsi dan penindasan secara sosial ekonomi dan bahkan fisik. Keteladanan mulai terkubur, nilai-nilai luhur terpinggirkan dan karena itu sikap skeptis terhadap kemampuan lembaga pendidikan sebagai tempat yang baik dan menyenangkan menyemai ilmu, memperkokoh kepribadian dan menempa integritas tak terhindarkan. Karena itu *renaissans* pendidikan kembali perlu dilakukan oleh Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah kembali menjadi pelopor menawarkan pendidikan paradigmatik alternatif dari pendidikan yang sudah menjebak dan membelenggu tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan kebudayaan yang luhur.

Networks, Diplomasi Kultural

Perjumpaan, dialog dan hubungan-hubungan intelektual keagamaan Dahlan dengan beberapa ulama penting sejak dari Kauman hingga di Mekah

merupakan pengalaman yang sangat berharga dan peristiwa historis penting yang kemudian banyak berpengaruh terhadap gerakan Muhammadiyah. Bersama Muhammad Hasyim yang kemudian dikenal dengan nama KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU), Dahlan adalah murid Syaikh Sholih bin Umar al-Samarani atau dikenal dengan nama KH. Saleh Darat dari Semarang. Mendahului Dahlan, Muhammad Mahfud al-Turmusy (Termas) juga menjadi murid KH. Saleh Darat. Di kemudian hari Dahlan bersama Hasyim Asy'ari menjadi murid Muhammad Mahfud yang dikenal sebagai seorang ahli Hadits dan Ushul Fiqih dan karena itu mendapatkan julukan *al-Allamah al-Muhadits al-Musnid al-Faqih al-Ushuli al-Muqri* dari *Syeikh Yasin al-Fadani* (seorang Ulama Mekah yang berasal dari Padang). Dua-duanya belajar Fiqih Syafii dan Ilmu Kalam Asy'ari.

Ketika bermukim di Mekah, misalnya, Dahlan berjumpa dan menjadi murid seorang Ulama/Imam penganut Mazhab Syafi'i berasal dari Minangkabau yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1855-1916). Ahmad Khatib adalah keturunan hakim kaum Paderi dan tokoh penting Pembaruan Islam. Selain Dahlan, murid lain Ahmad Khatib antara lain Muhammad Taib Umar (1874-1920), Abdullah Ahmad (1878-1933), Muhammad Jamil Jambek (1860-1947) dan Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul (1879-1945), ayah Hamka. Di Mekah Dahlan juga bertemu sekaligus menjadi murid Syeikh al-Allamah al-Sayyid Abubakar Syatha ad-Dimyathi, juga seorang ulama bermazhab Syafi'i. Abu Bakarlah yang kemudian memberikan/mengganti nama Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan.

Hubungan Dahlan dengan para guru dan sahabat-sahabatnya terutama selama pengembaraan intelektualnya di salah satu pusat studi Islam internasional yang sangat penting ini, yaitu di Mekah, tentu menjadi bagian penting dari dinamika dan transformasi intelektual Islam yang terjadi di Indonesia. Ini merupakan kelanjutan dari, apa yang disebut oleh Azyumardi Azra sebagai, jaringan ulama Haramain-Nusantara yang memang telah terbangun selama ini dengan segala pengaruhnya yang sangat *ekstensif* dalam bangunan kebudayaan Indonesia. Tentu saja, selama periode ini, akses Dahlan terhadap berbagai sumber-sumber pemikiran keislaman yang bervariatif sangatlah terbuka. Termasuk pemikiran yang berkembang di Mesir (Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Jamaluddin Afghani).

Komunikasi dan jaringan global merupakan salah satu faktor kunci yang ikut menentukan atau mewarnai arah perkembangan suatu masyarakat dan kebudayaannya. Disamping penguasaan alat-alat komunikasi internasional,

ada juga soal-soal kultural yang harus dikompromikan. Diantaranya ialah tarik menarik atau konflik pilihan kecenderungan global-lokal, transnasional-nasional. Namun yang pasti, dialog-dialog dan international *networks* and *collaboration* sangatlah dibutuhkan tidak saja dalam kerangka dakwah akan tetapi juga diperlukan untuk membangun atau menciptakan budaya respek pemikiran dan bahkan perbedaan kecenderungan politik. Hal ini yang juga dilakukan oleh Dahlan selama pengembaraan intelektual keagamaannya sejak di lingkungan Kauman, Jawa hingga lingkungan persahabatan internasional di Mekah. Saat Dahlan memulai memimpin Muhammadiyahpun peran-peran kultural menjalin komunikasi dan dialog dengan berbagai kalangan dan kelompok-kelompok sosial yang berbeda juga dibuka dan dikembangkan untuk mencari dan menemukan titik-titik persamaan (*Kalimatun Sawa'*).

Rekomendasi

Menyimak perjalanan dan pengalaman Dahlan dari Kauman hingga Mekah dan bahkan hingga ia memimpin Persyarikatan Muhammadiyah, penting dibuat catatan reflektif sebagai berikut: *Pertama, global networks* Muhammadiyah secara ekstensif sangat diperlukan paling tidak untuk mengatakan kepada dunia internasional bahwa Muhammadiyah adalah salah satu representasi penting Islam moderat Indonesia yang bersama dengan kekuatan lain secara bersama-sama: (1) dengan cara-cara dan pendekatan yang tepat menghadapi gerakan Islam transnasional yang radikal, Salafy Jihady dan kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan agama akan tetapi justru melakukan kejahatan dan mengancam kemanusiaan. (2) Membangun kedamaian dan berperan aktif dalam resolusi konflik (*conflict resolution*) di berbagai tempat melalui pendekatan agama dan etika global. Oleh sebab itu, dialog intensif dan kerjasama global secara jujur khususnya di kalangan agama-agama dan komunitas lainnya sangat dibutuhkan dan Muhammadiyah memiliki peluang yang sangat besar memainkan peran-peran strategis *cultural diplomacy* ini secara lebih maksimal. (3) Berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, ekologi, demografi dan lain sebagainya dengan cara mengurangi angka kemiskinan (*poverty reduction*), menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan, membangun kesehatan dan menjaga keseimbangan demografis. Disamping itu, persoalan gender dan hak asasi manusia juga menjadi agenda penting Islam moderat

Kedua, networks secara internasional Muhammadiyah ini juga sudah

merupakan kebutuhan untuk membangun dan memperkuat jaringan komunitas intelektual secara internasional dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan bersama. Berbagai kerjasama akademik dan saintifik, kebudayaan, seni antara pusat-pusat pendidikan Muhammadiyah dengan berbagai pihak atau lembaga internasional sudah waktunya dikembangkan. Spirit internasional Dahlan penting dilanjutkan dengan cara-cara baru. Gerakan *Fathullah Gulen* adalah salah satu contoh penting bagaimana Islam moderat dari Turki ini mengembangkan sayap dan program pendidikan, ekonomi, hubungan antar agama secara internasional dengan cara membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga secara internasional. *Gulen Movement* ini tidak saja memperoleh dukungan dari banyak kalangan masyarakat Turki di luar negeri, akan tetapi berhasil menarik minat dan simpati masyarakat internasional secara lebih luas (antara lain tokoh lintas agama, akademisi/intelektual, lembaga-lembaga sosial-ekonomi dan kemanusiaan, tokoh-tokoh politik dan pejabat pemerintah, serta pengusaha). Dengan jaringan dan *social capital* yang telah dimiliki lebih dari satu abad ini, Muhammadiyah akan memperoleh peluang yang sangat lebar dalam memperkuat internasionalisasi Muhammadiyah. Pengaruhnya juga akan sangat kuat termasuk antara lain dalam rangka membendung arus radikalisme dan Salafisme Jihadi.

KEBUDAYAAN MUHAMMADIYAH:
Diplomasi Geokultural Perdamaian Dunia Internasional, Menciptakan Keadaban Masyarakat Global

Supriadi Djae dan Rusdianto

Kebudayaan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya pandangan antropologis yang dapat di bagi secara dikotomis, yakni keseluruhan aktivitas manusia dan hasil aktivitas. Kebudayaan juga bisa di bagi dalam trikotomis sebagai objektif kajian yang mempunyai tiga aspek atau wujud, adalah *pertama,* kebudayaan sebagai tata tingkah laku manusia berwujud keyakinan, norma, adat istiadat, dan lain sebagainya. *Kedua,* kebudayaan sebagai tingkah laku manusia itu sendiri berwujud keseluruhan sikap manusia yang merupakan manivestasi dari tata tingkah laku, seperti upacara adat.

Ketiga, kebudayaan sebagai hasil tingkah laku bisa berwujud karya-karya intelektual dan monumentalisme. Dari sudut lain, kebudayaan juga bisa dalam konteks nilai dan simbol. Orang-orang bisa menangkap simbol dari bangunan, suara, gerak gerik dan tulisan. Tetapi juga sesungguhnya itu melambangkan nilai-nilai yang dimiliki atau dikembangkan oleh manusia di balik simbol itu. Karena memang, kebudayaan merupakan *people made* (buatan manusia) (Syafiq A Mughni dkk: 2010: 196).

Dalam tradisi gerakan reformis seperti Muhammadiyah bahwa kebudayaan sala satu kegiatan ibadah yang dimaknai dalam dakwah kultural untuk memberikan rasa damai. Tentu memahami hubungan Muhammadiyah dan dinamika kebudayaan harus utuh dengan pikiran jernih tanpa memberikan justifikasi pada pergeseran paradigma dengan

melanggar hal-hal yang dilarang agama, seperti taklid dan bid'ah yang di pahami dalam konteks kultural. Bagi Muhammadiyah untuk menciptakan tatanan sosial kemanusiaan yang berkemajuan sangat memerlukan gerakan *altruisme* kebudayaan sebagai manivestasi keadaban global. Hubungan-hubungan sinkretis budaya perlu dikonstruksi sebagai alat perjuangan *world peace* sehingga tercipta suatu masyarakat yang aman dan damai. Pola kontruktif adalah memberikan pemahaman kepada dunia global bahwa agama sangat memerlukan kebudayaan dan eksistensi kebudayaan itu sendiri membutuhkan peran keagamaan.

Hubungan timbal balik itu akan saling mempengaruhi dalam menentukan arah kehidupan baik sisi ajaran transendensi maupun doktrin ideologi dan imanensi kebudayaan. Karena itu, unsur-unsur kebudayaan masyarakat memerlukan proses perubahan yang lebih cepat melalui inovasi dan pembaharuan karakter. Tentu perubahan sosial inovatif itu terus terjadi akibat dorongan globalisasi dunia yang tidak akan dapat diberhentikan. Faktanya bisa di lihat sekarang, perubahan yang terjadi dalam masyarakat semakin menunjukkan geliat positif maupun negatif.

Dari kultur agraris yang bertahan dalam kultur subsisten dan barter, berubah menjadi kultur persaingan yang mengandalkan pasar dan jaringan. Interaksi penduduk terjadi dengan sangat gampang. Proses migrasi dan pertukaran pekerjaan demikian mudah di dapatkan. Pengetahuan sangat mudah diakses hanya menggunakan pesawat telpon, internet, *ed room.* Dunia maya mendera masyarakat global secara massif (Zoly Qodir dkk, 2010:208). Kadang menghasilkan sikap yang positif apabila komunikasinya hal-hal yang bersifat positif dan terbuka. Bisa juga menghasilkan negatif ketika mengakses segala bentuk kejahatan pornografi pornoaksi maupun jaringan kejahatan global, seperti kekerasa di zona eropa dan peperangan kelompok di berbagai negara teluk semenanjung Arab Saudi, Iran, irak, Afganistan, Palestina dan benua Afrika. Seolah-olah kebudayaan tidak lagi menjadi nafas reformatif dalam kehidupan dunia global sebagai basis penciptaan nilai0nilai baik dalam struktur masyarakat sehingga bverdampak pada terjadinya *deteritori culture* (tidak mengenal budaya).

Apa yang menyebabkan terjadinya deteritori budaya ?, karena adanya komodifikasi dan marketisasi budaya secara massif tanpa menhitung dampaknya. Pelbagai budaya saling campur baur, menyebar dan terus berkembang ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak ada lagi ikatan budaya yang sangat dominan atas masyarakat, terjadi *amalgamasi* (perkawinan-percampuran) dan sinkretis atas apa yang dahulu dianggap

"suci dan baku" saat ini semuanya nyaris tidak bisa dibedakan *"mana yang asli dan mana yang aspal"*, karena telah demikian rumit terjadi percampuran (Ibid, h. 210).

Bagaimana dengan Muhammadiyah menghadapi perubahan dan kecenderungan seperti diatas? sebagai sebuah gerakan dakwah dan memiliki infrastruktur organisasi (cabang istimewa) di seluruh negara-negara di benua Eropa, Afrika maupun benua Asia dan Timur Tengah. Nampaknya Muhammadiyah harus hadir mengisi absensi perdamaian dunia melalui berbagai forum-forum international, model *cross-culturale and diplomacy* kebudayaan (pertukaran dan diplomasi budaya) sebagai antitesa terhadap berbagai bentuk budaya negatif yang berkembang di dunia global, apalagi Indonesia.

Ada banyak bentuk budaya yang telah ditawarkan dan berseliweran di depan hidung Muhammadiyah, dari yang tampak islami, tidak islami, setengah Islami, bahkan tanpa agama dan budaya apapun. Bentuk ini juga sudah terdapat dalam kehidupan nyata masyarakat sejak ribuan tahun.

Muhammadiyah sebagai gerakan kemanusiaan memiliki unsur dakwah yang disampaikan secara lisan dan tulisan dalam ruang lingkup budaya yang bertujuan melakukan *akulturasi* pembinaan terhadap masyarakat global sehingga tidak berada dalam kontestasi dunia konflik sebagai lahan perebutan kekuasaan. Muhammadiyah harus mampu menempatkan diri sebagai gerakan keadaban dan melakukan *diplomacy* lebih luas melalui taraf sospeksitas peradaban, agar Muhammadiyah tidak terjebak pada kubangan (*comberan*) budaya negatif sehingga penting untuk mendidik masyarakat yang berbudaya dan bervisi kemajuan baik secara secara global maupun nasional. (Ibid, h. 214)

Hal yang bisa dipikirkan adalah bagaimana Muhammadiyah bisa memberikan pijakan pada masyarakat Indonesia untuk dapat memilih dari berbagai pilihan gerakan kebudayaan yang berseliweran di depan hidung Muhammadiyah, tanpa dituduh sebagai ormas Islam yang anti kebudayaan, anti produk kecantikan, anti diplomasi, anti perang dan anti kemanusiaan (Ibid, h. 215)

Maka Muhammadiyah harus memaksimalkan merebut pasar kebudayaan global sehingga memiliki peran dan andil besar dalam membawa misi kedamaian dan keadaban masyarakat sebagai ujung tombak perbaikan seluruh sektor kehidupan di berbagai negara, terutama negara-negara konflik yang selama ini tak pernah memberikan rasa aman kepada negara lainnya diberbagai belahan dunia.

Paling tidak, gerakan diplomasi kebudayaan Muhammadiyah dalam meneguhkan perdamaian dan keadaban masyarakat global dapat tercipta dengan baik agar kegalauan sebagian elit Muhammadiyah terobati. Sebagaimana kerisauan dan kegalauan Ahmad Syafii Maarif terhadap Muhammadiyah dengan melempar pertanyaan panas di sebagian kepala warga Muhammadiyah. Tentu melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan "Muhammadiyah mau dibawa kemana dan mau diapakan republik ini?".

Tentu tidak diketahui secara jelas dari pertanyaan itu, namun perlu dikaji lebih jauh bahwa memang Muhammadiyah harus berani mengambil resiko dengan melakukan internasionalisasi struktural organisasi sebagai upaya melibatkan diri dalam agenda diplomatik dan membantu bangsa Indonesia di kancah global dalam mengajukan proposal *world peace* dan merealisasikan janji-janji rekonsiliasi konflik menuju perdamaian oleh sebagian pemimpin-pemimpin negara.

Muhammadiyah seyogyanya menentukan hitam putihnya republik Indonesia, termasuk di kancah global sebagai *soft power civil* bangsa dalam memerankan sikap dan tindakan hubungan akomodatif terhadap seluruh negara di dunia. Tentu visi dan misi Muhammadiyah mengubah wajah perduniaan dengan gerakan *diplomacy of ma'ruf wassulhu* sebagai konsep dan strategi dakwah *transculturation of Muhammadiyah* dengan membawa identitas kebudayaan Indonesia sebagai milik dunia sehingga dapat dinilai bagian dari simbolisasi peradaban.

Jika memang Muhammadiyah bermetamorfosa dalam agenda *cross-culturation, transculturation and transglobalized dakwah* maka sudah waktunya Muhammadiyah menentukan banyak sumberdaya diplomat yang harus digerakkan ke berbagai negara sebagai bagian integrasi dari program organisasi dan sekaligus memperluas basis gerakan dakwah diberbagai belahan dunia internasional. Perkiraan luas, gerakan diplomasi dan komunikasi kebudayaan ini menjadi pilar-pilar peradaban global yang ikut membentuk prilaku keadaban dan karakter khasanah masyarakat internasional. Sehingga Muhammadiyah dapat dikenal sebagai alternatif peradaban dari berbagai stigma gagasan sekular, materialistik dan ateistik yang masih sangat terasa di dunia global.

Dalam diplomasi, kultural (kebudayaan) merupakan aspek yang perlu secara terbuka mendapat perhatian karena kebudayaan itu bersifat melekat dan dekat bersama dinamika masyarakat. Jika budaya antar negara yang berada di masing-masing negara tidak direspon secara positif, maka kebudayaan itu bisa keropos dan terkikis. Kekuatan masyarakat merespon

dan menciptakan sesuatu dari hasil perenungan dan pengolahan terhadap realitas fakta melalu kemampuan berfikir, berasa, dan bertindak akan menentukan kualitas budaya yang diciptakan.

Tidak heran, Jika Van Peursen dalam buku Strategi Kebudayaan mendiskripsikan bahwa kebudayaan sebagai ketegangan antara imanensi dan transendensi, dapat dipandang sebagai cirri has dari kehidupan manusia seluruhnya. Ketegangan kebudayaan global lebih pada lingkaran fakta-fakta yang mengurung manusia dalam keniscayaan alam sekitar di satu pihak, dan keterbukaan yang capai penilaian kritis (evaluasi) di lain pihak. Maka dinamakan ketegangan kebudayaan imanensi (serba terkurung) dan transendensi (mengatasi sesuatu, berdiri diluar sesuatu) (Anwar Abbas dalam M. Azrul Tanjung dkk: 2014).

Dalam tataran kebudayaan Muhammadiyah pada era mutakhir saat ini, tentu tantangannya lebih kompleks seluruh aspek kehidupan masyarakat dan global. Apalagi jika dikaitkan dengan survivalitas konflik antar negara akibat kebudayaan yang dipandang hanya dari imanensi (keyakinan) tindakan dalam persfektif minus nurani. Dekadensi kebudayaan membuat Muhammadiyah deklaratif terhadap situasi global untuk mengembalikan fungsi transendensi sehingga tercipta kehidupan yang baik dan terpelihara hubungan multikultural diantara simpul masyarakat.

Deklaratif itu merupakan tugas fungsional Muhammadiyah memboyong kebudayaan Indonesia sebagai *partner* perdamaian dunia. Karena Indonesia sebagai negara yang memiliki geopolitik dan *geoculturisme* yang begitu strategis dan potensial, seyogyanya menjadi modal utama dalam pengembangan diplomasi kebudayaan sebagai mainseat *world peace* untuk mengeluarkan masyarakat global dari keterjerembab pada perbenturan peradaban. Sumberdaya kebudayaan global bagi Muhammadiyah menjadi sektor menarik dalam membawa perubahan geopolitik untuk menjamin keadaban masyarakat global.

Tentu bagi Muhammadiyah geokultural dengan konsep *education crossculturalism* ini merupakan langkah kemajuan Muhammadiyah dalam mensiversifikasi dunia yang diarahkan pada akulturasi kebudayaan sebagai upaya menjinakkan peradaban kearah sebenar-benarnya. Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai negara besar dan potensial dengan jutaan kebudayaan yang berseliweran seluruh nusantara, apalagi jumlah penduduk sangat besar, keanekaragaman suku, agama, etnis, dan budaya, menjadi faktor kunci dalam mendukung dan memicu kemajuan bangsa.

Dengan kondisi krisis global yang terjadi saat ini, terutama meningkatnya

krisis moralitas yang mendera zona eropa dengan tindakan kekerasan terhadap sesama karena faktor minus imanensi dan transendensi sehingga berakibat krisis percaya diri (*self crisis*). Begitu juga, kawasan teluk timur tengah yang terdiri dari negara Arab dengan menujukkan konflik horizontal yang mengarah pada pertunjukkan kekuatan perang persenjataan sehingga zona kawasan teritorial Arab menjadi proyek kolonialisasi dan imprealisme (Chairul Tanjung dalam M. Azrul Tanjung dkk: 2014).

Hal ini posisi strategis Muhammadiyah membawa Indonesia sebagai jalan tengah diplomasi perdamaian di kawasan Asia, Eropa dan Timur Tengah yang berperan menyampaikan *amar maruf nahi mungkar* di seluruh sektor kehidupan global melalui intrumentasi kebudayaan. Tentu keuntungan bagi Indonesia ketika Muhammadiyah berani tampil sebagai perbaikan wajah dunia serta mampu mengatasi krisis dunia, seperti yang tengah terjadi konflik agama seperti di Myanmar berdampak pada bancakan ras muslim sehingga pengungsi terus meningkat.

Bukan hanya itu, Muhammadiyah bisa menjadi duta Indonesia untuk perdamaian melalui pengembangan pendidikan dan pertukaran budaya diberbagai negara sebagai entitas inklusif dalam mengawal deklarasi kemanusiaan, sosial keadilan, religiusitas dan humanitas di saat percaturan global diambang perpecahan.

Ahmad Dahlan sendiri telah menghayati cita-cita pembaharuan melalui diplomasi antar kebudayaan ketika sekembali dari studinya di mekkah. Dapat dibuktikan bahwa pembaharuan diplomasi yang dilakukan di Indonesia menginginkan perubahan lingkungan dengan gerakan kebudayaan. Tak sulit membuktikannya, saat itu tahun-tahun pertama mendirikan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan mengintrodusir pemikiran dan cita-citanya itu agar dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama.

Gerakan yang dibangun, seperti organisir pemuda-pemuda kauman yogyakarta agar bergotong royong, bermain biola dan pergelaran budaya menyambut tamu-tamu asing yang datang. Simpul perubahan yang dilakukan Ahmad Dahlan telah memberikan dampak bahwa kesadaran tentang perlunya membuang kebiasaan buruk masyarakat yakni terjebak pada fanatisme buta (Deliar Noer: 1980:87).

Adaptasi Muhammadiyah sebagai gerakan diplomatik dalam sejarahnya selalu ada pertukaran kebudayaan baik secara perorangan maupun kelompok. Saat itu, banyak ilmuwan Muhammadiyah dikirim ke Arab, India, Pakistan dan Eropa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ingin mereka dapatkan. Di

lain pihak ilmuwan negara-negara tersebut juga mengirim utusannya ke Muhammadiyah untuk meneliti, pengabdian masyarakat dan berdialog tentang perdamaian dunia. Investasi Muhammadiyah terhadap pola komunikasi dan diplomasi dalam angka-angka terhadap dunia timur tengah dikenal oleh Eropa sebagai angka *arabic wahabiyah* (*arabic numerals wahabi*). Ini terjadi setelah misi studi Ahmad Dahlan dan diplomatik *education geoculturalism* dan ilmu pengetahuan ke Arab bertemu Jamaluddin al Afgani dan lain sebagainya membuat Muhammadiyah di kenal sebagai diplomatik dakwah.

Selain itu, gerakan kultural popular menjadi menarik di Arab kawasan timur tengah yang dibawa oleh Ahmad Dahlan. Karya-karya diplomatik Ahmad Dahlan adalah hiburan-hiburan biola kebudayaan, koran-koran, dan pergelaran kebudayaan gambus qosidah di Arab Saudi sebagai pertunjukkan keadaban Ahmad Dahlan dalam kepiawaiannya memperlihatkan berbagai potensi kebudayaan Indonesia. Ahmad Dahlan memolopori perdamaian dengan mereduksi ekstremisme agama dan kelompok agar berpijak pada kebenaran dan keadilan semata. Di sisi lain, pendegradasian keagamaan masyarakat dianggap sebagai ancaman bagi berkurangnya simpati terhadap perkembangan Islam di Nusantara dan timur tengah. *Interest* besar terhadap pengaruh kultur yang dibawa oleh Ahmad Dahlan dan penterjemahan kebudayaan sebagai alat dakwah di beberapa kalangan Istana negara Arab Saudi dan juga mitra kerja kalangan intelektual Islam saat itu.

Tentu hal ini mempertegas superioritas kultural Indonesia atas bangsa Arab yang dikomandoi oleh Ahmad Dahlan dengan tujuan mempengaruhi kultur gerakan dan pemerintahan di Arab Saudi. Akibat gaya diplomatik kebudayaan Ahmad Dahlan ini, membuat literatur - literatur keilmuan peradaban Asia di eropa memiliki efek positif dimana paradigma pergaulan masyarakat internasional mempunyai pandangan hirarkis terhadap masyarakat, penguasa, bangsawan, tentara, penulis, pendeta, pedagang, pekerja ataupun kelompok-kelompok yang ikut mempengaruhi simpul-simpul masyarakat.

Tidak jauh untuk mengklasifikasikan etika dan tradisi kebudayaan Ahmad Dahlan dalam membawa Muhammadiyah, baik dalam konteks kekuasaan maupun politik. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah selalu menekankan etika diplomasi kebudayaan sebagai *fashion value* Muhammadiyah, yakni pemberdayaan strata sosial, pembebasan dari kungkungan harta benda dan bahaya kikir, memegang teguh hukum moralitas sosial, menjauhkan diri dari kezaliman terhadap simpul kemanusiaan, mementingkan persahabatan

dan pengunaan ilmu pengetahuan, serta membangun peradaba dunia yang penuh keadaban (Deliar Noer: 1980, h. 87).

Bayangkan saja, ketika Ahmad Dahlan bermukim di Arab Mekkah, secara reguler melakukan kontak dengan soekarno presiden pertama Republik Indonesia untuk mendiskusikan masalah-masalah sosial keagamaan, termasuk masalah yang terjadi di belahan dunia lainnya, baik komunikasi bersama sesama ulama yang sudah lama tinggal di Arab Saudi Mekkah, seperti Syehk Ahmad Khatib dari minangkabau, Kiyai Nawawi Banten, Kiyai Mas Abdullah dari Surabaya dan Kiyai Faqih dari Maskumambang maupun dengan pemimpin intelektual Eropa waktu itu. Berdasarkan koleksi buku-buku yang di tinggalkan Ahmad Dahlan, sebagian besar adalah buku yang berbicara pembaharuan, kebudayaan, komunikasi diplomasi dan negosiasi.

Dalam konteks poskolonial agama-agama sebagai aktivitas dan tindakan manusia, Ahmad Dahlan tampil dengan perlihatkan pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dengan berbagai kelompok dalam dunia keagamaan. Ahmad Dahlan secara rutin memberikan ceramah, pengajian dan forum-forum dialog keagamaan kepada semua orang yang datang ke masjid besar kauman ketika itu. Dalam sejarahnya, sangat fenomenal ketika Ahmad Dahlan mengubah arah peradaban umat islam kearah reformatif dengan praktik merubah arah kiblat sholat yang sebenarnya. Akan tetapi tindakan Ahmad Dahlan ini tidak begitu bisa di laksanakan seperti yang di ajarkan di serambi masjid besar karena persoalkan arah kiblat sholat yang merupakan satu hal yang sangat peka waktu itu. Ahmad Dahlan memerlukan waktu satu tahun untuk menyampaikan masalah ini. Pada satu malam tahun 1989, Ahmad Dahlan Mengundang 17 orang ulama yang ada di sekitar yogyakarta untuk melakukan musyawarah tentang arah kiblat. Ahamad Dahlan telah mempersiapkan diri dengan berbagai kitab, dialog pelurusan peradaban Islam pun dimulai, malam itu tak menghasilkan keputusan apa-apa. Namun, dua orang pemuda yang secara diam-diam mendengar pembicaraan itu beberapa hari kemudian membuat tiga garis putih setebal 5 cm didepan pengimaman masjid besar kauman untuk mengubah kiblat sehingga mengejutkan para ulama dan jamaah sholat dhuhur waktu itu (Najamuddin Ramly dan Heri Sucipto: 2010, h. 28-29).

Ahmad Dahlan telah menyerukan perubahan global atas pergulatan pemikiran dan kegalauannya terhadap masa depan dunia, dialog yang dilakukan diatas merupakan refresentasi keberpihakan untuk membenarkan tindakan yang salah terhadap keyakinan antara imanensi dan transendensi.

Maksud dari doktrin Ahmad Dahlan bahwa semua hidup kehidupan adalah ibadah, merupakan bentuk pemurniannya terhadap tuntutan zaman yang belum berkeadilan masih berkutat pada TBC sampai saat ini.

Geokultural Perdamaian Dunia Internasional

Muhammadiyah sebagai diplomator telah banyak memberikan pelajaran pada bangsa Indonesia, sangat dibutuhkan peran organisasi sipil Islam dalam menjinakkan konflik antar negara di dunia. Muhammadiyah misalnya terlebih dahulu melakukan kajian-kajian kebudayaan, apalagi karakternya menghargai konsep multikultural, transnasional, transcultural dan cross cultural yang selama ini menjadi konsentrasi Muhammadiyah dalam berbagai perundingan baik di PBB, forum konfrensi Agama-agama dunia dan forum kebudayaan dunia. Biasanya forum seperti ini melahirkan banyak gagasan perubahan yang di inginkan. Termasuk juga Muhammadiyah pernah memimpin delegasi perdamaian dunia yang bertujuan mencegah konflik yang terjadi selama ini. Dalam perannya sebagai diplomator, Muhammadiyah harus perhatikan beberapa hal adalah (Onong Uchjana Effendy: 2008, h. 177 – 189):

a. Sumber kepercayaan, dalam suatu perundingan, Muhammadiyah akan sukses apabila berhasil menunjukkan *source credibility,* artinya Muhammadiyah mendapat kepercayaan dari *audiens* dunia. Munculnya kepercayaan terhadap Muhammadiyah sebagai *diplomatory* karena keterpaduan I'itikad, moral, keahlian dakwah kultural.
b. Sasaran yang aktif, diplomat Muhammadiyah dalam perundingan harus bersifat fasip - aktif yakni menerima pesan. Karena diplomasi merupakan peluru ghaib yang memindahkan idea atau perasaan, pengetahuan, motivasi, dari satu orang ke orang lain secara otomatis.

Selain itu, Muhammadiyah juga harus memahami bahwa evolusi kebudayaan sejak 9 sampai 16 juta tahun lalu hingga sekarang masih berlangsung secara berangsur. Sebagai akibat perubahan iklim dunia menyebabkan banyak kekerasan konflik horisontal yang terjadi masyarakat global. Tentu pemahaman kita akan evolusi kebudayaan manusia didasarkan pada arkeologis dan tipologis sehingga dapat di interpretasikan sebagai bukti pengetahuan yang perlu dibangkitkan lagi sebagai alat diplomasi perdamaian (William A. Haviland dan RG. Soekardijo: 1999).

Muhammadiyah harus kembali mengkaji proses transisi politik dunia agar peradaban masyarakat terpelihara dalam cakupan keadaban yang peduli

antar sesama. Artinya Muhammadiyah jangan membiarkan tatanan sosial masyarakat harus dilalui dengan ongkos sosial yang mahal. Sebagian karena euforia karena jebolnya tanggul-tanggul otoritarianisme dan masalah-masalah sosial ekonomi budaya yang telah lama kronis. Masyarakat global hanya bisa menonton menyaksikan kekerasan antar agama di Myanmar dan kerusuhan sosial di benua Amerika Eropa dan beberapa belahan dunia lainnya.

Konflik-konflik agama dan kebudayaan yang menghebat itu selama 20 tahun terakhir ini telah memakan banyak korban, termasuk propaganda kaum Yahudi terhadap umat Islam dengan menujukkan sikap *deletimate* terhadap ketokohan sakralitas Nabi Muhammad yang di gambarkan melalui karikatur yang berdampak pada ekstremitas dan penciptaan gelombang kebencian terhadap perkembangan Islam. Kini konflik agama terlihat semakin meruncing, akar penyebab konflik terus menjadi sumbuh api peperangan. Terutama kebahasaan jihad di kontruksikan seolah-olah ekstreamitas dan menjustifikasi Islam sebagai agama pemelihara dan pengelola kekerasan. Sungguh prihatin terhadap kondisi seperti ini. Maka Muhammadiyah harus lahir sebagai penopang gerakan pencerahan dan membangkitkan keadaban prilaku manusia sehingga peran-peran Muhammadiyah dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia dan bentuk pelaksanaan ketertiban umum yang berdasarkan teransendensi (ketuhanan).

Muhammadiyah harus mengetahui potensi konflik dan melakukan antisipasi. Selama ini potensi konflik diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi, belum stabilnya geopolitik dunia dan akar konflik itu seperti api dalam skam. Apalagi transisi kebudayaan yang berakibat pada perbenturan mulai dari cara berfikir, sikap, tindakan dan prilaku sosialnya yang diyakini menyimpan potensi konflik yang sangat membahayakan bila tidak di kelola dengan baik (Irfan Abubakar dan Chaider S Bamualim: 2006, h. ix & 17).

Sebagaimana Hungtington sinyalir dalam tulisan artikelnya *the clash of civilization* bahwa Samuel P. Hungtongton melakukan interpretasi yang hegemonik dan kecenderungan pada rekayasa bahwa kebudayaan akan hancur akibat perbenturan sehingga masuk pada fase berakhirnya ideologi. Namun, Samuel P Hungtington keliru kalau kebudayaan akan hilang bersama penganut ideologi. Sebagaimana di katakan oleh Kenichi Ohmae (1995:105) mengatakan bahwa *Samuel P Hungtington offers an interpretation of what that "somoething else" is. According to Hungtington, the fault lines in our new post cold war world do not flow from politics or ideologi, but from culture. From now on, when large masses of people join in common*

purpose, the primary link between them will increasingly be their shared heritage of langguage, history, tradition, and religion—that is, civilization. Groupings based on culture will become—in fact, have al ready become—the most powerfull actors in world affairs (Kenichi Ohmae: 1995,h. 105).

Paham kebudayaan yang dipahami Muhammadiyah merupakan dimensi gerakan perwujudan keadaban dalam konteks geokultural yang berwawasan nasional sebagai penjiwaan terhadap agenda perdamaian sebagaimana diinginkan oleh semua negara bangsa. Muhammadiyah dari awal sudah menegaskan identitas kulturalnya yang berorientasi pada sebuah negara berbudaya berlandaskan imanensi (prilaku—spiritualitas) dan transendensi (keyakinan ketuhanan). Tentu hal ini bagi Muhammadiyah telah banyak melakukan akulturasi diplomasi pada aspek kebudayaan dengan menerapkan dalil-dalil merebut nilai kemanusiaan dari dekadensi global dan mempertahankan kebudayaan untuk menjaga rezim negara, politik adu domba (*devide et empera*) yang selama ini terjadi di berbagai belahan negara di dunia.

Modal besar bagi Muhammadiyah secara organisasi yang sudah memiliki perwakilan di berbagai negara untuk memainkan peran perdamaian baik melalui pertukaran budaya maupun rekayasa sosial perdamaian sebagai langkah masa depan yang anti terhadap peperangan, konflik komunal etnik, rasisme agama, dan ekstremitas terorisme yang mengancam dan mencerai-beraikan keuntuhan masyarakat global.

Karena bagi Muhammadiyah cara-cara diplomasi melalui perang bersenjata hanya melahirkan keterpurukan global tanpa makna perdamaian, bahkan pertumpahan darah di berbagai belahan dunia. Kemantapan suatu sistem negara hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan suatu bangsa. Kebudayaan itu akan menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan masyarakat yang ada di dalam negara itu sendiri. Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga harus menghayati kondisi subyektif psikologis sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam kepribadian bangsa.

Geokultural Muhammadiyah sebagai dasar melakukan diplomasi pada suatu negara yang merupakan alat pertukaran seluruh potensi sumberdaya keragaman yang dimiliki. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan) dengan pertumbuhan organisme budaya (mahluk hidup berbudaya) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.

Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok itu tumbuh (teori ruang). Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/ perang.

Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, social politik dan kratopolitik. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.

Pandangan citranisasi kultural Muhammadiyah telah berkembang di Indonesia di bawah pengorganisasian yang rapi dan dilandasi oleh semangat nasionalisme. Pokok–pokok geokultural Muhammadiyah sebagai alat diplomasi dalam berbagai khittah-khittah yang telah di hasilkan diberbagai Muktamar, yaitu sebagai berikut :

1. Penciptaan imperium kebudayaan global yang penuh ijtihad, moralitas, jihad sosial dan teologis (imanensi dan transendensi) dapat mengejar ketertinggalan dari berbagai negara-negara pertama yang relatif aman secara geopolitik.
2. Muhammadiyah harus mulai menggeser paradigma kultural daratan kepada kultural maritim sehingga terciptanya kekuatan baru imperium kebudayaan maritim untuk menguasai pengawasan lalu lintas, melalui berbagai kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan pergelaran budaya itu sendiri.

Geokultural merupakan doktrin Muhammadiyah terhadap berbagai negara melalui berbagai sarana dan prasarana dakwah kulturalnya seperti penyebaran mahasiswa yang kuliah di luar negeri, pertukaran budaya

Indonesia—negara lain, pergelaran seni budaya pendidikan, dan internalisasi fungsi-fungsi cabang Istimewa Muhammadiyah. Geokultural dalam pengerti di atas dititikberatkan pada strategi pembumisasian kebudayaan nusantara yang memiliki pengaruh terhadap suatu negara dan memelihara kelangsungan untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah) yang lebih nyaman dan baik. Geokultural bagi Muhammadiyah menganut konsep kekuatan transendensitas dan etos—etics manusia dalam memelihara diri dengan kesadaran atas penciptaannya sebagai mahluk bertuhan.

Ajaran geokultural harus menguasai *jantung dunia*, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Penguasaan atas dua daerah ini harus dilakukan dengan gerakan kebudayaan, pendidikan karakter, pemantapan moralitas, penegasan ideologi keagamaan, dan menyebarkan paham-paham kemuhammadiyah. Tiga benua tersebut, harus menjadi target proyek dakwah kultural melalui berbagai *resouces* Muhammadiyah yang ada di berbagai negara. Apalagi wawasan nasional Indonesia selalu bersentuhan langsung dengan gerakan peneguhan jati diri bangsa oleh Muhammadiyah selama ini, tentu dikembangkan berdasarkan konvensi universal, ideologi dan kultural *religion* sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kebudayaan. Muhammadiyah yang berideologi Islam *amar makruf nahi mungkar* telah mengalami pertautan dan dinamisasi saling mengisi dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang menganut paham perdamaian sejati dan mencerdaskan dunia berdasarkan kemerdekaan yang dimiliki setiap bangsa.

Dengan demikian, geokultural Muhammadiyah dengan wawasan kebudayaan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan (*adu domba*) karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme, tetapi berdasarkan *Archipelago Concept and Cultural Religion of Islam* yaitu konsep laut, udara dan darat merupakan penghubung antara kebudayaan dengan penyebaran budaya agama Islam sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air atau sering disebut negara kepulauan yang terdiri dari jutaan budaya.

Ada banyak tokoh Muhammadiyah meletakkan dasar dakwah kultural sebagai tanggal geokultural untuk menjinakkan dunia internasional yang mengarah pada perbaikan dan perdamaian. Ilmuwan Islam Al Jabir Ibnu Hayyan (Geber Rox Arabum) yang hidup pada 721 Masehi mengeritik keras pendapat plato dan aristoteles "manusia cenderung emosional terhadap kebudayaannya". Ibunu Hayyan mengiritiknya pada posisi bahwa manusia itu terbentuk dari budaya moralitas dengan pertunjukkan karakter yang nayat dan sesuai alam. Selain itu juga, antropolog Islam Al Faraby mengatakan

bahwa wujud kebudayaan tak terlepas dari illahiyah (*transendensi*) dan iman (*imanensi*) sebagai sistem rangkaian manusia dalam beraktivitas dan berpola.

Menurut Koentjaraningrat bahwa kebudayaan dibagi dalam beberapa unsur yang mewakili seluruh tindakan dan aktivitas manusia termasuk di dalamnya membicarakan geokultural, adalah (Elly M. Setiadi, dkk: 2009, h. 31) *pertama,* wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari sebuah kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang ataupun di foto dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat dunia dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini disebut juga tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat istiadat yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape dan komputer. *Kedua,* wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud tersebut di namakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Lebih jelasnya, tampak dalam bentuk bahasa prilaku dalam interaksinya di masyarakat. *Ketiga,* wujud kebudayaan sebagai hasil karya *artefact,* wujud ini merupakan alat diplomasi kebudayaan yang memiliki nilai keindahan yang sangat luar biasa, misalnya Candi Borobudur, Prambanan, kain batik, dan lain sebagainya.

Selain dari tiga hal di atas, substansi misi utama geokultural yang dilakukan Muhammadiyah sebagai implementasi proposal diplomasi perdamaian dunia internasional, adalah (Ibid, Hal. 32-33):

a. Sistem pengetahuan *amar ma'ruf nahi mungkar*
b. Nilai dakwah kultural Muhammadiyah
c. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (pandangan hidup)
d. Transfering transendensitas dan *imanensiasi* (keyakinan dan prilaku)
e. Persepsi geokultural
f. Etos kebudayaan

Hampir semua literatur kajian dakwah kultural Muhammadiyah dalam pembentukan peradaban menitikberatkan pada reformasi dunia global—harmonisasi dan konstruksi kebudayaan nasional diantara bangsa-bangsa di dunia. Muhammadiyah harus tampil sebagai pembawa pusaka

kebudayaan dan perdamaian demi mengimajiner sebuah bangsa untuk bisa memperbaiki kultur yang terjebak pada *comberan* ekstremisme. Sehingga gerakan tajdid kebudayaan sebagai arus utama masyarakat dunia harus menjadi mainstream perubahan global untuk mengawal perdamaian dunia dan harmonisasi peradaban masyarakat global yang dilandasi nilai-nilai keadaban.

Geokultural tentu berupaya mengembalikan peradaban kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang jauh tertinggal dengan barat dari semua lini kehidupan. Bahkan pada tahap yang paling ekstream, barat telah menancapkan pengaruhnya yang dominan di tubuh kebudayaan Islam. Mereka menghegemoni Kebudayaan Islam mulai dari pandangan dunia yang beragam pemeluknya hingga menganekasasi wilayah pendidikan, politik, ekonomi, budaya dan pola gaya hidup manusia dan peradaban muslim. Ironisnya, justru orang yang mengklaim diri orang Islam justru saling mengkafirkan dan saling menyesatkan hanya untuk mendapatkan legitimasi, àpakah mengikuti atau menolak secara mutlak akulturasi dengan barat merupakan kesalahan atau kebenaran (Ismail Samad: 2015: 3).

Maka, penting bagi Muhammadiyah merespon entitas karakter dan diplomasi budaya dengan konstruksi geokultural agar perbedaan peradaban yang menyebabkan konfliktual antara barat dan timur, Islam dengan kristen, Islam dengan yahudi. Persaksian Muhammadiyah sangat penting untuk mengeluarkan konflik dunia ini pada arus perdamaian yang hakiki. Tentu sangat berat bagi Muhammadiyah, tetapi hal ini butuh waktu lama bahkan puluhan tahun akan ditempuh. Namun, Muhammadiyah harus konsisten penyeruan pada dakwah geokultural sehingga dapat mengevaluasi dalam berbagai sistem kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, politik dan budaya. Kebuntuan dan alih-alih kegagalan praktik ekonomi, sosial, politik dan budaya yang seruang dan sebangun dengan nilai-nilai kemanusiaan dihampir sebagian negara-negara di dunia mulai dari horison barat hingga horison timur mengindikasikan bahwa ada proses kekeliruan dalam proses memahami hakekat kebudayaan sebagai sumbuh peradaban mulia yang penuh perdamaian. paling tidak, indikasi tersebut telihat dari ketidakmampuan dua ideologi besar menghegemoni dunia saat ini (Liberalisme, Komunisme dan kapitalisme) dan menahkodai peradaban manusia. Di horison barat, liberalisme sebagai induk dari kapitalisme (liberal ekonomi), demokrasi (liberalisme politik), sekularisme pendidikan, dan globalisasi (Liberlisme kosmolohi) yang bawalnya dipahami dan dinilai sebagai titik awal kebangkitan peradaban manusia justru mengalami kemacetan nilai kebudayaan dan

peradaban itu sendiri (Subiran Paridamos: 2014: 128).

Parahnya, kebebasan dan kemerdekaan hanya diperuntukan bagi negara-negara yang menghegemoni dunia pada khususnya negara adidaya, yakni Amerika Serikat. Sementara horison timur sosialisme sebagai induk dari komunisme (sosialisme politik, kolektivitas sosialisme, integralisme kapital di tangan kaum sosialisme (sosialisme ekonomi) dan totalitarianisme (sosialisme kekuasaan) juga menampakkan sistem yang paradoksal. disatu sisi menjanjikan kebersamaan dan penyatuan dalam keragaman (wacana dan laku) tetapi disisi yang lain justru membunuh kredo pemusatan kekuasaan sumberdaya negara sehingga menyebabkan ketimpangan yang menjauhkan pemimpin yang rakyatanya. Kebuntuan dua mazhab pemikiran di atas dalam menerapkan sistem kehidupan manusia disegala sektor, seperti hukum, ekonomi, politik dan budaya semakin menginformasi dan mengeksplanasikan adanya kekeliruan besar dalam memahami hakikat kebudayaan bahwa kedua mazhab ekonomi politik mereka menyesatkan masyarakat dunia dan bisa di pahami bahwa argumentasi mereka terhadap manusia adalah tak ubahnya material yang bisa ditata dan dipola sesuai tolak ukur kepentinggannya (Ibid, Hal. 129).

Disebelah lain, gejolak Timur Tengah ada upaya kaum liberalis menguasai Arab Saudi Mekkah untuk mengubah wujudnya. Tentu ide-ide ini merekahkan konflik komunal peradaban Islam yang semakin dipertajam oleh barat. Betapa tidak, kemarahan muslim Arab pada pendudukan Israel atas tanah palestina. Makanya tidak terlalu mengagetkan bila mereka mempunyai sikap anti (peradaban) Islam yang menyalak-nyalak (Mohamad Ali: 2010: 78). Maka penting untuk dipahami oleh Muhammadiyah bahwa geokultural sebagai proposal perdamaian merupakan keniscayaan gerakan Muhammadiyah agar tampil dominan membawa entitas peradaban Islam ke seluruh dunia. Landasan-landasan geokultural Muhammadiyah ideologis sebagai alat diplomasi dan penetrasi konflik, adalah (Haedar Nashir: 2013:1, 91, 104, 188, dan 205):

1. Muqaddimah ADART Muhammadiyah
2. Masalah lima
3. Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah
4. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah
5. Pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang satu Abad
6. Kepribadian Muhammadiyah
7. Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah
8. Khittah Muhammadiyah

Aktualisasi Muhammadiyah berada dalam kehidupan bangsa dan antar bangsa yang sarat dinamika kompleks. Peran sejarah Muhammadiyah juga dalam posisi yang benar-benar memiliki modal sosial yang tinggi sebagai gerakan Islam yang mengemban fungsi dakwah dan tajdid di dunia. Maka, Muhammadiyah dengan berbagai perangkat organisasi harus melakukan *selebration* geokultural pada seluruh aspek dan struktur gerakan ke berbagai negara belahan dunia. Tentu khittah, gerakan, landasan dan aturan mengikat organisasi dapat diletakkan sebagai bingkai dan pagar konflik yang mengancam sebuah perdamaian seobjektif mungkin dalam menjalankan misi kebangsaan Indonesia di ranah global. Muhammadiyah harus mampu mengelanvitalkan sumber kekuatan diplomasi sebagai arus baru dalam mendikte negara-negara yang senang dan suka berkonflik (Ridjaluddin: 2011: 122).

Proposal Diplomasi Muhammadiyah – Indonesia untuk Dunia

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang yang biasanya mewakili negara atau organisasi tertentu. Diplomasi merupakan salah satu intrumen politik luar negeri untuk mewujudkan suatu kepentingan nasional dari sebuah negara. Diplomasi sama saja dengan negosiasi, atau tawar-menawar dengan sebuah kepentingan. Namun, kata diplomasi ini biasa digunakan dalam prakteknya sebuah negara terkait dengan hubungan internasional.

Diplomasi sangatlah penting mengingat hanya satu-satunya instrument politik luar negeri yang paling menghemat biaya dan tanpa harus berjatuhannya korban jiwa. Dan diplomasi ini dinilai sangat bagus untuk mewujudkan sebuah hubungan kerjasama antar Negara kedepannya. Karena dilihat dari segi prakteknya diplomasi merupakan bentuk komunikasi biasa yang hanya saja dibuat sedemikian formal dengan gaya bahasa tertentu dan *gesture* tubuh tertentu untuk bisa memikat lawan mainnya dalam percaturan diplomasi global ini. Sebuah hubungan antar Negara bisa terjadi berkat adanya para diplomat yang menegosiasikan kepentingan negaranya dengan Negara lain dan cocok. Oleh karena itu diplomasi benar-benar terbukti sebagai senjata yang paling ampuh untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama antar Negara tanpa harus terjadinya konflik terbuka yang bisa menelan korban jiwa, dan biayanya juga sangatlah sedikit ketimbang biaya untuk perang.

Sebenarnya instrument politik luar negeri tidak hanya diplomasi saja.

Terdapat agen propaganda, intelijen, dan perang salah satunya. Tapi hal ini sudah kuno. Permainan intelijen sudah cukup di pertontonkan pada akhir dekade 1990-an. Bersamaan dengan berakhirnya perang dingin, isu mengenai perang intelijen menurun hingga tak ada lagi yang peduli mengenai intelijen-intelijen tersebut yang berusaha mencapai kepentingan nasional sebuah Negara. Agen Propaganda, merupakan salah satu interumen politik luar negeri yang sering digunakan pada zaman perang dunia kedua dan pada saat perang dingin. Propaganda ini bertujuan untuk mencuci *mindset* seseorang atau paradigma seseorang terhadap apa yang dilihat sebelumnya entah menjadi lebih menyukainya atau menjadi lebih membencinya. Namun propaganda ini juga tidak murah. Sekarang untuk melancarkan propaganda secara *massive* membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena propaganda tersebut akan disebarkan lewat media cetak, atau media elektronik dan hal tersebut yang membuatnya menjadi sangat mahal.

Menegok sejarah diplomasi di atas, Muhammadiyah harus belajar dari plus minus pemimpin Soviet berubah dari Breznev ke Gorbachev, dari Nixon ke Reagan, setiap pemimpin diduduki dengan berbagai persoalan yang berbeda. Kedua pemimpin itu dari AS dan Uni Soviet harus menghadapi perubahan besar politik dalam negerinya karena mereka secara bertahap kehilangan kontrol atas negara-negara satelitnya yang menguasai peta geopolitik, budaya dan ekonomi dunia (Bernard Wasserstein: 2008, h. 204).

Saat ini Muhammadiyah diwarisi krisis moralitas domestik yang penuh propaganda radikal atas nama agama dan kekecewaan kebijakan politik yang berdampak pada resesi ekonomi dan tumbuhnya intoleransi. Sementara Muhammadiyah sudah memiliki agenda dakwah kultural yang ditemukan lebih jauh sejak tahun 1930-an sebagai strategi baru diplomasi untuk menemukan kembali otentisitas keadaban manusia di dunia. Tentu diplomasi yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah adalah pencegahan bersifat preventif terhadap intoleransi, kekerasan agama, dan diskriminasi global. Muhammadiyah dituntut harus tumbuh lebih modern di mana transfer ideologi, dakwah, dan islamisasi karakter kutural berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sehingga peradaban benua, negara, dan bangsa di dunia berkiblat pada Islam sebagai sumber perdamaian.

Kedepan, Muhammadiyah tidak terjebak pada pengalaman sentimental akan datang dan memelihara harmoni kehidupan global yang lebih baik. Dunia berharap pada Muhammadiyah untuk membebaskan masyarakat global dari tirai besi dan stigma kekerasan, dimana kebebasan, keadilan

dan persamaan menjadi spirit baru untuk merubah situasi global yang terkoyak saat ini oleh sikap menjajah. Secara simbolik Muhammadiyah harus dilihat multifaktorial untuk meredam gejolak rasisme. Selain itu, sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, bahwa mencakup kehidupan manusia dibutuhkan reformasi dan keterbukaan sebagai panggilan modernisasi yang menyiratkan Muhammadiyah cukup siap untuk membuat kestabilan global melalui berbagai strategi diplomasi yang dilakukannya.

Oleh karena itu, Muhammadiyah berdasarkan problem di atas harus berani secara totalitas untuk menangkal seluruh faktor yang merusak Islam dan sangat urgensi apabila Muhammadiyah membentuk *think tank* diplomasi. Diplomasi Muhammadiyah sangat penting, ditujukan untuk perdamaian global dengan negosiasi dan *marketing* dakwah geokultural melalui berbagai infrastruktur Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang ada di berbagai negara dengan misi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi geokultural Muhammadiyah melakukan misi dengan cara tertentu, seperti ceramah, pertukaran budaya, studi, pendirian institusi pendidikan, menginformasikan, menarik, dan membujuk masyarakat asing agar mereka mengikuti apa yang menjadi tujuan Muhammadiyah, yakni menciptakan masyarakat Islam sebenar-benarnya.

Beberapa ahli kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia percaya bahwa menggunakan diplomasi publik untuk memberikan penjelasan yang jelas dan jujur tentang pentingnya keputusan diplomasi untuk mencegah kekerasan, radikalisme dan perang melawan terorisme. Maka diplomasi Muhammadiyah setidaknya sama penting dalam perang melawan terorisme sebagai alat netralisir masyarakat muslim. Agar dapat mengalahkan ancaman ekstremis kekerasan, promosi kebebasan dan keadilan social, penataan kembali peradaban Islam melalui pendidikan dan kebudayaan dan informasi media internasional.

Ideologi Muhammadiyah menekankan pada perang gagasan yang kontra terorisme. Misi diplomasi Muhammadiyah berfokus pada penggunaan ideologis al-Qur'an dan Sunnah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan damai untuk mencegah aksi ekstremisme kekerasan dan stigma negatif kepada Islam itu sendiri. Diplomasi adalah salah satu alat untuk mempromosikan kepentingan dakwah kultural Muhammadiyah dan transferisasi program pemerintah Indonesia yang disesuaikan dengan kebijakan luar negeri (Glassman, James: 2008, h. 344).

Karena begitu, Muhammadiyah bertanggungjawab menjaga nasionalisme yang selama ini sudah dalam dekolonisasi. Sehingga penting, nasionalisme

dipakai untuk menunjukkan kekuatan (*super power*) sebagai simbol dominasi di dunia. Berdasarkan pertimbangan itu, Muhammadiyah juga harus sejeli mungkin melihat Eropa dari abad 17 hingga sekarang, bahwa di sana pentingnya sebuah *common values* dan *common civilization* (Richelieu & Mazarin: 1971, h. 511) dimana entitas spiritual keagamaan secara faktual terdifusi dalam praktiknya. Entitas banyak Negara di dunia masih berdasarkan warisan garis keturunan. Saat itu, hal ini menjadi faktor determinan dalam kekuasaan dan pengaruhnya terhadap antarnegara untuk mengadakan perjanjian damai sehingga terciptanya keadaban (https://frenndw.wordpress.com: 2010).

Perjanjian damai bertujuan untuk mengakhiri dominasi dekolonialisasi diplomatik modern_berdasarkan kedaulatan *nation state* yang diakui atas konsesus bersama dan batas-batas teritori yang jelas, tidak lagi bersifat diskriminatif terhadap agama-agama yang ada. Keberadaan perjanjian perdamain merupakan peneguhan asas kebudayaan dan keadaban moralitas yang memiliki otoritas pada penetapan peraturan mengatur hubungan manusia dan Tuhan secara vertikal dan horisontal dengan menggunakan hukum. Diplomasi merupakan mesinnya hubungan internasional. Diplomasi muncul setiap saat dan tempat entitas politik dengan identitas berbeda melihat dan menyaksikan kebutuhan reguler untuk mengembangkan hubungan. Karakter diplomasi Muhammadiyah, bisa di cerminkan dari aktivitasnya, adalah:

a. Ideologis, kedekatan dan kekeluargaan
   Dialog diplomasi melalui persuasi, dakwah, ancaman, aliansi terbuka, pernikahan, dan pertukaran budaya (Deighton, Anne: 1947, h. 22)
b. Ada perwakilan permanen seperti pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Luar Negeri, kedutaan dan embassy
c. Diplomasi bersama
d. Diplomasi Ekonomi
e. Diplomasi perdamaian.

Apabila hal ini dilakukan Muhammadiyah, disamping bisa berperan lebih aktif di berbagai forum internasional, memberikan dukungan lebih besar dan lebih nyata, dan secara diplomasi akan dipandang sebagai sebuah langkah maju dibanding sebelumnya. Bahkan dalam skala yang lebih besar akan bisa mengkapitalisasi prestasi-prestasi atau capaian dakwah kultural secara global menjadi buah nyata dalam berbagai bidang, yakni ekonomi, budaya dan agama.

Dalam upaya memberikan kontribusi untuk memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan pada tataran global, Muhammadiyah—Indonesia turut aktif mengupayakan penyelesaian isu-isu konflik antar negara, seperti Suriah, Irak, Palestina, dan negara lainnya. Penyelsaian masalah tentu melalui berbagai *steakholders* negara bersangkutan mulai dari kepala negara, menteri, PBB, dan negara-negara anggota DK PBB. Artinya Muhammadiyah walaupun bukan negara tetapi memiliki otoritas untuk ikut campur dalam persoalan global demi kepentingan perdamaian diberbagai negara yang mengalami konflik. Menghentikan kolonialisasi dunia sangat urgen agar masyarakat tidak menjadi korban kebrutalan berbagai kelompok ekstrem dan mendorong adanya dialog kemanusiaan yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen organisasi sipil, institusi negara dan lembaga politik untuk menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, Muhammadiyah juga bisa mengusulkan agar meninjau kembali status hubungan diplomatik diantara negara-negara yang menjadi korban genoside yang diakibatkan perang.

Selain mengupayakan terciptanya perdamaian dan keamanan pada tataran global, Muhammadiyah—Indonesia juga berupaya mendorong terciptanya tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkemajuan, yaitu sebuah tatanan yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat internasional untuk merasakan buah dari pembangunan. Sebuah tatanan yang memberikan kesempatan bagi seluruh negara untuk maju dan sejahtera, tanpa terkecuali (www.tabloiddiplomasi.org).

Dalam beberapa hal yang paling fundamental bahwa Muhammadiyah Indonesia juga harus ikut mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih giat lagi dalam menciptakan poros perdamaian dunia melalui hubungan diplomatik. Tentu sekali lagi, Muhammadiyah mendorong atas visi dan *platform* pembangunan global dengan konsep yang jelas, rasional dan visioner, serta berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan, yaitu *Sustainable Growth with Equity.* Ini menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan di dunia atas *support* dari organisasi sipil seperti Muhammadiyah sehingga dapat melakukan penguatan diplomasi yang lebih komprehensif dalam situasi perekonomian global dewasa ini yang masih belum menentu.

Menjelang abad 21 ini, diplomasi menjadi sebuah instrument politik luar negeri yang sangat diutamakan, mengingat sudah banyak juga konflik-konflik lama yang belum diselesaikan akibat dampak dari perang dunia, ditambah lagi permasalahan baru mengenai terorisme, isu lingkungan, serta isu-isu kontemporer lainnya.

Menciptakan Keadaban Masyarakat Global

Keberadaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya konsep keadaban *(moralitas)* yang mencakup tiga unsur, yaitu kebudayaan, keragaman dan pluralitas. Menurut Lawrence A. Blum, menawarkan definisi keadaban dalam keragaman adalah masyarakat *yang meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya.* Keragaman struktur budaya dalam masyarakat menjadikan keadaban terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni (https://ilmiinfo.wordpress.com) pertama, keadaban isolasi, yaitu masyarakat menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Kelompok tersebut menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

Kedua, keadaban akomodatif, yakni masyarakat yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat berkeadaban akomodatif kultural, memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan dan mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Ketiga, keadaban otonomik, yaitu dalam model ini kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam rangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok dalam prinsip keadaban untuk mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak-hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

Keempat, keadaban komunikasi interaktif dan kritikal, jenis keadaban masyarakat dalam model ini terjadi pada masyarakat plural yang kelompok-kelompoknya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang menegaskan perspektif distingtif mereka. Kelompok dominan dalam hal ini tentu menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan dengan mengorbankan budaya kelompok minoritas. Kelima, keadaban kosmopolitan, kehidupan dalam

masyarakat jenis ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu.

Secara umum, masyarakat yang berkeadaban global dapat dimaknai sebagai suatu tatanan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen, yang pola hubungan antar individu dalam masyarakat bersifat toleran dan bersedia menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan segala perbedaan yang ada. Perbedaan tersebut, mencakup dua hal, yakni (ibid.) pertama, secara *horizontal,* ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, secara *vertikal,* ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Untuk mewujudkan dan mengembangkan masyarakat berkeadaban ini, menurut pandangan Cogan (1998), ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh warga masyarakat, di antaranya sebagai berikut (ibid):

1. *The ability to look at and approach problems as a member of a global society* (kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global).
2. *The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society* (kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat).
3. *The ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences* (kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya).
4. *The capacity to think in critical and systemic way* (kemampuan berpikir kritis dan sistematis).
5. *The willingness to resolve conflict and in a non-violent manner* (kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan).
6. *The willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the envirinment* (kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan).
7. *The ability to be sensitive toward and to defend human right e.g, rights of women, ethnic minorities, etc.* (memiliki kepekaan untuk mempertahankan hak asasi manusia, seperti hak kaum wanita, dan minoritas etnis).
8. *The willingness and ability to participate in politics at local, national*

and international levels (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional).

Masyarakat berkeadaban merupakan masyarakat yang kelompok suku bangsa dan budayanya berada dalam kesetaraan derajat dan toleransi sejati. Adapun karakteristik dari suatu masyarakat berkeadaban adalah masyarakat beradab yang menghargai setiap budaya yang bersifat otonom sesuai perkembangan konsep hidup bersama dan berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok masyarakat. Konteks masyarakat berkeadaban ini dikembangkan sebuah toleransi, saling memahami, dan menghargai perbedaan yang ada untuk mencapai *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis (ibid).

Pada dasarnya semua bangsa di dunia bersifat berkeadaban dengan memberikan nilai tambah bagi bangsa tersebut. Keragaman ras, etnis, suku, ataupun agama menjadi karakteristik tersendiri sebagaimana bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan dan jutaan pulau. Masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Namun, keanekaragaman budaya dan masyarakat sering dianggap pendorong utama munculnya masalah baru. Kelompok ini beranggapan bahwa identitas kelompok bersifat kaku (http://syauqi-albi.blogspot.com). Sehingga, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah.

Upaya membangun Indonesia yang berkeadaban dapat dilakukan dengan cara dan langkah yang tepat. *Pertama*, menyebarkan konsep masyarakat berkeadaban atau berkamjuan secara luas dan memahamkan akan pentingnya masyarakat berkemajuan bagi bangsa Indonesia, serta mendorong keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. *Kedua*, membentuk kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya. *Ketiga*, berbagai upaya dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Penutup

Kebudayaan Muhammadiyah mengalami fase baru, dimana struktur organisasi diperluas ke berbagai negara, seperti Eropa (Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Uni Soviet), Afrika (Afrika Selatan, Afrika Utara, Afrika Barat dan lainnya), Timur Tengah (Palestina, iran, Irak, Afganistan, Turki, Libiya, Arab Saudi, Yaman dan lainnya) dan Asia (Jepang, Srilanka, Brunei Darussalam, Malaysia, China, Korea Selatan, Korea Utara dan lainnya).

Seluruh negara yang disebut itu telah berdiri Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Luar Negeri. Pengurus PCIM itu di isi oleh banyak warga Muhammadiyah baik yang studi maupun sebagai diplomat Indonesia, bahkan banyak juga kader persyarikatan Muhammadiyah menjadi Duta besar Indonesia di berbagai negara tersebut yang sekaligus menjadi pengurus organisasis Muhammadiyah di luar negeri. Sadar atau tidaknya, Muhammadiyah telah masuk pada taraf internasionalisasi melalui gerakan dakwah kulturalnya yang bertujuan menciptakan masyarakat berkeadaban secara global sesuai tuntutan dan misi organisasi Muhammadiyah. Tentunya, modal sosial dan nilai kebudayaan yang tertransformasi dalam masyarakat untuk menciptakan keadaban global. Selain itu, investasi peradaban yang dibangun oleh Muhammadiyah melalui strategi diplomasi geokulturalnya. Bagi Muhammadiyah, geokultural merupakan hal baru dalam gerakannya yang esensinya penyambung paradigma dakwah kultural, multikultural dan berkamajuan.

Alat diplomasi Muhammadiyah adalah ideologi inklusif yang telah dikembangkan sebelumnya, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai tuntunan dalam Islam. Karena itu, Muhammadiyah bertanggungjawab pada penciptaan masyarakat berkeadaban dan membangun peradaban dunia yang damai, humanis, imanensi dan transendentalis. Fungsi dan peran Muhammadiyah dalam konsep geokultural itu, lebih pada diplomasi perdamaian dengan berbagai negara dibelahan dunia. Terutama negara-negara yang berkonflik kepanjangan dan melahirkan banyak korban sipil. Kemudian, Muhammadiyah juga bertugas menganekasasi seluruh potensi radikalisme, terorisme, rasisme, dan paganisme masyarakat agar tidak terlibat dalam berbagai konflik.

Gerakan perdamaian yang diusung oleh Muhammadiyah telah di mulai sejak 20 tahun terakhir, berbagai kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah seperti dakwah kultural global, dialog perdamaian antara Muhammadiyah dengan PBB, OKI, maupun simpul masyarakat global.

Untuk membangun perdamaian, tentu tidak mudah, Muhammadiyah setiap tahun bahkan sekarang perbulan mengirim diplomat melalui program pendidikan dan ekonomi. Lobi-lobi yang paling nyata saat ini adalah lobi dan mendorong agar palestina merdeka dan sifatnya deklaratif.

Daftar Pustaka

Syafiq A Mughni dkk. 2010. *Kebudayaan Dalam Islam, dalam buku Menggugat Modernitas Muhammadiyah: Refleksi Satu Abd Perjalanan Muhammadiyah,* Cet I Juni Penerbit Kerjasama Grafindo Group Jakarta dan Pusat Studi Islam Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Zoly Qodir dkk. 2010. *Muhammadiyah Budaya Populer dan Masyarakat Konsumtif,* dalam buku *Menggugat Modernitas Muhammadiyah: Refleksi Satu Abd Perjalanan Muhammadiyah,* Cet I Juni Penerbit Kerjasama Grafindo Group Jakarta dan Pusat Studi Islam Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Anwar Abbas, Kata Pengantar dalam buku M. Azrul Tanjung dkk (2014), *Reinventing Budaya Bisnis Untuk Kesejahteraan dan Kejayaan Peradaban Islam,* Cet I Grafindo Books Media, Jakarta.

Chairul Tanjung Prolog dalam buku M. Azrul Tanjung dkk. 2014. *Reinventing Budaya Bisnis Untuk Kesejahteraan dan Kejayaan Peradaban Islam*, Cet I Grafindo Books Media, Jakarta.

Deliar Noer. 1980., *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942,* Penerbit LP3ES Jakarta.

Puriyadi. 2012. *Nilai Etika dalam Kalilah Wa Dimnah, Karya Ibn Al-Muqaffa' 106. - 142 H / 724 - 759 M),* Pernerbit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.

Najamuddin Ramly dan Heri Sucipto. 2010. *Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah, Pemikiran dan Kiprah Dalam Panggung Sejarah Muhammadiyah,* Penerbit Best Media Utama, Jakarta.

Onong Uchjana Effendy. 2008. *Dinamika Komunikasi,* Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Cet ke-7, Jakarta.

William A. Haviland dan RG. Soekardijo. 1999. *Antropologi,* Edisi Ke 4 Penerbit Erlangga, Jakarta

Irfan Abubakar dan Chaider S Bamualim. 2006. *Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia,* di Terbitkan oleh Pusat Bahasa dan Budaya

(PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kenichi Ohmae. 1995. *The End Of The Nations State: The Rise of Regional Economics, How New Engines of Prosferity Are Reshaping Global Markets,* The Free Press A Divission of Simmon & R. Schuster Inc. Avenue of the Americas New York.
Elly M. Setiadi, Kama A Hakam, Ridwan Effendi. 2009. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Revisi Kedua Cet ke 5, Penerbit Kencana, Jakarta.
Ismail Samad. 2015. *Political Nuklear, Dari Kemandirian Bangsa Hingga Perdamaian Dunia,* Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa LPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan Pena Nusantara (PENTARA) Books Press, Jakarta.
Subiran Paridamos. 2014. *Tauhid Jurnalis, Agama, Cinta, Jiwa, dan Kemerdekaanku adalah Jurnalis,* Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa LPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan Pena Nusantara (PENTARA) Books Press, Jakarta.
Anonim. 2012. Tanggungjawab Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, https://gradschool.paramadina.ac.id/in/news/375--palestina-timur-tengah-dan-tanggung-jawab-indonesia-menyongsong-kemerdekaan-palestina.html. Diakses pada Tanggal 10 Maret 2015
Mohamad Ali. 2010. *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah,* Cet I penerbit Al-Wasat Publishing House
Haedar Nashir. 2013. *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah,* Penerbit Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah).
Ridjaluddin. 2011. *Muhammadiyah dalam tinjauan Filsafat Islam,* Penerbit Pusat Kajian Islam Fakultas Agma Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.
Bernard Wasserstein. 2008. *Sejarah Eropa.* New York: Oxford Tekan Universitas.
Anonim. 2009. Kebijakan Diplomasi, https://www.policyarchive.org/handle/10207/2230. Diakses pada tanggal 12 Mei 2015
Glassman, James. 200). *Usia Baru Diplomasi Publik,* Penerbit New York Univesrsity. Amerika Serikat.
Richelieu & Mazarin. 1971. *A New Diplomatic System Area, The Principe of Sovereignty, Political Thinking and State Power, The Heritage of Westphalia System the Wien (Vienna) Congress,* Washington DC University of American, US.
Anonim. 2010. *Masyarakat Diplomatik Eropa,* https://frenndw.wordpress.com

2010/01/15/masyarakat-diplomatik-eropa/. Diakses pada tanggal 21 Maret 2015

Deighton, Anne. 1947. *Perang Dingin di Eropa*, The Adidaya Kompetition, Amerika Serikat.

Anonim. 2015. *Interaksi Produktif Antar Warga ASEAN Bisa Hindari Perang*, http://international.sindonews.com/read/932647/40/interaksi-produktif-antar-warga-asean-bisa-hindari-perang-1417619025. Diakses pada tanggal 22 Maret 2015

Anonim. 2012. *Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Perdamaian Global* http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/180-diplomasi-november-2012/1557-peran-indonesia-dalam-mewujudkan-perdamaian-global.html. Diakses pada tanggal 21 Mei 2015

Anonim. 2010. *Sosiologi dan Hakekat Masyarakat Multikultural*, https://ilmiinfo.wordpress.com/sosiologi-hakekat-masyarakat-multikultural/. Diakses pada tanggal 2 Maret 2015

Anonim. 2012. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Masyarakat*, http://syauqi-albi.blogspot.com/2012/04/pengaruh-globalisasi-terhadap-perubahan.html. Diakses pada tanggal 28 Maret 2015

LADANG DAKWAH DI RUMPUT HIJAU

Ma'ruf el Rumi

Namanya Muhammad Darwis. Seorang anak asal Kauman dengan postur tidak terlalu besar yang hobi bermain bola di Alun-Alun Selatan. Pemain yang bisa menari bersama bola saat di kakinya, memiliki kontrol dan akurasi umpan sama baiknya. Bisa mengocek lawan, menggulirkan bola di antara dua kaki lawan, serta selalu ingin mencetak gol berkelas.

Cara terbaik menghentikannya adalah dengan pendekatan fisik karena taktis saja tidak cukup. Jika dikomparasi, kemampuan Darwis mungkin seperti Ilham Udin Armyain di timnas U-19, Lionel Messi dari Barcelona, atau Eden Hazard yang memperkuat Chelsea. Pemain lawan, termasuk dari tim Ngadisuryan, tak jarang harus melakukan tekel untuk menghentikan ancaman yang lahir dari keistimewan *skill* alami Darwis.

Dia memang akhirnya tidak menjadi pemain sepak bola seperti kebanyakan anak zaman itu. Apalagi, aktivitas tesebut lebih banyak dilakukan disela-sela aktivitas bersama rekan-rekannya sebelum kemudian berangkat ke surau untuk shalat magrib. Selain bermain sepak bola, Darwis juga gemar bermain gerobak sodor, dan layang layang. Sejarah kemudian mencatat, Darwis kecil yang lahir pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta tersebut menjadi Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah.

Karena itu, sejauh ini, belum ada literatur resmi yang menyebutkan Ahmad Dahlan menjadikan sepak bola sebagai media dakwah, seperti biola. Dalam film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo dan kemudian ditulis lebih detil oleh Akmal Nasery Basral dalam novel dengan judul sama tersebut digambarkan, bagaimana biola menjadi pintu masuk dialog tentang esensi agama.

Dari biola lahir diskusi mencerahkan antara Ahmad Dahlan dengan

muridnya, yang boleh jadi menjadi esensi paling mudah ditangkap penonton untuk menterjemahkan "revolusi" dakwah ala Ahmad Dahlan. Ketika salah seorang santri bertanya apakah agama itu? Gesekan biola yang merdu dijadikan alat menjelaskan, sedangkan santri mendapatkan jawaban masing-masing.

Pesan yang ingin disampaikan adalah agama itu; harmoni, keindahan, dan pembelajaran. Agama sebagaimana musik atau nada yang harmonis sehingga menciptakan keindahan. Adapun musik tidak bisa dimainkan kecuali melalui proses pembelajaran sampai mampu memainkannya.

Muhammadiyah sendiri lahir melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid. Di mana, pintu ijtihad dibuka untuk kemajuan, sehingga memberi karakter khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari.

Ahmad Dahlan, sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid (aqidah), ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih, dengan membuka ijtihad.

Djarnawi Hadikusuma menyebut, Muhammadiyah telah menampilkan Islam sebagai "sistem kehidupan manusia dalam segala seginya". Artinya, Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai aqidah dan ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangkut akhlak dan *mu'amalat dunyawiyah.*

Selain itu, aspek aqidah dan ibadah harus teraktualisasi dalam akhlak dan mu'amalah, sehingga Islam benar-benar mewujud dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Karena itu, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan meluruskan dan memperluas paham Islam untuk diamalkan dalam sistem kehidupan yang nyata.

Atau bahasa yang selama ini dipakai adalah sistem dakwah kultural. Dalam arti luas bisa dimaknai sebagai kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk berbudaya dalam rangka menghasilkan kultur alternatif yang bercirikan Islam; yakni berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang murni bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi,

serta melepaskan diri dari kultur dan budaya yang dijiwai *syirik, takhayul, bid'ah*, dan *khurafat*.

Sedangkan secara khusus, dakwah kultural adalah kegiatan dakwah dengan memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan adat-istiadat, seni, dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam proses menuju kehidupan Islami sesuai dengan manhaj Muhammadiyah yang bertumpu pada prinsip tajdid, dengan purifikasi dan dinamisasi (pembaruan).

Untuk melakukan ini, ada empat cara kerja yang menjadi ciri melekat dalam membangun budaya. *Pertama*, senantiasa menyatukan dimensi "kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah" dengan dimensi "ijtihad" dan "tajdid" sosial keagamaan. Hal ini tercermin dan predikat yang diberikan masyarakat kepada Muhammadiyah sebagai faham yang tidak bermazhab. *Kedua*, dalam mengaktualisasikan cita-cita perjuangannya strategi kebudayaan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi.

Dengan model kedua ini Muhammadiyah ingin mengangkat kepentingan dan keselamatan pribadi ke wilayah kepentingan dan keselamatan sosial. Sistem organisasi juga menuntut kolegialitas dan transparansi. *Ketiga*, bercorak "antikemapanan" kelembagaan agama yang terlalu bersifat rigid-kaku. *Keempat*, adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam konteks ini pula, "sepak bola" yang menjadi budaya baru dari masyarakat, bisa menjadi lahan sekaligus identitas baru dalam gerakan dakwah Muhammadiyah di era sekarang. Ketika sepak bola sudah disebut sebagai budaya baru bahkan "agama baru" di dunia dengan miliaran pengikutnya, maka dalam prespektif saya, "wajib hukumnya" Muhammadiyah masuk ke dakwah lapangan hijau.

Apalagi, agama lain sudah melakukannya. Di balik gemerlap sepak bola Inggris yang kita saksikan sekarang ini, ada peran gereja dalam proses kelahirannya. Sebut saja Manchester City yang menjadi juara Liga Inggris, musim lalu. Dirintis pada 1880, City awalnya bernama St. Mark's (1880-1887). Klub ini didirikan dengan tujuan sosial kemanusiaan.

Berawal dari kegelisahan anggota Gereja St. Marks (Inggris), West Gorton, Manchester, mereka kemudian mendirikan klub sepak bola. Klub itu didirikan untuk mengekang kekerasan geng lokal dan alkoholisme yang disebabkan pengangguran tinggi. Salah satu caranya membentuk kegiatan baru untuk para pria lokal, karena saat itu olahraga kriket populer, maka didirikanlah klub kriket.

Semua orang di kawasan tersebut boleh ambil bagian di klub, tanpa

memandang agama (Protestan-Katolik), yang pada abad ke-19 masih sangat sensitif. Sebagai peredam, salah satu pemuka agama, Anna Connell secara pribadi mengunjungi setiap rumah di Paroki tersebut baik Protestan atau Katolik untuk mengambil bagian dalam kegiatan baru tersebut.

Kegiatan ini kemudian berkembang sehingga muncul ide bahwa rutinitas sehari-hari laki-laki akan lebih baik bila disalurkan melalui permainan kolektif yang dikelola gereja, melalui permainan olahraga baru, yang semakin populer di akhir abad ke-19, Sepak bola.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan sebagai bagian dari keinginan Connell untuk menyembuhkan penyakit sosial, sipir gereja William Beastow dan Thomas Goodbehere menbentuk tim sepak bola geraja yang disebut St. Mark's (West Gorton), kadang dituliskan West Gorton (St. Mark's) pada 1880.

Connell selanjutnya dikenal sebagai satu-satunya wanita yang membentukan klub sepak bola utama Inggris. Pertandingan pertama terjadi pada 13 November 1880, melawan tim gereja dari Macclesfield. St. Mark's mengenakan kemeja hitam dengan celana pendek putih. St Marks kalah dalam pertandingan 2-1, dan hanya memenangkan satu pertandingan selama musim perdana mereka di 1880-81, dengan kemenangan atas Stalybridge Clarence Maret 1881.

Pada tahun 1884, klub kemudian *merger* dengan Gorton Athletic. Tetapi *merger* tersebut hanya berlangsung beberapa bulan sebelum klub dibagi lagi. St. Mark's menamakan diri mereka dengan Gorton A.F.C sementara Gorton Athletic berubah menjadi West Gorton Athletic.

Dengan perubahan nama ini, tim secara bertahap kehilangan sentuhan awal agama mereka, dan nama St. Mark's perlahan memudar, dan klub sekarang hanya menempatkan St. Mark's dalam tanda kurung. Klub Inggris lain yang memiliki akar gereja adalah Everton dari Kota Liverpool, dan Middleborough.

Bagaimana dengan peran Islam dalam sepak bola? Sejauh ini, Islam dalam artian agama justru bekerja sendirian "menghadirkan warnanya" di sepak bola. Melalui kucuran *petrodollar* juragan minyak di Timur Tengah, serta kehadiran pemain muslim di klub Eropa, "Islamisasi" sepak bola terjadi dengan caranya sendiri. Kehadiran Sheikh Mansour di Manchester City membuat tim ini kini terasa lebih Islam, padahal sejarahnya, rival Mancester United ini berasal dari gereja.

Guyuran uang membuat tim terkaya di dunia Real Madrid, menghapus gambar salib dari logo resmi agar bisa memperkuat basis penggemar di

kalangan Muslim di Eropa dan Timur Tengah. Surat kabar olahraga utama Spanyol, Marca, menulis perubahan itu dilakukan untuk menghindari segala bentuk kebingungan atau salah tafsir di daerah di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Real Madrid mengatakan keputusan untuk menghapus salib dari logonya hanya biaya melakukan bisnis di dunia global. Namun kritikus mengatakan langkah itu merupakan belum erosi lain budaya dan tradisi Eropa dalam menghadapi melanggar Islam.

Kontroversi salib Real Madrid muncul saat mereka membangun resor olahraga wisata $1 miliar di Uni Emirat Arab. Padahal salib adalah logo pertama Real Madrid pada tahun 1920, ketika Raja Alfonso XIII diberikan klub sebagai bagian dari kerajaan. Kata Real dalam bahasa Spanyol berarti kerajaan, dan salib masih merupakan bagian integral dari lambang Raja Spanyol.

Tapi, Real Madrid bukan pertama klub Spanyol sepak bola menghapus "agama yang tidak benar" dalam upaya menenangkan perasaan Muslim. FC Barcelona baru-baru menandatangani lima tahun dengan Qatar Foundation yang berbasis di Doha, yang disebut kepercayaan amal yang telah dituduh menyediakan dana untuk ulama Yusuf al-Qaradawi, yang dituding sebagai penganjur terorisme. Perjanjian tersebut memungkinkan Qatar Foundation untuk menempatkan logo pada kaos tim resmi FC Barcelona.

Kandang beberapa klub Eropa sudah ada yang dilengkapi tempat sholat. Sebut saja Ettihad Stadium, kandang Manchester City, St Jame's Park, markas Newcastle United, dan Allianz Arena, milik Bayern Munich menyediakan tempat beribadah untuk penonton dan pemainnya.

Sementara melalui para pemain Muslim, Eropa menjadi lebih toleran ketika pemain yang beragam Islam menjalakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, tidak mau meminum minuman berakohol, menolak mengenakan jersey yang disponsori rumah judi, dan mengkampanyekan pembebasan Palestina.

Para muslimah yang berkarier di lapangan hijau juga mulai mendapat ruang dari FIFA selaku pemegang otoritas tertinggi sepak bola. Jika sebelumnya, FIFA melarang pemain dan wasit wanita mengunakan jilbab saat di lapangan, sekarang mereka menjadi sudah mengizinkan.

Tapi, pada saat bersamaan, ulama seperti membiarkan para pemain berjalan sendirian ketika menghadapi masa sulit. Paling sederhana, adalah soal fatwa hukum puasa untuk seorang pemain muslim yang merumput di Eropa. Mereka seolah dituntut membuat keputusan sendiri, terkait apakah

harus puasa, atau tidak saat bulan Ramadhan datang dan kompetisi justru sedang memasuki masa krusial.

Dalam kondisi ini, mereka melakukan ijtihad masing-masing. Ada yang nekat berpuasa meski dengan konsekuensi menghadapi tekanan dari manajer tim, sampai tidak diturunkan dalam pertandingan. Ada pula yang memutuskan tidak berpuasa dengan alasan profesionalisme sebagai pemain.

Jika kemudian ada ulama yang bersuara, jumlahnya tidak banyak. Mengutip Harian Republika (Minggu, 22 Agustus 2010), sejauh ini baru Abdul Bari Zamzami, Ketua Perkumpulan Peniliti Perkumpulan Islam Maroko. Meski belum menjadi kesepakatan, dia berani memberi fatwa terkait pertanyaan apa pemain bola muslim boleh tidak berpuasa. Dia berkesimpulan pemain boleh meninggalkan puasa.

Zamzami mengatakan, jika puasa mengganggu prestasi para pemain maka mereka bisa memutuskan tidak puasa. Tapi, keputusan ada pada para pemain itu sendiri. "Bagi yang tidak setuju saya tantang untuk bermain bola seperti yang dilakukan para pemain itu. Lihat saja apa kata mereka."

Sementara lembaga resmi yang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Jerman. Mereka mengeluarkan fatwa setelah tiga pesepak bola muslim FC Frankfurt berpuasa tanpa izin klub seingga mereka mendapat peringatan. Fatwa ini didasarkan pada fatwa Masjid Al-Azhar di Kairo Mesir dan Majelis Eropa untuk Fatwa dan Penelitian, dua organisasi penting untuk masalah peraturan Islam.

Mereka berpendapat pemain sepak bola muslim tidak wajib berpuasa saat Ramadhan. Menurut Masjid Al-Azhar, 'kontrak pemain dengan klub mewajibkan mereka berprestasi. Kalau bermain bola itu adalah satu-satunya sumber pendapatan dan bermain di bulan Ramadan tidak bisa dihindari, maka para pemain bola punya hak untuk tidak berpuasa.'

Berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya, klub sepak bola Belanda lebih toleran terhadap para pemain bola yang berpuasa. Penyebabnya, di Liga Belanda ada lebih 40 pemain sepak bola muslim, kebanyakan keturunan Maroko.

Terkait diizinkannya muslimah menggenakan kerudung juga karena "kebetulan". Pada 18 Maret 2012, wasit dari pertandingan sepak bola wanita di Kota Perancis tepatnya selatan Narbonne menolak memimpin pertandingan ketika pemain salah satu tim turun ke lapangan mengenakan jilbab Muslim.

Keputusan wasit tersebut diperkuat FIFA yang melarang pemain mengenakan

jilbab karena tidak aman. Tapi pada 3 Maret, FIFA mengubah peraturan bahwa perempuan bisa memakai jilbab saat bermain di kompetisi resmi. Perubahan peraturan, lebih karena kekuatan lobi Ali bin al-Hussein yang juga wakil presiden FIFA. Sekjen FIFA Jerome Vacke, berhasil meyakinkan FIFA bahwa jilbab adalah budaya bukan simbol agama. Dan perubahan aturan akan memungkinkan perempuan di seluruh dunia untuk bermain sepak bola. Meski, perubahan tersebut telah membuat marah banyak orang Eropa, termasuk beberapa kelompok feminis, yang mengatakan jilbab adalah tanda "dominasi laki-laki."

Konteks Indonesia

Bagaimana di Indonesia? Mengambil *sample* kompetisi musim 2014 yang dimiliki PSSI, Indonesia (PSSI) memiliki 22 klub Indonesia Super League (ISL), 60 tim Divisi Utama, 73 Divisi I, dan tak kurang dari 396 peserta tergabung di Liga Nusantara ambil bagian. Artinya, sebagai gambaran kasar, ada 649 klub tersebar di seluruh Indonesia yang resmi terdaftar dan memiliki pemain.

Jumlah ini makin bertambah luar biasa jika ditambah dengan sekolah sepak bola (SSB) di seluruh pelosok negeri. Dan, dalam sebuah kegiatan pesantren anak-anak yang pernah saya lakukan, dari 20 peserta ketika ditanya cita-cita mereka setelah dewasa, 19 di antaranya ingin menjadi pemain bola.

Sekarang, jika dari 649 klub memiliki 22 pemain (jumlah standar pemain) maka, lebih dari 14 ribu orang yang menggantungkan kehidupan di sepak bola Indonesia. Jumlah tersebut bisa membengkak bila ditambah dengan bagian teknis tim, ofisial tim, dan panitia pertandingan. Dimana, tanpa perlu menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mayoritas dari mereka tentu umat Islam.

Lalu berapa jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan? Mungkin levelnya belum sekelas Piala Dunia, yang menurut Bloomberg dalam tulisan mereka "*A League of His Own; How Sepp Blatter Controls Soccer*" menulis. "Sponsor dan penyiaran membayar mahal untuk menjadi bagian dari Piala Dunia. Sebuah gabungan 30 miliar pemirsa di lebih dari 200 negara membuat Piala Dunia 2014 menjadi acara di televisi yang paling banyak ditonton dalam sejarah."

Di Indonesia, penonton yang menyaksikan di stadion memang tidak selalu sama. Tapi, bisa dibuat rata-rata satu pertandingan, setidaknya ada 5000 pasang mata yang datang ke stadion. Jumlah tersebut berlaku

untuk kontestan ISL, dan Divisi Utama. Untuk divisi terendah tentu saja berbeda.

Dalam konteks inilah, saya mengatakan, Muhammadiyah bisa berdakwah lewat jalur sepak bola. Sebagai organisasi pembaharu, maka tak ada salahnya, memikirkan untuk memberi warna dalam sepak bola Indonesia. Saat gerakan pembaharuan Muhammadiyah dikritik mengalami kemandekan, dan mencoba melakukan jihad konstitusi, maka tak ada salahnya mulai melakukan jihad sepak bola.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Muhammadiyah sesungguhnya bisa memurnikan sepak bola di Indonesia. Dengan segala yang dimiliki, Muhammadiyah bisa memurnikan sepak bola Indonesia dari penyakit TBC (Taruhan, Berkelahi, dan Curang) yang merusak sepak bola Indonesia.

Apalagi, secara tidak langsung, Muhammadiyah sesungguhnya memiliki pertalian dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Terutama jika dirunut dari silsilah pendiri PSSI, yaitu Soeratin Sosrosoegondo. Pria yang lahir 25 tahun setelah Ahmad Dahlan meninggal ini adalah putra dari pasangan R. Sosrosoegondo dan R.A. Srie Woelan.

Dalam tulisan Akira Nagazumi di Majalah Tempo yang terbit 4 Juni 1988 dengan judul "Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa", disebutkan bagaimana istimewanya hubungan antara Ahmad Dahlan dengan Sosrosoegondo. Hubungan itu terbentuk ketika Ahmad Dahlan pada 1909 menjadi anggota Budi Utomo dengan maksud hendak mengislamkan anggota-anggotanya.

Ahmad Dahlan berharap, dengan menjalin kontak di kalangan anggota Budi Utomo yang kebanyakan guru sekolah negeri dan pejabat pemerintahan itu, akan terbuka kemungkinan baginya memberikan pelajaran tentang gagasan-gagasan pembaruan keagamaannya di sekolah-sekolah.

Ceramah-ceramahnya ternyata sangat berhasil, dan disambut baik oleh sementara anggota Budi Utomo yang diam di kampung-kampung santri di Yogyakarta. Di antara para pendukungnya yang paling bersemangat adalah sekretaris kedua Budi Utomo, R. Sosrosoegondo, guru Kweekschool di Yogyakarta dan muridnya Mas Radji.

Tidak seperti anggota badan pengurus lainnya, Sosrosoegondo sangat memandang penting pelajaran keagamaan diberikan bagi anak-anak sekolah. Dalam sebuah karangan berjudul "Pengadjaran Agama dalam Sekolah", yang terbit pada majalah tengah bulanan Boedi Oetomo, Sosrosoegondo mengemukakan pendapatnya, sekolah-sekolah hendaknya memberikan sekurang-kurangnya satu jam pelajaran agama setiap minggu.

Agama yang dimaksudkannya tentu saja agama Islam, yang pada pendapatnya, "telah merupakan kebutuhan bagi seluruh bangsa." Dia menambahkan hal ini tidak akan bertentangan dengan "pendidikan bebas" yang sudah menjadi pendirian Budi Utomo. Para pendukung Dahlan melangkah lebih jauh dengan saran agar dibuka sebuah sekolah di daerah santri di Yogyakarta, yang akan terurus lebih baik serta dibiayai lebih cukup ketimbang keadaan pesantren tradisional.

Sekolah itu benar-benar berdiri dan menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah sejak 1912. Kepentingan yang sama dalam masalah pendidikan antara Budi Utomo dan Muhammadiyah menyebabkan keduanya menjadi sekutu dalam tahun-tahun permulaan. Tidak aneh apabila Muhammadiyah kelak tumbuh menjadi organisasi yang independen, hubungan dekat dengan Budi Utomo tersebut tetap dipertahankan.

Sedangkan ibunda Soeratin, R.A. Srie Woelan adalah adik kandung Dr Soetomo, pendiri Budi Utomo. Dr. Soetomo banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dan menjadi Penasehat (*Adviser* Besar) Muhammadiyah. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 (Surabaya), Dr.Soetomo memberikan ceramah (khutbah) dengan tema Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO).

Khutbah ini yang mendorong lahirnya PKO dengan rumah sakit dan panti asuhannya kemudian. Dr.Soetomo pun membantu memperlancar pengesahan berdirinya Muhammadiyah, tiga tahun setelah berdirinya.

Sayangnya, sampai tulisan ini selesai dibuat, belum ditemukan apakah Soeratin juga pengurus, anggota atau simpatisan Muhammadiyah. Sebab, setelah tamat dari Koningen Wilhelmina School di Jakarta, Soeratin belajar di Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg, dekat Hamburg, Jerman, pada tahun 1920 dan lulus sebagai insinyur sipil pada 1927.

Saat Ahmad Dahlan bisa menghadirkan biola sebagai media dakwah, maka pengurus Muhammadiyah sekarang harusnya lebih mudah menjadikan sepak bola lading dakwah. Olahraga ini memenuhi kualifikasi sebagai permainan yang membutuhkan harmoni, keindahan, dan pembelajaran. Sebagaimana musik atau nada, harmonisasi dalam permainan sepak bola menciptakan keindahan. Dibutuhkan pembelajaran untuk bisa menjadi pemain sepak bola terbaik.

Jika dari Budi Utomo, Ahmad Dahlan mendapatkan rumah untuk mewujudkan ide-ide perubahannya, kenapa Muhammadiyah tidak menjadikan sepak bola sebagai rumah baru melakukan dan memulai perubahan. Pejuang revolusi Marxis Argentina dan seorang pemimpin gerilya Kuba

Che Guevara mengatakan, sepak bola tidak sekadar permainan. "*It is a weapon of the revolution,*" ujarnya. Dan ketika Guevara mengatakan ini, dia tidak sedang bercanda.

FIFA dalam situsnya menulis artikelnya yang berjudul *Mahatma Gandhi, Football Legend* pada 22 Oktober 2010. Dalam tulisan tersebut disebutkan bagaimana Gandhi berhasil menggunakan sepak bola sebagai salah satu cara mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut FIFA, pria bernama lengkap Mohandas Karamchand Gandhi (atau Mahatma Gandhi, atau Bapu) menggunakan sepak bola sebagai cara memperbaiki ketidakadilan sosial dan diskriminasi terhadap kaum non kulit putih. Menurut catatan FIFA, Gandhi adalah salah satu pendiri *Transvaal Indian Football Association* di Afrika Selatan pada 1869.

Pada 1903, lahirlah *South African Association of Hindu Football*; juga tak lepas dari campur tangan Gandhi. Sebelum meninggalkan Afrika Selatan untuk kembali ke India, memperjuangkan keadilan sosial di Tanah Airnya, Gandhi mendirikan tiga kesebelasan di Durban, Pretoria, dan Johannesburg. Ketiganya diberi nama yang sama: *Passive Resisters Soccer Club.*

Gandhi saat itu tidak langsung menyadari kekuatan besar yang tersimpan dalam sepakbola: Awalnya, Gandhi hanya tergoda oleh esensi sepak bola itu sendiri. Barulah setelah beberapa lama dia menyadari bahwa sepak bola juga dapat digunakan untuk tujuan politiknya. Tanpa harus menjadi pemain, manajer, atau pelatih, Gandhi menggunakan waktu dan tempat yang dimiliki, yang disediakan sepak bola, untuk menyampaikan buah pemikirannya kepada banyak orang. Tidak jarang Gandhi berorasi di ruang ganti atau di hadapan tribune penonton.

Sepak bola menjadi jalan pembuka bagi Mahatma Gandhi memulai pergerakannya. Semua ini menjadi awal bagi Mahatma Gandhi untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di Afrika Selatan. Perjuangan Gandhi tidak sia-sia, dia berhasil mengubah wajah Afrika Selatan ditandai hak bersuara untuk para kaum minoritas. Sepak bola, nampaknya, telah membawa Gandhi mencapai tujuan yang ditentukan.

Lewat sepak bola juga Cile berhasil bangkit dan bersatu setelah dihantam gempa bumi dahsyat karena mereka menjadi juara Piala Dunia 1962. Masyarakat Jerman yang mentalnya hancur akibat perang dunia II, akhirnya bisa menemukan kembali bentuk dirinya setelah negara itu meraih juara dunia ketika mengalahkan Hongaria 3-2 di Swiss tahun 1954. Amerika Serikat yang mendapat kecaman internasional akibat perang Teluk, kembali mendapat kepercayaan internasioanl setelah menggelar

Piala Dunia 1994.

Sedangkan Prancis mulai menerima kehadiran orang kulit berwarna di tengah mereka. Sukses Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Makalele, Thierry Henry dkk. menghadirkan gelar Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000, membuat sentiment rasis yang menghantui Prancis memudar. Rakyat Prancis bahkan menyebut Zidane layak sebagai presiden. Para pemain Prancis dengan kulit berwarna mereka diterima di kantor Presiden.

Sementara itu setelah final Piala Asia 2007, sukses Irak membungkam Arab Saudi, sekaligus memastikan gelar juara disambut suka cita penduduk Negara yang dibelit perang saudara. Kemenangan ini dirayakan warga Irak dengan konvoi di jalan-jalan sambil membunyikan senapan meskipun telah dilarang aparat keamanan.

Penelitian dari University of Adelaide bisa menjelaskan bagaimana kemudian sepak bola bisa mengubah semuanya. Dari penilitian yang dilakukan, mengonfirmasi bahwa partisipasi dalam klub sepak bola telah menjadi pengaruh besar pada pengalaman pembauran pendatang baru dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, yang banyak berasal dari Eropa.

Sepak bola membantu para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di Australia. Klub sepak bola ikut serta membantu imigran mendapatkan pekerjaan melalui jaringan yang terjalin di klub. Klub sepak bola juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan pribadi mereka.

Klub sepak bola memberikan imigran satu-satunya kesempatan untuk bersosialisasi tanpa kemampuan berbahasa Inggris, karena bahasanya yang universal. Kemudian pendatang baru dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah, juga sudah tertarik dengan sepakbola untuk alasan yang sama.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sudah mencoba membuka kemungkinan tersebut ketika menjalin komunikasi dengan timnas U-19. Din sebagai ketua PP tidak saja melakukan pertandingan uji coba dengan ofisial timnas U-19, tapi juga menawarkan beasiswa pada pemain tim berjuluk *Garuda Muda* kuliah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pada saat bersamaan, STIKES Aisyiyah Yogyakarta menjalani kerjasama dengan ikut menangani cedera pemain timnas sepak bola U-19. Sayang langkah ini kemudian terhenti.

Saat Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan lewat jalur politik, pendidikan, kesehatan, dan sekarang mengarah ke jihad konstitusi, kenapa kemudian tidak mengharahkan sasaran ke sepak bola?

Banyak jalan bisa dilakukan. Paling simple, PDM atau PCM bisa

menjalin komunikasi dengan manajemen klub untuk menawarkan kegiatan pengajian bulanan. Dengan sekitar 22 pemain, dimana kemungkinan 80% muslim, saya pikir sudah sangat cukup untuk pengajian. Belum lagi jika kemudian melibatkan keluarga pemain, dan mengundang suporter. Target jangka panjang, bisa melahirkan ranting istimewa.

PDM juga bisa melakukan pendekatan dengan panitia pertandingan di lapangan agar bisa menyediakan fasilitas sholat yang memadai di semua tribune penonton, sehingga saat jeda pertandingan mereka bisa melakukan sholat.

Proses jangka panjang, membentuk sekolah sepak bola Muhammadiyah di masing-masing cabang. SSB yang tidak sekadar berorientasi pada skill pemain, tapi juga menghadirkan pemain yang memiliki kemampuan akademik baik dan keislaman memadai. Jika, Muhammadiyah bisa melakukannya dengan Tapak Suci, Hizbul Wathon, kenapa tidak dengan sepak bola.

Membayangkan, PP Muhammadiyah mengadakan turnamen SSB Muhammadiyah di sebuah stadion dimana sebelum dan saat jeda pertandingan, terdengar lagu mars Muhammadiyah, serta lagu bernafas Islam. Dan, saat pemain kedua tim terlibat bentrok fisik, mereka akan mengatakan, "Sudah, sudah, kalian semua pada main bola atau berkelahi. Ayo salaman," seperti yang dikatakan Ahmad Dahlan kecil sehabis dia dijatuhkan pemain lawan dalam pertandingan Kauman melawan Ngadisuryan di Alun-Alun Selatan. (*)

TAUHID SOSIAL DI ERA MEDIA SOSIAL

Endy Sjaiful Alim

Media Sosial yang didukung dengan ICT adalah salah satu produk teknologi yang paling populer di era global. Kecanggihannya telah mampu menyuguhkan berbagai fasilitas yang dapat memanjakan aktivitas manusia. Kehadiran ICT telah mampu memberi kemudahan terutama dalam mengatasi kendala ruang dan waktu. Maka wajarlah bila kemudian kehadiran ICT dapat menembus segenap *domain* kehidupan yang memang bertumpu dalam dimensi ruang dan waktu. Mulai urusan formal maupun informal, urusan *private* sampai urusan *public*, urusan serius hingga urusan hiburan, hampir di semua lini kehidupan dapat dijangkau oleh ICT.

Terlebih dukungan kemajuan *Hardware* maupun *software* yang sedemikian pesat membuat ICT dipercaya dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan secara cepat dan tepat. Sebagai ilustrasi kemajuan teknologi *micro-prosesor* termutakhir memunculkan generasi Intel Core i7 4790 dengan *clock speed* 4 GHz, ini berarti *prosesor* termutaakhir tersebut mampu memecahkan sebanyak 4.000.000.000 masalah dalam setiap detiknya (Intel, 2014). Tidak hanya sampai disini, perkembangan teknologi yang sangat cepat memungkinkan teknologi *micro-prosesor* berkembang menuju *nano-prosesor* dimana kecepatan proses data bisa mencapai 1.000.000 kali lipat lagi.

Kecepatan dan ketepatan dalam memecahkan masalah tersebut telah mendorong distribusi arus informasi yang sedemikian dahsyat. ICT memungkinkan informasi dapat dengan cepat dikirim, diterima, dan diolah. Daya jelajah dari distribusi informasi tersebut juga dapat menembus batas jarak geografis. Semua sudut relung bumi ini dapat tersasar oleh arus informasi yang disebarkan melalui jejaring ICT. Kemampuan distribusi arus

informasi yang didukung oleh ICT ini mendorong munculnya era baru dalam gelombang peradaban global. Era baru tersebut adalah era **transparansi *Computerized*.** Pada era ini keterbukaan telah terkomputerisasikan, dengan demikian keterbukaan itu dapat terjadi secara otomatis, masif dan terstruktur. Komputer, *Laptop, Tablet, Gadget, Smartphone,* yang terhubung dengan jaringan global, telah memungkinkan untuk mengolah suatu permasalahan (informasi) yang terjadi di satu tempat, sehingga dapat dengan mudah informasi tersebut dibaca, dilihat, dianalisa, diedit, dikembangkan dan bahkan juga dapat didistribusikan ulang ke berbagai tempat yang lain. Hal ini dapat dengan mudah dan relatif murah terjadi, karena hampir setiap pengguna komputer, *Laptop, Tablet, Gadget, Smartphone* dapat menjadi pengirim, penerima, sekaligus pengolah informasi tersebut secara simultan. Keterbukaan yang terkomputerisasi ini juga membawa pada era baru dalam jaringan dan komunikasi sosial. Sehingga ruang sosial menjadi semakin luas dan massif. Dialektika interaksi sosialnya tentu juga mengalami perubahan yang sangat dinamis.

Data yang dilansir oleh agensi marketing social *"We Are Social"* pada bulan Maret 2015 menyatakan bahwa populasi pengguna *Handphone* di Indonesai mencapai 308,2 juta (Gusindra, 2015). DataJumlah pengguna *Handphone* ini lebih besar dari data jumlah pendudukan Indonesia berdasarkan sensus 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010). Secara statistic ini menunjukkan rata-rata penduduk Indonesia memiliki *Handphone* lebih dari satu. Walapun pengguna sosial media yang mengakses melalui *Handphone* baru sebanyak 74.000, namun angka ini baru memenuhi kurang lebih 25% dari potensi pengembangannya. Belum lagi kalau ditambah dengan pengguna sosial media melalui ICT yang lain seperti *destop, laptop, tab* dan lain-lain, tentunya hal ini merupakan tantangan dan potensi jejaring sosial yang luar biasa.

Tauhid Sosial Berkemajuan

Al-Qurnan sering menyandingkan "*Amanu*" dengan "*Wa Amilusholihati*". *Amanu* lebih identik dengan dasar keimanan, dasar ketauhidan, kenyakinan terkait hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta (Allah). Sedang "*Amilusholihat*", adalah amal kebajikan yang membawa manfaat secara horizontal, *rahmatan lil alamin* dan ini sejatinya adalah merupakan pengejawantahan dari keimanan kepada sang Kholiq, penjabaran dari makna "*amanu*" yang disandingkan sebelumnya.

Terlebih dalam surat al-Maun secara jelas disebutkan bahwa umat islam yang hanya mementingkan kesholehan individu, dengan melakukan sholat secara ritual saja, adalah orang yang lalai dan termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Sholat harus diikuti dengan perbuatan bermanfaat bagi sesama. Sholat harus diikuti dengan berbuat kemaslahatan bagi lingkungan sosial seperti menyantuni anak yatim dan memberdayakan fakir miskin (QS: Al-Maun). Prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Ma'un inilah yang menjadi inspirasi KH. Ahmad Dahlan sebagai tokoh gerakan pembaharuan dan pencerahan umat (K.H. S. Ibnu Juraimi: 2011).

Konsepsi Tauhid menurut Amien Rais tidaklah sekadar berdimensi aqidah yang disebutnya sebagai tauhid aqidah, tetapi juga melahirkan konsepsi tauhid berikutnya yang disebut tauhid sosial dalam arti yang luas (Edi Setiawan: 2015). Kalau kita analisa lebih lanjut pemikiran Prof. Dr. Amien Rais tentang tauhid Sosial dalam Doktrin Perjuangan, meliputi beberapa formulasi pemikiran diantaranya pencerahan umat, menggembirakan amal sholih, bekerjasama dalam kebajikan dan kesadaran politik etik (Amien Rais, 1996). Dari fomulasi yang ditawarkan oleh Prof Amien Rais memeberikan arti yang nyata dalam pemaknaan Tauhid Sosial yang mendorong agar umat Islam terlibat langsung menjadi agen perbaikan sosial.

Agen perbaikan sosial tersebut ditegaskan pula dalam konsepsi gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam kontek da'wah inilah diperlukan strategi dan mediasi yang efektif serta efesien. Sebagaimana pula dianjurkan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 yang maknanya kurang lebih demikian "*Ajaklah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdiskusilah dengan mereka menggunakan metode yang paling baik*" Maka makna "hikmah" bisa diartikan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan, sedangkan metode yang terbaik adalah metode yang terbaik di zamannya, dengan kata lain metode yang *up to date* menggikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

Di sisi lain agama Islam sangat menghargai kreativitas dimana dalam islam mashur prinsip "*antum a'lamu bi umurid dunyakum*", bahwa agama islam mengakomodasi kreatifitas dalam urusan hubungan keduniawian. Agama islam menghargai perkembangan pengetahuan, strategi dan teknologi untuk urusan kemaslahatan dunia. Agama islam bahkan menghargai urusan kemaslahatan dunia yang diniatkan untuk mencari ridlho Allah dengan menggolongkannya sebagai bagian dari ibadah. Sehingga jelaslah dalam

ibadah yang umum (*ghoiru magdhloh*) ini diperlukan kreatifitas, diperlukan ilmu pengetahuan dan diperlukan teknologi. Sehingga Islam menjadi dinamis, berkembang menuju islam berkemajuan. Di sisi inilah Teknologi media sosial memiliki potensi sebagai media alternatif.

Todongan Sisi Negatif Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya yang bisa secara mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat informasi. Media Sosial tersebut meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Stephen R. Covey: 1989). Secara teknis Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sekumpulan aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan serta pertukaran *user-generated content*" (Kaplan, Andreas M.,Michael Haenlein: 2010).

Dari berbagai bentuk media sosial yang ada, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah jenis media sosial *jejaring sosial*. Layanan *jejaring sosial* adalah layanan dalam jaringan, *platform*, atau situs yang bertujuan memfasilitasi pembangunan jaringan sosial atau hubungan sosial di antara orang-orang yang memiliki ketertarikan, aktivitas, latar belakang, atau hubungan dunia nyata yang sama. Suatu layanan jejaring sosial terdiri dari perwakilan masing-masing pengguna (biasanya berupa profil), hubungan sosialnya, dan berbagai layanan tambahan. Kebanyakan layanan ini berbasis *web* dan penggunanya berinteraksi melalui internet, seperti surat elektronik dan pesan instan. Layanan komunitas dalam jaringan kadang dianggap sebagai layanan jejaring sosial, meski dalam artian yang lebih luas layanan jejaring sosial bersifat terpusat pada individu, sementara layanan komunitas bersifat terpusat pada grup. Situs-situs jejaring sosial memungkinkan pengguna berbagi ide, aktivitas, acara, dan ketertarikan di dalam jaringan individunya masing-masing (Wikipedia Indonesai, 2015). Menurut data dari *We Are Social* yang dikeluarkan bulan maret 2015, dari 74 juta pengguna media sosial di Indonesia, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah Facebook 14%, disusul oleh WhatsApps (WA) 12%, twitter 11% dan jejaring sosial lain sampai 100% (Gusindra: 2015).

Manfaat yang paling banyak didapat dari keberadaan jejaring sosial diantaranya dapat secara cepat menyebarkan informasi terkini, memperluas jaringan kemitraan, dan menjadi media untuk pertukaran data. Dari ketiga

manfaat utama tersebut, jejaring sosial dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai sebuah produk teknologi buatan manusia tentunya keberadaan jejaring sosial juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang muncul diantaranya informasi palsu yang mengarah pada penipuan, pencurian elektronik, dan pornografi. Dari beberapa dampak negatif yang muncul pronografi adalah dampak yang paling sering mengemuka.

Terkait data tentang pornografi berbasis ICT Badan Intelejen Negara pernah release laporan bahwa Amerika berada diurutan pertama dalam jumlah halaman porno di website (Badan Inteljen Negara RI: 2012). Sampai pada tahun 2007, jumlah halaman porno di website Amerika telah mencapai 244.661.900 (89%). Urutan kedua ditempati Jerman, dengan halaman porno sebanyak 10.030.200 (4%). Urutan ketiga adalah Inggris dengan 8.506.800 (3%) halaman. Untuk wilayah Asia, Jepang menjadi salah satu dari 9 negara produsen situs porno, dengan produksi sebanyak 2.700.800 halaman porno.

Data usia pengakses situs porno yang dirilis dalam *Pornography Statistic*, menunjukkan bahwa pengakses situs berdasarkan usia 18-24 tahun sebanyak 13,61%, usia 25-34 tahun sebanyak 19,90%, usia 35-44 tahun sebanyak 25,50%, usia 45-54 tahun sebanyak 20,67% dan usia 55 tahun keatas sebanyak 20,32% (*Internet Safety: 2015)*.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang atas nama Agustin Rahmawati dan Erna Kusumawati pada tahun 2013, terhadap remaja pengguna Facebook di kota Semarang, rata-rata tingkat permisif prilaku seksual pengguna facebook sebesar 63%. Ini berarti menunjukkan responden pengguna facebook kebayakan permisif dalam prilaku seksual. Terutama untuk kelompok pengguna facebook dengan motivasi sebagai informasi hiburan, kelompok ini tercatat sebagai kelompok paling rawan melakukan penyimpangan prilaku seksual. Menurut data kelompok ini lah yang paling permisif terhadap prilaku seksual dengan data prosentase sebesar 70,6% (Agustin: 2013).

Meski kita tidak boleh meremehkan dampak negatif dari media sosial yang ada, namun kiranya tak salah bila ada anggapan bahwa dampak negatif tersebut bukanlah dampak langsung. Karena sejatinya dampak penyakit sosial itu sudah ada sebelum teknologi media sosial ditemukan. Media sosial memang dapat memfasilitasi terjadinya dampak negatif, namum

sejatinya media sosial juga memiliki potensi dampak positif yang berlimpah. Ibarat mengatasi polusi udara, tidak mungkin kita membuang udaranya. Terlebih dalam budaya global keberadaan dan perkembangan media sosial tidak bisa kita elakkan lagi. Ibarat sebilah pisau yang memiliki sisi tajam dan ditodongkan kearah kita, tidak ada pilihan mengelak lagi, kecuali menguasai pisau itu untuk kemudian mengendalikaanya dan bila diperlukan juga dapat digunakan untuk melumpuhkan lawan dengan pisau tersebut. Sebagaimana layaknya sebuah media komunikasi pada umumnya tentu dampak *media sosial* sangat tergantung pada muatan/isi/substansi/konten dari *media social* itu sendiri. Oleh karenanya semakin banyak konten positif dalam media sosial dan semakin menarik kemasan muatan positif dalam media sosial, akan dapat semakin mengurangi dampak negatif dari media sosial tersebut. Bahkan lebih dari pada itu, semakin banyak konten positif dalam media sosial juga dapat semakin menambah manfaat positif dari media sosial tersebut. Oleh karenaya ber-*fastabiqul khoirat* melalui konten media sosial menjadi sebuah tuntutan. Tolong menolong dalam kebaikan melalui media sosial menjadi kebutuhan. Bahkan mungkin dalam kondisi tertentu tidaklah berlebihan bila diserukan Jihad melalui media sosial adalah sebuah panggilan, untuk memberhangus kemungkaran yang ada dalam meda sosial seperti dalam kasus *Cyber War*.

Alternatif Pemanfaatan Media Sosial

Pengembangan konten positif di dunia ICT sudah sangat massif. Terlebih dalam bidang pengembangan IPTEK dan HANKAM, dimana memang awal mula penemuan ICT ditujukan untuk mendukung keperluan *research* dan HANKAM. Pemanfaatannya untuk kepentingan da'wah juga sudah lama berkembang. Paling tidak ini bisa diamati dari munculnya aplikasi e-Quran, radio dan televisi streaming lembaga dakwah, situs-situs berita islam, situs-situs resmi lembaga da'wah islam baik dari Nu maupun Muhammadiyah dan banyak lagi komunitas bloger pengiat da'wah lainnya.

Untuk dakwah menggunakan jejaring sosial Facebook, pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa UIN Yogyakarta atas nama Misbakhul Khoiri, yang telah mengadakan penelitian terhadap proses da'wah KH. Gymnastiar melalui Facebook. Dalam kesimpulan laporan yang diterbitkan pada tahun 2014, terdapat empat kesimpulan utama diantaranya; *pertama*: da'wah melalui Facebook dapat menciptakan kesamaan pengertian antara da'i dan pengikut Facebook, atau dengan kata lain jamaah dapat mengerti pesan

yang disampaikan ustadz melalui Facebook. *kedua:* Jamaah memberi respon yang positif kepada ustad, hal ini dapat dilihat dari komentar-komentar positif yang Nampak pada halaman Facebook. *Ketiga*: banyak komentar pengikut yang menunjukkan adanya pengaruh positif pada sikap jamaah setelah membaca komentar ustadz di Facebook. Dan *keempat*: dakwah dapat berjalan secara timbal balik sehingga tercipta hubungan yang komunikatif (Misbakhul Khoiri: 2014).

Banyak kalangan yang berharap pada pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang efektif dan efesien untuk dapat mengatasi pengentasan kemiskinan dan pemberadayaan masyarakat dalam menanggulangi kesenjangan sosial serta melawan berbagai penyakit sosial lainnya. Hal ini sangat wajar karena menurut Forum Zakat Indonesai potensi penerimaan ZIS di negara yang mayoritas penduduknya Islam ini, secara teori harusnya dapat dikumpulkan dana ZIS sebesar Rp 300 Triliun setiap tahun (Voice Of America: 2015). Angka Rp 300 Triliun pertahun ini melebihi anggaran APBN 2015 dalam Pembelanjaan Negara bidang Penguatan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang berada di angka Rp 225,9 Triliun (Depkeu: 2014). Tentunya bila potensi zakat dapat tertangani secara optimal maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh umat Islam dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Menurut laporan Forum Zakat Indonesia sementara ini pengumpulan dana ZIS yang dilakukan di Indonesia baru mencapai Rp 1,8 Triliun per tahun (Voice Of America: 2015). Ini berarti bahwa pengumpulan dana ZIS baru mencapai 0,6% dari potensi penerimaannya. Tentunya ini bukan karena kesalahan lembaga pengelolaan ZIS semata, tapi juga sangat tergantung oleh kesadaran umat Islam terhadap ZIS. Dengan kemampuan distribusi informasi yang dimiliki oleh media sosial, terdapat potensi untuk dapat mengintensifkan dakwah dalam menggalang kesadaran umat akan ZIS, sekaligus menyuguhkan layanan kemudahan dalam pemungutan, serta penyaluran ZIS. Manajemen media sosial yang berbasis ICT, bisa diintegrasikan dalam sistem pemetaan sasaran muzaki dan sekaligus juga pemetaan sasaran mustahik yang handal. Sehingga dapat menjamin pencapaian sasaran pemungutan dan sekaligus pendistribusian ZIS yang tepat sasaran, guna mengoptimalkan pengelolaan ZIS. Memang upaya pemanfaatan media sosial dalam penanganan ZIS juga sudah mulai dilakukan seperti yang telah diprogramkan oleh LAZISMU dengan berbagai produk berbasis ICT-nya. Namun demi melihat potensi penggalangan dan pengelolaan ZIS yang begitu besar manfaatanya bagi pengejawantahan Tauhid Sosial, maka ihtiar kemajuan dalam pengelolaan

ZIS dengan berbagai setrategi termasuk pemanfaatan Media Sosial perlu terus digalakkan.

Tauhid Sosial di Ranah Dinamika Sosial Berbasis ICT

Secara sosiolgis, perkataan sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas, sesuai dengan perkataan asalnya "*sozius*" yang berarti "teman" (Astrid S. Susanto: 1983). Perkataan sosial juga mendapat banyak interpretasi lain, namun pada intinya perkataan sosial itu mengarah pada *reciprocal behavior* atau perilaku yang saling mempengaruhi dan saling tergantungnya manusia satu sama lain. Secara lugas inilah yang disebut sebagai *interdependensi*. Dengan demikian "manusia sosial" berarti manusia yang saling tergantung kehidupannya satu sama lain. Interdependensi inilah yang dianggap oleh para ahli sosial merupakan satu-satunya jalan penyelesaian untuk mengatasi kenyataan bahwa manusia tidak memiliki apa yang oleh Freedman dan para ahli sosial lain sebut sebagai "*ready made adaptations to environment*". Bahwa sejatinya manusia itu tidak akan pernah menjadi mandiri secara utuh, dan dependensi manusia tidak saja terdapat pada periode awal hidupnya, akan tetapi dialami manusia selama hidup (Astrid S. Susanto: 1983). Sejatinya ini sejalan dengan konsep tauhid yang menyatakan bahwa manusia itu adalah mahluk dengan segala ketergantungannya, yang hanya harus tunduk dan patuh kepada sang Kholiq. Maka manusia tidak boleh dan memang tidak perlu menghamba (menjadi budak) mahluk lain yang sama-sama memiliki ketergantungan. Baru kemudian sesama mahluq yang sama-sama memiliki ketergantungan itu, maka manusia satu sama lain memiliki saling keterkaitan dan saling membutuhkan (interdependensi).

Menurut ilmu sosiologi proses perubahan sosial akibat adanya interaksi dan interdependensi, baik antar individu dalam satu kelompok, maupun lintas kelompok inilah yang disebut sebagai dinamika kelompok sosial (Oemiesosiologi: 2012). Untuk itu perkembangan individu sebagai anggota kelompok sosial dalam sebuah dinamika kelompok sosial, akan sangat dipengaruhi oleh posisi interdependensi itu sendiri. Dalam historisitas proses perjalanan individu posisi interdependensi juga berkembang dalam siklus sosial yang dinamis yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Hingga pada akhirnya Stephen R Covey mampu mengurai secara operasional mengenai perkembangan individu menuju proses kedewasaan dalam konsep *the maturity continuum* (Stephen R. Covey: 1989).

Konsep *the maturity continuum* menjelaskan bahwa pematangan/ pendewasaan suatu individu (anggota sosial) dimulai dari tahap ketergantungan

terhadap lingkungan (*dependence*), kemudian kemandirian (*Independence*) dan pada akhirnya bermuara pada kesaling terkaitan yang saling membutuhkan (*interdependence*). Lebih rinci Stephen R Covey menjelaskan bahwa untuk berproses dari *dependence* menuju *Independence* suatu individu harus mengembangkan sikap pro-aktif, fokus pada tujuan akhir, dan mengutamakan yang utama. Pada intinya untuk menuju kemandirian (*Independence*) sangatlah tergantung oleh pola dan sikap kondisi internal yang berada dalam suatu individu itu sendiri (Stephen R. Covey: 1989).

Namun kemandirian (*Independence*) bukanlah tingkat tertinggi dalam pencapaian kematangan individu. Kemandirian itu baru dapat menangani dan memecahkan permasalahan-permasalahan dirinya sendiri (Yusuf Hamdan: 2003). Suatu individu itu masih harus mengembangkan kemampuannya berhubungan dengan lingkungan karena masih hidup dilingkungan sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya individu tersebut perlu mengembangkan sikap berfikir *win-win solutions, bersinergi* dan *ber-empati*. Baru kemudian suatu individu akan dapat mencapai pada tahapan tertinggi dalam proses pendewasaan diri, yakni mampu memberi banyak kontribusi dalam keterkaitan yang saling membutuhkan (*interdependence*).

Pada tingkat interdependensi ini, individu dituntut mampu bekerjasama dan berinteraksi sosial tanpa kehilangan eksistensi kediriannya. Pada tingkat ini pula sangat diperlukan kemampuan manajemen informasi dan komunikasi yang handal. Manajemen informasi dan komunikasi tersebut penting karena terkait dua hal vital. *Pertama* untuk mendukung penetrasi kontribusi dalam interaksi yang saling membutuhkan. *Kedua* manajemen informasi komunikasi tersebut juga sangat berperan untuk dapat selalu memperbaiki dan peningkatkan pengetahuan serta kemampuan diri, guna menjawab perkembangan interaksi saling membutuhkan dalam relasi interdependensi.

Menggaris bawahi pula pernyataan Astrid S Susanto dalam bukunya "Pengantar Sosiologi dan perubahan sosial" (Astrid S. Susanto, 1983), bahwa komunikasi memiliki peranan yang penting dalam perubahan sosial, maka penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting bagi agen perbaikan sosial. Media Sosial yang berbasis pada manajemen ICT bisa menjadi salah satu pemegang peranan penting bagi perbaikan sosial dalam tinjauan instrumental.

Dalam tinjauan strategi misi ke-Tauhidan, dengan fasilitas komunikasi yang disediakan oleh media sosial memungkinkan setiap individu menjalankan

misi untuk berdakwah, menyeru atau mengajak dalam kebajikan. Konsep menyeru atau mengajak adalah konsep yang proaktif, mengajak berarti mengambil inisiatif. Berkonotasi mempengaruhi menuju kebajikan. Begitulah seharusnya media sosial digunakan dengan penuh *al-i'timad 'ala nafs (self confident).*

Dengan kemampuan produksi dan distribusi informasi yang dimiliki media sosial, dapat memperlancar derasnya arus komunikasi. Hal ini tentu dapat dimanfaatkan dalam menebar manfaat bagi sebanyak banyaknya umat untuk menuju *khoirun nas anfauhum linnas.*

Lebih dari itu luasnya jejaring sosial yang disediakan dalam media sosial, dapat dimanfaatkan untuk saling menolong (*litta'awanu*), dapat juga menyambung tali silaturahim yang dapat menambah panjang pemanfaatan waktu (usia) dan dapat mengungkap rahasia penambahan banyak rezeki (keberkahan). Dan mungkin inilah salah satu kunci sukses Mark Elliot Zuckerberg (lahir 14 Mei 1984) pemilik Facebook yang telah berhasil menjadi orang kaya termuda di dunia. Karena jejaring sosial Facebook yang dibuat berawal dari tugas kuliahnya telah berhasil menyambungkan silaturahmi 1,44 miliar lebih anggotanya. *Wallahu a'lam.*

IMPLEMANTASI TEOLOGI SOSIAL DALAM PERSYARIKATAN

Amirsyah

Dakwah Muhammadiyah telah berhasil melewati fase awal pembaharuan Islam dalam tiga aspek yakni *pertama,* keyakinan yang bersifat hayalan (*tahyul*); *kedua,* menambah dan mengurangi amalan yang menambah dan mengurangi ibadah khusus (*bid'ah*); *ketiga,* mencampur adukkan masalah tradisi dengan keyakinan (*khurafat*) yang disingkat dengan TBC.

Dapat dipahami bahwa telah terjadi proses implementasi doktrin idiologis Muhammadiyah sebagaimana yang terdapat dalam paham agama menurut Muhammadiyah yakni Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam, ibadah, akhlak dan muamalah duniyawiyah berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam konteks ini, fase awal persyarikatan Muhammadiyah yang dikembangkan KH. Ahmad Dahlan berbenturan dengan tradisi dakwah yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Namun dakwah Muhammadiyah tidak serta merta "mengalah" dengan kondisi tersebut. Bahkan dakwah Muhammadiyah semakin "getol" untuk memberantas praktik TBC tersebut.

Hal ini terjadi karena kehadiran Islam Indonesia pada fase awal masuknya Islam lebih bercorak sufi yakni mewariskan amalan tasauf yang cendrung beradaptasi dengan tradisi lokal. Disamping itu, buku-buku yang digunakan pada lembaga pendidikan pesanteren abad 18 dan 19 menunjukan bahwa buku-buku aqidah (teologi) yang digunakan semua berasal dari kitab-kitab teologi tradisional (Karel: 1984)

Untuk itulah Muhammadiyah terus berupaya melakukan dakwah

yang bersifat rasional yakni merasionalisasi pesan-pesan dakwah yang secara fakta empiris tidak dapat dipisahkan dengan dakwah Muhammadiyah.

Keberhasilan dakwah Muhammadiyah meluruskan pemahaman dan keyakinan yang bersifat tradisional disebabkan banyak faktor, diantaranya; *pertama,* Muhammadiyah lebih mengedepankan teologi "Mu'tazilah"; *kedua,* warga Muhammadiyah dapat membebaskan diri dari cara berpikir dogma; *ketiga,* keyakinan lebih menitik beratkan pada pemahaman al-Qur'an dan As-Sunnah (Harun Nasution: 1996).

Dalam pemikiran Islam dikenal dengan dua corak *pertama,* pemikiran yang bersifat rasional dan *kedua* pemikiran tradisional. Ketentuan Allah yang lebih dikenal dengan *sunnatullah* memberikan kebebasan pada cara berpikir rasional yang menitik beratkan cara berpikir sebab-akibat (*kausalitas*).

Teologi Sosial

Al-Qur'an mengingatkan agar penganut Islam menggunakan akal pikiran dengan term yang beragam, antara lain; apakah kamu tidak berakal (*afala ta'qilun*), mengapa tidak kamu pikirkan al-qur'an apakah kamu tidak berakal (*afala yatadabbruna al-qur'an am'ala qulubin akfaluha).* Berdasarkan hal ini diperlukan ideologi rasional atau teologi *sunnatullah* memiliki ciri : 1) Kedudukan akal yang tinggi; 2) Kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatannya; 3) Kebesan berpikir hanya diikat oleh ajaran dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis yang sedikit sekali jumlahnya; 4) Percaya adanya *sunnatullah* dan kausalitas; 5) Mengambil arti *metafor* dari teks wahyu; 6) Dinamis dalam sikap berpikir. Aliran kalam ini diwakili oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkan (Harun Nasution: 1996).

Selama beberapa abad pandangan teologi tradisonal ini menjadi pandangan teologi Islam di Indonesia. Tetapi ketika terjadi gerakan pembahruan di dunia Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, mulai kembali diperkenalkan pandangan teologi rasional. KH. Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah dan memimpimpinnya tahun 1912-1923 adalah tokoh yang banyak berkenalan dengan pembaharuan dan teologi rasional seperti Muhammad Abduh. Dahlan sejak masa muda dikenal sebagai anak yang sangat pintar bahkan ia dikenal sebagai tokoh yang tekun membaca dan menelaah pemikiran keislaman reformis. Ia menekuni pemikiran yang benafaskan tajdid (pembaharuan) dan dakwah, dari sinilah kemudian ia tergugah untuk berbuat sesuatu agar umat muslim di Indonesia menyadari tentang cita-cita yang terkandung dalam ajaran Islam (Sutarmo: 2005).

Berangkat dari kesadaran bahwa Islam agama yang membebaskan, beliau tergugah melihat dan memahami bahwa umat Islam yang berada disekitar tempat tinggalnya sangat terbelenggu dan memperihatinkan. Banyak diantara mereka yang terbelenggu oleh kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan kejumudan yang disebabkan oleh adat istiadat dan keyakinan keagamaan yang tidak masuk akal bahkan telah menjerumuskan pada perilaku syirik. Sedangkan, mereka belum memahami betul tentang ajaran agama dengan baik dan benar, ibadah hanya dilaksanakan secara formalitas dan terbatas hanya pada shalat, puasa, haji dan zakat. Persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan dan perkembangan zaman tidak banyak diajarkan pada mereka (Sutarmo: 2005).

Seiring dengan bergolaknya api pembaharuan dalam Islam di Timur Tengah yang diproklamirkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh segera megalir ke Nusantara memberikan janji-janji dan harapan baru bagi tokoh Islam Nusantara untuk mengadakan gerakan pemurnian dan pembaharuan.

Tak ketinggalan KH. Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh gerakan yang menyalakan api pembaharuan di Nusantara, dengan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Ide-ide pembaharuan yang dilaksanakan oleh beliau adalah dipengaruhi pendidikan agama dan realitas sosia-keagamaan selama di Nusantara dan di Saudi Arabia, dan ditambah lagi loleh bahan bacaan yang sering beliau gali dari Majalah al-Manar dan bahkan beliau pernah berjumpa langsung dengan Muhammad Rasyid Ridha (Sutarmo: 2005).

Sebagai gerakan sosial-keagamaan, Persyarikatan Muhammadiyah merumuskan tiga identitas dan aspek gerakannya. Identitas gerakan Muhammadiyah; *pertama*, sebagai gerakan Islam; *kedua,* gerakan Dakwah amar ma`ruf nahy munkar; *ketiga,* gerakan tajdid.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah bergerak dalam tiga bidang; *pertama,* bidang sosial keagamaan; *kedua,* sosial pendidikan dan *ketiga,* sosial kemasyarakatan. Melalui identitas dan bidang gerakan ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi modern yang terbesar di Nusantara bahkan di dunia Islam.

Ketiga aspek gerakan tersebut, berangkat dari gagasan pembaharuan yang kemudian melahirkan sebuah pandangan teologi sosial yang berbasis pada prinsip tauhid dan amal. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan "*innallajina amanu wa amilussolihat"* Artinya sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh Allah memberikan balasan yang

tidak putus-putusnya (QS Attin ayat 6).

Muhammadiyah sebagai lembaga amal telah memberikan dampak sosial yang luas, dalam rangka membentuk kesalehen sosial. Kesalehan sosial berawal dari kesalehan individu warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah berloba-lomba berbuat kebajikan dengan berperinsip *'...fastabiqul khoiroots"* ..

Oleh karena itu tak berlebihan jika Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaharuan sosio-riligius, refrormis-riligius dan pada saat yang sama menjadi agen perubahan sosial (*agent of sosial change*). Dari perinsip keyakinan KH.Ahmad Dahlan berupaya menanamkan idiologi yang berupaya menerapkan norma-norma agama atau realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman dengan berpengang teguh pada dasar-dasar (ushul) yang sudah diletakkan oleh Agama, yaitu al-Qur`an dan Sunnah.

Penggunaan term ini sebagai sinonim terhadap term kalam. In'an Esa sebagaimana mengutip dari Wolfson ini hanyalah proses sejarah yang berulang *re historica progcces.* Pada dasarnya, kedua term tersebut meskipun berkembang dalam tradisi dan agama Kristen akan tetapi subtansinya sama yaitu ilmu yang berkaitan dengan Tuhan dan berbagai derivasinya, baik dalam relasi-Nya dengan alam semesta maupun manusia (In'an Esa: 2001).

Menggunakan term teologi sosial dalam menggambarkan pemikiran dan aksi nyata yang dipraktekkan dalam aspek sosial-kemasyarakatan. Ahmad Dahlan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan pengamalan Islam. Berpijak pada kandungan surah al-Ma'un yang berisi tentang Apakah engkau melihat orang yang mendustakan catatan kehidupan [agama]?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat!, Mereka yang lalai dalam salat mereka, Mereka yang ingin dilihat, dan tidak mau memberikan kebutuhan sehari-hari [kepada sesamanya]. (QS: al-Ma'un ayat 1-7).

Berangkat dari ajaran inilah Kiai Ahmad Dahlan membentuk majelis ilmu sebagai proses awal mendirikan gerakan Muhammadiyah sebagai wadah untuk mengimplementasikan pemahaman ke-Ismanannya. Ada dua faktor yang melatar belakangi ini semua yaitu *pertama,* faktor internal umat Islam Indonesia; *kedua,* faktor ekternal. kebijakan politik pemerintah kolinial Belanda yang terus berusaha memperkokoh hegemoninya, faktor internal banyaknya umat Islam Indonesia yang masih percaya pada persoalan

tahayul, bid`ah dan khurafat (TBC) sehingga menyebabkan mereka bodoh, miskin dan tertingal dari Negara-negara yang ada di negeri Eropa (Abdul Munir Mulkhan: 2010).

Kemunduran dunia Islam menurut KH.Ahmad Dahlan, karena persoalan merosotnya akidah Islam. Berangkat dari kesaran ini, maka inilah yang kemudian menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh Ahmad.

Selain itu, gagasan ini juga melahirkan konsep etika welas asih, penulis mengutip Abdul Munir Mulkhan sebagaiaman dikutip dalam naskah yang berjudul *Tali Pengikat Hidup Manusia*, KH Ahmad Dahlan mengatakan tentang pandangannya tentang kemanusiaan, hubungan antar bangsa, ilmu dan pokok-pokok isi Kitab Suci al-Quran yaitu:

Kebanyakan pemimpin-pemimpin belum menuju baik dan enaknya segala manusia, baru memerlukan kaumnya golongan sendiri saja, kaumnya tiada dipedulikan. Jika badannya sendiri sudah mendapat kesenangan, pada perasaannya sudah berpahala, sudah sampai pada maksudnya… begitu juga sudah menjadi kebiasaan orang, segan dan tiadak mau menerima barang apa saja yang kelihatan baru.

Selain itu, Kiai Ahmad Dahlan juga mengatakan tentang memelihara dan meningkatkan kemapuan berfikir yang masih berkaitan dengan kepeduliannya terhadap persoalan kemasyarakatan yaitu dengan menyatakan: *antara lain: Pertama, memilih perkara apa-apa harus dengan membalas kasih. Manusia tidak sampai kepada keutamaan, bila tidak dengan belas kasihan; sebab wataknya orang yang tidak belas kasihan itu, segala perbuatannya biasanya kejadian melainkan dengan kejadiaannya kesenangan, yang akhirnya lalu bosen dan terus sia-sia. Kedua, harus bersunguh-sunguh akan mencari; sebab akibat yang dimaksudkan kepada keutamaan dunia dan akhirat, itu tidak sekali-kali dapat tercapai bila tidak dicari dengan daya dan upaya ikhtiar dengan pembelaan harta dan benda, kekuatan dan fikir"* (Abdul Munir Mulkhan: 2010).

Dalam konteks kekinian, pemikiran Ahmad Dahlan sangatlah relevan, karena dalam perkembangan Muhammadiyah dewasa ini terdapat kecendrungan warga dan pimpinan Muhammadiyah pada semua level kurang meneladani sikap dan pikiran Ahmad Dahlan.

Misalnya pemikiran Ahmad Dahlan adalah sosok yang sangat peduli dengan persoalan kemasyarakatan, kemiskinan dan kebodohan khususnya yang dialami bangsa Indonesia pada waktu itu. Abdul Munir Mulkhan: 2010)

Dan dalam beberapa kesempatan ketika Ahmad Dahlan mengajar dan

menyampaikan pengajian kepada santrinya tentang surah al-Ma'un secara berualang-ulang, namun kebanyakan mereka kurang paham kenapa Kiai Dahlan selalu mengulang-mengulang kandungan surat teresebut. Cara nerulang-ulang mendapat protes dari santinya. Dengan sederhana dan masuk akal KH Dahlan menjawab apakah kalian udah mengamalkannya ?

Dibalik itu semua ada nilai spritualitas yang ditanamkan di sanubari para santri untuk terus saling menolong dan peduli terhadap masyarakat atau orang-orang yang ada disekitarnya untuk membantunya disamping itu, agar kita semua memberdayakan kaum miskin dan duafa. Terhadap gagasan ini, sebagian kalangan memberikan beberapa istilah yaitu: teologi al-ma'un, teologi al-Duafa dan etika wales kasih. Meskipun demikian tujuannya sama yaitu ingin menguraikan gagasan Kiai Dahlan yang berkaitan dengan perannya dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Kunci utama gagasan Dahlan terletak pada realitas kebenaran tafsir al-Qur'an, akal suci, temuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman universal kemanusiaan. Mempelajari filsafat merupakan kunci pengembangan kemampuan akal suci, selain belajar pada pengalaman bangsa yang beragam dan pemeluk agama, baru kemudian bisa memperoleh bagaiamana cara mencapai tujuan penerapan ajaran Islam yaitu; penyelamatan kehidupan umat manusia di dunia yang berlandaskan cinta kasih.

Dapat dikatakan Kiai Dahlan berusaha mengamalkan Islam satu-kata dengan perbatan, sebagaimana beliau contohkan bahwa perolehan dari lelangan ini akan digunakan untuk "modal" perjuangan, termasuk menyantuni fuqara (kaum fakir), masakin (kaum miskin), dan aitam (anak-anak yatim). Tak salah kiranya jika Dahlan bisa disebut sebagai "*a man of action*" dan bukan "*a man of thought*" semata. Bagi Dahlan iman itu harus nampak pada amal shaleh (action) bukan sekedar pembenaran dalam hati (tasdiq). Kalau pandangan itu dirujuk kedalam paham teologi klasik inilah konsep ini yang diajarkan oleh paham teologi rasional (Mu`tazilah), bahwa iman tidak hanya tasdiq dan ma`rifah tetapi adalah amal. Teologi amal atau iman yang membebaskan inilah yang menjadikan persyarikatan Muhammadiyah bisa eksis dan maju sampai saat sekarang ini. Yaitu "sedikit bicara banyak bekerja" atau "satu kata dengan perbuatan". Dalam kesehariannya, Dahlan telah merealisasikan dengan cara mengembangkan sekolah modern, mendirikan panti asuhan, rumah sakit dan pemberdayaan kaum mustadafin dalam sistem dan manajmen organisasi modern. Hal ini dilakukan sebagai praktek ritual Islam yang difungsikan sebagai dasar teologis. Disamping itu, beberapa cerita menyebutkan bahwa suatu ketika Kyai Dahlan memukul kentongan

untuk mengumpulkan tetangganya untuk mau membeli peralatan rumah tangganya seperti kursi, meja, jam dinding dan sebagainya dalam sebuah lelangan spontan. (Zuly Qadir: 2010).

Seluruh harta Kiai Dahlan rela dijual untuk kepentingan dakwah dan membantu umat yang sedang membutuhkan. Hampir seluruh usaha dan kegiatannya merupakan perlawanan tentang takdir, nasib dan fatalistik.

Kerja keras mengumpulkan capital untuk membebaskan kaum tertindas, marjinal dan mskin, ini pandangan Muhammad Iqbal mengenai konsep fakir dalam tasawuf yang harus digelorakan pada era modern ini. Dahlan dan tokoh-tokoh awal Muhammadiyah sangat teguh mengamalkan ajaran dalam bermuhammadiyah

Dengan berbekal ajaran ini dia dapat mengajak berpatisipasi para dokter-dokter yang berasal dari Belanda untuk membantu kaum duafa yang memerlukan pengbatan. Bahkan ajaran cinta kasih ini juga yang menarik elit priyayi dr. Soetomo untuk membantu Kiai mendirikan Rumah Sakit Muhammadiyah di Surabaya yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan tertindas (Abdul Munir Mulkhan: 2010). Kiai Dahlan berpandangan bahwa kerja sosial yaang digagasnya merupakan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang harus dipahami dengan akal dan hati suci serta diamalkan dengan welas asih cinta kasih. Darisini kemudian peradaban dan iptek bisa dikembangkan, keselamatan dunia dan kemanusiaan universal bisa dicapai (Abdul Munir Mulkhan: 2010).

Teologi al-Ma'un bisa dipahami sebagai dasar pengembangan kegiatan kesehatan dan panti asuhan, bukan sebagai dasar bagi aksi kebudayaan dan metodologi pemahaman atau tafsir pragmatis atas ayat-layat al-Qur'an, lebih dari itu semua ini merupakan penerapan ajaran Islam secara langsung (Abdul Munir Mulkhan: 2010).

Persoalan yang terjadi di abad 20 ini bersumber dari gagasannya tentang kemanusiaan sebagai kesadaran akan ketimpangan social, dasar kerja sama dan kesatuan seluruh umat manusia secara global (Sutarmo: 2010).

Gagasannya pentinngnya sikap terbuka dan kesediaanya untuk belajar pada orang lain, walaupun kepada orang yang berbeda agamanya. Baginya, pendidikan yang tinggi adalah pendidikan akal dengan materi utama filsafat, khususnya logika. Kajian filsafat bertujuan untuk kesejahteraan seluruh manusia di dunia, untuk mencapainya semua manusia yang berbeda agama harus saling menghargai dan bekerjasama. Dari sisni akan tampak bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan bagi pencapaian kesejahteraan dan perdamaian seluruh umat manusia (Sutarmo: 2005).

Teologi Sosial Menjadi Tauhid Sosial

Tauhid rububiyah adalah pengesaan Allah disertai bahwa Allah-lah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta ini. Sedang tauhid ilahiyah adalah tauhid yang menyadarkan kepada kita bahwa hanya Allah-lah eksistensi tunggal. Tauhid sosial merupakan implementasi dari tauhidullah dalam dimensi sosial. Dalam Islam, kata yang lebih popoler yakni Tauhid terbagi dua; pertama, meng Esakan Allah dengan meyakini satu-satunya Zat pemelihara alam semesta (*tauhid rububiyah*); *kedua*, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah *(tauhid ilahiyah*) (Sokhi Huda: 2011).

Konsekwensi dari tauhid adalah menuntut di tegakkannya keadilan social dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Karena setiap gejala eksploitasi manusia atas manusia lainnya adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai tauhid yang menjunjung keadilan dan persamaan derajat manusia dihadapan Allah SWT (Sokhi Huda: 2011). Pemikiran Tauhid Sosial adalah upaya pembelaan terhadap masyarakat dari kondisi-kondisi: (1) Ketertindasan akidah (2). Keterbelakangan dan ketertinggalan (3). Penderitaan ekonomi, (4). Penderitaan moral, (5). Ancaman teologi dan idiologi falsafat Bangsa Indonesia yaitu pancasila. Teologi ini kemudian dlandasarkan pada keimanan pada Allah Saw yang dilandaskan dalam praktek sosial (Sokhi Huda: 2011).

Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah tujuan yang ingin dicapai dan juga. menegakkan tauhid sosial yang murni berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah al-Shahihah/ al-Ma'qulah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum. Ketiga, pelaksaan programnya adalah (1). Ketauhidan, (2). Keramahan, (3). Kekhalifahan, (4). Kerisalahan amar ma'ruf nahi mungkar, (5). Kemaslahatan, (6). Kemajuan, (7) rasionalitas dan keilmuan, (8) keretifitas lokal dan desentralisasi proporsional (9) fleksibilas, efektifitas dan efesien dan (10) penegakan hukum dan keadilan. Pada akhirnya gasasan ini menjadi idiologi dan kepribadian organisasi Muhammadiah (Sokhi Huda: 2011). Bila dipadatkan dalam empat buah istilah, cita- cita sosial Muhammadiyah berkisar pada ukhuwah, hurriyah, musawah, dan 'adaalah (persaudaraan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan).

Gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Falsafah yang telah diajarkan Dahlan yaitu "*sedikit bicara banyak bekerja*" setidaknya melahirkan tiga prioritas utama Muhammadiyah

dalam bidang sosial antara lain: bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah modern (schooling), bidang kesehatan mendirikan layanan banyak rumah sakit, rumah bersalin dan poliklinik, sedangkan dalam bidang santunan sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan bantuan kreatif lainnya (Sokhi Huda: 2011). Berdasarkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini telah memiliki 161 perguruan tinggi, 5.500 sekolahan, lebih dari 300 rumah sakit, dan lebih dari 300 panti asuhan.

Gagasan teologi sosial ini kemudian melahirkan sebuah gerakan dalam Muhammadiyah yaitu majelis Penolong Kesengsaraan "Oemoem" memiliki maksud tesendiri bagi Muhammadiyah. Istilah "Oemoem" dipilih dengan visi bahwa seluruh kerja dan amal usaha atas nama Muhammadiyah ditujukan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi semua manusia tanpa memandang agama, etnik, kultur, ras, kaya, miskin, dan sebagainya.

Berulang kali Kiai Ahmad Dahlan menyampaikan kepada para santrinya falsafah yang sangat penting yang terkandung dalam surah al-Ma'un, *Pendusta agama adalah orang-orang yang shalat namun tidak berpihak dan peduli kepada orang miskin dan menelantarkan anak yatim.* Falsafah al-Ma`un ini sangat sentral dalam teologi sosial Muhammadiyah. Gagasan ini memiliki erat kaitannya dengan etos kerja dan kewirausahaan. Artinya, kerja keras warga Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghasilkan surplus pendapatan dan kekayaan. Surplus itu ditujukan untuk melahirkan kebajikan berupa pemihakan, pelayanan dan pemberdayaan atas orang-orang miskin dan tertindas.

Ironisnya, belakangan banyak pengikut—kalaupun bukan pimpinan Muhammadiyah yang tidak tahan godaan materialisme yang semakin merajalela, tarikan hasrat kepada orientasi profit yang menjadi semangat neo-kapitalisme. Spirit al-Ma'un sekarang sudah tergantikan dengan kemewahan-kemewahan, bermegah-megahan dan lalai akan tujuan hakiki. Amal usaha Muhammadiyah yang jumlahnya ribuan berubah menjadi rezim baru "kapitalisme" *an sich*, minus kebajikan. Sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh Muhammadiyah sekarang tidak lagi bisa dinikmati oleh kalangan mustadafin, orang-orang kayalah yang hanya bisa menikmati di sekolah ungulan Muhammadiyah. Di samping itu, orang miskin dilarang sakit dan berobat di rumah sakit PKU Muhammadiyah karena dipastikan tidak mampu membayar jasa kesehatan dan tidak ada dispensasi.

Tampaknya ada perubahan dalam sprit yang ditanamkan oleh Kiai Dahlan kepada para santrinya dan pengikut ajarannya. Sudah selayaknya Muhammadiyah tampil sebagai khittah al-Ma'un melihat kondisi masyarakat saat ini yang sudah rakus akan kekuasaan dan terobsesi dengan kekayaan serta kenikmatan materi yang hedomistik.

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan di era global kapitalisme, adalah apakah pemaknaan teologi al-Ma'un seperti yang dilakukan oleh Kiai Dahlan 100 tahun yang lalu itu masih efektif, terutama untuk 100 tahun akan datang? Orang menjadi miskin itu kebanyakan bukan karena mereka malas bekerja. Banyak sekali orang miskin yang justru bekerja banting tulang 24 jam sehari.

Untuk itu segenap keluarga besar Muhamadiyah, mulai dari pimpinan, anggota perlu kembali memahami dasar pengelolaan amal usaha Muhammadiyah, antara lain; *pertama,* menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehiidupan. *Kedua,* memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. *Ketiga,* meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya. *Keempat,* meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemauan tinggi serta berakhlak mulia.

Inilah salah satu upaya melawan kemiskinan dengan domikasi kepitalisme yakni dengan mengubah cara berpikir, dari cara berpikir kapitalis menjadi cara berpikir sistem sosial Islami yakni didalam harta ada hak pakir miskin.

Mereka menjadi miskin karena hidup di dalam sistem yang menciptakan kemiskinan dan mendukung penindasan terhadap orang miskin, yang dikenal kemiskinan struktural. Cara-cara tradisional dalam pengentasan kemiskinan, terutama yang bersifat karikatif, terlihat tak berdaya dan kedodoran menghadapi sistem kapitalisme global dan pemiskinan struktural oleh negara terhadap rakyatnya. Karena itu Muhammadiyah harus mempunyai dua kekuatan besar yaitu memiliki pawer untuk mempengaruhi kekuasaan negara yang berpihak kepada rakyat miskin dan dhuafa. Dan kedua mempunyai jaringan dan kapital besar untuk untuk menguasi pasar dan sumber-sumber ekonomi yang membebaskan rakyat miskin.

Selain hal di atas Muhammadiyah harus mencoba mendifinikan

kembali term miskin, seperti kata Moeslim Abdurrahman, *pertama*, definisi orang miskin itu tak boleh dibatasi pada mereka yang miskin secara ekonomi. Orang miskin adalah mereka yang mengalami marjinalisasi sosial, seperti petani, pemulung, dan pelacur, dan mereka yang mengalami subordinasi sosial seperti kelompok agama minoritas (Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya). *Kedua*, bagaimana menerapkan teologi al-Ma'un bagi orang-orang miskin kontemporer itu? Caranya tentu tak bisa dilakukan dengan memberi mereka uang, tapi melawan sebab-sebab yang membuat mereka miskin, seperti kapitalisme global dan budaya kemiskinan (*culture of poverty*).

Menurut hemat saya, miskin secara struktural mengakibatkan kemiskinan terstruktur mulai dari level masyarakat yang paling bawah, sebagai akibat dari masyarakat kelas atas kurang peduli seperti yang dilakukan Ahmad Dahlan. Disamping itu, miskin secara budaya (cultural). Kemiskinan semacam ini telah membudaya mulai dari cara berpikir—hingga prilaku yang miskin berbuat, hanya menunggu belas kasihan orang lain. Dari kemiskinan ini dapat menyebabkan kemiskinan iman, yang kemudian terjeba pada lemiskinan teologi. Ini sangat berbahaya untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Pendeknya, jika Muhammadiyah kini telah berkembang, untuk memasuki abat ke-2 pada 100 tahun yang akan datang, maka Muhammadiyah harus mampu mempertahankan upaya-upaya penerjemahan dan mengimplementasikan teologi al-Ma'un dalam tiga pilar pelayanan kesehatan (*healing*), pendidikan (*schooling*), dan pelayanan sosial (*feeding*). Organisasi ini perlu juga mengadopsi sistem baru untuk mengejawantahkan teologi al-Ma'un di era kapitalisme global. Hemat saya peran kaum ibu dalam mendukung tiga pilar gerakan ini sangatlah sentral, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada Aisiyah menjadi anggota PP Muhammadiyah.

Penutup

Teologi sosial Ahmad Dahlan diimplementasikan dengan cara berpikir yang rasional, beriman dengan amal, kerja keras untuk menghasilkan amal soleh yang surplus pendapatan dan kekayaan agar dapat membebaskan masyarakat miskin, melandaskan cinta kasih dalam kerjasama dengan bermacam orang berbeda keyakinan untuk kemajuan kemanusian. Merupakan ide-ide berilian dan substansial yang diwariskan oleh Ahmad Dahlan bergerak membebaskan masyarakat mewujudkan cita-cita Islam yang sebanar-benarnya. Penerus Ahmad Dahlan dan

ortom-ortom Muhammadiyah sudah saatnya dapat selalu mewarisi dan mengembangkan secara kontektual dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Bacaan

Abdul Munir Mulkhan, *Kiai Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Kompas, 2010)

Harun Nasution, *Islam Rasional,* (Bandung: Mizan, 1996)

In'an Esa, *Teologi Progresif*, (Yogyakarta: Remebook, 2001)

Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Sokhi Huda, *Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian Atas Teologi*

Syah, Amir, Modernisasi Kebijakan Keagamaan di Indonesia, dalam Pemikiran Mukti Ali, Jakarta, Alinnuha Pres, 2019

Syah, Amir, Wanita Dalam Perspektif Islam, Jakarta, Alinnuha Pres, 2019

Pedoman Amal Usaha Muhammadiyah, penerbit PP Muhammadiyah.

Muhammadiah, Jurnal TASAQAFAH Vol 7, No 02, 2011

Zuly Qadir, *Muhammadiyah Studiest: Reorentasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Keduapuluh,* (Yogjakarta:Kanisius, 2010)

Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial-Keagamaan Modernis,*(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005).

Bagian Dua

EKONOMI ALTRUISTIK MUHAMMADIYAH

NALAR ALTRUISME MBAH DAHLAN

Dahnil Anzar Simanjuntak

Bertepatan dengan tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus 2015 nanti, Muhammadiyah akan menggelar Muktamar ke-47 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 103 tahun sudah Muhammadiyah bekerja untuk Islam dan Indonesia. Rentang waktu tersebut, banyak fase kehidupan beragama dan berbangsa yang diisi oleh semangat Muhammadiyah. Muktamar, bagi warga Muhammadiyah bukan sekedar bicara siapa yang akan memimpin Muhammadiyah 5 (lima) tahun kedepan, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah apa agenda ke-Islaman dan keIndonesiaan yang akan dilakukan Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah *amar makruf nahi munkar* dengan semangat *tajdid* atau pembaharuan. Gerakan *tajdid* bagi Muhammadiyah adalah jiwa atau nyawa, bila *tajdid* tidak lagi hadir dalam setiap pikir dan gerak Muhammadiyah, sejatinya sebagai pergerakan, Muhammadiyah telah mati. Karakteristik gerakan pembaharuan (*tajdid*) adalah sikap utama yang diajarkan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan (Mbah Dahlan). Semua langkah awal memulai dakwah Islam dan ke-Indonesian yang diinisiasi Mbah Dahlan adalah "baru" pada saat itu, selain baru pengajaran Islam yang ditawarkan Mbah Dahlan menggembirakan dan menawarkan solusi. Tengok bagaimana Mbah Dahlan mengajar menggunakan media alat musik seperti Biola yang dulu dianggap sebagai cara-cara orang kafir sehingga Mbah Dahlan disebut sebagai tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Kebaharuan yang selalu ditawarkan Mbah Dahlan dalam pengajaran Islam, membuat "*Muhammadiyah al awalun*" pada tahun 1920 merumuskan tujuan dan maksud Muhammadiyah adalah, Pertama, "memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam

di Hindia Belanda". Kedua, "memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya".

Kata kunci yang digunakan sebagai tujuan dan maksud Muhammadiyah pada tahun 1920 tersebut adalah "menggembirakan". Mbah Dahlan dan generasi "*Muhammadiyah al awalun*" paham betul, bahwa dakwah Islam harus dilaksanakan dengan cara menggembirakan, pun, untuk mencapai masyarakat Islam yang berkemajuan serta gembira hidupnya sepanjang masa bersama ajaran Islam.

Orientasi gerakan Muhammadiyah, yang diinisiasi oleh Mbah Dahlan adalah "Keadilan Sosial", dimana umat Islam dan rakyat Indonesia saat itu bisa keluar dari kebodohan dan kemiskinan menjadi umat yang memiliki semangat berkemajuan dan bergembira dalam ber-Islam, melalui kepedulian sosial tinggi yang ditunjukkan oleh Mbah Dahlan, jauh sebelum ilmuan dan para cendikiawan masa kini berkoar tentang gerakan Islam transformatif, yang membebaskan dan mewujudkan keadilan sosial. Mbah Dahlan mampu melahirkan pemikiran dan gerakan Islam yang mampu menjawab permasalahan sosial sesungguhnya, yang di masanya dianggap aneh dan kufur, karena mengancam eksistensi kelompok tertentu penjajah maupun kelompok ulama yang feodal.

Menjawab permasalahan kebodohan maupun pembodohan, kemiskinan juga pemiskinan, Mbah Dahlan mengintensifikasikan gerakan pendidikan. Lahirlah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Gerakan anti kemiskinan lainnya, pun tercetus melalui pengajian-pengajian intensif yang langsung dibina oleh Kiyai Dahlan.

Cerita tentang pembahasan Surat Al Maun yang terus menerus diajarkan oleh Kiyai Dahlan pada santri-santrinya, sangat populer di kuping kader dan simpatisan Muhammadiyah. Pengajian tentang surat Al Maun ini, yang melatarbelakangi lahirnya lembaga-lembaga *altruistic*, milik Muhammadiyah, seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Rumah Sakit. Bermodal semangat Ikhlas dan Jihad dakwah *amar makruf nahi munkar* Generasi "*Muhammadiyah al awalun*" mampu mentransformasikan pemahaman ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

Mbah Dahlan dan generasi *Muhammadiyah al awalun* menggunakan *nalar altruisme* dalam mengembangkan dakwah Islam melalui Muhammadiyah di Indonesia. Sikap Ikhlas bekerja untuk umat dan bangsa menenggelamkan sikap egoistik yang dipenuhi dengan sikap mengejar kepentingan pribadi

serta abai kepentingan publik.

Merujuk kamus besar bahasa bahasa Indonesia, Nalar adalah aktivitas berpikir logis dengan mempertimbangkan baik-buruk setiap keputusan yang dibuat. Nalar merupakan kata yang sering kita gunakan untuk menggambarkan jangkauan berpikir, kekuatan berpikir serta keunggulan akal budi. *Mainstream* ilmu sosial-politik dan ekonomi dibangun dengan nalar "materialisme", hampir semua pendekatan insentif dan disinsentif dalam ilmu ekonomi, menggunakan nalar materialisme, sikap egoistik merupakan "panglima" yang memimpin aksi sosial ekonomi yang berujung pada insentif keuntungan material.

Nalar yang digunakan dan dirawat Mbah Dahlan dan *Generasi Muhammadiyah al awalun* adalah *nalar altruisme*. Nalar dimana logika sehat digunakan untuk mendorong tindakan atau gerakan yang berorientasi pada kepentingan orang banyak (umat) dibandingkan kepentingan diri sendiri, bahkan dalam kondisi yang ekstrim mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang banyak (umat). Istilah Altruisme pertama kali diperkenalkan oleh bapak sosiologi Auguste Comte. Merujuk Walstern, dan Piliavin (Deaux, 1976). Perilaku altruistik adalah perilaku menolong yang timbul bukan karena adanya tekanan atau kewajiban, melainkan tindakan tersebut bersifat suka rela dan tidak berdasarkan norma–norma tertentu, tindakan tersebut juga merugikan penolong, karena meminta pengorbanan waktu, usaha, uang dan tidak ada imbalan atau pun *reward* dari semua pengorbanan.

Cara berpikir seseorang atau kelompok bisa dilihat dari cara mereka bekerja. Maka, alangkah lebih tepat melihat apa yang dipikirkan seseorang atau kelompok melalui apa yang sudah dan sedang mereka kerjakan. Mbah Dahlan seringkali dijuluki dengan istilah "*Man of Action*", melalui aksi-aksi nyata beliau-lah kita bisa memahami cara beliau berpikir dan bersikap. Mendirikan sekolah, panti asuhan bagi yatim piatu, panti jompo, rumah sakit dan pelayanan sosial lainnya membuktikan bahwa nalar altruisme mendominasi nalar atau pikir sehat Mbah Dahlan. Mbah Dahlan dan generasi *Muhammadiyah al awalun* tidak pernah punya ide untuk mendirikan institusi bisnis yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan atau membangun nalar egoisme, tetapi aksi-aksi organisatoris dan dakwah beliau perkuat melalui aksi-aksi sosial membangun institusi-institusi sosial ekonomi dengan semangat ikhlas untuk melayani umat, atau *nalar altruism*.

Meskipun, Mbah Dahlan dan generasi *Muhammadiyah al awalun* memiliki latarbelakang sebagai pedagang batik, namun mereka menjadikan

aktivitas perdagangan yang mereka lakukan sebagai motivasi dan cara untuk menggerakkan mesin dakwah, agar mereka merdeka, mereka berbisnis dengan jujur dan menggunakan keuntungan bisnis sebagai biaya gerakan dakwah yang mereka lakukan, berbeda dengan pedagang kebanyakan yang umumnya memiliki orientasi memaksimalkan keuntungan *an sich*, egoistik, berkarakter khas *homo economicus* yang sering diistilahkan sebagai *economic animal* yang abai terhadap kepentingan orang banyak. Kegiatan ekonomi yang didominasi nalar egoisme, pun, dipraktekkan menjadi pekerjaan yang didasari nalar altruisme. Sehingga gerakan ekonomi yang diinisiasi adalah gerakan ekonomi yang mensejahterakan bagi semua, berniaga tidak sekedar untuk kepentingan pribadi tetapi berniaga untuk mendapatkan keuntungan demi menggerakkan dakwah Islam dan Muhammadiyah.

Belajar dari fakta historis gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh Mbah Dahlan yang didominasi nalar altruisme tersebut. Maka apa pun pekerjaan Muhammadiyah dimasa yang akan datang, harus dibangun menggunakan sikap nalar altruisme. Tantangan kini dan masa depan Muhammadiyah yang perlu menjadi pembahasan penting Muhammadiyah agar amal usaha milik Muhammadiyah yang terdiri dari 167 perguruan tinggi, 2.703 Sekolah Menengah Pertama dan Atas, 2.901 sekolah dasar, 67 pesantren, dan 346 rumah sakit, bisa tetap menjadi amal usaha yang berorientasi pada dakwah dan nilai pelayanan sosial untuk umat dan bangsa dimana sikap nalar altruisme tetap menjadi karakter dasar gerakan ini, dan tidak membelokkan amal usaha tersebut menjadi *homo economicus* yang dipenuhi dengan nalar egoisme.

Bertentangan dengan teori modern ekonomi yang didominasi nalar egoisme, gerakan ekonomi jamaah Muhammadiyah, pun, harus dirancang dan digerakan melalui sikap nalar altruisme, dimana memperkuat jejaring ekonomi Muhammadiyah harus didasari oleh semangat berjamaah, sebagai karakter egoistik dalam bisnis digunakan sebagai mesin penggerak produktivitas. Sedekah, Infaq dan zakat adalah mesin penggerak bagi sikap nalar altruisme dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.

(Sebagian besar isi tulisan ini pernah diterbitkan Republika, 22 Mei 2015)

JIHAD KONSTITUSI:
Peran Muhammadiyah dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi

Dani Setiawan

Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta pada tahun 2010 menjadi perjalanan penting. Dari sini bermula gerakan "Jihad Konstitusi" mendapatkan dasar pijakannya. Sebuah terobosan strategi gerakan pencerahan tengah dipelopori oleh Muhammadiyah di abad keduanya, untuk meluruskan kiblat bangsa yang dianggap telah melenceng dari Pancasila dan UUD 1945. Secara operasional, Jihad Konstitusi dilakukan dengan cara pengujian peraturan perundang-undangan tertentu (*Judicial Review*) oleh Mahkamah Konstitusi dan pendidikan publik melalui berbagai forum diskusi dan seminar. Gerakan yang dipandang sebagai *amar makruf nahi munkar* ini terbilang sukses dan menjadi perhatian publik demikian luas. Inisiatif ini sekaligus meneguhkan usaha-usaha menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa yang merupakan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejauh ini, jihad konstitusi sudah berhasil membatalkan sejumlah pasal di UU 22/2001 tentang Migas dan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Ada pula tiga UU lain yang secara sekaligus sedang dalam proses *judicial review* di MK, yakni UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam modernis terbesar (*the largest modernist islamic organization*) di Indonesia bahkan di dunia, telah menampilkan diri sebagai gerakan pembaruan

(*tajdid*) yang terus berkomitmen untuk mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahirannya. Dan menuju abad kedua, Muhammadiyah telah menyatakan komitmennya untuk terus melakukan gerakan pencerahan. Bagi Muhammadiyah, gerakan Pencerahan (*tanwir*) merupakan wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia. Jihad kemudian dimaknai sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah diaktualisasikan dalam bentuk perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama (Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, 2010).

Penggunaan terminologi "jihad" untuk mengoreksi kebijakan ekonomi negara memiliki pesan yang sangat kuat. Bahkan dapat dikatakan sejalan dengan tuntunan sila pertama Pancasila. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai moralitas ketuhanan seperti dinyatakan dalam sila pertama Pancasila itu, terdapat suatu cita-cita untuk membawa etika dan misi profetik agama ke dalam kehidupan publik. Bahkan sila ketuhanan yang maha esa harus dibumikan dalam strategi kebijakan ekonomi nasional. Caranya yaitu memberi jalan bagi berlangsungnya roda perekonomian nasional yang digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan nilai-nilai etik dan moral (Mubyarto, 1985: 148). Ekonomi tidak hanya digerakkan oleh rangsangan harga, sebagaimana terjadi pada negara-negara kapitalis, tetapi juga merupakan penggabungan antara sistem pasar (harga), kontrol sosial atau pengawasan dari warga negara sekaligus memiliki pedoman moral-etis yang lahir dari dorongan sifat keimanan dan ketakwaan setiap warga masyarakat kepada Tuhannya.

Sebagai konsekuensi prinsip kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana telah diterangkan di atas, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Asshiddiqie, 2011: 56). Dalam ungkapan Bung Hatta (1956), bahwa dasar ketuhanan yang maha esa menjadi dasar moral yang memimpin cita-cita negara Indonesia, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar,

adil, dan baik. Oleh sebab itu sistem ekonomi Indonesia sesungguhnya tidaklah bebas nilai, tetapi mengandung penentuan tujuan sosial dan metode untuk mencapai tujuan sosial ini.

Jihad konstitusi melalui *judicial review* merupakan dakwah politik *amar makruf nahi munkar* dalam merespon ketidakadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengelolaan ekonomi nasional telah menciptakan ketimpangan yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebab utamanya yaitu berlangsungnya penerapan yang ketat disiplin-disiplin ekonomi neoliberal, yang memungkinkan negara-negara kapitalis maju yang memiliki modal yang kuat, mengambil manfaat lebih besar dari proses globalisasi ekonomi yang berdasar "persaingan bebas" dan "pasar bebas". Sementara negara berkembang/negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, diarahkan hanya menjadi penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah bagi kebutuhan industri negara-negara pusat dalam sistem pembagian kerja internasional di bawah globalisasi ekonomi.

Indonesia suka tidak suka telah menjadi korban dalam proses semacam ini. Pemerintah tidak siap memberi arah dan ikut serta mendesain tata kelola perekonomian global yang lebih adil, sehingga gagal melakukan domestifikasi kepentingan-kepentingan yang berada di dalam globalisasi agar bekerja bagi kepentingan nasional. Akibatnya sebagai contoh, pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak ditujukan untuk meletakkan dasar-dasar bagi pelembagaan sistem ekonomi kerakyatan/demokrasi ekonomi di Indonesia. Sebaliknya pemerintah ikut memfasilitasi pengambilalihan kekuasaan dalam pengelolaan kekayaan alam kepada monopoli modal internasional

Kondisi ini tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Meluasnya peran asing dalam ekonomi Indonesia berakar pada sejarah ekonomi-politik yang panjang. Kapitalisme, sebagai sebuah pemikiran yang mendorong semangat individu untuk bersaing dan membentuk mekanisme *free competition* dalam kehidupan berekonomi, dalam prakteknya membutuhkan intervensi dari otoritas kolektif, yaitu negara yang dapat mewakili kepentingan modal secara umum. Dalam pengertian lain, negara sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dalam sistem kapitalisme dan merupakan pemain kunci dalam praktek akumulasi primitif. Yang telah menggunakan kekuatannya bukan hanya untuk memaksa penerapan perjanjian-perjanjian untuk melembagakan kapitalisme, tetapi juga untuk mendapatkan dan melakukan privatisasi aset yang merupakan basis utama dari akumulasi kapital. Kerangka legal yang dilakukan dengan membuat aturan-aturan hukum menjadi sebuah

prinsip dalam kapitalisme untuk menjadikan alat produksi (buruh, tanah, dan modal) sebagai komoditas yang bisa dimiliki oleh individu, dan oleh karenanya setiap individu dapat secara bebas memperjual-belikannya di dalam mekanisme pasar.

Proses pelembagaan nilai-nilai ekonomi neoliberal di dalam kebijakan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh pandangan kelompok "neo-institusionalis," yang menganggap peranan penting dari institusi (pemerintah, hukum, pasar, dan sebagainya) dalam mereduksi ketidakpastian dengan cara menstabilkan struktur relasi sosial antar aktor. Dalam ranah politik, institusi memainkan peran penting dalam mempengaruhi kekuasaan kelompok-kelompok kepentingan yang saling bersaing. Menurut pendekatan ini, terdapat dua fungsi penting institusi terkait dengan kekuasaan. *Pertama*, institusi memberi legitimasi bagi kekuasaan sebuah perusahaan asing dalam mengeksploitasi sumber daya alam di suatu negara. *Kedua*, institusi membantu meregulasi dan menstabilkan hubungan kekuasaan dengan membatasi bentuk-bentuk tindakan tertentu yang dianggap dapat mengganggu sistem (Hadi, dkk., 2012).

Pinjaman-pinjaman dan bantuan luar negeri pada prakteknya telah digunakan untuk mendorong agenda reformasi neoliberal di bidang tata kelola dan hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyaluran kredit oleh pihak kreditor mengarah pada upaya untuk menciptakan relasi dalam struktur perekonomian Indonesia yang dapat menjaga keharmonisan modal internasional untuk tetap berperan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia di berbagai sektor. Karenanya, dukungan kreditor untuk menciptakan stabilitas makro perekonomian dipahami sebagai sebuah kondisi kebijakan yang mendukung bekerjanya mekanisme pasar dengan dukungan penuh dari negara. Sebagaimana dinyatakan sejak lama oleh Bank Dunia, *"...Reducing the hidden costs of doing business in Indonesia and ensuring good governance will be a lengthy process and will require administrative reforms, reform of the legal system, and institutional strengthening at various levels of government (World Bank, 1997)."*

Demokrasi Ekonomi Sebagai Amanat Konstitusi

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan yang cukup lengkap. Tidak saja mencakup ketentuan di bidang politik (*political constitution*), tetapi juga di bidang perekonomian (*economic constitution or constitution of economic policy*). UUD 1945 yang memuat ketentuan di bidang ekonomi antara lain kebijakan anggaran negara, bank sentral,

maupun mata uang. Akan tetapi yang sangat khas dalam konstitusi Republik Indonesia ini adalah ketentuan khusus mengenai sistem dan kebijakan ekonomi dalam penyelenggaraan negara. Sangat berbeda dengan tradisi yang dianut oleh negara-negara liberal yang praktik konstitusinya tidak memuat ketentuan yang mengatur mengenai sistem ekonomi. Para ahli konstitusi menyatakan bahwa corak konstitusi Indonesia seperti ini banyak dipengaruhi oleh tradisi negara-negara sosialis yang memuat kebijakan dasar perekonomian secara khusus di dalam konstitusinya.

Karena itu, konstitusi Indonesia juga disebut sebagai konstitusi ekonomi. Yaitu konstitusi yang memuat tentang kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Karenanya salah satu istilah yang sering dipopulerkan, yaitu ekonomi konstitusi, merujuk pada pengertian tentang sebuah corak perekonomian yang didasarkan atas norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional (Asshiddiqie, 2010; 69). Dalam pengertian seperti ini, UUD 1945 haruslah dipahami sebagai sumber hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam kebijakan ekonomi yang harus dijadikan acuan di dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Ketentuan ini bersifat mengikat dan memaksa terhadap aturan-aturan di bawahnya untuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai normatif-filosofis maupun legal-formal yang ada di dalam UUD 1945.

Ketentuan mengenai perekonomian atau sistem ekonomi di dalam konstitusi RI sangat erat kaitannya dengan sila keempat dan kelima Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kedua sila dalam Pancasila itu menjadi dasar dalam perumusan landasan konstitusi yang memberikan jaminan bagi kesamaan bagi seluruh rakyat Indonesia pada lapangan politik maupun lapangan ekonomi. Artinya titik tolak dari konstitusi ekonomi Republik Indonesia adalah keinginan untuk menyediakan landasan bagi kebijakan ekonomi yang dapat mengadakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dasar-dasar pengelolaan perekonomian nasional tercantum dalam UUD 1945 pada bab "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Bab ini merupakan bab yang sangat penting karena mengatur hal-hal yang berada di luar persoalan politik, melainkan secara khusus mengenai

soal-soal ekonomi dan sosial. Judul bab ini semula adalah "Kesejahteraan Sosial" berdasarkan hasil pengesahan UUD 1945 pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 33 dan 34. Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 pascareformasi, bab tentang kesejahteraan sosial ini berubah menjadi bab "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial" pada perubahan keempat tahun 2002. Jumlah ayat dalam pasal 33 juga bertambah dari sebelumnya tiga ayat menjadi lima ayat. Begitu pula dengan pasal 34, dari sebelumnya tanpa ayat menjadi empat ayat. Selain kedua pasal tersebut, terdapat pasal-pasal lain yang juga berkaitan langsung atau pun tidak langsung dengan perekonomian. Misalnya pasal 23 mengenai keuangan negara dan hal-hal yang terkait, Pasal 27 Ayat (2) tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dapat juga dimasukkan di sini pasal 28 tentang HAM, khususnya mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Bukan hanya pada batang tubuh, Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berisi prinsip-prinsip dasar Pancasila dan tujuan bernegara secara tidak langsung juga mengandung gagasan mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan: "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...." Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, terutama untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diadakan pengaturan-pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara serta hal lain yang menyangkut keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara (Bab VII dan Bab VIIIA); mengenai hak asasi manusia dan warga negara di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Bab XA); didukung oleh bab tentang pendidikan bagi warga negara Indonesia sebagai subjek pembangunan kesejahteraan tersebut (Bab XIII); dan khusus mengenai kebijakan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam Bab XIV.

Dengan dicantumkannya prinsip keadilan sosial, Indonesia mengarah pada sosialisme yang bersendikan semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan kreatif individu secara bertanggung jawab. Sumber dari sosialisme itu sendiri berasal dari tradisi masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif, dan masih bertahan hingga saat ini. Dalam pandangan ini, sosialisme adalah suatu tuntunan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat

yang adil dan makmur, bebas dari segala penindasan (Swasono, 2012: 307). Cita-cita untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan bernegara mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi di bidang politik yang beriringan dengan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. Inilah yang disebut sebagai "sosio-demokrasi", yaitu demokrasi yang tidak mengabdi pada sebagian kecil saja melainkan kepentingan masyarakat secara umum. Sebagaimana disimak dalam ungkapan Bung Hatta berikut:

> "Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada" (Hatta, 1985: 6–7).

Singkatnya, untuk melaksanakan sebuah negara yang bercirikan keadilan sosial, maka sistem politik yang demokratis saja tidak cukup. Hal tersebut harus bersamaan dengan dijalankannya agenda-agenda demokrasi ekonomi di Indonesia. Bahkan lebih jauh, demokrasi politik sangat mustahil dapat diwujudkan dalam sebuah negara bilamana tidak terdapat demokrasi ekonomi. Situasi ini terjadi oleh karena adanya kenyataan di banyak negara bahwa struktur ekonomi yang oligarkis dengan konsentrasi kekuatan ekonomi hanya pada segelintir orang, menyuburkan praktik politik yang tidak demokrastis. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, serta korporasi-korporasi media telah mengontrol proses politik yang menyebabkan kekuatan korporasi menjadi tirani yang meminggirkan kedaulatan rakyat.

Secara sederhana dapat diartikan bahwa doktrin kesejahteraan sosial Indonesia berorientasi pada pelibatan serta kontrol rakyat dalam proses produksi ekonomi. Strategi pembangunan haruslah didesain sebagai cara untuk menjadikan rakyat sebagai produsen, bukan hanya memproduksi untuk rakyat. Sebab sebagaimana dipahami dalam prinsip kesejahteraan sosial, negara bertugas untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, yang dengan cara itu maka dapat dijamin suatu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika kondisi-kondisi minimum tersebut dapat dipenuhi, rakyat dengan sendirinya dapat dibekali dengan "senjata" yang lebih kuat untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan.

Pada titik ini, pengertian tentang kesejahteraan sosial yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan konstitusi sesungguhnya merupakan konsep yang melampaui pemikiran zamannya ketika hal itu pertama kali dirumuskan. Terutama bila melihat adanya suatu pemikiran yang

berkembang saat ini dari para ekonom-ekonom Barat yang resah dengan definisi kesejahteraan yang selama ini dianutnya. Pemikiran itu berpangkal dari keinginan untuk menciptakan suatu ukuran baru untuk mendefinisikan kesejahteraan masyarakat di tengah semakin tidak memadainya ukuran-ukuran kinerja ekonomi yang berlaku saat ini. Salah satunya muncul dari Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (sering disebut sebagai Komisi Stiglitz-Sen-Fitoussi). Komisi ini mengidentifikasi dimensi-dimensi pokok (yang tidak hanya bersifat ekonomi) yang membentuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut adalah:

1. Standar hidup material (pendapatan, konsumsi dan kekayaan);
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Aktivitas individu termasuk bekerja;
5. Suara politik dan tata pemerintahan;
6. Hubungan dan kekerabatan sosial;
7. Lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan);
8. Ketidakamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.

Prinsip demokrasi sosial (sosio-demokrasi) menjadi kata kunci bagi usaha negara menjalankan kebijakan pembangunan yang diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan sosial. Sosio-demokrasi di sini mencakup prinsip demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Istilah demokrasi sendiri merujuk kepada sebuah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat berperan serta dalam mengambil keputusan-keputusan yang dilakukan pemerintah. Prosedur keikutsertaan rakyat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, apakah secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Sedangkan ekonomi merujuk kepada suatu ilmu yang mempelajari sistem produksi dan distribusi dalam suatu keadaan di mana barang yang dibutuhkan bersifat terbatas. Jika kedua istilah ini digabungkan menjadi demokrasi ekonomi, dapat diartikan sebagai sebuah sistem di mana rakyat berperan serta secara substansial dalam menentukan proses produksi dan distribusi dan menerima manfaat dari kegiatan produksi tersebut secara relatif merata.

Karena itu, bilamana di dalam suatu masyarakat tidak terdapat demokrasi ekonomi, maka proses produksi hanya ditentukan oleh sekelompok elite, dan hasil-hasil produksi tersebut tidak didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Keyakinan akan demokrasi ekonomi didasarkan pada penolakan terhadap kepemilikan segelintir orang terhadap alat-alat produksi.

Atau dengan kata lain, demokrasi ekonomi adalah suatu sistem yang menolak proses ekonomi yang akan menimbulkan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang dan segelintir kelompok. Akan tetapi di saat bersamaan, demokrasi ekonomi juga bukanlah sebuah sistem yang serba negara (*etatisme*) dengan terjadinya penciutan inisiatif rakyat untuk berperan di dalam proses ekonomi yang dapat merusak pemanfaatan sumber-sumber nasional yang optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia tercantum dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi itu, maka perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sebab itu cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Negara juga dituntut untuk terlibat dalam penguasaan bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rumusan operasional demokrasi ekonomi ini menghendaki secara mutlak adanya suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan masyoritas bangsa Indonesia sebagai pelaku dan tulang punggungnya.

Penutup

Ada tiga hal yang dapat dipelajari dari uraian singkat di atas. *Pertama*, gerakan jihad konstitusi menjadi bagian penting perjalanan Muhammadiyah abad kedua. Secara sadar, Muhammadiyah meletakkan Jihad Konstitusi sebagai *amar makruf nahi munkar* untuk membongkar desain ekonomi-politik neoliberalisme yang mengunci Indonesia dalam piramida terbawah pembagian kerja internasional, yaitu sebagai penyedia bahan baku dan buruh murah. Gerakan ini juga menghendaki dilakukannya restrukturisasi atas sistem dan tata nilai dalam kehidupan bernegara dan juga tata kelola global. Artinya, keharusan adanya koreksi atas kerusakan sistemik akibat perluasan agenda liberalisasi dan privatisasi melalui pembentukan perundang-undangan yang bertentangan dengan dasar konstitusi negara Republik

Indonesia. Selain itu, gerakan ini mendesak Indonesia untuk terlibat dalam mendesain tata kelola global yang lebih adil dan saling menghargai kedaulatan masing-masing negara. Hubungan ekonomi (perdagangan, investasi, dll) antar negara diletakkan dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan bukan saling mematikan.

Kedua, gerakan jihad konstitusi memberi ruang kontekstualisasi lebih luas dalam menginterpretasikan teologi Al-Ma'un yang menjadi prinsip dari gerakan Muhammadiyah selama ini. Teologi Al-Ma'un yang telah melahirkan spirit transformasi dan liberasi untuk memajukan dan memberdayakan umat tetap menjadi ciri dari gerakan Muhammadiyah, tetapi dengan Jihad konstitusi hal ini memiliki dimensi yang lebih struktural. Pemberdayaan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menyasar pada aktor yang paling bertanggung jawab, yaitu negara yang dianggap semakin berkurang pengaruhnya. Meluasnya problem-probem sosial di tengah masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, semakin tidak cukup dipecahkan dengan hanya mendorong kepedulian sosial antar masyarakat. Masalahnya menjadi semakin besar, karena sumber-sumber ekonomi dan kegiatan produksi nasional semakin terkonsentrasi pada segelintir orang dan jauh dari kontrol negara. Akibatnya, negara justru memfasilitasi ruang pertarungan bebas dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan kontrol privat dalam kegiatan produksi nasional.

Ketiga, *judicial review* atas sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi merupakan bagian penting dalam gerakan "Jihad Konstitusi". Langkah ini sangat strategis dalam mengembalikan marwah konstitusi RI dari upaya "subversi" sejumlah pihak dengan cara mencangkokkan nilai-nilai dan prinsip kapitalisme-neoliberalisme di dalam perundang-undangan, khususnya di bidang ekonomi. Secara substansial, gerakan ini memiliki kontribusi penting untuk mendorong proses restrukturisasi perekonomian nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi dipahami sebagi sebuah sistem yang menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi nasional dengan partisipasi dan kontrol rakyat, serta menjamin manfaat dari kegiatan ekonomi didistribusikan secara merata bagi seluruh rakyat. Demokrasi ekonomi bukanlah sistem yang serba negara (*etatisme*), tetapi juga bukan pula sistem yang membiarkan kegiatan ekonomi berlangsung di bawah kontrol segelintir orang dan hanya menghasilkan kesejahteraan bagi orang seorang.

Karena itu, keberhasilan Muhammadiyah dalam membatalkan sejumlah

undang-undang strategis seperti UU Migas dan UU Sumber Daya Air barulah langkah awal. Yang menjadi tugas berat berikutnya, dan menjadi bagian terpenting dalam gerakan "Jihad Konstitusi" adalah ikut terlibat dalam merumuskan undang-undang baru dan peraturan lainnya yang menjamin terakomodasinya prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di atas. Di sinilah tantangan besarnya, sebab boleh jadi sebuah undang-undang yang telah dibatalkan, hanya melahirkan undang-undang baru yang secara substansi tidak berubah dengan undang-undang sebelumnya. Sebagaimana terjadi pada UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang mengganti UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang telah dibatalkan pada tahun 2005. Dengan cara ini, Muhammadiyah memastikan bahwa arah perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita nasional yang luhur untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Wallahu a'lam.*

MUHAMMADIYAH, *JUDICIAL REVIEW*, DAN NASIONALISME EKONOMI

Anwar Abbas & Mukhaer Pakkanna

Pada medio April 2015 lalu, Muhammadiyah bersama beberapa tokoh nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan *judicial review* terhadap tiga Undang-Undang di bidang ekonomi, yakni UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sebelumnya, Muhammadiyah dengan mitranya, telah "sukses" melakukan jihad konstitusi di forum Mahkamah Konstitusi (MK), terutama berkaitan UU No. 22 Tahun 2011 tentang Migas dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Lantas, mengapa Muhammadiyah menganggap bahwa jihad konstitusi di bidang ekonomi itu penting? Setidaknya didasari pada, *pertama,* amanah Muktamar Muhammadiyah (Malang dan Yogyakarta) yang merekomendasikan melakukan *review* terhadap beberapa UU yang dianggap "menganiaya" kepentingan publik. Paling tidak, ada sekitar 105 UU yang perlu ditelaah eksistensinya. *Kedua,* sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah memiliki pretensi memproteksi kepentingan publik, yang tentu pada gilirannya berkepentingan menyelamatkan nasib bangsa dari kesewenangan kuasa politik dan modal. *Ketiga,* dengan *judicial review,* Muhammadiyah mengimajinasikan sebuah konstruksi UU baru yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga.

Dengan demikian, muara dari semua alasan jihad konstitusi di bidang ekonomi itu adalah bagaimana membangun spirit nasionalisme ekonomi, yakni rasa cinta atas kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Maka, merujuk Hans Kohn dalam *The Idea of Nationalism: A Study In Its Origins*

and Background (1961), spirit nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya *national counciousness*. Dengan kata lain, nasionalisme adalah formalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Pudarnya Elan Nasionalisme

Menukik substansi dari ketiga UU itu, sungguh sangat miris. Dalam konteks UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisi dan Sistem Nilai Tukar misalnya, setidaknya catatan penting, yakni, *pertama*, spirit liberalisme cukup kental, karena UU itu lahir dari proses politik dalam interaksinya dengan IMF (*International Monetary Fund*). Statemen pasal 2 (1) secara jelas menjustifikasi liberalisme itu: "Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa".

Padahal penduduk yang dimaksud pasal ini adalah, orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan jika setiap pendiduk atau berencana berdomisili di Tanah Air, bebas menggunakan transaksi mata uang asing. Inilah yang mengonfirmasi, mengapa kedaulatan rupiah digerus oleh mata uang asing, rupiah menjadi tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Kedua, konsekuensi hilangnya kedaulatan mata uang rupiah, maka kurs rupiah selalu terpuruk, bahkan menjadi "mata uang sampah" *(currency garbage)* sebagaimana laporan *the Richest (2014)*, rupiah selevel dengan mata uang sampah lainnya, seperti Kip Laos, Dong Vietnam, Dobra Afrika, Rubel Belarusia, Rial Iran. Implikasinya, kepastian usaha menjadi limbung, sehingga memicu banyaknya pelaku usaha memarkir dana hasil keuntungan devisa ekspornya di luar negeri. Di Singapura misalnya, pada 2013, dana hasil ekspor diparkir dalam kisaran US$250 milyar atau Rp2.500 triliuan, yang diasumsikan dana keuntungan yang diparkir harus di atas US$ 1 juta.

Padahal sejak 2012, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/20/PBI/2012 dan Surat Gubernur BI No.14/3/GBI/SDM yang mewajibkan hasil devisa ekspor sesudah 90 hari kalender harus ditarik kembali ke Tanah Air. Sayang, PBI dan SK tersebut lumpuh sebelum direalisasikan.

Demikian juga pada UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, tercatat klausul yang sangat riskan dan menohok rasa nasionalisme, yakni pasal 8 (1): "Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya

kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal". Pasal ini jelas telah memberi ruang sangat besar kepada penanam modal dimana keuntungan dari hasil usaha dengan seenaknya dipindahkan ke luar negeri.

Ini pula yang mengonfirmasi, mengapa usaha PMA dengan mudah memperoleh izin penguasaan hingga 85,4% untuk investasi migas, sebesar 99% untuk investasi bidang perbankan, dan sebesat 85% untuk usaha keuangan. Bahkan, secara eksplisit tertuang dalam PP 77/2011 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka bagi PMA, pada bagian c) dinyatakan batas kepemilikan modal untuk usaha yang bergerak dalam bidang Ekonomi, Sumberda Daya Mineral (ESDM) hingga mencapai 95%.

Selanjutnya, dalam UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, memberi peluang bagi investasi asing untuk membuka usaha penyediaan tenaga listrik di Tanah Air. Pasal 4 (2) menegaskan: "Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat bisa menyediakan tenaga listrik". Padahal ketenagalistrikan adalah domain komoditas publik, yang jika diberikan peluang bagi swasta masuk, terutama PMA, telah memicu tarif listrik pun menjadi mahal. Itulah yang mengonfirmasi mengapa tarif listrik secara kontinyu terus bergerak naik, tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat yang berada pada level riskan.

Lantas, konsekuensi apa yang terjadi setelah pudarnya nasionalisme ekonomi? ***Pertama***, terjadi liberalisasi ekonomi yang tidak diiringi demokratisasi ekonomi. Partisipasi ekonomi rakyat stagnan, yang diindikasikan matinya pelbagai aktivitas kearifan ekonomi lokal dan industri ekonomi rakyat, bahkan koperasi sebagai soko guruh ekonomi nasional pun ikut sekarat.

Di sisi lain, di tengah liberalisasi ekonomi, justru menguntungkan dan mengawetkan pemodal raksasa, yang telah berkolaborasi dengan korporasi asing dan penguasa politik domestik. Kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk hingga ke pelosok-pelosok desa (kegiatan hulu hingga hilir) telah dikuasai jaringan distribusi pemodal raksasa asing!

Kedua, terjadinya liberalisasi politik kian menempatkan sirkulasi elite politik pemilik modal. Akibat liberalisasi politik, pemilik modal mendeterminasi oligarki parpol. Liberalisasi politik yang ditandai berjubelnya partai politik (parpol), ternyata tidak mampu merangsang partisipasi politik rakyat, bahkan rakyat kian muak melihat "perilaku bajingan" para politisi.

Liberalisasi ekonomi politik yang berkarakter *free fight liberalism* itulah, sejatinya menjadi biang patologi krisis. Ketika terjadi krisis pangan dan energi misalnya, orang akan merujuk sumber hulunya pada kebijakan ekononomi-politik yang salah kaprah. Oligopolisasi pasar untuk kasus

komoditi pangan misalnya, yang diiringi perilaku spekulasi para pengeruk keuntungan di jalur distribusi, justru sesungguhnya sudah terang benderang siapa pelakunya (oligoplist dan spekulan). Tapi, kelihatannya negara gamang bertindak untuk menyelesaikan oligopolisasi itu.

Di balik itu, fakta miris terjadi! Realitas ekonomi rakyat yang hidup di pelosok-pelosok desa sebagai petani, telah mengambil pilihan meninggalkan lahan pertaniannya mencari pilihan hidup baru. Tidak aneh, jika saat ini, sekitar 88,2 persen pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar sektor pertanian, seperti ojek, dagang dan pekerja kasar. Sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga petani telah merosot: dari 36,2 persen pada 1980-an, tinggal 13,6 persen saat ini (BPS, 2010). Yang lebih menyayat hati, dari sisi komposisi penduduk, jumlah petani di atas usia 50 tahun mencapai 75 persen, 30 – 49 tahun 13 persen, sisanya 12 persen berusia di bawah 30 tahun. Dapat dibayangkan, bahwa 10 tahun ke depan usia para petani Indonesia semakin banyak yang *gaek*, dan tentunya tidak akan produktif lagi.

Selain di bidang pertanian dan pangan, di bidang energi juga semakin akut. Penguasaan sumber-sumber migas oleh perusahaan minyak asing mencapai 89%. Sejak berlakunya UU 22 tahun 2001 mengenai Migas, sektor hulu migas telah leluasa dikuasai asing, dari data Kementerian ESDM pada 2009, dari total 100% produksi minyak Indonesia, Pertamina hanya mendapat bagian 13,8%, terbesar malah dikuasai swasta asing (TNC/ MNC) yaitu Chevron (AS) 41 %, Total E & P (Perancis) 10%. Chonoco Philips (AS) 3,6 %, CNOOC (RRC) 4,6% dan sisanya juga dikuasai pihak swasta-swasta baik asing maupun lokal.

Bahkan, atas nama kemajuan ekonomi, negara justru membela korporasi multinasional, baik yang bergerak di bidang migas, batubara, tambang emas, dan lainnya, ketimbang membela rakyatnya. Di Mimika, Papua, pemerintah memperpanjang kontrak karya PT Freeport, kendati eksplorasi raksasa tambang emas ini merusak keseimbangan ekologis. Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), kontrak karya PT Freeport Indonesia berlaku hingga 2021 telah menimbulkan potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti sebesar Rp1,591 triliun. Nilai potensi kerugian negara tersebut, didasarkan perhitungan hasil nilai royalti selama kurun waktu 2002-2010, dibanding pelaporan pembayaran royalti Freeport

Selanjutnya, di Cepu, Bojonegoro, Negara lebih memilih ExxonMobil untuk mengelola cadangan minyak dibanding menyerahkannya kepada perusahaan lokal. Di Minahasa, Sulawesi Utara, pencemaran Teluk Buyat

oleh PT Newmont yang menyebabkan penyakit minamata di kalangan penduduk sekitar.

Demikian juga, lambannya renegosiasi kontrak karya sesuai perintah dalam UU Minerba, terang benderang melanggar Pasal 33 UUD 1945. Konsekuensinya, ekploitasi besar-besaran telah menyengsarakan rakyat. Tampaknya, Pemerintah sedang mendegradasi kepentingan daerah dan melakukan pelanggaran konstitusi demi ekploitasi alam secara besar-besaran Yang paling kontroversial, kaitan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Migas, bertentangan pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945. Sejak pembahasan RUU hingga saat ini, UU Migas terus menuai masalah di masyarakat karena sangat merugikan rakyat. Padahal, MK pernah mengeluarkan putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tapi mandul dalam tahap eksekusi kebijakan di eksekutif.

Banyaknya pembahasan RUU digodok di meja legislatif dan eksekutif, tentu tidak lepas dari pelbagai macam intervensi. Politisi di parlemen dan di eksekutif telah berkolaborasi dengan pemilik modal kakap, demi mengawetkan kekuasaan modal dan politik para elite. Oligarki politisi telah menentukan wajah ekonomi bangsa yang karut-marut. Dan, tentu dari situlah sumber pemicunya, ekonomi Pancasila dikuburkan ramai-ramai.

Bagaimana Ideologi Muhammadiyah

Mengingat konstelasi ekonomi nasional yang telah memberi "karpet merah" bagi kuasa politik dan modal dengan justifikasi berbagai regulasi yang *bias*, maka apa yang perlu dilakukan persyarikatan Muhammadiyah?

Sejatinya, ideologi Muhammadiyah beraroma sosialisme. Dalam *Demokrasi Kita* (1966), Bung Hatta secara konkret menjelaskan sosialisme ekonomi; "Sementara demokrasi dalam bidang ekonomi tergambar dalam "...semangat gotong rojong jang merupakan koperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknja untuk membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakjat. Kejakinan tertanam bahwa hanja dengan koperasi dapat dibangun kemakmuran rakjat".

Dengan demikian, merujuk pada visi Muhammadiyah 2025 yang ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka praksis ekonomi Muhammadiyah, setidaknya diarahkan pada, *pertama,* model gerakan ekonomi Muhammadiyah harus bernuansa pelayanan sosial, tanpa membengkalaikan aspek bisnis. *Kedua,* jika Muhammadiyah masuk ke arena bisnis dalam skala lebih besar, jangan sampai tercerabut pada akar dan misi sosialnya. Karena itu, perlu manajemen Muhammadiyah *incorporated,*

di mana gerakan sosial dan ekonomi (bisnis) Muhammadiyah memiliki kesinambungan dalam satu kesatuan jamaah. *Ketiga*, perlu reformulasi teologi dakwah ekonomi yang memberi apresiasi yang besar terhadap pengembangan jiwa kewiraswastaan, pengembangan etos kerja, produktivitas, kemaslahatan, dan fungsi-fungsi *rahmat lil 'alamin*.

Dalam kerangka implementasi pembumian ideologi ekonomi Muhammadiyah, praksis gerakan harus mengkombinasikan antara pemahaman ideologi gerakan Muhammadiyah yang didasarkan pada teologi al-ma'un dengan ideologi ekonomi Pancasila. Dalam praksis gerakan, kedua entitas ini akan bergerak simultan, karena falsafah gerakan menganut prinsip universalisme. Dalam kaitan itu, Muhammadiyah harus berkontribusi ikut mendesain kembali gerakan ekonomi Indonesia, yang selama ini wujud "ketersusunannya" dilibas oleh liberalisme ekonomi. Padahal perintang Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian Indonesia harus "disusun", bukan digadaikan kepihak pemilik modal.

Dengan dasar itu, sejatinya kebijakan ekonomi harus "disusun" sesuai makna demokrasi ekonomi. Secara imperatif, Negara harus menyusun dan mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud "ketersusunan", yaitu sebagai usaha bersama berdasar kebersamaan dan kekeluargaan. Karena itu, sangat tepat jika "ketersusunan" ekonomi tidak diserahkan pada liberalisme pasar yang rakus, yang melahirkan penindasan, eksploitasi, dan penghancuran alam, tapi harus didesain. Dalam QS al-Hasyir ayat 7, Allah memberi ruang kepada manusia untuk menyusun dan mendesain model terciptanya pemerataan distribusi pendapatan.

Demikian juga, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama *(at-ta'wun)* beradasarkan atas asas kekeluargaan dan kerjasama (*syirkah*). Tentu, instrumen operasionalnya, adalah koperasi. Koperasi, menurut Bung Hatta, memberikan tempat yang sama antara kaya dan miskin untuk saling kerjasama. Hatta menginginkan agar dalam koperasi, mereka yang miskin harus dibela dan diberi kesempatan. Tentu hal ini sejalan QS. al Ma'un: 1-3; "pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau membela dan memberi makan orang miskin".

Dalam konteks keterlibatan negara, spirit ekonomi Pancasila menegaskan, untuk menguatkan potensi ekonomi rakyat, negara tidak boleh melepaskan diri dalam kerakusan *free fight liberalism*. Rakyat harus diberi kesempatan dalam demokrasi ekonomi, yakni kesempatan partisipasi dan emansipasi. Dalam demokrasi ekonomi, semua bisa duduk bersama. Oleh karena itu,

demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus simultan.

Jika demokrasi politik dilepas, tanpa demokrasi ekonomi, yakinlah akan melahirkan "petaka" kerakusan individualisme. Kasus pada keberadaan koporasi multinasional dan pemodal kakap, yang kian menancapkan kukunya, menghisap kekayaan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja kita, sebagai bukti abainya Negara dalam menyusun demokrasi politik, tanpa demokrasi ekonomi. Tentu hal ini, paralel dengan prinsip *musyawarah* (Qs. 3: 159) dan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik *(al-makrufat)* dan lebih maslahat *(al-mashlahat)* bagi rakyat luas.

Dalam kaitan jaminan sosial, pasal 34 UUD 1945 disebutkan "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ekonomi Pancasila memandang, masalah kemiskinan tidak saja terkait dengan masalah ekonomi, tapi juga terkait dengan kehidupan keagamaan seseorang. Kata Bung Hatta: "Jangan dikira orang miskin yang begitu banyak, hidup meminta-minta akan taat beragama. Mereka malahan menyumpah-nyumpah, mengapa Tuhan menjadikan nasibnya begitu jelek". Tentu, hal ini sangat sejalan dengan hadis Nabi: "hampir-hampir kefakiran itu membuat orang menjadi kufur". Dan instrumen yang tepat, negara harus memaksa kewajiban zakat.

Demikian juga ihwal penataan pertanahan (*landreform*). Dalam perspektif ekonomi Pancasila, *landreform* penting karena tanah adalah faktor produksi penting, alat menghasilkan. Ini artinya, baik buruknya penghidupan rakyat tergantung kepada keadaan milik tanah. Perspektif ini tentu sesuai spirit Islam, tanah dituntut untuk dikelola dan diproduktifkan bagi yang memilikinya agar tercipta kesejahteraan di tengah masyarakat.

Namun, menjadi *illat* bagi pencabutan dan pengalihan kepemilikan serta pengolahan tanah tersebut dalam Islam bukanlah masalah luas tanah yang dimiliki seseorang, tetapi "karena tanah tersebut dibiarkan, tidak dikelola". Anwar Abbas (2010) mengurai kasus ini dengan mengupas dialog Umar bin Khattab dengan Bilal, seperti dinukil Taqyuddin an Nabhani, Umar berkata kepada Bilal; "..bahwa Rasulullah saw tidak akan memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka ambillah dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola dan yang lain (yang tidak bisa kamu kelola) kamu kembalikan".

Berdasakan uraian dan falsafah di atas, tidak ada alasan lagi, jika kita masih mempertentangkan ekonomi Islam dengan Pancasila dalam praksis ideologi ekonomi Muhammadiyah. Bahkan, jika ideologi ekonomi Muhammadiyah mau gerakkan secara massif di Tanah Air, tidak perlu

ragu menggunakan "jubah" ekonomi Pancasila. Kompatibilitas menjadi keniscayaan, karena kita yakin, bahwa ekonomi Islam memiliki nilai-nilai universalitas yang abadi. Dalam konteks inilah, *judicial review* terhadap berbagai UU terutama berkaitan dengan kehidupan ekonomi, yang dilakukan Muhammadiyah sejatinya harus diarahkan pada makna dan orientasi ideologi yang kompatibilitas tadi.

Daftar Pustaka

Amartya Sen dalam. 2003. *Demokrasi (Tidak) Bisa Memberantas Kemiskinan.* Terjemahan. Mizan Pustaka: Jakarta.

Anwar Abbas . 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkap Makna Maqâshid al Syarî'ah.* Kompas: Jakarta.

Berita Resmi Muhammadiyah (2010), BRM No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010. Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Yogkarta.

Data Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, tahun 2010

Jon Elster. 2000. *Karl Marx: Marxisme-Analisis Kritis.* Prestasi Pustakarya: Jakarta.

Mohammad Hatta. 1979. *Ekonomi Terpimpin.* Mutiara: Jakarta.

Mohammad Hatta. 1983. *Islam dan Masyarakat.* Pidato di Depan Para Mahasiswa Universitas Islam Aligar, di India, 29 Oktober 1955, I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono (eds.), *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979.* Inti Idayu Press: Jakarta,

Muhammad Yunus. 2008. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan.* Gramedia: Jakarta.

Sri-Edi Swasono. 2010. *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas.* Edisi 2010. Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM: Yogyakarta.

--------------------- 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai The End of Laissez-Faire.* Perkumpulan Prakarsa: Jakarta.

REVITALISASI KOPERASI SEBAGAI GERAKAN EKONOMI BERJAMA'AH

M. Azrul Tanjung & Sutia Budi

Pada suatu kesempatan, Prof. Yunan Yusuf pernah berdiskusi dengan Bapak Projo Kusumo (*Founding father* Muhammadiyah DKI Jakarta). Prof Yunan bertanya kepada Pak Projo; Apakah makna ungkapan "hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah?", Pak Projo menyampaikan bahwa beliau pernah dapat cerita dari Pak Hadjid ternyata ungkapan itu muncul saat menghadapi permasalahan belum digajinya para guru sekolah Muhammadiyah. Kemudian Kyai Dahlan mengumpulkan para saudagar batik di Yogyakarta dan meminta para saudagar dapat membantu membayar gaji guru sekolah Muhammadiyah tersebut, maka muncul ungkapan "Hidup-hidupilah Muhammadiyah jangan mencari hidup di Muhammadiyah". Dari cerita tersebut, Prof Yunan Yusuf menyimpulkan bahwa ungkapan tersebut bukan ditujukan kepada guru (pekerja/pegawai amal usaha muhammadiyah), tetapi lebih tepat ditujukan kepada donatur atau anggota-anggota Muhammadiyah yang memiliki kekuatan ekonomi (www.lemlit.uhamka.ac.id, 3 September 2013).

Membaca uraian di atas, Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah. Berdaya secara ekonomi harus menjadi tekad seluruh warga Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah. Spirit kewirausahaan, kerja keras, inovasi, dan menggali kreativitas terpendam seyogianya menjadi budaya yang harus terus dikembangkan. Tekad dan semangat untuk meraih kesuksesan lahir batin bagi warga Muhammadiyah harus mampu ditularkan pada ummat yang lebih luas, sehingga "matahari menyinari negeri" mencakup

berbagai aspek kehidupan. "Menghidupkan" Muhammadiyah tentunya harus dilihat dalam multi-aspek.

Harus kita sadari, bahwa saat ini Gerakan Ekonomi Muhammadiyah belum mencapai titik harapan. Sementara tantangan zaman semakin kompleks dan "pertarungan" dalam dunia ekonomi kian hebat. Tentu, ini menjadi sebuah arena untuk ber-*fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Muhammadiyah dan warganya harus mampu bangkit dari tidurnya untuk mengejar ketertinggalan dalam sebuah gerakan yang bernama "gerakan ekonomi".

Kita tentu ingat bagaimana kisah empat belas abad yang lalu. Bagaimana keuletan Rasulullah SAW dalam bekerja dan berniaga. Dengan memegang teguh kepercayaan (*trust*), beliau muncul sebagai Saudagar tangguh. Gelar *al-amin* (dapat dipercaya) mengantarkannya ke gerbang kemuliaan. Beliau tangguh dan kuat (*strong*) dalam menghadapi ujian, hinaan-celaan dan fitnah. Beliau selamat dari berbagai skenario jahat yang akan mencelakakannya. Kepercayaan dan kekuatan itulah yang juga mengantarkannya ke gerbang kemakmuran.

Sebagai pengikut Rasulullah SAW, Ahmad Dahlan muda berkeliling berdakwah ke berbagai daerah sambil berniaga. Dengan tekad dan langkah yang kuat, sorot mata yang tajam, ia runtuhkan ego-nya. Disamping kesibukannya sebagai guru mengaji dan khatib, Kyai Dahlan juga menjadi pedagang batik. Kyai Dahlan sering melakukan perjalanan ke berbagai kota. Dalam perjalanan niaganya itu, tentunya selalu membawa misi dakwah Islam.

Dawam Rahardjo (1995:48) menguraikan, kepada para aktivis organisasi dan para pendukung gerakannya, KH. Ahmad Dahlan berwanti-wanti: "Hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan hidup dari Muhammadiyah". Himbauan ini menimbulkan konsekuensi tertentu. Warga Muhammadiyah tidak bisa memperjuangkan kepentingan ekonominya lewat organisasi ini. Mereka hanya menyumbangkan harta dan tenaganya untuk dakwah dan amal usaha, misalnya mendirikan sekolah dan panti asuhan anak yatim piatu atau menyantuni fakir miskin. Konsekuensi yang lain adalah bahwa untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya, mereka harus memajukan usahanya agar bisa membayar zakat, shadaqah, infaq atau memberi wakaf. Warga Muhammadiyah harus menengok ke organisasi lain. Pada waktu itu, yang bergerak di bidang sosial-ekonomi adalah Sarekat Dagang Islam (SDI), kemudian bernama Sarekat Islam (SI) itu. Itulah sebabnya warga Muhammadiyah sering berganda keanggotaan,

Muhammadiyah dan Sarekat Islam.

Dawam melanjutkan, warga Muhammadiyah di kota-kota Industri, seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Tasikmalaya, Tulungagung, dan kota lainnya merupakan tulang punggung gerakan koperasi, terutama koperasi batik. Tetapi aktivitas mereka tidak atas nama Muhammadiyah, walaupun langkah tokoh-tokoh koperasi tersebut sangat jelas keberpihakannya kepada Muhammadiyah.

Jelas bahwa Muhammadiyah lahir dari para ulama yang sekaligus pedagang (*entrepreneur*). Para pengurus Muhammadiyah pada periode berikutnya juga masih lebih didominasi oleh para pebisnis yang memiliki misi yang jelas dalam dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan selalu berupaya menghidupi Muhammadiyah. Sedangkan dalam periode perkembangannya, Muhammadiyah pada berbagai level pimpinan, banyak dipimpin oleh para pegawai atau karyawan yang kurang memiliki naluri bisnis (semangat kewirausahaan).

Revitalisasi Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi Berjama'ah

Koperasi merupakan badan usaha yang tepat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dalam skala luas. Dengan koperasi, gerakan ekonomi jama'ah dapat diwujudkan secara nyata. Dengan latar belakang anggota yang relatif beragam, memungkinkan gerakan koperasi mampu mencapai tujuan "memakmurkan/mensejahterakan" anggotanya lebih mudah. Fakta keberhasilan koperasi milik warga Muhammadiyah bisa dijumpai di beberapa daerah, misalnya yang paling menonjol di Kabupaten Pekalongan. Koperasi menjelma menjadi gerakan ekonomi berjama'ah yang patut dibanggakan. Koperasi mampu "menghidupi" warga Muhammadiyah, dan juga bisa "menghidupkan" Persyarikatan Muhammadiyah setempat.

Gerakan ekonomi berjama'ah melalui pengembangan Koperasi merupakan agenda mendesak bagi Muhammadiyah. Koperasi perlu direvitalisasi. Koperasi harus kembali dikampanyekan secara masif, dan masyarakat harus kembali disadarkan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan senjata untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Seluruh warga Muhammadiyah mesti bergabung dan menghidupkan koperasi di wilayahnya masing-masing. Gerakan ekonomi berjama'ah ini merupakan salah satu "jalan terbaik" untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Namun ingat, bukan sekedar koperasi, bukan lembaga rente yang diberi label koperasi. Bukan itu.

Gerakan koperasi yang murni selalu memperjuangkan tujuan mulia, yaitu

mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi harus didukung secara penuh, diperkuat, dan terus dibatinkan dalam kehidupan masyarakat kita. Bagi warga Muhammadiyah, tentu jangan ragu untuk mengembangkan Koperasi yang murni itu. Sekali lagi, dikatakan "murni" karena pada era sekarang ini banyak modus-modus penipuan dan "penindasan ekonomi" berlabel Koperasi.

Gerakan koperasi sesungguhnya selaras dengan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, khususnya poin 4.d. Muamalah Duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. Serta poin 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: "*Baldatun Thayyibatub Wa Robbun Ghofur*".

Koperasi: Kekuatan Berjama'ah untuk Kesejahteraan Umum

Koperasi merupakan perwujudan kekuatan ekonomi berjama'ah. Koperasi yang kuat ditopang oleh anggota yang memiliki komitmen berjama'ah untuk mewujudkan kesejahteraan. "Gotong Royong" atau kekeluargaan yang merupakan inti dari filsafat Pancasila, dapat kita temukan pada sebuah lembaga yang bernama "koperasi". Oleh karenanya, dalam penafsiran Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), koperasi disebut sebagai sokoguru perekonomian nasional. Bung Hatta, sang Proklamator dan juga kita kenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia pernah mengatakan bahwa sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasaskan kekeluargaan.

Mubyarto (2002) mengemukakan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar, SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Masih menurut Mubyarto (1981), Ekonomi Pancasila dicirikan lima hal sebagai berikut:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial.
2. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi.
3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional.
5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara menurut Boediono (1981), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut:

1. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional.
2. Manusia adalah *"economic man"* sekaligus *"social and religious man"*.
3. Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial.
4. Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh.
5. Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.

Koperasi versus Korporasi

Ingat, yang menjadi sokoguru (pilar atau tiang) perekonomian nasional adalah Koperasi, bukan Korporasi. Menghidupkan korporasi mungkin perlu, tetapi menghidupkan dan mengembangkan Koperasi jauh lebih penting. Karena banyak fakta, hadirnya sebuah Korporasi di suatu kawasan hanya menguntungkan segelintir orang, bahkan mirisnya "menindas" banyak orang. Tentu tidak semua demikian. Merebaknya korporasi di Indonesia

harus diikuti pengawasan yang ketat dari pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jika korporasi lebih berdampak pada keuntungan individu atau segelintir orang, sementara koperasi hanya untuk kesejahteraan bersama. Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa Koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Dari pengertian tersebut nampak jelas bahwa dasar Koperasi adalah nilai inti dari Pancasila, yaitu gotong royong atau kekeluargaan. Titik perjuangan yang dituju adalah keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun UU tersebut dinilai menggerus jati diri koperasi, atau dengan kata lain beraroma korporasi. Karena itulah , UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Mei 2014. Yang dibatalkan MK sungguh mengejutkan, yaitu Seluruh Materi Muatan Undang-Undang tersebut.

Publikasi MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id) menerangkan bahwa dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Demikian halnya dengan Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang No. 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas dan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Selain karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992 (www.hukumonline.com, 28 Mei 2014).

Koperasi sebagai Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah Muhammadiyah

Publikasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah (www.muhammadiyah.or.id) mengetengahkan tentang Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah (GJDJ) Muhammadiyah. Gerakan yang dimaksud dalam rangka gerakan jama'ah dan dakwah jama'ah di sini adalah suatu usaha Persyarikatan Muhammadiyah, melalui anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air, untuk secara serempak teratur dan terencana meningkatkan keaktifannya dalam membina lingkungannya ke arah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.

Jama'ah adalah suatu bentuk kehidupan bersama sekelompok orang yang tujuannya membina hidup berjama'ah. Pengertian sekelompok orang yang dimaksud adalah sekelompok keluarga yang tempat tinggalnya saling berdekatan, tidak membedakan golongan, baik agama, status sosial maupun mata pencaharian. Kelompok itu-oleh sekelompok kecil anggota Muhammadiyah yang ada di dalamnya-diusahakan dapat terwujud suatu kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, bagi segenap anggota kelompok, sehingga merupakan satu kesatuan kehidupan bersama dan serasi, yang selanjutnya dapat menyumbangkan kemampuannya untuk ikut serta membangun bangsa dan negaranya. Sekelompok anggota Muhammadiyah yang mengambil inisiatif itu, disebut inti jama'ah, yang membentuk dirinya sebagai potensi penggerak kelompok (*group dinamics*).

Alasan untuk menempatkan diri sebagai inti jama'ah bagi anggota Muhammadiyah ini, tidak lain karena didorong oleh rasa tanggung jawabnya sebagai muslim yang melaksanakan ajaran agamanya, sebagai ibadahnya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Adapun materi yang disajikan dalam bidang ekonomi adalah berusaha mencegah kesulitan-kesulitan ekonomi/ penghidupan yang dialami oleh anggota jama'ahnya, antara lain dengan membantu permodalan, mencarikan pekerjaan, memberikan latihan ketrampilan/ keahlian dan sebagainya.

Dalam konteks GJDJ Muhammadiyah, untuk mengarahkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, maka Koperasi bisa dijadikan salah satu senjata yang ampuh dalam gerakan ekonomi Muhammadiyah menuju kesejahteraan bersama. Yang lebih menarik lagi, dalam pengertian jama'ah disebutkan bahwa "tidak membedakan golongan, baik agama, status sosial maupun mata pencaharian". Warga muhammadiyah dituntut berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Warga Muhammadiyah harus inklusif, dan pada saat yang sama gigih memperjuangkan untuk menerapkan sistem

ekonomi inklusif pula. Koperasi dalam hal ini adalah salah satu produk dari sistem itu. Oleh karenanya, dalam aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Koperasi sangatlah tepat bila dijadikan sebagai produk ekonomi dari Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah Muhammadiyah.

Dengan koperasi, memungkinkan terbukanya akses permodalan, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangannya jaringan dan akses pemasaran. Melalui koperasi, pengembangan sumber daya insani pun dapat dilakukan dengan berbagai program pelatihan keterampilan hidup (*life skills*). Koperasi dapat menekan angka kemiskinan dan mengikis pengangguran. Koperasi dapat mendorong kesejahteraan lahiriah, pemenuhan tuntutan materi yang sulit ditunda (pemenuhan kebutuhan pokok), dan secara bersamaan dapat mendorong terpenuhinya "kebutuhan bathin". Karena dengan berkoperasi, tolong menolong dalam kebajikan dapat dilakukan secara nyata. Hal ini tentu dapat ditemukan dan dirasakan pada "koperasi yang sebenar-benarnya".

Ayo, kita Revitalisasi Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi Berjama'ah!, karena menghidup-hidupi Muhammadiyah akan lebih mudah bila berjama'ah. Kokohnya Muhammadiyah hari ini adalah buah dari kekuatan berjama'ah. Jihad meng-Indonesia-kan Koperasi dan meng-koperasi-kan Indonesia kita lakukan dengan menjadikan Koperasi sebagai Gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Dengan gerakan ini niscaya, keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Indonesia akan terjadi. Semoga!

MUHAMMADIYAH, KEMISKINAN, DAN KEKUASAAN

David Krisna Alka

Muhammadiyah dan Kaum Miskin Kota," itulah judul tulisan saya yang dimuat pertama kali dalam rubrik opini Harian Kompas (2/07/2005). Tulisan itu dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2005 di Malang.

Dalam tulisan itu, terurai otokritik tentang Muhammadiyah yang katanya gerakan Islam kota kelas menengah mestinya lebih dekat dengan kaum miskin kota. Seperti di bidang pendidikan, biaya sekolah dan kuliah di lembaga pendidikan Muhammadiyah tak terjangkau anak-anak miskin kota. Sebagai ormas Islam yang katanya berbasis kelas menengah, Muhammadiyah seyogianya memberi pendidikan murah bagi anak-anak miskin kota. Banyak anak Indonesia belum bisa menikmati kehidupan layaknya anak, sekolah dan belajar.

Mengambil contoh kehidupan Jakarta, dengan mudah akan ditemui anak-anak usia sekolah mengamen atau mengemis di lampu merah. Tak jarang, mereka ditemukan di bus-bus kota, dikenal sebagai anak jalanan. Tiadanya kesempatan yang adil dan tidak terpenuhinya kebutuhan papan, pangan, pendapatan, dan pendidikan, membuat warga miskin Jakarta menjadi kelompok pinggiran, hidup di luar jaring keamanan sosial.

10 tahun sudah tulisan itu berlabuh dan berlalu. Dalam kaitan ini, masalah kemiskinan selalu relevan untuk dikaji. Sebab, kemiskinan merupakan salah satu masalah penting dan terus menerus terjadi di bumi. Problem kemiskinan pun sudah setua umur umat manusia.

Pertanyaannya, mungkinkah ada jalan ke luar dari kondisi pemelaratan sebagai akibat ketimpangan dan masalah kekuasaan. Dan, dalam konteks

kebangsaan dan kemanusiaan, sejauh mana Muhammadiyah memberikan jalan keluar tentang masalah kemiskini di bumi pertiwi ini?

Kemiskinan

Prof Dr A Syafii Maarif pun galau menanggapi kemiskinan di negeri ini. Di mata seorang warga negara Chad, sebuah negara miskin dan tandus di Afrika, amat takjub menyaksikan hamparan indah Nusantara. Bahkan, menurut Buya Syafii Ma rif, mereka menyebut Indonesia sebagai serpihan surga. Namun, serpihan surga itu benar-benar tak pernah menjadi surga bagi warganya.

Kaum miskin di negeri ini belum merdeka dari kepahitan hidup yang didera. Kemerdekaannya terenggut karena tak merasakan kebebasan menjalankan fungsi dalam hidup. Disamping itu, negara ini terdampar dalam lilitan utang luar negeri yang terus-menerus mengekang kedaulatan kita, apalagi bagi generasi muda dan anak-cucu-cicit nanti.

Pelan tapi pasti, negeri ini telah dikangkangi "penjajah-penjajah ekonomi dunia." Menjadi bangsa yang bemartabat baru sebatas cita-cita kata yang tertata dengan rapi dalam lembaran teks pidato pada setiap memperingati seremonial Ulang Tahun Hari Kemerdekaan. Hingga kini, cita-cita menjadi bangsa yang bermartabat itu belum terlaksana. Apakah yang salah dengan manusia Indonesia?

Bermartabat berkelindan dengan bermoral. Prof Dr Syafii Maarif (2005) seringkali menegaskan supaya manusia Indonesia menjadi manusia yang bermoral, karena itu adalah salah satu syarat untuk memulihkan dekadensi moral manusia Indonesia. Beberapa persyaratan yang lain, yang menurut Buya Syafii harus terpenuhi diantaranya, berani memulai untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri, mengakui borok-borok yang menempel pada diri sendiri, dan jangan pernah menjual kebohongan di mana-mana.

Tetapi, persayaratan yang disebutkan Buya Syafii Maarif itu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Hal itu disebabkan karena manusia itu memiliki posisi yang unik, apalagi manusia Indonesia. Keunikan manusia itu secara natural terjadi dikarenakan terletak pada dualisme moral yang ada pada dirinya. Pada satu sisi, manusia bisa berkehendak secara baik, integratif, dan positif serta di sisi lain ia berpotensi melakukan hal-hal yang buruk, negatif dan disintegratif. Persoalannya, ke arah manakah dari dua kecenderungan ini manusia Indonesia memilih.

Jika salah pilih, manusia Indonesia telah mengikis eksistensi diri mereka dari tanah air mereka sendiri. Budaya korup dan menjilat yang seolah sudah

menjadi bagian dari masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari akan membangun ruang publik yang sakit. Disamping itu akan menghambat berkembangnya ruang sosial (publik) secara baik.

Dalam setiap pengambilan keputusan, masyarakat yang korup tidak lagi memikirkan, apalagi mempertimbangkan hal baik dan buruk. Yang ada adalah bagaimana cara yang dilakukan itu berhasil dan sesuai dengan keinginan pribadi. Meskipun hal itu harus menabrak norma-norma luhur yang potensial berkembang dalam masyarakat.

Kemerdekaan bagi orang miskin adalah kebebasan untuk hidup. Karena kemiskinan adalah sebuah pengingkaran terhadap kebebasan, orang-orang miskin berjuang untuk kebebasan supaya tercapai kesejahteraan. Bila kemerdekaan mereka dikebiri oleh sikap wakil rakyat dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kaum miskin, maka tak ada arti kemerdekaan.

Dari situ, amat disayangkan, kemerdekaan belum dirasakan kaum miskin di tanah air yang kekayaan alam melimpah ruah ini. Semuanya tampak kontras, nilai kemerdekaan yang sesungguhnya telah tercabik oleh kepentingan kelompok tertentu.

Perjuangan orang-orang miskin yang berdesak-desakan mengambil dana bantuan langsung tunai dan antrian panjang membeli minyak yang harganya bertambah mahal, ditambah lagi dengan beban perjuangan keseharian mereka untuk dapat bertahan hidup.

Apakah itu berarti sejarah tak punya arti? Menurut Karl Popper, sejarah memang tidak punya arti. Fakta masa lalu tidak pernah memiliki arti pada dirinya sendiri. Terutama bagi manusia zaman modern ini. Fakta itu baru memiliki arti kalau kita memutuskan untuk memberinya arti. *"Facts as such have no meaning; they can gain it only through our decisions..."*

Kemerdekaan berarti kebebasan, selama kebebasan itu belum diterima maka nilai kemerdekaan masih bisa ditakar kadar kemurniaannya. Kemerdekaan berarti juga pengakuan terhadap kesetaraan sesama manusia. Kemerdekaan juga ekspresi tindakan keadilan, perlakuan yang sama kepada siapapun tanpa memandang status sosialnya.

Akhirnya, pengalaman membangsa selama ini ditambah dengan dekade-dekade penuh duka sebelumnya, tangga demi tangga mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia berjalan setengah hati. Sehingga persoalan menurunkan tingkat kemiskinan di negeri ini berjalan tertatih-tatih.

Secara umum dan gamblang, kemiskinan dapat diukur dari berapa besar tingkat pendapatan rat-rata penduduk per tahun, berapa besar pendapatan

kotor negara per tahun, berapa rata-rata umur harapan hidup penduduk, berapa rata-rata tingkat kematian bayi per seribu penduduk per tahun, berapa besar jumlah penduduk yang menganggur, berapa besar penduduk yang masih buta huruf dan sebagainya. Para ahli statistik dengan mudah dapat menghitung dan menyebutkannya.

Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin. Perbedaannya tidak seberapa besar. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup tidak jauh dari batas Rp 11.000. Dengan sedikit sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, mereka bisa langsung kembali miskin.

Seperempat populasi Indonesia jatuh miskin setidaknya sekali dalam tiga tahun. Situasi menjadi lebih sulit lagi ketika keluarga yang miskin menghabiskan uang sangat sedikit untuk kesehatan dan pendidikan – rata-rata cuma 5%. Akhirnya anak-anak yang dihasilkan pun tidak terdidik dan tidak sehat; mereka terancam mewarisi lagi kemiskinan yang sama ke generasi berikutnya.

Ketimpangan konsumsi rumah tangga Indonesia pun telah meningkat sejak tahun 2000. Koefisien Gini, ukuran dari ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0.30 pada tahun 2000 menjadi kira-kira 0.41 pada tahun 2013. Kesenjangan antar wilayah pun tidak berkurang. Wilayah timur Indonesia tertinggal di belakang wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama Jawa. Tak heran bila angka ketimpangan konsumsi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur, walau Indonesia mencatat kemajuan yang baik dari sisi pengentasan kemiskinan.

Ada banyak cara untuk melakukan pengentasan kemiskinan, seperti:

1. Perbaikan akses pangan, kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin.
2. Penciptaan lebih banyak lagi lapangan kerja.
3. Pembentukan jaring pengaman sosial untuk melindungi mereka yang rentan.

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk Muhammadiyah.

Selama ini Muhammadiyah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat. Namun, Kuntowijoyo (1991:266)

menyatakan, selama ini Muhammadiyah belum mendasarkan program dan strategi kegiatan sosial berdasar elaborasi realitas sosial yang obyektif. Muhammadiyah kurang siap merespons tantangan perubahan sosial di masyarakat atas dasar konsep, teori, strategi, dan aksi yang jelas.

Kegelisahan Kuntowijoyo kala itu tentu sudah menjadi kegelisahan berbagai kalangan Muhammadiyah masa kini yang sering menyuarakan keberpihakan Muhammadiyah bagi kaum tertindas. Lebih dari sekadar lembaga keagamaan, Muhammadiyah merupakan organisasi nonpemerintah yang mengisi fungsi-fungsi riil di masyarakat yang sering diabaikan negara. Tidak berlebihan jika Muhammadiyah kini dan nanti diharapkan tumbuh sebagai organisasi pelayanan sosial *(social services)* terkemuka di Indonesia melalui berbagai aktivitas amal usaha.

Berkaca dari situ berbagai kegelisahan, problem kemasyarakatan yang dihadapi Muhammadiyah berubah dari problem kemasyarakatan (dihadapi di saat pendiriannya). Ini menjelaskan, upaya pembaruan (tajdid) gerakan Muhammadiyah mendesak segera diformulasikan.

Maka, wajar dan adil jika menjelang Muktamar Muhammadiyah ke 47, geliat Muhammadiyah dalam gerakan sosial kemanusiaan di Tanah Air selayaknya ditafsir ulang. Godaan-godaan global yang merasuki gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah harus diperhatikan tanpa tedeng aling-aling.

Selain itu, badan-badan pelayanan sosial Muhammadiyah tak hanya sekadar menjadi coretan-coretan dinding kota yang terpampang di penjuru kota. Sebuah bangku sekolah di Muhammadiyah tak harus dibeli dengan harga mahal. Masih banyak warga Indonesia dan tentu warga Muhammadiyah yang hidup dalam kemiskinan.

Lebih dari itu, agenda yang harus disiapkan Muhammadiyah saat ini adalah keperluan melakukan pembenahan dalam rangka menghadapi gejala metropolitan super-culture yang telah menjauhkan masyarakat dari rasa kepedulian terhadap kaum miskin.

Kekuasaan

Meraih kekuasaan adalah kaidah pertama bagi politisi dalam politik. Kaidah kedua ialah mempertahankan kekuasaan. Namun, dalam perjalanannya, kekuasaan membuat sebagian politisi di negeri ini terbuai dan goyah di tengah jalan ketika meraih kekuasaan atau tatkala berada dalam sebuah kekuasaan.

Kegoyahan tersebut salah satunya akibat terjebak dalam polah politik transaksional, kultur politik uang, dan politik konsumtif. Tak mengherankan, politisi yang ingin menjadi calon anggota legislatif tak cukup punya modal duit hanya 'sedompet'. Selain itu, korupsi yang melibatkan pimpinan partai atau kader sebuah partai politik (parpol), pelan tapi pasti, akan diprediksi sulit mendapatkan simpati publik.

Ada beberapa definisi politik yang meningkatkan apatisme publik terhadap politisi. Dalam paparan JA Barnes (2005:66) mendefinisikan politik sebagai seni mengatur manusia dengan cara menipu dan seni meyakinkan orangorang dengan kebohongan baik demi tujuan baik. Namun, tetap saja itu bernama kebohongan. Bohong selalu dianggap sebagai sarana yang harus dan bisa diterima, bukan hanya bagi politisi atau demagog, melainkan juga oleh negarawan.

Ihwal kategori politisi, Heinz Eulau (1987:342) mengemukakan ada empat jenis kepribadian politisi, yaitu ritualis, tribunalis, inventor, dan broker. Politisi ritualis menaruh perhatian pada kesopanan dan protokol. Politisi itu berusaha memasukkan semua pesan yang relevan ke dalam kategori-kategori yang dibakukan dan diterima. Politisi tribunalis menganggap dirinya wakil dari 'forum rakyat'.

Ide-ide tribunalis biasanya mendekati kebutuhan rakyat jelata. Ia merupakan ahli dalam menemukan tanggapan rakyat jelata. Itu termasuk peran seorang populis. Politisi inventor memandang dirinya sebagai seorang pemrakarsa kebijaksanaan, yakni seseorang yang 'membayangkan', mencari rumusan, dan strategi-strategi baru.

Adapun politisi broker merupakan perantara klasik yang menyeimbangkan semua pokok pandangan, membuat transaksi, dan selalu seolah tampak netral. Masalahnya, politik Indonesia saat ini masih dalam perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai privilese sekelompok orang. Pengkastaan politik di tengah-tengah masyarakat yang hanya satu kelompok atau satu kasta yang berhak memegang kekuasaan politik, misalnya penguasaan terhadap parpol.

Monopoli politisi yang memiliki perspektif politik seperti itu dikenal sebagai perspektif politik paling tua dalam sejarah, meski paling tua sampai sekarang masih ada. Akibatnya praktik demokrasi di negeri ini tampak semu. Ketika becermin kelihatan seperti demokratis, tetapi kenyataannya oligarki di tubuh parpol masih cukup kuat.

Ahmad Syafii Maarif (2004:175) pernah mengingatkan, tugas utama kita adalah mempercepat proses pencerdasan otak dan pencerahan hati

seluruh masyarakat agar tak lagi menjadi mangsa retorika politik yang meninabobokan. Artinya, kebaikan publik dalam berpolitik seharusnya menjadi panglima, bukan hanya retorika yang menyejukkan hati. Keberadaan politisi berguna untuk menjalankan roda pemerintahan agar tidak berjalan di tempat dan kesejahteraan rakyat kian meningkat.

Sebenarnya, tak sulit menemukan keberadaan politisi yang baik di negeri ini. Seolah melulu kelihatan dusta politisi yang tersiar di berbagai media. Akibatnya setiap tahun berganti, tapi berita tentang silat lidah politisi tak kunjung berhenti mewarnai kehidupan seharihari.

Semestinya, kerja politisi berjuang untuk kebaikan publik. Namun, kini terkesan merusak kepercayaan publik. Meski wacana kebajikan politik dan kebajikan publik sudah berserak di berbagai literatur ilmu politik. Karena itulah, kebajikan publik yang otentik dari politisi masih kita cari. Silat lidah politisi dalam kebangkrutan logika masih sering terbaca dan terdengar di berbagai media. Seolah sudah tak percaya lagi dengan kebenaran, bahkan mengakui kesalahan saja sangatlah susah.

Kini, harapan terletak pada kekuatan baru. Angkatan baru politisi Indonesia itu tersebar di berbagai parpol. Diharapkan, mereka dapat menjadi penggerak yang membikin politik di republik ini kian beradab.

Kekuatan kolektif politisi baru itu hendaknya mampu mengisi ruang sunyi kepemimpinan politik di negeri ini. Tak terjerembab korupsi politik dan tak terhanyut dalam arena dinasti politik. Yang penting, politisi baru Indonesia itu sadar bahwa harum aroma kekuasaan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu membawa tujuan politiknya yang terbaik bagi rakyat, bukan malah 'dilaknat' rakyat.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai organisasi pencerah republik menjadi penerang dengan turut melalukan dakwah untuk menumbuhkan kesadaran etik dalam politik di negeri ini. Sebab, Muhammadiyah lahir lebih dahulu daripada kelahiran negara-bangsa Indonesia. Muhammadiyah lahir 1921, sedangkan kelahiran bangsa 1920-an dan negara Indonesia 1945.

Namun, persoalannya bukan tentang siapa yang lahir lebih dulu. Pastinya, Muhammadiyah sudah menyatu-padu dalam sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Walau, menurut Ahmad Syafii Maarif (2009), ungkapan nasionalisme memang tidak populer di kalangan Muhammadiyah. Akan tetapi, perbuatan yang bercorak nasionalistik telah menjadi wataknya sejak semula kebangkitan Muhammadiyah. Muhammadiyah langsung bergerak untuk membenahi kultur umat terjajah melalui proses pencerahan dan

kemanusiaan. Sesuatu yang sangat mendasar bagi bangunan sebuah bangsa yang bakal lahir. Keterbukaannya terhadap gagasan-gagasan baru yang lebih segar telah menjadi sifat Muhammadiyah selama sekian dasawarsa.

Dalam catatan sejarah, gerakan Muhammadiyah berperan penting dalam pembangunan bangsa. Hampir di seluruh Indonesia, Muhammadiyah membangun perguruan tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, lembaga ekonomi, dan panti asuhan. Karenanya, hal itu mesti lebih diperkuat dan dikembangkan, jangan sampai hanya tinggal menjadi catatan sejarah.

Kini, bersama presiden baru dan pemerintahan baru, gerakan Muhammadiyah diharapkan lebih maju untuk mengutamakan program-program pemberdayaan yang nyata menyentuh kalangan bawah. Soalnya, orangorang papa sering kali mengeluh, mengapa pelayanan terhadap orang-orang kaya selalu menjadi prioritas yang utama.

Di segala zaman yang dihuni manusia selalu ada ketidakadilan yang diderita kaum papa. Begitu pula pada setiap era pemerintahan di Indonesia, kaum miskin tetap eksis. Bukankah setiap agama sangat menolak setiap bentuk penindasan, penyelewengan dalam urusan-urusan sosial, ekonomi, dan urusan manusia lainnya, seperti pungutan-pungutan ekstra, penyuapan, dan hadiah-hadiah yang dipaksakan untuk mengamankan kedudukan atau kenaikan pangkat.

Beberapa masalah pemerintah menumpuk peninggalan era pemerintahan masa lalu, sebab tampaknya selalu bersidahulu dengan perdebatan sana-sini tanpa realisasi yang cepat menjadi.

Elite negara yang mendahulukan kepentingan diri dan golongannya sulit menjadi daya penggerak bagi kemajuan negeri ini. Hasrat kekuasa an yang tidak memihak rakyat akan memperlambat perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Langkah perubahan akan berjalan di tempat. Perubahan hanya terjadi pada data statistik, belum jelas tampak perubahan yang nyata.

Karena itu, Muhammadiyah memiliki semangat dasar menghapuskan kezaliman, membongkar struktur dan sistem yang salah, serta mengubah mental manusia Indonesia. Kesadaran transformatif dan kesadaran kritis rakyat dalam gerakan *civil society* seperti Muhammadiyah dan ormas lainnya menjadi penting untuk mewujudkan perubahan di Indonesia.

Nah, Muhammadiyah hendaknya menjadi penggerak utama menumbuhkembangkan kepedulian terhadap kaum miskin di negeri ini. Bersama pemerintahan baru, mendorong dan memberikan pelayanan publik yang layak terhadap kaum papa, biaya kesehatan yang tak mahal, dan

pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Lebih baik jika itu gratis.

Selain itu, Muhammadiyah juga bersinergi mengawal, mengawasi, dan memberantas segala akar korupsi, manipulasi, dan eksploitasi yang terjadi di negeri ini. Jangan sampai kerisauan kembali menyelimuti mereka yang didera kemiskinan di pelosok desa dan perkampungan kumuh perkotaan akibat kebijakan pemerintah yang belum banyak berpihak terhadap mereka.

Di sinilah pentingnya kesadaran perbuatan secara kolektif antara pemerintahan baru dan Muhammadiyah sebagai gerakan *civil society,* untuk berjuang mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, gerakan Muhammadiyah, selain mengembangkan dan memajukan gerakan pendidikan dan sosial keagamaan yang sudah ada, juga memberikan kesadaran kritis dan kesadaran transformatif.

Menurut Paul Freire (1921-1997), kesadaran transformatif adalah 'kesadarannya' *(the conscie of the consciousness).* Artinya, orang makin praksis dalam merumuskan suatu persoalan. Antara ide, perkataan, dan tindakan serta progresivitas dalam posisi seimbang. Kesadaran transformatif akan menjadikan manusia itu betul-betul dalam derajat sebagai manusia yang sempurna.

Dalam paradigma transformasif, kesadaran yang ada pada masyarakat memungkinkan semua warganya mengambil bagian dalam kekuasaan dan kemakmuran. Itu berarti, kunci gerakan Muhammadiyah ialah menumbuhkan kesadaran kritis, menghapus struktur yang menindas, dan memberikan akses kepada masyarakat bawah terhadap sumber daya modal, pendidikan, keterampilan, teknologi, informasi, dan sebagainya.

Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia saatnya berjibaku menjadi kekuatan ekonomi dunia, menjadi teladan kebajikan politik dan kebajikan publik, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional, serta tatkala pentingnya menanamkan penghayatan keagamaan yang damai, mencerahkan, dan berkemajuan.

Itu karena menggerakkan Muhammadiyah dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia awalnya tak semudah membalikkan telapak tangan. Soalnya, KH Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah dan para pejuang bangsa memerdekakan Indonesia, bukan dengan simsalabim dan abrakadabra.

Akhirnya

Gerakan Muhammadiyah seharusnya lebih peduli terhadap persoalan realitas sosial kini dan nanti. Namun, suatu sistem ekonomi politik di mana *the rulling elite* mengalami konservatisasi karena ingin mempertahankan

monopolinya pada akses-akses ekonomi dan kekuasaan selalu muncul polarisasi yang merusak solidaritas sosial.

Lagi, menurut Kuntowijoyo (1993:42), Muhammadiyah sebagai kelompok yang selalu mendefinisikan dirinya sebagai entitas non-kelas mempunyai peluang untuk kembali mendefinisikan ideologi sosial dan politiknya berdasar kepentingan rakyat jelata—sebagaimana dicontohkan Sarikat Islam (SI) di masa lalu—dan dirumuskan secara jernih berdasar analisis yang tepat tentang formasi sosial dan sistem ekonomi politik yang ada.

Ini berarti politik agama harus dibumikan pada tingkat obyektif menjadi politik kelas dalam rangka mengakomodasi kepentingan empiris umat dan bangsa. Hanya dengan gerakan agama yang memihak, gerakan sosial Muhammadiyah akan memiliki makna sejati sebagai gerakan untuk pembebasan struktural, seperti dirumuskan Kuntowijoyo terkait tiga misi agama: humanisasi, emansipasi, dan transendensi.

Sebagai panutan moral, kalangan politisi dan cerdik pandai Muhammadiyah saat terlibat dalam kancah perpolitikan nasional dicemaskan akan lupa kepada rakyat yang masih banyak didera kemiskinan. Ketika hasrat ingin berkuasa dan ingin cepat kaya kian menggoda, politisi cenderung lupa, tetangga yang miskin di kampungnya bingung besok mau makan apa.

Dari sisi organisasi, sejatinya, gerakan Muhammadiyah adalah wadah perjuangan umat Islam dalam melaksanakan gerakan dakwah sosial yang memiliki cukup banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga zakat (lazis). Muktamar Muhammadiyah diharapkan mengembalikan spirit awal Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berpihak terhadap realitas sosial yang timpang, kemiskinan, dan ketertindasan. Seperti agama, gerakan dakwah Muhammadiyah harus berpihak kepada kaum papa.

Selain itu, kita, kalanganMuhammadiyah diharapkan tak terjebak dalam rasa sudah tahu segala sesuatu, atau kebencian paranoid. Artinya, elite Muhammadiyah dan anggotanya telah mencapai titik di mana mereka tahu perbedaan antara baik-buruk, mampu menjatuhkan pilihan sendiri, memiliki kemampuan sendiri, keyakinan sendiri, yang bukan sekadar pendapat. Sudah saatnya gerakan Muhammadiyah dapat kita rasakan seperti merasakan gerakan alam, tatkala melihat dan merasakan musim bunga tiba, musim pergerakan alam, mengalirnya air sungai, keluarnya mata air, datang dan perginya burung-burung, usapan lembut angin di pagi hari, gelombang pergerakan angin dari satu kawasan ke kawasan yang lain, semua

itu adalah bagian dari alam yang menjadi guru bagi umat manusia. Yang membangunkan kita untuk bangkit dari rasa tidak bersemangat. Mengajak kita untuk bergerak, bergembira, bekerja, dan berusaha.

Kita banyak belajar dari pergerakan alam. Segala yang ada di alam semesta senantiasa bergerak, berkembang, dan bekerja untuk membangun sistemnya. Dengan demikian, segala aktivitas dan gerakan Muhammadiyah hendaknya menginspirasikan rakyatnya untuk terlibat dan merasakan manfaat sehingga kita menjadi bangsa yang berkemajuan dan mencerahkan. Jayalah Muhammadiyah, Jayalah Indonesia. Semoga.

Daftar Pustaka

Buku:

Ahmad Syafii Maarif. *2014. Mencari Autentisitas dalam Kegalauan*. PSAP: Jakarta.

____________________, 2015. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Mizan dan Maarif Institute: Jakarta.

Barnes, A. 1994. *A Pack of Lies : Toward a Sociology of Lying*. Cambridge University Pres: New York.

Heinz Eulau. 1963. *The behavioral persuasion in politics*. Random House: New York.

Freire, Paul. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Pustaka LP3ES: Jakarta.

Kuntowijoyo. 2010. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Mizan: Bandung.

Abdul Munir Mulkhan. 2010. *Kiai Ahmad Dahlam, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*. Kompas: Jakarta.

Abdurrahman, Moeslim. 2005. *Islam yang Memihak*. LKis: Yogyakarta:

Media Cetak:

Alka, David Krisna. "Muhammadiyah dan Kaum Miskin Kota". *Kompas,* 2 Juli. 2005

__________________"Muhammadiyah, Politik, Dhuafa". *Kompas,* 22 Februari. 2008

__________________ "Muhammadiyah, Presidan Baru dan Pemerintahan Baru". *Media Indonesia*, 23 Agustus. 2014
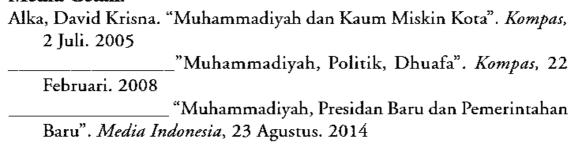
MENDARAS TANGISAN PILU DAENG BA'DU

Cerpen Ekonomi

Mukhaer Pakkanna

Nyaris saban hari, di depan rumahku berjejeran armada angkutan becak. Maklum, di depan rumahku para pengayuh becak, menjadikannya sebagai pangkalan. *Entah* sejak kapan, mereka mulai mangkal. Yang pasti, sejak aku mulai memiliki rekaman memori seperti yang diungkap JR Anderson (2012) dalam buku *Learning & Memory an Integrated Approach*, kira-kira usia tiga tahun, para penarik becak telah familiar dengan lokasi itu. Selain teduh, karena pohon asam berusia ratusan tahun, berdaun lebat bergelayut, menjuntai, dan juga tempatnya adem strategis di perempatan jalan utama.

Usai sekolah, hampir setiap petang, aku mampir dan menegur sapa mereka. Bahkan, sesekali aku larut dalam cengkerama santai dan sendau gurau. Banyak kronika kehidupan yang mulai kurekam. Gaya guyub mereka cukup kental. Mereka ibarat satu keluarga besar, mereka saling asah, asih, dan asuh. Kendati hidupnya cukup keras di tempa alam. Panas di santap terik mentari hingga dingin diguyur hujan telah membalut, tidak lekang dalam goresan hidupnya.

"Becak...becak..daeng becak!..", teriak calon penumpang dari seberang perempatan jalan Merpati Raya. Ibarat koloni, para pengayuh becak pun sigap merespon panggilan. Tanpa perintah, mereka saling mafhum, antri menjemput calon penumpang. Mereka tampaknya sudah terbiasa disiplin dalam berjamaah, tanpa saling *seradak-seruduk* berebutan calon penumpang. Padahal tingkat pendidikan mereka, rerata kelas 2 SD. Mereka putus

sekolah karena ketiadaan biaya. Prinsip mereka, yang penting bisa baca tulis. Titik.

Mereka yakin dan ikhlas, rizki tumpangan akan datang lagi. Mereka yakin, pasar penumpang di depan rumahku sangat menggiurkan. "Yang penting sabar," ujar daeng Ba'du berkhotbah. Padahal daeng Ba'du adalah sosok yang tidak pernah terlihat batang hidungnya mengaji dan tadarussan di musholla reot di sekitar rumahnya. Ia sibuk dengan urusan becaknya.

Suatu hari, tumpangan mulai terasa sepi. "Maklum tanggal tua! Kalau sudah tanggal 15-an ke atas, *yah* kita banyak santai. Penumpang kurang. Banyak yang berjalan kaki," ujar daeng Majid, pengayuh becak yang paling senior.

"Kalau tanggal tua, paling bisa bawa pulang Rp10.000,- per hari!", timpal daeng Ba'du lagi.

" *Wah,* mau makan apa *yah* anak istri kalau penumpang sepi melulu", sambut daeng Pe'te.

"Masih mending, kalau tumpangan sepi, becakku juga selalu rusak. Tali rantainya selalu copot. Piringan *gear*-nya makin aus. Bagaimana anak-anakku bisa makan? "Beli rantai dan piringan *gear* baru saja susah," resah daeng Baco.

"Tapi, kenapa *yah*, walau kita selalu menggerutu, tapi *kan* dapur kita masih bisa ngepul. Anak-anak kita masih pada bernafas?", timpal daeng Majid dengan seloroh khas makassarnya.

Jelang adzan magrib berkumandan, ibuku lazim memanggilku dari teras rumah. Tugas rutinku memasukkan anak ayam kampung peliharaan masuk ke kandangnya. Maklum, di antara kami bersaudara kandung, kami sudah terbiasa berbagi tugas. Untuk urusan anak ayam dan menimba air dari sumur, itu dianggap kompetensiku. Itu secara alamiah dianggap keahlianku.

"Sudahlah, kenapa kamu termenung anakku"? Penuhilah air bak mandi itu, Attamu (ayah, *red*) mau mandi sekarang. Sekarang *kan* sudah hampir magrib!," tegur ibuku. Apa anak ayam sudah masuk kandang? "Apa yang *kau* pikirankan lagi?", tambahnya sambil melirikku.

Aku pun sigap. Usai Attaku mandi, aku pun menyusul mandi sambil bergumam mengingat pembiacaaraan dengan para pengayuh becak tadi. *Entah* kenapa, percakapan mereka melekat dalam hatiku. Pikiranku agak terbebani, sampai-sampai tidak terasa air segar dingin yang mengguyur dari balik pancuran bak mandi yang tatakannya lebih tinggi, ludes sudah.

"Yang terpikir olehku hanya satu, *kok* bisa *yah* hanya dengan penghasilan

Rp10.000/hari atau Rp300.000 per bulan, mereka sekeluarga bisa hidup? Padahal mereka tidak punya warisan tanah, tabungan, dan lainnya dari orangtuanya? Tidak juga ada warisan ilmu dari sekolah? Apakah ini yang disebut kemiskinan kultural atau struktural? Apa memang sengaja Tuhan tidak memihak kepada nasib mereka?

"Mungkin pak Sutia Budi, guru ekonomi yang kusegani dan inspiratif di sekolahku, SMAN I Bantaeng, yang bisa menjawabnya. Besok, saya akan tanyakan ke beliau," ujarku dalam hati.

Usai sholat magrib berjamaah, dari balik jendela kamarku, kuintip lagi para pengayuh becak itu. Rasanya aku ingin berdiskusi, dan mendengar banyak rintihan dari mereka. Banyak pelajaran hidup yang bisa kutarik hikmahnya. Mata pelajaran ekonomi dari pak guru Sutia Budi di kelas pada minggu sebelumnya yang bercerita banyak tentang penderitaan dan kesenjangan sosial, cukup banyak mengganggu pikiranku.

Aku ingin membuktikan fakta-fakta ucapanya itu. Maklum, cita-citaku sejak SD hingga sekarang (SMA), ingin menjadi ahli ekonomi, plus memahami peta realitas sosiologis dan antropologis kehidupan manusia. Aku tidak mau buta dengan fakta. Pikiran dan fakta mesti sejalan.

Aku berambisi, bahwa selain aku bisa jadi ekonom handal, ilmuku harus memberi manfaat kebanyak orang. Bermanfaat bagi masyarakat, membei jalan terang bagi masyarakat. Terus terang, aku terinspirasi kisah inspiratif dari pemenang hadiah Nobel, Muhammad Yunus, dalam bukunya "Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan" (2009). yang sadar segera melepas mantel gelar PhD-nya. Kisah Yunus menjadi "tamparan" bagi para ekonom "menara gading" untuk bergumul dalam lumpur persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

"Aku ingin menjadi Yunus", ujarku membatin. Yunus itu ingin melepaskan diri dari kesombongan yang menyertai seorang PhD-nya, yang cenderung melihat situasi dengan sudut pandang mata burung. Para ekonom seyogjanya, mendapatkan sudut pandang mata cacing, yakni berfokus pada satu persoalan kecil dan mencoba berada di atasnya – sebuah strategi yang lebih efektif karena beranjak dari kenyataan lapangan.

"Saatnya sekarang, di depanku, ada fakta kemiskinan dari para pengayuh becak. Ini laboratorium hidup yang perlu dicarikan solusinya," batinku memberontak. "Mestinya, semakin banyak orang terpelajar di kampung itu, kemiskinan harus semakin berkurang. Tapi kenapa, semakin banyak orang terpelajar, kemiskinan makin meningkat? Apa yang mereka pelajari dari kaum terpelajar itu di bangku-bangku sekolah?

"Aku ingin seperti Yunus, karena ia rela turun gunung", bisikku dalam hati. Yunus telah menemukan pencerahan, tatkala pada salah satu acara berkeliling ke desa bertemu dengan seorang perempuan pembuat bangku dari bambu. Namun, karena ketidaaan modal perempuan tersebut meminjam kepada rentenir untuk membeli bambu sebagai bahan baku. Setelah bangku tersebut jadi harus dijual kepada rentenir dan dia hanya mendapatkan selisih keuntungan sekitar 1 penny. "Inilah rantai kemiskinan yang perlu diurai dan diputus tuntas," kata Yunus.

"Aku harus menjadi *problem solver*, bukan *part of problem.* Terus terang aku terobsesi dengan perkataan Albert Einstein yang pernah kubaca waktu mata pelajaran Fisika SMA Kelas I: *"It's better to light a candle than curse the darkness"* alias "Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan"

Lamat-lamat kuintip para pengayuh becak di depan rumahku, dan tidak terasa aku keluar rumah melalui jendela. Aku melompat. Aku yakin, kalau pamit keluar rumah melalui pintu ruang tamu, pasti aku harus ikut tadarussan hingga menunggu waktu sholat isya. Sudah menjadi kegaliban, di dalam keluarga kami, orangtuaku mewajibkan seluruh anggota keluarga kumpul di ruang tamu. Selain tadarussan, pasti Attaku selalu memberikan beberapa nasihat dan cerita-cerita sejarah tentang kisah para nabi, rasul dan para sahabat-sahabatnya.

"Kenapa kau ada di sini?, tegur daeng Ba'du.

"Memangnya kamu mau jadi pengayuh becak? Sudah, masuk rumah sana!, nanti Attamu pasti mencarimu".

"Daeng Ba'du"!, ujarku lirih memulai pertanyaanku.

"Memangnya, sejak kapan daeng Ba'du narik becak?"

"Apa tidak *capek*? Berangkat usai sholat subuh dan balik ke rumah usai sholat isya *kan*?

"Bagaimana dengan anak-anak daeng Ba'du"?

Apa mereka sekolah? Apa mereka bisa makan cukup dengan penghasilan Rp10.000 per hari?

Tiba-tiba daeng Ba'du membentak: "Memang kenapa, apa salah. Kerjaan saya *kan* halal. Saya bukan maling alias koruptor yang kerap menghias media-media elektronik"?

"Terus terang, aku idak habis berpikir, bagaimana bisa menghidupi keluarga daeng Ba'du dengan hidup Rp10.000 per hari? Punya istri dan tiga anak lagi?

Sambil tertegun, terdiam. Ekpresi wajah daeng Ba'du pun berubah.

Matanya pun berkedap-kedip dan menggaruk-garuk kepala, yang saya yakin kepalanya tidak gatal. Rambutnya yang kribol tak beraturan, pertanda ia tidak siap dengan serangan pertanyaanku.

Sambil menunggu sekian menit, suasana menjadi hening. Lalu lalang keramaian lalu lintas menjadi senyap dalam interaksi batin kami berdua. "Tapi, aku ingin ada jawaban dari daeng Ba'du", ujarku berharap. Sambil menatapku, ia pun menjawab terbata-bata..

"Sejak tiga minggu ini, tiga anakku sedang sakit", ujar daeng Ba'du mengawali tuturnya. Entah kenapa, sekujur tubuh anak-anaku memerah dan timbul bisul-bisul bernanah. Aku mengobatinya dari daun jarak dan rebusan daun pepaya, yang daunya kuambil di pelataran perkuburan dekat rumah. Awalnya, yang kena anak paling kecilku. Terus menular ke kakak-kakaknya. Sekarang, istriku pun kena. Kata dokter di Puskesmas Malillingi, itu bukan cacar, tapi penyakit kulit.

"Dokter Puskesma merekomendasikan ke dokter spesialis kulit. Tapi, spesialis kulit *kan* tidak ada di Bantaeng ini. Saya harus membawa mereka berobat ke kota Makassar, sekitar 124 kilometer. Tentu butuh biaya tidak sedikit".

"Sebelum saya ke Puskesmas, saya antar anak-anak ke dokter Farid. Tapi, tidak sembuh-sembuh juga. Malah menular ke yang lain". Saya sudah pinjam dana biaya berobat ke bank keliling di dekat pasar sentral. *Alhamdulilllah*, cukup membantu. Tapi saya *kan* harus melunasi utang segera"

"Tapi saya yakin mereka akan segera sembuh. Karena saya yakin, siapa yang berusaha sungguh-sungguh pasti ada obatnya, pasti ada jalan keluarnya. Hanya waktu yang akan bicara," tambah lelaki kurus kering kecil berusia 35 tahun itu.

"Apa perlu saya bantu?", ujarku tak sadar menawarkan diri.

"Sudahalah, kau *kan* masih pelajar, masih kelas II SMA. Kau pikirkan saja masa depanmu. Jalanmu masih panjang", timpal daeng Ba'du lagi.

"Tidak usaha kau ceritakan masalahku dengan orangtuamu, aku malu. Aku masih bisa mencari jalan keluar"

"Teman-temanku sesama pengayuh becak pun tidak tau, tidak usah kau pikirkan. Kamu anak baru kemarin!"

Daeng Ba'du, sosoknya tidaklah perkasa. Perawakannya malah tergolong kecil untuk ukuran becaknya atau orang-orang yang menggunakan jasanya. Tetapi, semangatnya luar biasa untuk bekerja keras. Mulai jam lima pagi setelah melakukan rutinitasnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian

dia melalang dijalanan, di atas becaknya untuk mengantar para pelanggannya. Dan, ia akan mengakhiri kerja kerasnya setelah jam delapan malam, usai sholat isya.

Para pelanggannya sangat menyukai daeng Ba'du. Karena ia pribadi yang ramah dan senyum tak pernah lekang dari wajahnya. Dan, ia tak pernah mematok berapa orang harus membayar jasanya. Namun karena kebaikan hatinya itu, beberapa orang yang menggunakan jasanya membayar lebih. Mungkin karena tidak tega, melihat bagaimana tubuh yang kurus kering dan kecil malah tergolong ringkih itu, dengan nafas yang ngos-ngosan (apalagi kalau jalanan mulai menanjak) dan keringat bercucuran berusaha mengayuh becak tuanya.

Daeng Ba'du tinggal di sebuah gubuk reot yang nyaris sudah mau rubuh, bersama istri dan tiga anaknya. Tetangganya juga banyak penarik becak, para penjual asongan dan pemulung lainnya. Perlengkapan di gubuk itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah tikar tua yang telah robek-robek dipojok-pojoknya, tempat dimana ia biasa merebahkan tubuh penatnya setelah sepanjang hari mengayuh becak.

Gubuk itu hanya merupakan dua ruang kecil di mana ia biasa merebahkan tubuhnya beristirahat. Di ruang utama, ia menerima tamu yang butuh bantuannya, di ruang itu juga ada sebuah kotak dari kardus yang berisi beberapa baju tua miliknya dan sebuah selimut tipis tua yang telah bertambal-tambal. Di pojok ruangan tergantung sebuah lampu templok minyak tanah, lampu yang biasa dinyalakan untuk menerangi kegelapan di gubuk tua itu bila malam telah menjelang.

Sambil aku termenung dan gagap, segera aku kembali dan masuk ke halaman rumahku. Aku pun teringat ucapan daeng Ba'du sambil mengigat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari: "T*idaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya*".

Berat rasanya aku melangkahkan kaki balik ke rumah, dan kemudian permisi ikut bergabung kembali tadarussan di ruang tamu. Lagipula, aku yakin, aku mendapat hukuman (sanksi) dari attaku karena kabur usai sholat magrib berjamaah tadi. Aku pun bingung!

Tapi, aku membatin, terus terang, aku malu yah Tuhan. Rutinitasku sholat berjamaah, berdoa dan tadarassan saban magrib hingga usai sholat Isya, belum memberi efek internalisasi dalam diriku. Aku belum memberi manfaat kepada banyak orang. Aku takut dituduh Allah sebagai orang yang sombong karena tidak perduli kepada mereka yang rentan, miskin, dan teraniaya, yang ada disekeliling rumahku.

Aku pun teringat pada bunyi pesan surah al Ma'un, yang selalu dikutip Kiyai Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta, tatkala membengkali santri-santrinya dengan metode pembelajaran (*sorogan/halaqah*) dan model klasikal: "Tuhan mengancam terhadap mereka yang tergolong mendustakan agama, yakni mereka yang menghardik anak yatim, tidak menolong fakir miskin, riya' dalam sholatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna".

Hari berganti hari, sepanjang malam, ada pergolakan batin dalam diriku. Aku pun bergumam protes, untuk apa kita sholat, puasa, naik haji, umroh berkali-kali, kalau ilmu kita tidak bermanfaat pada banyak orang?. "Itu namnya merugi".. Demikian juga, untuk apa kita sekolah dengan titel yang berjubel, tapi tidak mampu memberi jalan keluar bagi masyarakat. "Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa?", itulah kalimat pemberontakaku di 3/4 malam yang hening jelang subuh di suatu hari.

Tidak terasa, selang beberapa tahun berikutnya, terdengar kabar, daeng Ba'du telah diajak oleh Tuhannya untuk bertemu dalam alam kesejatian. Daeng Ba'du tampaknya memaksa takdir dan kehendak Tuhan,.akhirnya, aku pun membuat goresan kalimat untuknya dengan tetesan tangisan pilu, yang rasanya sulit kuterima dalam fakta. Inilah goresanku:

Sahabatku Pergi ...!

Lukamu masih menganga dalam nuraniku. Sembilu itu tak lekang di telan masa. Guratan wajahmu masih tertusuk tajam dalam memoriku. Bayangan keceriaanmu masih menjuntai di pelupuk bulu mataku. Sorotan matamu, meniscayakan ingatanku kugiring untuk selalu berontak. Berontak atas nasibmu. Berontak atas ketidakadilan yang kerap menjadi sahabat karibmu.

Pagi itu, kau begitu ceria, bercanda, bergurau dalam kerasnya roda waktu. Seolah rasa damai lekat dihatimu. Seolah kebahagiaan adalah milikmu. Seolah beban hidupmu tidak menggelayut sedikitpun ada noktah. Tapi, aku yakin, rautan wajahmu itu tidak seindah keceriaanmu. Ada beban yang kau tutup rapat-rapat. Ada bau anyir yang kau endapkan dalam beban hidupmu. Kumembatin, kau hidup dalam dua dunia.

Petang itu, terhirup kabar dari sekawanan burung elang yang mengepakkan sayapnya di atas nyiur melambai. Sementara, di pelataran jalan tampak sepi. Canda dan gurau tertelan dalam keheningan. Para pengayuh becak yang kerap ceria menghampiri depan halaman rumahku, menghilang bagai di telan bumi. Tiba-tiba tersiar kabar dari seberang mushola reot, berita yang

tak mengenakkan hati. Ibarat di sambar petir di siang bolong, aku tidak sanggup menerima kabar itu.

Sahabatku, daeng Ba'du, pergi untuk selamanya ke dunia lain, tanpa pamit menggenggam dua dunia yang kontras.

Hidupnya yang keras dalam kayuh penarik becak, terlilit beban. Beban struktural. Beban ketidakadilan. Beban utang, beban lintah darat, beban kemiskinan.

Daeng Ba'du, menjuntai di atas langit-langit rumah manzil yang sepi, yang hanya diintip seekor kelelawar.

Ia "memaksa" Tuhan untuk segera meminangnya. Ia "memaksa" sang takdir segera mendekap dirinya. Ia hirau dalam hitungan sunatullah.

Sahabatku, kau pergi dalam kesunyianmu. Pergi di tengah ketidakperdulian kita. Pergi tatkala "keadilan sosial" menjadi barang dagangan. Pergi ketika rajutan cinta kemanusiaan hanyalah retorika hidup. Sahabatku, selamat jalan...selamat jalan... Tersenyum indahlah di hadapan kekasih-Mu.

Surakarta, 19 Mei 2015

Bagian Tiga

POLITIK MUHAMMADIYAH

TANTANGAN MUHAMMADIYAH DI TENGAH MASYARAKAT TERBUKA

Pradana Boy ZTF

Tulisan ini bermaksud memetakan tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah di sebuah era ketika keterbukaan menjadi ciri tak terpisahkan dari masyarakat. Sebuah keterbukaan meniscayakan adanya kontestasi, baik yang berlangsung dalam hukum kompetisi yang normal, maupun dalam situasi persaingan yang tidak alamiah. Kenyataan ini memberikan tantangan dan sekaligus peluang bagi Muhammadiyah. Dengan sendirinya, dalam konteks apapun kompetisi dan kontestasi itu terjadi, Muhammadiyah perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian agar misi yang diemban untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya tercapai. Namun, dalam upaya adaptasi itu, menengok dan menimbang doktrin-doktrin dasar Muhammadiyah menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar.

Dengan alasan keterbatasan ruang, tulisan ini akan mengangkat tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah berkaitan dengan perubahan rezim dan orientasi politik. Sangat bisa dimaklumi, perubahan politik selalu membawa perubahan pada bidang-bidang kehidupan yang lain, tak terkecuali bidang ideologi dan pemikiran. Maka, bagian pertama tulisan ini akan menganalisis dampak perubahan rezim dan orientasi politik pada pemikiran dan doktrin keagamaan Muhammadiyah, yang saya gambarkan sebagai mengalami *mihnah.* Bagian berikutnya mengkaji tentang dinamika dan pola hubungan Muhammadiyah dan negara yang selalu menjadi pertanyaan menarik di hampir setiap fase kesejarahan Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam "Mihnah"

Sejarah pemikiran adalah sejarah pergulatan doktrin dan zaman. Setiap zaman selalu melahirkan pemikiran yang senantiasa sinambung dengan kebutuhan masanya. Dengan sendirinya, zaman yang berbeda memerlukan pemikiran yang tak sama. Prinsip ini bisa diterapkan untuk memahami perkembangan, evolusi dan bahkan revolusi pemikiran dalam satu individu atau kelompok sosial. Dengan mengambil kasus dari khazanah intelektualisme Islam klasik, bisa ditampilkan kasus Imam Syafi'i dan al-Ghazali sebagai contoh betapa individu selalu mengalami perubahan orientasi pemikiran ketika berhadapan dengan latar sosial yang berbeda-beda. Imam Syafi'i populer dengan perubahan fatwa-fatwa fiqihnya dari *Qawl al-Qadim* menjadi *Qawl al-Jadid*, sementara al-Ghazali ilmuwan Muslim serba bisa itu, pada awalnya dikenal sebagai filsuf, tetapi pada fase akhir karier intelektualnya lebih sering ditampilkan sebagai representasi kaum sufi yang mungkin cenderung memusuhi filsafat.

Dinamika pemikiran selalu dipengaruhi konteks dan struktur sosial. Struktur sosial yang membentuk pemikiran itu bisa juga mencakup situasi politik. Dalam sejarah Islam, sebutlah *mihnah* sebagai contoh. *Mihnah* tidak lain adalah sebuah peristiwa politik yang berdampak besar pada penentuan corak pemikiran dalam Islam. Dengan kata lain, *mihnah* adalah suatu bentuk pemihakan rezim politik terhadap suatu kelompok atau aliran pemikiran tertentu yang kemudian meniscayakan keberpihakan itu kepada khalayak. Karena sebuah pemikiran tertentu telah menjadi niscaya, maka perbedaan tidak lagi memiliki ruang. Akibatnya, silih bergantinya pemikiran kadang ditentukan pula oleh kuasa. Seperti dicatat oleh George Abraham Makdisi (2000) dalam *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West*, empat khalifah Bani Abbasiyah yakni al-Ma'mun, al-Mu'tashim, al-Watsiq, dan al-Mutawakkil memberlakukan ajaran Kaum Tradisionalis sebagai faham resmi negara dan meminggirkan –untuk tidak mengatakan memusuhi—Kelompok Rasionalis yang diwakili oleh Mu'tazilah. Atau dengan kata lain, kemenangan Syafi'i atas Kaum Mutakallimun atau teolog. Akibatnya sangat jelas. Mereka yang tidak sefaham dengan ajaran Tradisionalisme Syafi'i beresiko menghadapi peminggiran secara sosial politik dan bahkan siksaan.

Pada dasarnya, fenomena seperti ini tidak hanya terjadi dalam sejarah. Ia selalu menjadi fenomena abadi sepanjang zaman. Fenomena pemikiran Islam di Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa gejala *mihnah* itu makin hari makin menguat. Perbedaannya adalah bahwa *mihnah*

kontemporer mewujudkan diri dalam bentuk penghakiman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam di luar kekuatan politik negara. Fenomena Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Tarbiyah dan Salafi merupakan bukti nyata lahirnya *mihnah* kontemporer dengan aktor-aktor kelompok-kelompok masyarakat sipil dari kalangan Islam. Di Indonesia, secara formal negara memang tidak terlibat secara langsung dalam proses *mihnah* ini. Tetapi lembaga keagamaan yang berafiliasi kepada negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya juga memiliki peran sebagai aktor *mihnah*. Tetapi posisi MUI sedikit ambigu. Di satu sisi, MUI adalah suara negara. Tetapi di sisi lain, MUI merupakan kumpulan kelompok-kelompok masyarakat sipil Islam yang beroperasi di luar negara. Tetapi di luar soal ini, MUI juga merupakan salah satu aktor *mihnah* dalam latar Indonesia kontemporer.

Berdasarkan fakta-fakta sejarah, secara garis besar bisa disimpulkan bahwa *mihnah* dengan sendirinya menafikan perbedaan dan ruang untuk berdialog. Di dalamnya juga terkandung tendensi untuk memaksakan satu pemikiran sebagai kebenaran dan menafikan pemikiran lain yang dinilai sebagai salah. Dalam latar Indonesia kontemporer, ruang untuk berbeda menjadi semakin sempit karena aktor-aktor *mihnah* kontemporer itu secara agresif memaksakan tafsir tunggal atas kebenaran dengan intensitas dan level mereka masing-masing. Sejumlah bukti yang bisa ditampilkan misalnya adalah pengharaman suatu model pemikiran tertentu oleh sejumlah kelompok Islam yang kemudian berimplikasi pada penghakiman oleh publik terhadap para penganut sejumlah model pemikiran tertentu atau tafsir-tafsir yang berbeda dengan yang diyakini oleh kelompok-kelompok Islam aktor *mihnah* kontemporer tersebut.

Maka menarik untuk sedikit ditelisik sejauh mana lahirnya kecenderungan *mihnah* kontemporer dalam latar Islam Indonesia ini memberikan pengaruh terhadap dinamika pemikiran Islam di Muhammadiyah. Harus dikatakan bahwa tendensi seperti ini sedikit banyak memberikan pengaruh pada dinamika pemikiran dalam Muhammadiyah. Selama ini analisa tentang tesis kemandegan pemikiran Muhammadiyah menaruh fokus perhatian pada faktor-faktor internal. Maka tulisan ini berpendapat, di samping meyakini bahwa faktor internal memiliki pengaruh signifikan, faktor lingkungan makro sosial dan politik di Indonesia memberikan kontribusi yang tidak kecil.

Perangkap *mihnah* kontemporer ini tanpa disadari mempengaruhi perubahan orientasi pemikiran dalam Muhammadiyah. Sejumlah analisa

tentang Muhammadiyah memang sering menunjuk Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan puritan yang sampai batas tertentu terkesan "kaku" dalam menghadapi konteks-konteks perubahan sosial tertentu. Tetapi sejarah awal Muhammadiyah menunjukkan bahwa gerakan ini sesungguhnya memiliki sifat toleran yang sangat tinggi. Toleran terhadap perbedaan identitas keagamaan, toleran terhadap penafsiran yang berbeda, serta terbuka terhadap intervensi akal dalam penafsiran doktrin-doktrin agama. Misalnya, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan terlibat dialog aktif dengan Uskup Soegijapranata dalam membincang soal-soal keagamaan dan tentu saja bagaimana agama memiliki peran dalam ruang publik.

Di sisi lain, sebagai gerakan Islam puritan, Muhammadiyah sering digambarkan sebagai gerakan Islam yang memusuhi budaya lokal. Sesungguhnya, tidak serta-merta semua bentuk budaya lokal menjadi "musuh" Muhammadiyah. Karena hanya budaya dengan dimensi sinkretik yang cenderung menyimpang dari ajaran Islam murni yang menjadi perhatian Muhammadiyah. Saya berkeyakinan bahwa di luar citra yang senantiasa menempatkan Muhammadiyah sebagai "musuh" kebudayaan, Muhammadiyah sebenarnya terlibat dalam usaha-usaha serius untuk melakukan pribumisasi Islam melalui metodenya sendiri. Muhammadiyah memiliki tafsir sendiri terhadap "kebudayaan", sehingga aktivitas dakwah Muhammadiyah dalam berbagai domain sosial, sebenarnya sama sekali tidak mengabaikan aspek kebudayaan ini. Hanya saja, seperti sering disinyalir oleh almarhum Prof Kuntowijoyo, Muhammadiyah merupakan pengusung kebudayaan baru yang pelan-pelan menggerus kebudayaan lama, sehingga ia kelihatan sebagai anti-budaya. Penting dicatat, budaya tidak identik dengan seni, karena seni hanya merupakan salah satu elemen penyusun kebudayaan. Semua konteks ini merupakan faktor penting dalam melahirkan dinamika pemikiran Islam yang cair di Muhammadiyah pada beberapa dekade silam.

Keterbukaan Muhammadiyah ini sebenarnya telah membawa Muhammadiyah pada dilema. Di satu sisi, hal itu merupakan keunggulan yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok Islam lain yang cenderung tertutup. Tetapi di sisi lain, keterbukaan ini telah menjadikan Muhammadiyah sedikit longgar dalam menyeleksi ideologi-ideologi lain yang secara perlahan ikut mewarnai corak pemikiran Muhammadiyah kontemporer. Saya tidak hendak membuat generalisasi. Tetapi cukup banyak kasus di mana Muhammadiyah menjadi pilihan bagi kelompok-kelompok Islam ideologis sebagai media infiltrasi mereka. Dalam sejumlah kasus yang saya temui, terdapat sejumlah (mantan) aktivis

Hizbut Tahrir, Salafi atau Tarbiyah yang kemudian beralih menjadi anggota Muhammadiyah. Fenomena ini yang oleh Miftahul Huda diistilahkan dengan "Ikhwanul Muhammadiyah".

Akibatnya, mungkin karena prinsip Muhammadiyah yang terbuka tadi, infiltran-infiltran ini membawa *fikrah* non-Muhammadiyah dan kemudian memaksakannya ke dalam stuktur pemikiran Muhammadiyah, seolah-olah itu merupakan pemikiran dasar Muhammadiyah. Misalnya, sungguh terasa aneh, bahwa di lingkaran-lingkaran tertentu, sejumlah aktivis Muhammadiyah mengkampanyekan pentingnya Muhammadiyah untuk mendukung gagasan lahirnya khilafah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia. Ini terasa aneh dan ahistoris, karena sebagai sebuah gerakan Islam modernis, Muhammadiyah tidak hanya turut serta dalam mendorong Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan, tetapi juga turut mendukung prinsip kebhinekaan Indonesia dengan bentuk negara seperti yang sekarang ini. Prof Din Syamsuddin bahkan pernah menyebutkan bahwa bagi Muhammadiyah pancasila sebagai dasar negara adalah final.

Anehnya, karena sistem *antibody* –meminjam istilah Prof Amin Abdullah—dalam Muhammadiyah yang lemah terhadap segala sesuatu yang secara fisik berbungkus Islam, infiltran-inflintran ideologis itu justru lebih mudah mendapatkan tempat dalam kancah pemikiran Muhammadiyah ketimbang kader-kader Muhammadiyah yang lahir dari rahim pengkaderan dan pendidikan Muhammadiyah sendiri. Alasan penolakan itu antara lain adalah karena kader-kader muda Muhammadiyah ini mengalami persentuhan dengan gagasan-gagasan kontemporer melalui mobilitas intelektual yang mereka alami di berbagai belahan dunia, yang tidak semuanya adalah dunia Islam. Jika ditelisik, sesungguhnya suara-suara penolakan terhadap kader-kader muda yang berusaha mempertahankan kesinambungan modernitas Muhammadiyah itu lebih banyak lahir dari para infiltran daripada dari kalangan Muhammadiyah sendiri. Ini setidaknya menunjukkan keberhasilan para infiltran itu mempengaruhi pola pikir dasar Muhammadiyah, yang pada awalnya bersifat kosmopolit.

Inilah yang di antara sebab-sebab lainnya, menjadikan Muhammadiyah resisten terhadap gagasan-gagasan baru dan kemudian terperangkap dalam *mihnah* atas pemikiran baru tersebut. Sehingga, Muhammadiyah yang pada awalnya toleran, terbuka dan lentur dalam menyikapi ide-ide baru dan perbedaan, secara perlahan tapi pasti tergiring ke arah pola pikir *ala mihnah* ini. Maka, jika dikontekstualisasikan dalam kondisi kontemporer Muhammadiyah, *mihnah* seperti yang dipraktikkan oleh sejumlah khalifah

Bani Abbasiyah ini menjelma dalam wujudnya yang tak sama namun memiliki efek yang kurang lebih sepadan. Seperti yang disinggung di atas, *mihnah* dalam konteks masa kini bukan terwujud dalam bentuk pemihakan sebuah rezim penguasa atas wacana tertentu, tetapi bahkan telah bergerak lebih jauh dalam bentuk wacana publik yang lalu menjelma seolah-olah sebagai penentu kebenaran. Maka pemegang tampuk *mihnah* dalam konteks Muhammadiyah, bukan semata-mata berada di tangan para pemegang otoritas dalam Muhammadiyah, tetapi juga publik Muhammadiyah. Akibatnya, penghakiman terhadap pemikiran-pemikiran tertentu begitu sering kita dengar terjadi di Muhammadiyah. Karena seringnya terjadi penghakiman-penghakiman seperti ini, kalangan pemikir Muhammadiyah, terutama kelompok muda yang masih mencari eksistensi, seringkali mengalami keengganan untuk berolah fikir dalam naungan Muhammadiyah. Pada gilirannya, hambatan proses dinamisasi pemikiran di Muhammadiyah semakin terasa, seperti yang sampai hari ini kita saksikan, meskipun sinyalemen akan kemandegan itu sudah didengungkan lebih dari dua dasawarsa silam.

Sebelum terlalu jauh, maka sifat dasar Muhammadiyah yang terbuka dan toleran terhadap ide-ide baru itu harus dikembalikan, dan pada saat yang sama mengeliminasi setiap potensi *mihnah* terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda. Karena jika sikap-sikap *ala mihnah* ini berkembang, maka pintu gerbang menuju fanatisme menjadi semakin terbuka. Sementara fanatisme adalah sebuah sikap yang bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip modernitas yang sudah sangat lama menjadi ciri tak terpisahkan dari citra dan jatidiri Muhammadiyah.

Muhammadiyah dan Tantangan Politik

Dalam sebuah seminar terbatas, di luar sesi, seorang peserta berdiskusi dengan saya. Ada yang menarik dari diskusi kami berdua. Dia mengeluhkan kepada saya tentang tidak adanya wakil Muhammadiyah di Kabinet Indonesia Bersatu II. Atau tepatnya lagi, dia mengeluhkan tentang lepasnya pos menteri pendidikan nasional dari Muhammadiyah. Menurut konvensi politik yang selama ini berlaku, menteri pendidikan nasional selalu menjadi jatah Muhammadiyah; karena asumsi atau pertimbangan bahwa Muhammadiyah sangat berpengalaman dalam mengelola pendidikan. Sementara Departemen Agama, selalu menjadi jatah Nahdlatul Ulama'. Entah benar atau tidak, tetapi keyakinan itu dipegang sangat kuat oleh sejumlah kalangan, baik di Muhammadiyah maupun NU.

Peserta seminar itu lalu menanyakan pandangan saya tentang masalah ini, khususnya tentang ketidakterwakilan Muhammadiyah dalam KIB II. Atas pertanyaan ini, saya kemudian menyatakan bahwa tidak perlu merisaukan masalah ini, karena memang sudah seharusnya begitu. Bahwa sebagai salah satu pilar *civil society* di Indonesia, Muhammadiyah sudah seharusnya tidak terlibat dalam proses-proses kekuasaan seperti ini. Apa yang disebut dengan *civil society* atau masyarakat sipil dalam kajian ilmu politik memang masih sering diperdebatkan. Tetapi satu hal yang cukup pasti adalah bahwa *civil society* memutlakkan adanya sebuah ruang kosong di luar negara, pasar dan keluarga. Jika demikian, maka menjaga jarak dengan negara merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh gerakan-gerakan *civil society*.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa pandangan seperti ini memang mendominasi cara pandang sebagian besar warga Muhammadiyah. Ada semacam ketakutan bahwa jika Muhammadiyah tidak memiliki "bagian" dalam negara dan pemerintahan, maka kepentingan-kepentingan Muhammadiyah tidak akan terakomodasi. Maka terhadap pandangan yang semacam ini, kita harus segera melakukan penyadaran kepada kalangan-kalangan di Muhammadiyah, bahwa ketika Muhammadiyah tidak memiliki peran dalam proses-proses politik penyelenggaraan negara, sesungguhnya itulah jalan yang semestinya diambil oleh Muhammadiyah.

Adalah benar bahwa sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam turut memajukan bangsa ini. Tetapi tidak berarti bahwa itu semua harus dilakukan dalam kerangka kekuasaan. Jika melihat sejarah panjang kekuasaan bangsa ini, sesungguhnya kaum modernis seperti Muhammadiyah selalu berada di dalam lingkaran kekuasaan. Lihatlah ketika pada masa Orde Lama, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi, dan hampir dipastikan bahwa Masyumi menjadi kendaraan politik resmi Muhammadiyah, meskipun itu tidak termaktub dalam keputusan-keputusan resminya. Demikian pula, ketika Orde Baru menggantikan Orde Lama. Meskipun pada awal-awal masa kekuasaan Orde Baru, Islam cenderung dimarginalisasikan dalam konteks kekuasaan, tetapi pada masa-masa berikutnya, ketika Orde Baru mulai mengalami kedekatan dengan Islam, kelompok Islam modernis memiliki peran cukup besar dalam lingkaran kekuasaan negara.

Pada masa Orde Baru, sebuah doktrin politik yang secara kuat dipegang oleh Muhammadiyah adalah "Muhammadiyah tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana." Doktrin ini telah menjadikan Muhammadiyah bebas

leluasa mengartikulasikan sikap politiknya, atau lebih tepatnya Muhammadiyah bisa memainkan sejumlah peran –melalui anggotanya—di berbagai partai politik. Pada saat Orde Baru berkuasa, tentu saja tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Konsekwensinya adalah, kader-kader Muhammadiyah yang menyebar di berbagai partai ini, utamanya Golkar, menjadi pintu gerbang bagi proses masuknya Muhammadiyah ke dalam pusaran kekuasaan. Terlebih ketika Soeharto merestui pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), di bawah kendali B.J. Habibie, maka proses akomodasi negara terhadap kalangan Islam modernis menjadi lebih nyata lagi. Pada kerangka inilah kita bisa memahami penolakan Gus Dur terhadap ICMI. Meskipun penolakan itu tidak semata-mata karena persoalan persaingan kaum modernis dan tradisionalis; tetapi itu bisa menjadi indikasi bagaimana peran yang dimainkan oleh kalangan modernis pada tingkatan negara.

Sebaliknya, kelompok tradisionalis atau khususnya NU, cenderung dimarginalisasi oleh penguasa. Sepanjang sejarah Orde Baru, marginalisasi NU juga nampak dari fakta bagaimana NU pernah mengalami intervensi oleh negara dalam Muktamarnya ke-29 di Cipasung terdapat upaya-upaya untuk menyingkirkan Gus Dur yang waktu itu sangat kritis terhadap pemerintahan. Karena itu, bisa dimaklumi ketika saat ini NU merasa berada di dalam kekuasaan, berbalikan dengan Muhammadiyah. Dalam sebuah kesempatan berdialog dengan wartawan seusai berceramah di Universitas Islam Malang (Unisma), Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan bahwa saat ini banyak sekali kader NU yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan itu patut disyukuri. Pada saat yang bersamaan, Mahfud juga mengingatkan agar hal ini dijadikan kesempatan untuk tetap berlaku Islami dalam mengemban amanah kekuasaan.

Dalam konteks semacam inilah, maka sebenarnya ada beberapa argumentasi yang perlu dikemukan di sini berkaitan dengan posisi Muhammadiyah dalam konteks kekuasaan negara belakangan ini.

Pertama, pemaparan situasi singkat di atas menyatakan bagaimana Muhammadiyah hampir selalu berada di lingkaran kekuasaan. Pada satu konteks, kenyataan ini memang memberikan keuntungan bagi Muhammadiyah. Tetapi pada sisi yang lain, hal ini akan menjadikan Muhammadiyah kurang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Sikap tidak kritis itu bisa lahir, misalnya, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengamankan setiap agenda negara yang diwakili oleh pejabat-pejabat dari Muhammadiyah. Telah terlampau sering kita mendengar bagaimana

pimpinan-pimpinan Muhammadiyah menyerukan warga Muhammadiyah untuk mendukung sebuah kebijakan, karena menteri yang menelurkan kebijakan itu adalah dari Muhammadiyah.

Ini tentu saja menjadikan Muhammadiyah tidak cukup kritis terhadap negara. Memang ada argumentasi yang selama ini dikembangkan bahwa dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh kader-kader Muhammadiyah layak didukung karena mengedepankan kepentingan publik dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan primordial bagi Muhammadiyah. Betapapun pendapat semacam ini bisa dibenarkan, tetapi menampilkan alasan-alasan seperti ini untuk memberikan dukungan tanpa *reserve* kepada kebijakan-kebijakan itu adalah sebuah tindakan yang apologetik sekaligus tidak kritis.

Kedua, posisi yang terlalu dekat dengan negara akan menjadikan Muhammadiyah terlihat seperti tidak independen dalam mengelola sejumlah amal usahanya. Padahal, kemampuan independensi Muhammadiyah lebih dari sekadar memadai dalam menjalankan sejumlah lembaga yang ia miliki. Ketika Prof. Malik Fadjar menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, misalnya, terdapat keluhan-keluhan dari sejumlah pengelolan perguruan tinggi Muhammadiyah. Keluhan itu tidak berkaitan dengan "keuntungan primordial" yang diterima Muhammadiyah, tetapi lebih kepada adanya prasangka yang dikembangkan oleh orang luar terhadap Muhammadiyah. Prasangka itu adalah, misalnya, bahwa Muhammadiyah bisa memiliki kampus-kampus besar dan maju karena menteri-menteri pendidikan berasal dari Muhammadiyah. Tentu saja kenyataan ini menjadikan sejumlah pimpinan PTM merasa prihatin, karena kerja keras Muhammadiyah dalam mengelola pendidikan atau sejumlah lembaga sosial sama sekali tidak dilihat dan dianggap sebagai "belas kasihan" negara.

Jika situasi ini berlanjut, maka kerja-kerja indenpenden Muhammadiyah akan cenderung tertutupi oleh kesan-kesan seperti itu. Padahal apa yang sesungguhnya terjadi justru sebaliknya. Bahwa Muhammadiyah sesungguhnya memainkan peran penting dalam membantu negara menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang tidak seluruhnya bisa dikerjakan oleh negara. Pendidikan adalah salah satu contoh yang terlampau gamblang bagaimana Muhammadiyah justru memainkan peran penting dalam memperkuat negara.

Kedua, dengan berada di luar kekuasaan, kita seharusnya menyadari bahwa Muhammadiyah bukanlah partai politik. Bagi saya, adalah sebuah paradoks ketika Muhammadiyah selalu berusaha menjaga gerakan apolitis, tetapi pada saat yang sama justru melakukan hal-hal yang sebenarnya

merupakan hakikat kerja partai politik. Kesadaran bahwa Muhammadiyah bukan partai politik seharusnya dikembangkan kembali mengingat telah terlampau banyak warga Muhammadiyah yang terbius dengan logika-logika politik dan semua itu dilakukan atas nama Muhammadiyah. Tentu saja ini tidak menyehatkan bagi Muhammadiyah. Karena logika politik yang merasuk ke dalam kerangka fikir Muhammadiyah tidak hanya berpotensi melemahkan sensitivitas sosial Muhammadiyah, tetapi juga memiliki andil dalam mengoyak kesatuan Muhammadiyah sebagai sebuah satu organisasi yang kohesif.

Di samping itu, kenyataan-kenyataan seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkat untuk tidak tergoda dalam membawa-bawa Muhammadiyah ke ranah politik. Di berbagai tempat kita menyaksikan kenyataan itu secara masif. Jika itu berlangsung terus menerus, maka sebenarnya kita tengah mendegradasi posisi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan. Artinya, jika dibawa ke dalam konteks pola hubungan antara penguasa dengan pemimpin agama, maka khazanah Islam memiliki pola bahwa pemimpin agama tidak seharusnya datang kepada penguasa untuk meminta-minta kekuasaan. Sebaliknya, posisi pemimpin agama adalah sebagai penasehat bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan mereka. Karena itu, jika kesadaran semacam ini harus kembali digaungkan agar Muhammadiyah bisa memainkan peran penyeimbang bagi kekuasaan negara.

Dalam konteks inilah, maka menjadi penting untuk kembali mengangkat doktrin *high politics* atau politik adiluhung Muhammadiyah yang dulu pernah sangat populer dikembangkan oleh M. Amien Rais. Terbukti, pada masanya, doktrin ini mampu menjadi penyeimbang bagi proses-proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Gegap gempita reformasi telah memalingkan warga Muhammadiyah dari doktrin politik ideal ini. Bahkan perkembangan politik yang semakin jauh telah menyeret-nyeret Muhammadiyah ke dalam konteks kekuasaan negara secara langsung; dan secara fisik kenyataan itu telah sedikit banyak menyalahi doktrin politik ideal itu. Sampai hari inipun, kesadaran Muhammadiyah akan pentingnya doktrin politik adiluhung yang selama cukup lama didefinisikan sebagai bermain politik pada wilayah etik dan bukan pada wilayah praksis, seperti merebut kekuasaan, berebut tempat di parlemen, lembaga eksekutif dan seterusnya, cukup lemah. Karena itu, kita mesti melihat tidak terakomodasinya Muhammadiyah dalam kekuasaan negara saat ini sebagai langkah yang cukup tepat bagi Muhammadiyah untuk kembali memposisikan diri sebagai

pemegang politik etis yang akan memberikan *nasihat al-mulk* kepada penguasa, ketimbang tunduk di bawah perintah para penguasa, sehingga tak mampu lagi memainkan peran kontrol etis itu. Sekarang adalah saat yang sangat tepat.

KEADABAN KOMUNIKASI POLITIK MUHAMMADIYAH

Selebritisasi Citra Elit dan Upaya Keluar dari Latahisme

Rusdianto

Tulisan ini bersumber dari pengamatan gaya citranisasi Muhammadiyah dalam pertautan politik dengan realitas dakwahnya. Tak perlu menampik isu kegagalan komunikasi politiknya yang di lakukan selama ini oleh sebagian kaum elit Muhammadiyah. Kenyataan di lingkungan manapun Muhammadiyah selalu menempatkan jangkar gerakan sebagai dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Kalimat dan pesan ini tak pernah terlupakan, bahkan sampai berbusa mengucapkannya yang merupakan bumbu hidangan dalam berbagai pengajian dan ceramah. Namun, di balik itu ada sifat kelatahan *(latahisme)* dari kaum Muhammadiyah itu sendiri dalam menafsirkan gerakan dakwah yang menjadi idamannya untuk menciptakan masyarakat Islam sebenar-benarnya.

Latahisme itu bisa di pandang dalam ruang sebab akibat, lemahnya interpretasi akan eksistensi *social order* dan *integrity knowledge* terhadap persoalan mendasar masyarakat. Sebab lain, belum merangseknya transformasi ide dan progresifitas gagasan dalam hubungan interaktif pada wilayah masyarakat plural, perkotaan dan perdesaan. Tentu *latahisme* tidak ujug-ujug muncul sebagai paradigma bertindak dan mengambil keputusan, tetapi sudah berkembang lama dalam tatanan bangsa ini dan Muhammadiyah terjangkiti virus "wabah hama *latahisme*" yang melemahkan karakter *integrity* dan moralitas pimpinan, elit dan kader Muhammadiyah.

Watak kelatahan ini sudah memuakkan di bangsa kita sekarang yang

berimbas pada sel-sel jaringan *civil social of Islam* seperti Muhammadiyah. Diantara contoh paling mungkin budaya *latahisme* di Muhammadiyah adalah terseoknya kebiasaan spontanitas memberi dukungan dalam pemilu dengan "apel kebulatan tekad dan upacara barisan relawan" untuk mendukung seorang calon pimpinan (Capres) tertentu. Ini terjadi pada tingkat nasional, sementara tingkat lokal Muhammadiyah juga alami kelatahan itu, sebagaimana kita lihat faktanya dalam memberikan respon *effect* politik yang tidak pernah berhasil.

Semenjak demokrasi terpimpin, sebagian tokoh Muhammadiyah, demi untuk *survival,* telah sedikit atau banyak terjebak pada perilaku yang kita soroti ini, yakni watak *latahisme* sedang dibudidaya dan dijamurkan dalam berbagai lingkungan sektor Muhammadiyah. Rupanya pengalaman traumatik pada masa reformasi terpimpin itu telah menyadarkan Muhammadiyah untuk tidak lagi menggulang sikap *latah* pada periode berikutnya.

Sesuai dengan tema buku ini "Muhammadiyah Ahmad Dahlan menemukan kembali otentisitas gerakan Muhammadiyah" sebuah judul yang menarik untuk kita baca, apakah kedepan Muhammadiyah tetap bercermin pada kaca yang terbelah oleh virus watak *latahisme* itu. Tentu sikap yang harus diteguhkan Muhammadiyah yakni tidak lagi menyebur dan menghanyutkan diri dalam kelatahan ini. Muhammadiyah seobjektif mungkin memberi pengaruh sebagai *alarm* (peringatan) yang wajib ditularkan kepada generasi selanjutnya agar bangsa Indonesia segera sadar dari sikap berwatak kelatahan itu. Sebuah saran yang patut dipertimbangkan.

Mayoritas kelompok yang mendorong Muhammadiyah kearah politik sungguh banyak dan tidak sedikit pula menginginkan Muhammadiyah tetap berada pada rel sejarahnya sebagai gerakan dakwah. Tetapi kedua hal ini perlu dipertimbangkan, karena tarikan politik mainstream sedang menguat di internal Muhammadiyah. Begitu juga, perwajahan dakwah Muhammadiyah tetap di pertahankan. Maka instrumentasi pertimbangan itu harus didorong dengan menjadikan lahan politik sebagai arena pertarungan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar.* Sehingga kelatahan yang selama ini terjadi, kedepannya tidak terulang. Muhammadiyah tidak lagi menyebut dirinya bukan organisasi politik dan sekiranya mulai jujur atas realitas yang dihadapi bahwa Muhammadiyah memainkan peran politik dakwah. Karena memang, politik adalah jalan empuk yang harus dimurnikan dari watak kelatahan itu berkedok demokratis tapi membawa virus kerusakan. Muhammadiyah harus tampil sebagai aktor penegur atas simpul-simpul politik dengan peran kebangsaannya yang didasari oleh pembacaan maksimal

atas realitas dihadapannya.

Memang berat menggulangi suatu masa yang tak mungkin di lakukan kembali seperti pada masa awal berdirinya karena Muhammadiyah sedang berpuasa keadilan atas berbagai masalah kebangsaan tapi tak mampu menagih keadilan itu, apalagi mau merealisasikan keadilan. Sangat susah adanya. Ini patut untuk dipikirkan oleh Muhammadiyah.

Mengapa demikian, karena selama ini bermain pada wilayah politik yang dianggap lahan basah itu tanpa didasari oleh citra yang bagus, baik personal maupun kelompok. Kita tengok pilpres 2014 lalu, setengah juta porsen, mulai dari elit, kader dan simpatisan Muhammadiyah terlibat dalam posisi dukung mendukung, tidak hanya elit politiknya tetapi sampai tingkat rantingpun terlibat, walau itu dikemas dalam bentuk konsolidasi senyap para tokohnya. kesenyapan dalam mendukung calon presiden dilakukan lewat facebook, twitter, modal telepon koordinasi dan permainan group *maylist* elit yang mendiskusi Indonesia lalu *mengcreat* pada dukungan untuk suara calon presiden.

Namun, apapun argumentasi Ahmad Syafii Maarif soal *latahisme* yang terjadi di Muhammadiyah dari masa ke masa tetap tak merubah pandangan politik kader–kader persyarikatan. Bahkan, konon orang terdekat Ahmad Syafii Maarif pentolan Maarif Institute yang berasal dari kader dan alumni organisasi otonom Muhammadiyah juga ikut mendirikan partai politik Solidaritas Indonesia (SI) saat ini. Sebaiknya Ahmad Syafii Maarif juga harus rasional dalam menilai keberpihakan Muhammadiyah dalam politik. Kontestasinya bukan melarang berpolitik dan menganggap politik itu *biang* kerusakan moralitas kaum Muhammadiyah tetapi alangkah arif dan bijak apabila kader-kader Muhammadiyah berani dan jujur dalam memerankan politik praktis.

Terbukti, pilpres 2014 lalu menggerus Muhammadiyah pada *latahisme* kelas *akut* karena sebagian elit Muhammadiyah tidak berada pada porsi independen, namun memihak secara disorientasi dan serampangan. Hasilnya bisa dilihat pada pilpres 2014 tak lebih dari dagelan elit Muhammadiyah dalam konteks politik dan mengorbankan banyak pihak termasuk simpatisan Muhammadiyah. Alih-alih setelah pilpres berharap jadi menteri, kepala lembaga, dan lain sebagainya. Tetapi yang ada hanya mengobati batin yang dikandung rusak oleh tindakan politik dan minus perhitungan.

Ahmad Syafii Maarif dan para elit Muhammadiyah mengalami kegalauan melihat potensi kemunculan kelompok politik ekstrem di Muhammadiyah. Kelompok politik ini kelihatan biasa saja namun sikap dan tindakannya sudah

diluar batas normal ideologi Muhammadiyah. Kembalikan Muhammadiyah pada arus keberpihakan yang benar. Ahmad Syafii Maarif (2000:85) sendiri berharap bahwa kearifan dan kebijakan yang harus dibudayakan untuk mengikis habis sikap *latahisme* dari kehidupan bangsa kita. Muhammadiyah harus jadi *avand garde* dalam mengembangkan akal sehat dalam proses pembangunan politik bangsa ini dan sekaligus memberikan contoh untuk tidak mengaitkan diri dengan "wabah kelatahan".

Keadaban *Shaffan* Perspektif Komunikasi Politik Muhammadiyah

Menelusuri akar genealogi komunikasi politik Muhammadiyah tidaklah gampang, Ahmad Dahlan sendiri secara struktural telah memberikan pondasi konsep-konsep komunikasi, baik itu komunikasi organisasi, massa, politik, diplomasi, negosiasi dan budaya. Faktanya Ahmad Dahlan di paruh abad ke-20 telah melahirkan banyak karya monumentalnya yang dicerminkan melalui sikap dan tindakan. Papen *(kanjeng)* Dahlan direntang usianya telah berbuat banyak sebagai landasan fikir ilmu komunikasi di Indonesia.

Papen Dahlan sebagai aktivis Islam tentu merepresentasikan komponen masyarakat Islam dalam memunculkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, sebagaimana dahulu penyakit sosial budaya masyarakat yang menjangkiti kala itu, seperti tahayul, bid'ah dan khurafat. Bahkan faktor kemiskinan, kemungkaran dan degradasi moral umat Islam, Ahmad Dahlan termasuk sosok manusia yang sangat peduli. Kepedulian papen Dahlan itulah terinspirasi mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah yang bertujuan mengorganisasikan, komunikasi dan konsolidasi masyarakat untuk diarahkan pada kebaikan dan pencegahan kemungkaran.

Pendirian organisasi Muhammadiyah merupakan termasuk cikal bakal perkembangan budaya organisasi dan politik seiring dinamika bangsa dan negara. Papen Dahlan meletakkan dasar pendirian Muhammadiyah pada al qur'an surat al Imron ayat 104 berbunyi *"hendaklah ada di antara segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran"*. Ayat tersebut termasuk dalam rumpun ilmu komunikasi yang mengandung gerakan, sikap, keputusan, tindakan dan peran kepemimpinan.

Apalagi perwajahan Muhammadiyah telah *tertransfering* pada arus kultural untuk mengatur struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Harus diakui oleh siapapun, Ahmad Dahlan sebagai salah satu tokoh pelaku (aktor) komunikasi karena telah memberikan pondasi kuat terhadap perkembangan paradigma komunikasi di Indonesia, misalnya komunikasi

politik di mana papen Dahlan juga bersentuhan dengan gerakan politik partisipan. Sementara perspektif komunikasi massa Papen Dahlan mendirikan media Suara Muhammadiyah. Kemudian, ditinjau dari aspek komunikasi organisasi Mbah Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Lebih luas lagi, Papen Dahlan bermain biola menandakan unsur komunikasi budaya (sekarang—gerakan kultural Muhammadiyah).

Sungguh papen Dahlan kaya ilmu dan gagasan bertahta moralitas kuat tak layak dibandingkan dengan para intelektual zaman sekarang ini. Ahmad Dahlan telah bekerja, memeras gagasannya sehingga bisa melahirkan paradigma komunikasi dengan unsur-unsur interaksi yang berbeda, seperti upaya pengorganisasian manusia melalui pengajian untuk diceramahi, mengaji, tadabbur, dan lain sebagainya.

Ide dan gagasan besar Ahmad Dahlan bisa diterjemahkan dalam berbagai aspek bidang keilmuan dan penelitian-penelitian. Karena perannya telah berkontribusi terhadap bangunan perubahan yang mengarah pada penataan struktur kehidupan masyarakat. Papen Dahlan sangat berjasa pada abad 20 terhadap ilmu komunikasi sebagai kajian akademik diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Karena Ahmad Dahlan telah meletakkan pondasi pertama terhadap kajian komunikasi di Indonesia, seperti komunikasi media, politik, organisasi dan budaya.

Tentu sebagai pendiri Muhammadiyah, jelas Ahmad Dahlan menempatkan pada arus keadaban dan penciptaan moralitas pada struktur masyarakat. Konteks sekarang mungkin realitasnya berbeda, namun paradigma Ahmad Dahlan dari tahun 1912 hingga era globalisasi tidak jauh meninggalkan "*basic knowledge and social order*" sebagai pemantak *(jangkar) vision* dan *mission* dalam memperbaiki kehidupan sosial kemanusiaan.

Dalam beberapa faktor, perilaku komunikasi Ahmad Dahlan mempengaruhi realitas politik Muhammadiyah sekarang ini, baik secara ideologis, kelompok maupun individual. Hal itu berdasarkan kekuatan kesadaran yang tergerak secara *shaffan* (bersama), sebagaimana tertuang dalam *mission* yang disandarkan pada pola pembaharuan dan ijtihadiyah. Pola kesadaran tersebut yakni *pertama, kesadaran tauhid* memberikan solusi dari segala bentuk penindasan sistem, struktural kekuasaan, politik penjajahan hegemonik dan negosiasi diplomasi maupun komunikasi. Wilayah kesadaran tauhid ini berada pada nilai ketuhanan meliputi akidah (etika), ibadah (spritualitas) dan akhlak (moralitas) sebagai ilmu dasar paling pokok dalam mengambil sikap teladan keadaban antara sesama dalam kehidupan sehari-hari yang dijalankan secara istiqamah *(consistent).* Sebagaimana

QS 33:21 mengatakan *sesungguhnya kamu dapati pada diri Rasulullah itu teladan yang terpuji bagi mereka, yang menaruh harapan kepada Allah, dan yakin akan hari akhirat, dan senantiasa terkenang akan Allah.*

Kedua; kesadaran iqranisasi, dalam Qur'an secara harfiah berarti bacaan dan membaca. Iqranisasi merupakan proses bacaan berbagai media dan kebudayaan seperti kitab, buku, komik, majalah, media cetak maupun *online. Iqranisasi* juga dilakukan manusia sejak mengenal baca tulis, penelitian, pengamatan, dan publikasi-publikasi. Dalam sejarah telah diakui bahwa Al Qur'an tulisan pertama yang ada sepanjang masa kehidupan manusia sejak ratusan juta tahun lalu. Tentu atas dasar Iqranisasi Ahmad Dahlan meluapkan emosional *question*-nya pada arus dakwah dan pendirian organisasi yang di topang oleh media dakwah Suara Muhammadiyah.

Ketiga; kesadaran majelis adalah kesadaran bersama untuk sebuah entitas kemajuan, sehingga harapan kolektif menjadi bagian perubahan yang diinginkan melalui majelis diskusi, pengajian, *ta'lim* dan *tadabbur.* Kesadaran majelis dalam Muhammadiyah merupakan tempat pertemuan antara dua pihak untuk wahana dialog dalam mencari keadilan dan kebenaran. *Keempat; kesadaran harakah* bahwa segala aktivitas pengorganisiran yang bersifat politik membutuhkan arena dan lingkungan komunikasi untuk memperbaiki masyarakat dan pembentukan struktur sosial melalui maksimalisasi penyadaran dari problem terkecil sampai besar.

Faktor kesadaran diatas, sebagai bentuk pola komunikasi politik Muhammadiyah yang terlegitimasi secara teoritis, historis dan humanis yang mewarnai proses politik. Ahmad Dahlan sendiri meletakkan fungsi komunikasi politik sebagai pilar nilai, modal sosial dan keadaban dalam menyusun kekuatan politik *(power politics)* Muhammadiyah agar tampil secara elegan dan mencerminkan perilaku *morality* dan *integrity (citra politik)* yang dianut secara bersama *(shaffan)* dalam Muhammadiyah. Apalagi, system demokrasi membuka kran peran politik seluas-luasnya sehingga bisa tampil dengan penuh rasa percaya diri. Penampilan *(style)* komunikasi politik Muhammadiyah dapat pengaruhi lingkungan dan simpul-simpul kebangsaan, seperti lembaga politik negara dan divisi-divisi negara.

Peran komunikasi politik Muhammadiyah lebih pada prinsip *allocative* (pengalokasian) dalam berbagai kelembagaan, seperti partai politik, legislator, institusi (lembaga) negara dan pemerintahan. Pada prinsipnya, pelaku *(aktor)* komunikan yang dimiliki Muhammadiyah harus menganut ideologi dakwah, citra *(image)* dan marketing *(piarisasi)* agar mencapai taraf nilai dan modal sosial sebagaimana pemikiran politik Ahmad Dahlan membangun

Muhammadiyah.

Selain moralitas, nilai etik dan citra politik, yang sudah tentu dan pasti diperhatikan adalah personalisasi menjadi pemimpin politik untuk mengambil peran dalam mempengaruhi simpul-simpul kebangsaan negeri ini. Tanpa kurangi elan vital Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Memang sangat dibutuhkan paradigma politik yang kuat untuk membawa Muhammadiyah keluar dari jeratan *archimedes* sebagai keutamaan kepentingan politik, bangsa dan negara. Karena selama ini arus politik Muhammadiyah selalu bertekad pada pemimpin yang bukan dari kalangan Muhammadiyah, itupun setelah ada proses dukung mendukung, malah Muhammadiyah dibuang dan tidak diikutkan sama sekali dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan kesedihan kita bersama.

Dari sisi lain, apabila diamati dari perbedaan model kepemimpinan politik pada elit dan kader Muhammadiyah yang bersifat formal di atas landasan konstitusi organisasi dan ideologi Islam *(amar ma'ruf nahi mungkar)* secara terbuka. Tentu berdampak pada *performance* pemimpin sebagai representasikan komunikasi dan pertimbangan *mainset* politik atas dasar perubahan situasi dan kondisi politik bangsa dan negara. Walau faktanya Muhammadiyah, banyak memiliki sikap non kooperatif terhadap kekuasaan pemerintahan. Sikap non kooperatif itu lebih dimaknai pada konteks pelanggaran hak-hak ekosospol warga negara yang dilatarbelakangi oleh kebijakan negara yang salah urus. Perilaku yang ditunjukkan Muhammadiyah mengarah pada penegasan sikap kritik dan komentar pedas terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, juga memilih bersifat akomodatif terhadap kebijakan negara, seperti ambil peran dalam proses penyusunan Undang-Undang dan penataan system kenegaraan.

Konteks lebih luas, Muhammadiyah juga tidak melarang *resources* (sumberdaya) politik masuk secara totalitas baik personal maupun kelompok dalam sebuah institusi politik, seperti partai politik, lembaga politik dan partai politik misal golkar, Gerindra, PDIP, PPP, PKS, Hanura, Nasdem, PKPI, PKB dan PBB.

Tentu sikap dan perilaku merupakan model keadaban komunikasi politik kebangsaan Muhammadiyah yang memiliki peran ganda secara konstitusi dan pragmatisme politik. Tentu dilihat dalam proses politik secara inklusif sehingga bisa mengetahui preferensi batas normal saluran pesan yang disampaikan sesuai evolusi realitas dalam perspektif yang luas dan menyejarah.

Selain itu, Muhammadiyah juga harus mempertimbangkan dengan

apik dan tersusun bagus model *marketing* politik sebagai panggung idealitas dari sebuah prinsip-prinsip totalitas untuk mendorong keterlibatan secara kolektivitas oleh berbagai individu dan kader. Orientasi marketing itu berupaya merekayasa dan penciptaan pasar moralitas dan nilai tawar menawar dengan konsekuensi prinsip keadaban komunikasi politik berjalan dan diperlukan ketika keinginan meningkatkan citra politik itu sendiri.

Mempelajari gaya komunikasi Muhammadiyah selama ini memiliki implikasi praktis dengan kecenderungan lebih banyak merugi yang disebabkan oleh kurang memahami konteks rekayasa citra politik sebagai pijakan dalam pergulatan politik. Muhammadiyah harus memulai dari konsep komersialisasi dan selebritisasi citra sebagai metodologis peran politiknya agar dapat menunjukkan kekuatan dan membangun pola kebersamaan internal dan eksternal.

Prinsip utama, Muhammadiyah tidak hanya mengandalkan kemampuan media untuk berkomunikasi, namun harus memiliki agenda *setting* yang jelas sehingga isu-isu yang akan merusak citra bisa teratasi secara baik. Untuk melancarkan kekuatan selebritisasi citra sebagai ruang hidup, bagi Muhammadiyah harus bertindak layaknya aktor produsen opini dengan menjadikan masyarakat *(publik)* sebagai pasar sekaligus konsumen opini publik yang disodorkan dan menguntungkan bagi Muhammadiyah. Hal ini akan bisa dilakukan ketika harus menggunakan model *multigated* (banyak pintu) dan model *monogated* (satu pintu) yang mendorong siklus opini, citra dan *style* komunikasi politik melalui berbagai kelembagaan masyarakat pedesaan, struktur kelas tradisional menengah, dan organisasi politik *mainstream*. Memberi pengaruh dengan opini tentu lahir *multi effect* yang bertujuan mempengaruhi nilai-nilai budaya, birokrasi, organisasi sosial, konsolidasi dukungan dan merebut tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Juga, jangan lupa bahwa peran sumber daya politik seperti ketokohan dan kaderisasi merupakan syarat untuk tumbuh dari lanskap politik dengan *political spin and communication* sebagai prasyarat mulusnya jalan komunikasi politik dengan persiapan *communican* (aktor) handal untuk memberikan kontribusi lebih nyata. Pertumbuhan kaderisasi politik Muhammadiyah sekarang ini telah mengubah arah orientasi saluran aktor politik lebih terbuka sebagai pembawa pesan-pesan politik ke publik dengan terlibat langsung dalam menyikapi realitas politik.

Karena memang tidak dapat dikesampingkan, bahwa Muhammadiyah dari masa ke masa telah banyak memainkan peran politik dalam mendorong

reformasi sistem kekuasaan, pelaku perubahan sosial, kekuatan politik, laboratorium pemimpin *(leaders)* dan mayoritas penganut Islam politik. Dari hal tersebut, Muhammadiyah *laik* diapresiasi karena memiliki infrastruktur politik yang kuat sehingga lebih mengkristal dalam membangun maupun mendorong komunikasi politik agar dapat mencerminkan idealitas politik di atas *fashion pedagogis morality participant* dan kebudayaan yang mampu memberi warna baru dan elegan dalam memandang segala persoalan masyarakat.

Pola komunikasi politik *pedagogis morality participant,* harus menunjukkan geliat langsung (emosional—naluri politik) untuk mengambil peran dalam kepemimpinan bangsa. Walaupun dalam perjalanannya selama ini bersifat kontraktual dan relasional yang mengandung unsur kepentingan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling membutuhkan antara negara dan Muhammadiyah sehingga tercipta *good governance* yang adil, sehat, sejahtera, makmur, berdaulat dan bermartabat.

Cemotrapolitics: Jalan Murah Sebuah Keadaban: Upaya Keluar dari Kelatahan

Saat ini sesuai perkembangan komunikasi dan teknologi informasi *(cemotra)* atas perubahan sosial yang ada, maka jalan kemurahan sebuah keadaban yang diperuntukan bagi Muhammadiyah untuk mendorong transformasi politik *(politics)* dalam ruang demokrasi terbuka saat ini dengan resiko tanggungjawab peran lebih besar. Tentu jalan kemurahan ini merupakan proses penggalangan partisipasi politik Muhammadiyah melalui sistem *volunter cemotrapolitics* dengan menggunakan sumberdaya Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam menarik simpati dan dukungan agar keterlibatan dalam proses politik, pengalokasian kader dan diaspora institusi politik serta aktif secara kelembagaan maupun personalitas.

Apabila *voluntering cemotrapolitics* dilakukan secara maksimal maka faktanya akan berbeda dengan sebelumnya. Dimana preferensi politik keikutsertaan kader, warga dan simpatisan Muhammadiyah dalam proses demokrasi sangat tinggi, seperti terlibat langsung dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014 kemaren, misal kelompok Relawan Surya Madani Indonesia (SMI), Relawan Keluarga Besar Alumni Universitas Muhammadiyah Seluruh Indonesia (KB AUMI) dan Relawan Mentari Indonesia (RMI), dan Relawan Memajukan Indonesia (MI) yang mendukung pasangan calon presidennya, tidak bertindak atas nama Muhammadiyah. Namun, basis perekrutan massa dukungan politik ada di Muhammadiyah.

Mereka adalah kader dan simpatisan Muhammadiyah yang kebetulan terbangun dari jejaring aktivis persyarikatan dengan membuat *networking positioning* politiknya sehingga diaspora yang diinginkan lebih maju ketimbang masa-masa sebelumya. Argumentasinya, tak ada hubungan struktural dengan persyarikatan Muhammadiyah, yang ada hanya konsolidasi dukungan. Apalagi, dua pasangan capres-cawapres berdasarkan hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan konsultan politik lain bahwa di Muhammadiyah, Jokowi-JK mendapat angka 27,44 persen dan Prabowo-Hatta mendapat 31,57 persen. Artinya partisipasi dan preferensi politik Muhammadiyah lebih besar di banding pemilu presiden sebelumnya. Partisipatif inilah merupakan jalan keluar dari kelatahan, karena beberapa dekade lalu Muhammadiyah selalu berada dalam jeratan tabung politik, hanya memberi dukungan tetapi petikan hasil tak dapat diraih. Keluarlah dari kelatahan dengan *voluntaring cemotrapolitics* dan *participant* kolektif.

Cuma, satu hal yang belum menemukan data dalam berbagai penelitian mengenai jumlah matematis berdasarkan grafik kader, simpatisan dan warga Muhammadiyah yang masuk ke berbagai partai politik, lembaga politik, kementerian Negara, lembaga tinggi Negara, dan pemerintahan. Namun secara individual dan ditinjau dari aspek kelembagaan politik diketahui melalui jaringan – jaringan kelompok Muhammadiyah, bahwa memang ada banyak kader Muhammadiyah terlibat secara aktif dalam politik dan ikut mendirikan lembaga politik (orpol). Sebetulnya kekuatan sumber daya politik Muhammadiyah tersebar diberbagai tingkatan mulai dari kepala desa, DPRD kab/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan birokrasi pemerintahan. Upaya komunikasi politik Muhammadiyah harus keluar dari tinjauan internal tanpa terikat dan mentransformasi citra politik ke berbagai sektor kehidupan sehingga pola komunikasi politiknya tidak terkesan tersentralisasi hanya pada ketua umum (presiden) Muhammadiyah.

Penulis juga menemukan khazanah baru, yakni komunikasi politik Muhammadiyah masuk babak baru dalam mengukur indeks preferensi keterlibatan kadernya dalam proses demokrasi politik. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi Muhammadiyah, yakni *pertama*, faktor *political belief* keseluruh institusi politik, seperti orpol (partai politik) bahkan faktor ini lebih dominan. *Kedua*, faktor *political consolidative* dengan memberikan pendidikan politik secara informal baik yang menyebar di berbagai orpol maupun birokrasi serta kelompok penekan *(interest group)*. Jika berbagai pidato, tulisan, dan kritik sebagai landasan untuk memahami kontestasi komunikasi politik, maka harus di hubungkan dengan konsepsi

politik sehingga dapat dianalisis dalam konteks realitas politik yang lebih luas.

Kedua faktor itu, Muhammadiyah tertopang dalam mensinkronisasi konten gagasan politik kader dan pola kepentingan yang ingin dicapai. Itupun terkadang dilakukan secara otomatis dan terkonstruk dalam memerankan strategi politiknya sebagai alat ukur tingkat kelayakan komunikasi politik yang diaplikasikan selama ini. Tentu strategi politik Muhammadiyah menguat ketika jumlah posisi *resources* politik (sumber daya politik), seperti elit politik, kader, ortom, dan simpatisan memiliki karakter keadaban yang bagus dan hubungan baik dengan seluruh partai politik dan jaringan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Tentu yang berperan adalah berbagai kelompok di dalam internal Muhammadiyah dengan tersedianya infrastruktur komunikasi massa, seperti media, tv, koran, majalah dan sufrastrukturnya adalah negosiasi dan diplomasi politik sebagai esensi pertarungan, baik *vis a vis* dengan pemerintah maupun negara asing.

Sala satu hal yang membuat Muhammadiyah lebih dominan dalam konteks komunikasi politik adalah peluang partisipasi dalam proses politik sehingga dapat memberikan pemahaman dan menjelaskan prinsip–prinsip politik, seperti dakwah amar maruf nahi mungkar, politik kultural, politik demokratis, pancasila, bhineka tunggal ika dan UUD 1945. Tentu identitas politik yang tidak bisa disamarkan karena tujuan ideologis berpolitik adalah berdakwah *"bil hal bil maruf nahyu munkara"* sebagai bagian dari keadaban politik Muhammadiyah. Selebihnya, berkewajiban mentransformasi tujuan Muhammadiyah agar dapat membawa dampak serius terhadap keberhasilan politik Muhammadiyah dan pembentukan masyarakat yang dinamis, sebenar-benarnya dan elegan.

Pendekatan politik Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tentu membentuk komunitas–komunitas ideologis (kelompok pengajian) secara permanen sebagai penggerak citra keadaban politik untuk memoderasi gagasan dan tujuan Muhammadiyah lebih luas, yakni membentuk masyarakat yang sebenar-benarnya.

Kalau dilihat peran Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan nasional, justru modal *social order* sudah cukup untuk menggerakkan langgam politiknya yang lebih kuat. Asalkan corak politik Muhammadiyah bersifat *transedentalis reformatif*, yakni tidak terjebak pada diskriminasi ideologis dan teologis atas pemikirannya. Karena, bisa dilihat upaya delegitimasi politik Muhammadiyah yang dilakukan oleh publik melalui

persebaran opini adalah *"apabila orang-orang Muhammadiyah masuk politik lalu berkuasa, maka dianggap bid'ah semua urusan negara dan pemerintah".* Nah, sebetulnya sebaran opini ini perlu disikapi secara rasional karena memang teori dan strategis politik tak mengenal haram halal atau bid'ah. Yang dikenal dalam politik adalah keadaban untuk memenangi pertarungan politik dimanapun dan Muhammadiyah sendiri tidak harus terjebak dalam kubangan justifikasi perbedaan tradisional dan perkotaan. Harus tetap berada pada posisi tengah-tengah *(wasathan).*

Karena politik diartikan sebagai pengabdian plural tanpa keterbatasan sekat etnis, kulit, agama dan ras itu sendiri. Apabila Muhammadiyah tetap memberikan warna anasir pada sistem ideologis dan teologi atau membedakan dari kalangan mana, maka realitas politik tidak akan berpihak pada Muhammadiyah. Bahkan, tidak akan sukses menghadirkan seluruh potensi politik yang ada.

Sementara komunikasi politik merupakan sebuah proses penyampaian pendapat, sikap, dan tingkah laku orang-orang, lembaga atau partai politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Sedemikian eratnya hubungan antara komunikasi politik, pesan politik dengan peran politik dalam ruang lingkup bangsa dan Negara. Di samping itu, Muhammadiyah harus memiliki *sense of belonging* yang cukup tentang komunikasi politik atas gambaran kekuasaan politik yang dipengaruhi oleh realitas inklusif kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa dan Negara.

Namun proses ini tidak selalu menguntungkan pihak tertentu, apalagi masyarakat. Tetapi keputusan politik diambil untuk membesarkan Muhammadiyah dan penyelamatan umat dari ketidakseimbangan. Muhammadiyah *"mau tak mau" harus* berperan aktif dalam menjaga keseimbangan yang melekat dalam sejumlah entitas kolektif masyarakat sebagai pondasi hubungan antar lembaga politik negara, pers, pidato politik, ceramah, dan pernyataan pendapat umum Muhammadiyah. Jika pemerintah labil dalam kondisi kurang efektif, maka Muhammadiyah harus mendominasi politik strategis untuk mendorong tumbuhnya kesetaraan dan keseimbangan baik dalam ekonomi, politik, perdagangan maupun sosial budaya.

Faktor keadaban politik Muhammadiyah memiliki banyak komunikator *(agen)* yang berkemampuan dalam membangun hubungan Muhammadiyah dengan realitas politik. Komunikator politik Muhammadiyah memiliki tiga posisi penting, adalah sebagai berikut :

1. Politikus (kader) Muhammadiyah yang bertindak sebagai komunikator politik, mereka mencari pengaruh politik melalui komunikasi, memiliki

jabatan di luar dan di dalam pemerintahan, berwawasan nasional dan internasional dengan keberanian menyelesaikan masalah sosial baik di daerah maupun di tingkat nasional.

2. Professionalitas kader (elit) dan simpatisan media *(news)* Muhammadiyah, adalah representasi dari berbagai media massa untuk perjuangan tujuan Muhammadiyah dan membantu pengalokasian kader politik. Kaum profesional Muhammadiyah dalam politik ini harus mampu menggunakan potensi media, simbol-simbol politik untuk mempengaruhi orang yang berbeda kelompok dengan Muhammadiyah, misalnya banyak alumni ortom dan lembaga sosial politik yang menjadi kaum professional yang sesuai dengan bidangnya. Mereka secara otomatis dapat mempengaruhi kondisi dengan selebritisasi citra politik Muhammadiyah dan menutup kekurangan.
3. Komunikator Muhammadiyah *(spin elit)*, termasuk dalam kelompok ini adalah para juru bicara Muhammadiyah, aktivis ortom, lembaga amal usaha, kelompok kepentingan, dan kelompok khusus menyatakan pendapat *(opinion leaders)* yaitu orang-orang yang dapat dipercaya karena memiliki kredibilitas untuk menggerakkan potensi yang ada.

Hal-hal yang menjadi tanggungjawab komunikator politik Muhammadiyah, adalah *pertama*, pesan politik *(political message)*, pesan politik Muhammadiyah kepada masyarakat harus bersifat terbuka dan tertutup. Penyampaian pesan di lakukan melalui pembicaraan seputar politik yang menyangkut segala informasi tentang kekuasaan politik, pengaruh masyarakat, otoritas penyampaian, isu konflik, lembaga politik, pemerintah dan entitas lainnya yang bergerak dalam kegiatan politik. Sementara konteks lain, Muhammadiyah bisa melakukan persuasi politik dalam penyampaian pesan untuk mempengaruhi masyarakat. Tentu teknik penyampaian pesan melalui propaganda, iklan politik, retorika dan majelis-majelis perkumpulan, masjid-masjid, khotbah politik, ceramah, orasi dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, Muhammadiyah memberikan pesan politik sesuai kondisi dengan rekayasa potensi lapangan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai konsepsi praksis agar penyampaian pesan politik memiliki *effect* bahwa Muhammadiyah mampu mengatur masyarakat dalam suatu negara. Dalam melaksanakan tugas komunikasi harus tetap berpegang teguh pada kepribadian Muhammadiyah yang merupakan bagian *fashion ideologis* berdasarkan pembacaan realitas politik yang ada.

Tentu, mempertegas pesan komunikasi politik Muhammadiyah ditinjau

dari aktivitas politik dan penyebaran *resources* sumber daya kekuatan politik, maka dapat dilihat dampaknya yakni digitalisasi politik Muhammadiyah sesuai perubahan strategi dan analog informasi politik yang memuat banyak agenda politik, kampanye politik, gagasan politik dan operasionalisasi politik dari semua jenis atau model strategi untuk memenangkan pertarungan politik. Selain itu, peta jaringan komunikasi politik *(political communication networking)* Muhammadiyah harus kuat pada arus bawah sebagai infrastruktur politik yang sangat penting dilakukan seperti informasi politik, konsep informasi *(parisasi mass media)*, dan partisipasi pilihan politik. Ini harus diatur secara lokal dan nasional.

Kedua, media politik Muhammadiyah, secara umum memiliki banyak alat komunikasi politiknya sekaligus saluran mengirim pesan politik *(pollitical message)*, seperti saluran organisasi misal partai politik, media politik, kelompok kepentingan (NGO) dan organisasi massa yang memiliki tujuan sama, seperti ortom, lembaga, majelis, amal usaha, dan lain sebagainya. Juga ada saluran interpersonal, merupakan bentuk komunikasi tatap muka atau perantara untuk mencapai tujuan politik, seperti pertemuan para tokoh, musyawarah, tanwir, milad, pengajian khusus, forum dialog, kampanye terbuka dan lain sebagainya. Itu semua merupakan upaya menselebritisasi citra para elit Muhammadiyah agar tidak lagi terjadi hal sebelumnya, yakni kegagalan dalam arena pragmatik politik sehingga berakibat gagal juga meraih tujuan politik yang selama ini menjadi cita-citanya.

Kemudian, kewajiban lain infrastruktur politik Muhammadiyah adalah menyebarluaskan informasi *(selebritisasi)* positif melalui berbagai media massa sebagai pesan politik agar menjangkau sasaran politik terutama masyarakat heterogen dan homogen. Selama ini Muhammadiyah memiliki Suara Muhammadiyah, Suara Aisyiyah, Bulletin Jum'at, Koran, TvMu, radio dan lain sebagainya.

Selain saluran di atas, Muhammadiyah dapat menyampaikan pesan politik melalui demontrasi, dialog kerakyatan, dan rekayasa peristiwa politik, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan kegiatan politik untuk mempengaruhi publik. Termasuk di dalamnya pernyataan tidak puas kepada pemerintah dan melakukan pemboikotan. Sedangkan dalam bentuk lain yang lebih lunak adalah *public polling, search surveyor indicator*, dan konsolidasi politik struktural maupun menyuarakan pendapat umum sebagai *open strategi* dan intervensi psikologi sosial masyarakat untuk merubah pilihan.

Ketiga, khalayak politik Muhammadiyah, secara umum, khalayak

komunikasi politik Muhammadiyah dapat dibentuk melalui opini publik dengan catatan jika opini yang dibentuk oleh komunikator politik dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Sebab tidak semua opini dengan mudah menjadi pendapat umum yang memiliki banyak pengikut. Maka, keberhasilan membentuk *opini public* adalah keberhasilan yang diikuti oleh khalayak masyarakat, misalnya permasalahan penghapusan kolom agama di KTP, pesta bikini lulusan siswa SMA yang mencatut nama SMA Muhammadiyah Rawamangun dan lain sebagainya. Hal itu sebagai pemecah terhadap upaya perlawanan terhadap pemerintah melalui perang opini publik.

Komunikator (aktor) politik Muhammadiyah dalam membentuk opini publik harus lebih cerdas mengelola isu-isu yang ada seperti konflik politik, persaingan politik, dan berbagai kegiatan politik agar dapat dipahami, menarik dan mempengaruhi rakyat untuk berpihak. Persoalannnya tidak mudah membuat suatu isu menjadi menarik di kalangan masyarakat, sebab jika tidak menyangkut kepentingan langsung atau tidak langsung, maka opini menjadi tidak menarik. Maka Muhammadiyah memberikan opini publik harus bersifat sensitif dan bisa menjadi konsumsi khalayak masyarakat luas.

Merujuk suatu definisi yang ditawarkan, politik Muhammadiyah adalah aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai nilai dan basis solidaritas kemanusiaan. Jika menggunakan definisi ini, maka orang yang mendukung politik Muhammadiyah bukan hanya umat Islam bahkan seluruh masyarakat. Ini sebagai konsekuensi logis dari keberadaan Muhammadiyah sebagai penyambung lidah *rahmatan lil'alamiin*. Makna rahmat itu yang diinginkan Muhammadiyah adalah sebuah keadaan sejahtera dan beradab yang dirasakan masyarakat atas keberadaan Muhammadiyah yang menjiwai regulasi hidup bersama dalam suatu tatanan masyarakat yang baik. Karena substansi politik merupakan penghadapan Muhammadiyah dengan kekuasan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai moralitas. Tapi ini juga bukan tanpa tantangan. Maka, penting ada faktor perjuangan menegakan nilai-nilai moralitas sebagai aktualisasi diri dan kelompok yang bersifat profan dan cenderung negatif.

Tarik menarik di antara kedua inilah yang memerlukan mekanisme yang utuh untuk mengatur dan meminimalisir segala potensi negatif yang mungkin muncul di Muhammadiyah. Di sinilah peran komunikasi politik Muhammadiyah salah satunya menjadi strategis. Komunikasi politik

yang merupakan proses penyampaian pesan politik dan rekayasa arena pertarungan politik, tentu harus memposisikan khalayak dalam persepsi dan sikap politik yang menjadi amunisi bagi dukungan. Komunikasi di kukuhkan pada beberapa fungsi dasar, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat; mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada; menyediakan diri sebagai *platform* menampung masalah-masalah politik; membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan institusi politik. Hal ini hanya dapat dilakukan jika, adanya dukungan sumber-sumber kekuatan politik. Sumber-sumber tersebut yakni massa, materi, ide, dan informasi. Komunikasi politik Muhammadiyah harus dilakukan secara kolektif agar menjadi sesuatu kekuatan besar yang bisa mencapai tujuan dan keluar dari dilema politik itu sendiri.

Selebritisasi Citra Elit Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah memerlukan dua arah aktivitas, yaitu perubahan internal dan eksternal. Kegiatan dua arah yang berhubungan dengan usaha perubahan yang diinginkan, baik kontestasi politik maupun geopolitik masyarakat yang tentunya butuh kesadaran partisipasi. Dalam hubungan itu, hendaknya Muhammadiyah mampu membentuk selebritisasi citra diri yang baik dalam lingkungan sosial masyarakat seperti moralitas, akhlak, sikap, dan tingkah laku, nilai-nilai jujur, adil, benar, persamaan dan kebersamaan diterapkan sebagai alat komunikasi politik.

Pertimbangan relasi Muhammadiyah dan politik harus disertai penataan internal dengan sistem dan mekanisme organisasi yang memungkinkan lahirnya pemimpin yang *"benar"*, dan berani men-selebritisasi citra untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai instrumen eksistensif peran politik kekuasaan. Muhammadiyah sangat perlukan para selebritis politik yang bercitrasasi baik, *trackrecord* mumpuni dan berahlak mulia untuk menguatkan gerakan politik Muhammadiyah di masa akan datang.

Muhammadiyah juga memerlukan usaha serius yang terencana untuk melakukan penguatan kapasitas kader politik dan komunikator Muhammadiyah. Jangan lagi seperti saat sebelumnya hingga sekarang, memperlihatkan typologi *"balsem"* yang dimiliki oleh kadernya dan senang general, segala hal ingin dilakukan semuanya, organisator tidak, ilmuwan juga tidak, politisi tidak, pengusaha tidak, akhirnya tidak jelas, walaupun memiliki gelar akademis sepanjang air mengalir di sungai.

Selain itu, kader Muhammadiyah tidak *laik* menjadi seorang politik ataupun aktor memakai gaya filsafat kera *"bote bau balang"* (seperti kera

menangkap belalang). Sebuah filsafat berdialek Sumbawa yang bermakna bahwa para politisi atau aktor senang mengerjakan semua tanpa kualifikasinya, maka tentu sifatnya tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh dan orang yang hidupnya penuh dengan ambisi namun tidak sesuai dengan kemampuan yang memadai.

Keterkaitan sifat merasa tidak puas dan ambisi kader Muhammadiyah itu ibarat kera yang serupa manusia bahwa ketika kera menangkap belalang, dimana kera berusaha juga menangkap belalang sebanyak-banyaknya. Tangan kiri tugasnya memegang dan mengumpulkan hasil tangkapan belalang pertama yang didekap diantara perut, kedua kakinya juga ikut menjepit belalang tangkapan, sementara tangan kanan berusaha menangkap belalang lain lagi yang letaknya agak jauh darinya. Alhasil, kera tersandung jatuh sehingga menyebabkan semua belalang hasil tangkapan itupun lepas terbang. Sehingga apa yang dikejar tidak ada hasilnya karena seluruh hal-hal yang menjadi kebutuhannya harus terpenuhi tanpa melihat kemampuan sendiri.

Mengkaji pepatah ini lebih dalam dan menarik kepada realitas politik Muhammadiyah, tentu salah satu faktor yang membuat orang berpolitik tidak berhasil karena tertanam sikap ambisius. Kader Muhammadiyah harus membentuk citra politik yang baik sehingga makna pelajaran moralitas sesuai dengan karakter politik yang diperankan yakni dakwah *amar maruf nahi munkar* dan secara ideologis memberikan jalan alternatif terhadap kebuntuan sikap berdemokrasi yang selama ini tidak mampu membangun tatanan masyarakat dengan baik. Sebagaimana kata Ahmad Dahlan *"jadilan kalian guru, dokter, kembalilah kepada Muhammadiyah"*. Kalimat ini takjud dalam konteks politik, bahwa Ahmad Dahlan memberi sinyal pesan bahwa laiknya kadernya Muhammadiyah dalam politik harus konsisten dan tidak keluar masuk.

Demokrasi momentum yang dikejar secara babi buta tanpa melihat proporsi nilai moralitas dan simpul kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Sehingga demokrasi itu seperti *"bote/kera"* yang membuat para pegiatnya ambisius tanpa perhatikan norma-norma yang ada. *Nah*, gagasan politik Muhammadiyah yang termasuk bagian dari demokrasi merupakan perangkat secara praksis untuk *merecstat* demokrasi agar menjadi lebih baik, jujur, dan partisipatif.

Gebrakan sebagian kader untuk terjun ke dunia politik sangat menarik untuk diteruskan ke tingkat kelembagaan, seperti dikonstruksikan melalui lembaga nirlaba konsultan politik untuk membentuk selebritisasi citra

politik dengan catatan bahwa arahnya pada penguatan kader politik, bukan politisi gadungan tetapi pemimpin politik yang memiliki *knowledge* dan citra integritas tinggi. Jalur kaderisasi ini untuk memperkuat kapasitas kader politik praktis, tentu saja diperlukan. Tapi tidak semua kader diarahkan untuk bersiap-siap menjadi politisi, atau bahkan membentuk partai politik baru jika kecewa dengan partai lamanya.

Penegasannya bahwa aktivitas politik harus membentuk citra positif dan selebritisasi moral (piarisasi kebaikan), baik secara individu maupun kelompok dalam Muhammadiyah. Karena pilihan jalan politik dengan instrumentasi keadaban adalah pilihan yang tepat. Upaya memasukkan Muhammadiyah sebagai penentu arah negara dan kekuasaan secara tidak langsung untuk menjaga eksistensi jargon Muhammadiyah sebagai "tenda besar nusantara, penjaga pintu kemerdekaan hak dan kewajiban".

Rekam jejak perjalanan politik warga Muhammadiyah, menunjukkan bahwa kekuatan Muhammadiyah tidak dapat dipandang enteng. Karena itu, pilihan terbaik adalah menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik yang ada dan membentuk energi politik di tingkat *grass root* untuk menstimulus siapapun kader politik Muhammadiyah dengan citra bersih, intelek, jujur, didasari idealisme, bukan sakit hati, sehingga aspirasi politik itu berlabuh.

Proses politik merupakan momentum untuk memperbaiki sistem politik dan sarana membangun bangsa secara substantif. Segala bentuk eksperimen politik harus membawa perubahan sejati dalam kehidupan kebangsaan. Tujuan jalan politik Muhammadiyah adalah membebaskan rakyat dari ketertindasan dan merealisasikan kesejahteraan negara *(welfare state)* dan menjauhkan kehidupan politik yang sarat transaksional, korupsi, politik dinasti dan gaya hidup elit yang jauh dari standar moralitas agama dan budaya luhur bangsa.

Dampak Keadaban Kultural Citra Politik Muhammadiyah

Konsekuensi dari sosialisasi politik atau masuk dalam proses politik yang dilakukan oleh komunikator politik yakni pembelajaran politik dan partisipasi politik dari masyarakat. Sosialisasi politik itu merupakan suatu proses yang berdampak pada masyarakat untuk melihat tanggapan dan reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Komunikasi politik Muhammadiyah pasti membawa dampak perubahan dalam masyarakat Indonesia. Di dunia politik, konvergensi komunikasi politik dan penggunaan teknologi memiliki dampak baik dan buruk.

Muhammadiyah cukup banyak memberikan gagasan politik sebagai sebuah keniscayaan. Dua jenis budaya keadaban politik yang patut dipelajari dan berdampak pada para pelaku dan aktor politik.

Dampak budaya politik positif memang harus dijalankan dan negatifnya harus ditinggalkan. Budaya positif seperti budaya dakwah, demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan, menjalankan khittah dan berkemajuan (pembaharuan). Sedangkan budaya negatif dari politik adalah budaya KKN, budaya anti asas, budaya golput (parokial), dan budaya rasis. Budaya parokial masyarakat cenderung pasif terhadap cara pandang memahami kehidupan politik namun belum mengembangkan sikap kritis partisipan yakni aktif dan kritis terhadap kehidupan politik. Budaya politik secara umum terbatas pada persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di suatu bangsa dan Negara.

Budaya politik bagi Muhammadiyah sebagai wujud nyata dari partisipasi umat dalam kehidupan politik yang berujung pada pembentukan pribadi ihsan, jujur, adil, sejahtera bagi semua lapisan masyarakat sehingga terciptanya sistem negara yang mensejahterakan bagi semua warga tanpa menciptakan jurang perbedaan kekayaan yang berlebihan. Muhammadiyah juga dituntut untuk menyiapkan diri menghadapi kehidupan Indonesia yang semakin kompleks dimasa depan.

Lepas dari efektif atau tidaknya dukungan politik tersebut, kini muncul gejala bahwa independensi kultural Muhammadiyah tergoyah oleh rayuan, syahwat, dan kepentingan politik praktis. Muhammadiyah yang juga menjadi elemen terbesar dari *civil society* terasa kurang konsisten pada pemberdayaan masyarakat sipil. Dampak lebih jauh adalah rentannya konflik kepentingan di kalangan aktivis. Dampaknya, tidak saja menjadikan warga Muhammadiyah sebagai tumbal kepentingan politik, melainkan juga proyek penguatan *civil Islam* yang selama ini dilakukan menjadi terbengkalai. Maka dampak budaya politik Muhammadiyah, adalah: *pertama*, dampak kultural positif. Untuk itulah, penting sekali bagi Muhammadiyah sebagai salah satu tokoh intelektual dan penghimpun elemen masyarakat sipil menjaga independensinya terhadap segala intervensi kepentingan politik. Kalaupun berpolitik karena dipaksa sejarah janganlah mengabaikan kewajiban asasi rakyat sebagai kekuatan Islam kultural. Dinamika dan fragmentasi politik nasional yang berkembang cepat mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah dengan menempatkan diri sebagai kader terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dampak kultural keadaban positif dari budaya politik dibagi lagi kedalam beberapa bagian, adalah:

a. Kultur Positif Dakwah Muhammadiyah

Muhammadiyah ditakdirkan untuk menjadi gerakan kultural, sosial-ekonomi dan dakwah yang menaungi seluruh kelompok masyarakat, dan menjadi tenda kultural bagi bangsa ini. Muhammadiyah selama ini telah dikenal sebagai *"rumah rakyat"*, yang setiap saat dapat dijadikan sebagai tempat pengaduan bagi segenap anggota masyarakat yang kini tengah menghadapi berbagai problema sosial politik. Kembalikan Muhammadiyah pada orientasi awalnya sebagai gerakan kultural, sosial-ekonomi dan dakwah. Dengan begitu, ia akan mempunyai dampak politik yang besar.

Muhammadiyah bisa menjadi kekuatan yang dapat menekan kekuatan politik dan pemerintahan yang korup, tanpa harus melibatkan diri pada politik praktis. Melibatkan Muhammadiyah pada politik praktis di samping berlawanan dengan spirit dasarnya, juga tidak akan menguntungkan politisi Muhammadiyah sendiri. Karena pada hakikatnya Muhammadiyah telah menjadi milik masyarakat luas milik bangsa, bukan milik para politisi mantan pengurusnya. Dengan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara konsepsionil dan operasionil dalam sebuah negara.

b. Kultur Positif Taat Khittah (Konstitusional)

Khittah secara bahasa berarti langkah atau jalan. Khittah dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang. Khittah adalah pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya di masyarakat. Singkatnya khittah adalah garis perjuangan. Adapun pola dasar perjuangan Muhammadiyah dalam berpolitik, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa Muhammadiyah berjuang untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada ajaran islam.
2. Menegaskan bahwa untuk mencapai suatu keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam tersebut dilaksanakan dengan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar.*
3. Menegaskan bahwa kegiatan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dilaksanakan melalui dua saluran yaitu : saluran politik kenegaraan dan saluran masyarakat.
4. Menegaskan bahwa alat yang digunakan untuk dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* bidang politik dengan mendirikan partai politik, sementara organanisasi kemasyarakatan dengan organisasi non partai.

5. Menegaskan bahwa Muhammadiyah memilih dan menetapkan dirinya sebagai gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan alat perjuangannya di bidang politik Muhammadiyah membentuk partai politik.
6. Menyebutkan peraturan yang mengatur hubungan Muhammadiyah dan partai politik. Partai politik merupakan objek binaan Muhammadiyah. Antara Muhammadiyah dan partai politik tidak ada hubungan organisatoris tetapi memiliki hubungan ideologis.
7. Muhammadiyah dan partai politik berjalan menurut caranya masing-masing yang penting tujuannya sama. Tidak diijinkan rangkap jaabatan di Muhammadiyah dan partai politik.

Khittah apapun penting karena terdapat garis atau bingkai pembatas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan Muhammadiyah, yang mengikat seluruh anggota lebih-lebih pimpinannya. Boleh jadi khittah sebaik apapun masih memiliki kelemahan atau melalui Khittah terdapat plus-minus dari gerakan Muhammadiyah. Namun khittah tetap diperlukan baik karena sudah menjadi garis resmi organisasi yang tentu saja lahir karena pengalaman yang panjang suka-duka yang dialami Muhammadiyah maupun karena dipandang sejalan dengan jati diri gerakan ini sejak awal, sehingga telah menjadi bagian dari prinsip atau *manhaj* gerakan Muhammadiyah.

Adapun khittah Denpasar tahun 2002 yang berisi mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat sembilan butir pernyataan pokok. Salah satunya adalah Muhammadiyah meyakini politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal kedua khittah pun secara tegas bahwa Muhammadiyah berusaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perjuangan politik maupun pengembangan masyarakat yang mutlak diperlukan agar nilai-nilai Ilahiah dan kemanusiaan tumbuh subur yang penuh keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya *"Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur"*. Pasal ketiga dari khittah denpasar juga menegaskan tentang kebijakan negara sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan yang ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan politik yang

demokratis.

Selain itu, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya agar terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara ini.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Pasal khittah yang lain juga menegaskan bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.

c. Kultur Positif Aspiratif Responsif dan Proaktif

Peran sejarah yang penting dan strategis itu hanya dapat dilakukan manakala berdiri dalam posisi yang benar, tepat, dan memiliki modal sosial yang tinggi. Sesuai ungkapan Antonie Giddens (1999:10) bahwa *The leadership paradigm is something dynamic and always up to date to talk from one generation to generation. They promised to build peacefull situation, justice and democracy and prosperity for all. This policy, of course needs a good basic moral and ethic.* Paradigma aspiratif responsif dan proaktif merupakan sesuatu yang sangat dinamis dan bertekad mewujudkan bangsa yang aman, damai, adil dan demokrasi, serta mewujudkan kesejahteraan yang melimpah dan merata *(peace, justice, democracy and prosperity).*

Aspiratif, responsif dan proaktif tentu saja membutuhkan landasan moral dan etik yang baik. Nilai aspiratif responsif dan proaktif itu berasal dari revitalisasi dan harmonisasi yang telah ada berdasarkan budaya kebangsaan. Yang terpenting adalah memandang aspiratif responsif dan proaktif sebagai tonggak yang dapat menopang tegaknya bangsa dan Negara.

Pepatah Arab yang cukup terkenal di Indonesia mengatakan *"Innamal umamu akhlaqu maa baqiat fain humu jahabat akhlaquhum jahabu"* artinya suatu umat akan kuat karena berpegang teguh pada moralitas, aspiratif responsif dan proaktif. Namun apabila moral diabaikan maka tunggulah kehancuran umat tersebut. Untuk itulah perlu menyadari bahwa sikap aspiratif responsif dan proaktif dapat mengatasi segala masalah, seperti krisis keuangan, krisis pangan, krisis minyak, dan krisis lainnya. Pemimpin yang aspiratif, responsif dan proaktif adalah pemimpin yang memiliki kompetensi untuk mewujudkan visi bersama. Pimpinan yang memiliki kemampuan *rethingking future* dan aspiratif, responsif dan proaktif akan mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki kearah masa depan yang lebih cemerlang. Pimpinan yang tidak hanya menguasai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa, tetapi juga memiliki semangat membara untuk bersama menyelasaikan masalah secara cepat dan tepat *(high commitment and high abstraction).*

Moral pemimpin yang bersumber pada perilaku aspiratif, responsif dan proaktif adalah *"moral ketaqwaan"*. Manfaatnya rakyat menjadi individu yang aspiratif dan responsive mengambil hikmah dan contoh dari leadersnya. Sementara pimpinan menjadi fasilitator yang penuh dedikatif dan responsif akomodatif terhadap kepentingan orang yang dipimpinnya.

d. Kultur Positif Taat Pancasila

Nilai luhur yang terkandung dalam ideologi pancasila tentu perlu implementasi, yang menjalankan adalah seluruh rakyat warga negara, tanpa aktualisasi maka nilai tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Disinilah perlunya partisipasi. Hal ini memerlukan keterbukaan antar warga negara sendiri, antara yang kebetulan menjadi penyelenggara negara maupun rakyat jelata, bahkan keterbukaan sistem politik termasuk ideologi pancasila sendiri. maka suatu keharusan adanya ideologi Pancasila yang terbuka.

Masyarakat pluralistik memerlukan keterbukaan sistem, sehingga semua aspirasi mereka dapat tertampung. Sejarah perjalanan politik sendiri menunjukkan, bahwa sejak berkembangnya pemikiran demokrasi, orang telah mengembangkan keterbukaan di semua aspek kehidupan, lebih-lebih dalam bidang politik. Karakteristik keyakinan politik serta kultur politik modern menuntut adanya "perubahan yang terus menerus" bagi perbaikan hidup manusia. Idealisme kuno yang statis sudah lama ditinggalkan. Modernisme selalu berisi pemikiran-pemikiran untuk terus maju, kemudian di semua aspek hidup itu terus berkembang dalam tamansarinya perdamaian, kebebasan, keadilan, kesejahteraan dan ketentraman, dan menentang serta mengeliminasi semua bentuk kemiskinan, penindasan, kekerasan, kejahatan, penyakit dan ketidaktertiban.

Ketika Soekarno dalam buku dibawah bendera revolusi (1979:19), dia lantang mengumandangkan menuntut kemerdekaan dan perbaikan masyarakat untuk terus maju menuju "kesempurnaan" hidup dengan menegaskan pada sila-sila pancasila sebagai landasan statis dalam menuju nilai tujuan, ideologi Pancasila akan tetap terbuka untuk mencapai sasaran-sasaran yang dinamis.

Maka Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah terbuka bagi pemahaman yang konstruktif untuk mencapai nilai tujuan yang diciptakan bersama. Sebagai landasan statis, sebagai istilah Bung Karno, maka sila-sila dalam pancasila pun dapat dibahas terbuka secara ilmiah. Namun sila-sila tersebut nyatanya telah teruji secara sejarah akan authentisitasnya bersumber dari rakyat, yang dalam istilah Prof. Beer sebagai "*political belief*", maka ideologi politik adalah realitas apa adanya *(what is)*, ini berarti tetap terbuka juga untuk penyelidikan ilmiah kapan saja.

Pendapat Beer ini kelihatan juga tidak jauh dari pandangan pendekar demokrasi liberal John Locke, ketika mengemukakan prinsip-prinsip ideologis demokrasi liberalnya, bahwa prinsip itu telah menjadi hukum alam yang tetap, namun kapanpun orang bisa berdebat tentang itu. Oleh karena

itu, Pancasila sebagai ideologi, baik dilihat dari sandaran *"landasan statis"* maupun sasaran *"leidster dinamis"*, akan tetap terbuka bagi pembahasan yang mendalam atau deliberatif.

Dalam keterbukaan itu orang tidak perlu menakutkan timbulnya kondisi akan melemahkan posisi maupun eksistensi ideologi bangsa, akan tetapi justru sebaliknya akan menemukan penguatan kondisi maupun eksistensinya, sebab sekali lagi sebagai sebuah kultur yang telah memiliki label *political belief*, eksistensinya tidak perlu diragukan lagi. Mungkin perlu sekali lagi kita mendengar pendapat filosof politik humanitarian Marquis de Condorcet (1743-1794) yang banyak berpengaruh ketika ideologi politik sedang banyak diluncurkan di Eropa, bahwa manusia akan tetap selalu menuju kearah *"perfektibilitas"*, oleh sebab itu sebuah ideologi politik harus terbuka untuk menuju ke sana untuk perbaikan masyarakat.

e. Kultur Positif Pembaharuan dan Berkemajuan

Dalam lalu lintas dinamika politik yang luar biasa dan permasalahan serta agenda bangsa yang semakin kompleks, maka sesungguhnya bagi partai-partai politik maupun organisasi kemasyarakatan sesuai fungsinya masing-masing justru diperlukan pembagian kerja dan kerjasama yang semakin konstruktif. Energi positif dari proses politik adalah adanya pembaruan dan konteks kemajuan yang di raih. Selain itu, apapun potensi yang dimiliki bangsa ini perlu disinergikan dan dimobilisasi secara optimal demi kemajuan dan kejayaan bangsa. Sebaliknya praktik-praktik politik dan sosial yang konvensional atau tidak sejalan dengan sistem politik modern yang demokratis semakin ditinggalkan menuju tata peradaban baru Indonesia yang lebih unggul. Bangsa ini tidak akan maju pesat manakala terlalu banyak beban politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ongkosnya terlalu tinggi dan kontra produktif.

Dalam dinamika dan tuntutan kehidupan kebangsaan yang demikian kompleks dan sarat tantangan itu maka peran Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dengan fungsi *moral force* atau kelompok kepentingan yang dapat dimainkannya secara optimal merupakan keniscayaan yang signifikan bagi Muhammadiyah sendiri maupun masa depan bangsa yang lebih baik ketimbang berkutat pada dilema berpolitik praktis dengan cara-cara tidak baik. Kini yang diperlukan ialah mobilisasi seluruh potensi yang dimiliki dan perankan fungsi-fungsi keormasan secara optimal baik dalam penguatan masyarakat maupun mempercepat proses

pembaharuan untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan. Disinilah dengan tetap berpijak pada khittah pentingnya kepekaan, orientasi advokasi, dan partisipasi politik kebangsaan secara lebih artikulatif yang diperlukan dari para anggota atau elite Muhammadiyah dalam memperkuat posisi dan peran gerakan Islam ini dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Kedua, dampak negatif budaya politik. Banyak orang berbicara bahwa dakwah amar makruf nahi mungkar yang telah menjadi "khittah" Muhammadiyah sejak awal, dimaksudkan untuk membatasi gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial semata. Padahal, apabila kita mau merenungkan, Rasulullah pernah menyatakan bahwa *apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka hadapilah dengan tanganmu, dan apabila engkau tidak bisa, maka hadapilah dengan lidahmu, dan apabila tidak bisa, maka hadapilah dengan nuranimu, akan tetapi menghadapi kemungkaran dengan nurani adalah selemah-lemahnya Iman.*

Dampak negatif politik tentu jelas adanya kita saksikan, dimana para pejabat Negara tidak melakukan efisiensi dan efektivitas terhadap kinerja mereka, sebagai contoh pengeluaran dana (anggaran) yang tidak penting, hingga pada penyelewengan kas Negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kuatnya sistem rasisme kelompok dalam demokrasi masih terasa di Indonesia, karena pemimpin yang terpilih bisa jadi tidak memperhatikan sisi keberagaman, mereka cenderung mengedepankan egoism politik keluarga. Kemerosotan etika politik yang tak bernilai itu merupakan masalah terbesar yang dihadapi Indonesia sejak reformasi pada Mei 1998 hingga sekarang. Kemerosotan etika politik ditandai dengan semakin luasnya KKN, politik uang, sampai pada demontrasi-demontrasi massa yang sering tidak memperhatikan etika politik, *out of control* dan berubah menjadi anarkis. Lebih jauh lagi, kemerosotan ini juga terjadi di elite politik pada umumnya.

Anehnya, banyak kader Muhammadiyah yang terlibat korupsi, walaupun mereka masih aktif di organisasi. Salah satu misalnya yang paling urgen disikapi adalah kasus bantuan Dana Sosial melalui institusi organisasi masyarakat maupun kepemudaan, semua anggota organisasi ikut merasakan dana bansos tersebut. Dengan mengajukan proposal usaha, kegiatan dan lain sebagainya namun sasarannya tidak tepat bahkan dipakai untuk kampanye politik.

Itu salah satu bukti kongkrit, bahwa secara ideologis kader-kader organisasi tidak lagi kedepankan etika politik. Mereka hanya berfikir bagaimana cara mendapat anggaran sebanyak mungkin untuk sebuah *cost* politik

yang menjadi tujuannya. Bahkan di setiap musyawarah organisasi sudah mulai melakukan hal-hal korup. Belum lagi pada kegiatan organisasi yang sangat membutuhkan anggaran, tentu ada potong memotong disitu. *Nah*, hikmah dari semua itu, bahwa Muhammadiyah harus merubah paradigma dakwah kultural yang menyakinkan seluruh kader, simpatisan dan anggota maupun sumber daya yang ada di amal usaha Muhammadiyah sendiri harus memberikan contoh kejujuran dan *tawaddu* serta *istiqomah* pada jalan yang benar dan lurus.

Ketika suhu politik tidak dapat berjalan dengan baik dimana etika berpolitiknya kacau, maka hal yang mendasar terjadi adalah sistem pemerintahannya juga kacau, kebijakan-kebijakan pemerintahpun tidak stabil, sering terjadi tumpang tindih dan terlalu banyak kepentingan pribadi yang menonjol bukan kepentingan bersama untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Selain itu, mudah terprovokasi, munculnya banyak pergolakan atau kerusuhan baik secara personal maupun organisasi, karena merasa bahwa kepentingan mereka yang harus didulukan daripada kepentingan yang lain, isu-isu yang belum benar pembuktiannya karena keadaan yang kurang stabil begitu cepat direspon dan ditanggapi dengan penilaian negatif. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun, masyarakat lebih memilih percaya kepada apa yang mereka lihat dari pada apa yang diungkapkam oleh para elite politik menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat menurun, akhirnya terjadi pengabaian apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk kepentingan bangsa.

Dari berbagai pendapat, diakhir tulisan ini mari kita simpulkan bahwa kader Muhammadiyah tak masalah memasuki dunia politik, namun jangan berharap Muhammadiyah menjadi tangga yang baik untuk sebuah karir politik. Jadikan Muhammadiyah sebagai alat penyampaian pesan politik untuk memenuhi logika politik sesuai dengan asas *amar ma'ruf nahi munkar* dan citra yang baik agar dapat menjadi pemeran politik yang menawan.

Daftar Pustaka

Ahmad Syafii Ma'arif. (2000). *Independensi Muhammadiyah: Ditengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan DINAMIKA

Rusdianto. (2014). *Analisis Wacana Political Allocative Din Syamsuddin*.

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

Rusdianto. *Poskolonial Pancasila Indonesia Melawan Kanalisasi.* Bayumedia Publishing: Malang.

Rusdianto. (2015). *Rekonstruksi Strategi Komunikasi Politik Muhammadiyah; Retrospeksi dan Analitikal Pemikiran Political Allocative Din Syamsuddin.* Penerbit Uhamka Press Jakarta

Abdul Mu'ti. *Hilangnya Keadaban Publik Kita.* Kompas, Senin 11 Mei 2015.

J. Syahban, Soleh Hadi. (2010). *Buku ke 5; Ensiklopedi Muhammadiyah Peran dan Aktivitas Organisasi.* Penerbit Dwi Kaharjaning Gesang (DKG) Pekalongan BSD MIPA Jakarta.

Rusdianto. *Retrospeksi Dinamika Politik dan Demokrasi Indonesia Pada Pemilu 2014: Sebuah Upaya Electoral Justice System.* Jurnal Diplomasi Kementrian Luar Negeri Direktorat Jenderal Diplomasi Bidang Pendidikan dan Latihan, Vol. & No. 4 Tahun 2015

Rusdianto. *Master Antikorupsi.* Republika 20 Februari 2015

Faissal Baasir. (2003). *Etika Politik.* Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

MUHAMMADIYAH TAK PERLU PARPOL

Sutia Budi

Menarik, ketika membaca artikel opini Mas Hajri (sapaan akrab Hajriyanto Y Thohari) yang berjudul "Muhammadiyah Berpolitik" (Republika, 7 Mei 2015). Pada bagian awal, dengan jelas Mas Hajri memaparkan bahwa berpolitiknya Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

Muhammadiyah sebagai gerakan berasas Islam yang nonpolitik. Warga Muhammadiyah juga memiliki pedoman yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sepak terjang Muhammadiyah dalam "berpolitik" diulas Mas Hajri dengan apiknya. Dari berbagai dinamika di masa lalu, hingga perhelatan politik terakhir. Mas Hajri sampai pada titik kesimpulan bahwa Muhammadiyah perlu "memiliki" parpol. Pengertian "memiliki" ini harus dielaborasi dan dirumuskan lebih lanjut.

Lalu, opininya ditutup dengan kalimat, "Bagaimana modus operandi berpolitiknya dan seperti apa modus vivendinya dengan parpol yang dimilikinya itu tentu harus diletakkan dalam konteks Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Sebagai gerakan dakwah yang selalu mengharuskan adanya mobilisasi sistematis dan sistematisasi yang dinamis, Muhammadiyah kadang-kadang memerlukan parpol. Percayalah."

Kesimpulan dan kalimat penutup itulah yang sedikit mengganggu pikiran penulis. Spontan saya bergumam, "Jangan pernah bermimpi Muhammadiyah memiliki parpol, jika tidak ingin menjadi kerdil atau dikerdilkan". Politik itu penting. Posisi parpol juga sangat strategis, yang turut menentukan arah bangsa ke depan. Namun, berkaca dari pengalaman perjalanan Muhammadiyah hingga hari ini, penulis pun sampai pada titik kesimpulan bahwa Muhammadiyah tidak harus memiliki parpol, bahkan

tidak perlu.

Kita bisa bayangkan tatkala kader-kader Muhammadiyah diarahkan untuk masuk pada satu parpol tertentu, maka kegaduhan politik di internal Muhammadiyah akan memasuki babak baru. Pada saat syahwat politik membuncah itulah, bukan hanya diri seorang kader yang menjadi kerdil, tetapi juga akan meredupkan Muhammadiyah, dengan kata lain "menenggelamkan matahari terbit".

Dalam perjalanan Muhammadiyah selama ini, akomodasi politik memang dianggap konvensi politik yang tidak tertulis, tapi bukan berarti Muhammadiyah harus selalu berada dalam kabinet. Sungguh, bukan personal seorang menteri yang diperlukan. Lebih dari itu, kepentingan Muhammadiyah (baca: mewujudkan tujuan Muhammadiyah) dan bangsa Indonesia ke depan jauh lebih utama. Walau diakui bahwa posisi kabinet itu strategis, tetapi bukan segalanya.

Adapun dikatakan bahwa ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, tetapi Mas Hajri pun menyatakan bahwa hal itu belakangan disyukuri. Jika kader Muhammadiyah diakomodasi dalam Kabinet Kerja kala itu, maka bisa jadi "matahari benar-benar tenggelam". Karena fakta hari ini menunjukkan bahwa setelah enam bulan berlalu, ternyata banyak kalangan menilai "tanpa kesan".

Walau wajah politik Muhammadiyah pada pilpres lalu dinilai masih diwakili oleh Prof Amien Rais, jangan lupa posisi Prof Din Syamsuddin (Ketum PP Muhammadiyah dan Ketum MUI) sebagai lokomotif penjaga kesejukan suasana pra dan pascapilpres tentu tidak bisa diabaikan. Belum lagi, posisi Buya Syafii Maarif dan Prof Malik Fadjar sebagai "penasihat" sang Presiden, tentu memiliki posisi penting dalam memberikan pertimbangan di antara berbagai pilihan pelik.

Tetapi harus dimaklumi juga, tidak semua pertimbangan dipilih Presiden. Jalan politik yang dipilih tokoh-tokoh di atas tentu menjadi referensi penting bagi kader-kader muda Muhammadiyah (khususnya para aktivis politik). Jadi, di posisi mana pun boleh saja, asalkan tujuannya mendorong kebaikan-kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM).

Sekali lagi, Muhammadiyah "tidak perlu partai politik". Karena dalam poin ketiga Khittah Denpasar (2002) dengan tegas dikatakan bahwa Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat

guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Masuk area politik praktis tentu dibolehkan. Namun ingat, kepentingan umum yang harus didahulukan. Dalam poin keempat Khittah Denpasar (2002) dinyatakan, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.

Namun, dalam relasi Muhammadiyah dan partai politik, secara tegas dipagari poin keenam dalam Khittah tersebut, yaitu Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi apa pun.

Bagi penulis, pengertian "memiliki parpol" sebagaimana wacana yang dilempar Mas Hajri, dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjalankan "diaspora politik". Kader Muhammadiyah terbuka jalannya untuk berkiprah dalam politik praktis: boleh menjadi aktivis parpol apa pun sesuai pilihan nuraninya, sepanjang sejalan dengan tujuan Muhammadiyah dan Khittah Perjuangan Muhammadiyah.

Dengan demikian, warga Muhammadiyah tidak digiring pada satu parpol tertentu. Hal ini secara tegas termaktub dalam khittah pada poin ketujuh, yaitu Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing.

Bagi para aktivis parpol, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Jika kader-kader Muhammadiyah yang menyebar dalam berbagai parpol mampu memaknai dan memegang teguh Khittah Perjuangan tersebut, niscaya tidak akan pernah melakukan perbuatan tidak terpuji (korupsi, misalnya), tak pernah lelah untuk berjuang.

Tidak pula kecewa jika absen dari kabinet karena kekuasaan bukanlah tujuan.

Hemat penulis, opini Mas Hajri seyogianya mampu membuka mata kader-kader muda Muhammadiyah untuk serius dan pantang menyerah dalam berpolitik. Bukanlah Muhammadiyah yang harus "memiliki" parpol, melainkan kader-kader Muhammadiyah yang harus "memiliki" dan menyebar pada berbagai parpol.

Tujuannya jelas, untuk menegakkan kebajikan dan kemaslahatan. Kader Muhammadiyah harus ikut andil dalam menentukan arah bangsa Indonesia ke depan. Kader muda harus banyak menimba dari para senior, termasuk dari Mas Hajri. Dengan kepiawaiannya, beliau mampu "bergaul" dengan siapa saja, menjadi wakil ketua MPR, dan mencapai posisi puncak di Partai Golkar yang jelas-jelas bukan partainya Muhammadiyah, bukan pula partai Islam.

Kader Muhammadiyah lainnya, Marzuki Usman pernah menjabat sebagai Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya pada tahun 1998-1999, dan tahun1999 diangkat juga sebagai Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM. Beliau pernah juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Kehakiman ad interim. Pada pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, beliau menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DKI Jakarta yang notabene sering disebut sebagai "*partai* kaum *Nahdliyin*". Tentu, banyak lagi kader-kader Muhammadiyah yang berkiprah di berbagai partai politik.

Diaspora politik kader-kader Muhammadiyah adalah sebuah keharusan. Walau tentu, tidak semua kader mesti masuk area politik praktis. Kader Muhammadiyah di mana pun harus mampu meneladani Kiai Dahlan yang progresif dan inklusif. Karena siapa lagi yang "menghidupkan" Muhammadiyah kalau bukan kader-kader Muhammadiyah. Jika itu bisa dijalankan, maka "Matahari tidak akan pernah tenggelam" dalam dunia perpolitikan Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Percayalah.

***

Dalam publikasi Muhammadiyah (www.muhammadiyah.or.id) terdapat liputan menarik pada Rabu (21-12-2011), judul publikasinya "Makna Bermuhammadiyah Menurut K.H. Suprapto Ibnu Juraemi (Alm)". Transkrip

Ceramah Ustadz Ibnu Juraimi dalam Pengajian di PDM Temanggung, Jawa Tengah itu ditranskrip oleh Arief Budiman Ch. Berikut uraiannya:

Dua pertanyaan Kyai Ahmad Dahlan; Muhammadiyah Urung Menjadi Partai Politik Tahun 1921, ada Sidang *Hoofdbestuur* Muhammadiyah (PP Muhammadiyah). Di situ para *Assabiqunal Awwalun* Muhammadiyah berkumpul, para pendiri dan generasi pertama pimpinan dan aktivis Muhammadiyah. Yang menarik, dalam pertemuan itu ada tokoh yang tidak pernah kita kenal sebagai orang atau aktivis Muhammadiyah. Beliau bisa tampil meyakinkan dalam forum para pembesar, Pimpinan Muhammadiyah generasi pertama berkumpul. Orang itu adalah Haji Agus Salim.

Haji Agus Salim punya gagasan untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik. Ternyata, menjelang akhir hayat Kyai Haji Ahmad Dahlan, sudah muncul juga "ambisi" menjadikan Muhammadiyah sebagai Parpol. Sidang dipimpin oleh Kyai Ahmad Dahlan. Diketahui, Haji Agus Salim adalah seorang jurnalis, politisi dan diplomat yang hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam berdebat. Dalam sidang *Hoofdbestuur*, argumentasi yang disampaikan Haji Agus Salim membuat seluruh yang hadir terpukau, terkesima dan setuju untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai Partai Politik. Kyai Dahlan, karena menjadi pimpinan sidang, tidak berpendapat. **Setelah Kyai Dahlan melihat bahwa nampaknya yang hadir sepakat dengan gagasan Haji Agus Salim, Kyai Haji Ahmad Dahlan yang memimpin sidang dengan duduk, lalu berdiri sambil memukul meja. Saya tidak sempat bertanya kepada guru saya, Kyai Hadjid, apakah Kyai Dahlan memukul mejanya keras apa tidak.**

Kyai Ahmad Dahlan mengajukan dua pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat mudah. Dan kalau dijawab, sebenarnya juga gampang. *Pertama*, apa saudara-saudara tahu betul apa agama Islam itu? *Kedua*, apa saudara berani beragama Islam? Tidak ada satu pun dari yang hadir yang sanggup menjawab pertanyaan itu, termasuk Haji Agus Salim sendiri. Bukannya tidak bisa, sebab mana mungkin ditanya soal Islam begitu saja tidak tahu. Tapi, ketika ditanya "Beranikah kamu beragama Islam?". Mereka tahu persis yang ditanyakan Kyai Haji Ahmad Dahlan itu. Pak Hadjid muda, bercerita kepada saya, "Bukan main tulusnya pertanyaan Kyai Haji Ahmad Dahlan itu".

Sebenarnya pertanyaan itu sederhana, tapi tidak ada yang sanggup menjawab. Akhirnya gagasan Haji Agus Salim tidak kesampaian. Muhammadiyah urung jadi partai politik.

Membaca kejadian dramatis di atas, sejenak saya terdiam, terpana dengan Mbah Kyai Dahlan.

(Sebagian besar isi tulisan ini pernah diterbitkan di Rubrik Opini Harian Republika, 13 Mei 2015)

DILEMA POLITIK MUHAMMADIYAH

Ma'mun Murod Al-Barbasy

Menarik tulisan Mas Hajri (Hajriyanto Y Thohari), "Muhammadiyah 'Pasti' Berpolitik" di Republika (11/5/2015) yang berisi "kegelisahan" terkait relasi Muhammadiyah dan politik. Sebagai gerakan dakwah, menurut Mas Hajri, Muhammadiyah memerlukan bukan hanya strategi kebudayaan, tapi juga politik yang kadang-kadang memerlukan parpol.

Tulisan ini mendapat tanggapan Sutia Budi yang menulis, "Muhammadiyah tak Perlu Parpol" (13/5/2015). Dari judulnya saja terbaca tulisan Sutia ini mencoba memosisikan berbeda dengan Mas Hajri soal perlunya "Partai Muhammadiyah" yang di luar institusi Muhammadiyah.

Tulisan Mas Hajri sangat rasional dan realistis bila mencermati perkembangan politik pasca-Orde Baru yang bergerak begitu liberal dan telah menabrak "kelaziman politik". Sementara tulisan Sutia mencoba memosisikan Muhammadiyah secara ideal sesuai Khittah 1912 yang tidak "mengimpitkan" diri dengan partai mana pun. Mas Hajri bicara apa yang "senyatanya" berdasarkan realitas politik yang dinamis, sementara Sutia bicara apa yang "seharusnya".

"Senyatanya" dan "seharusnya" adalah dua wajah yang tidak perlu diperhadapkan dan bahkan akan terjalin apik bila "senyatanya" bergerak ke arah "seharusnya". Namun, ketika yang "senyatanya", jangankan mendekat, tapi justru mengambil posisi berhadapan, tentu menjadi problem. Dan yang terjadi kini realitas yang menggambarkan bertolak belakangnya antara "seharusnya" dan "senyatanya". Karena itu, menjadi sulit ketika "senyatanya" mencoba dilihat dengan kacamata "seharusnya" atau sebaliknya.

Realitas seperti ini dilema bagi Muhammadiyah. Satu sisi mencoba istiqamah dengan Khittah 1912, tapi realitas menghendaki lain dan menuntut Muhammadiyah bersikap berbeda dan atau setidaknya mereduksi khittah.

Inilah dilema Muhammadiyah dalam relasinya dengan politik.

Muhammadiyah lahir tidak dikonstruksi sebagai partai, tapi sebatas "gerakan politik", tentunya selain gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar. Konstruksi sebagai gerakan politik tergambar dari langkah KH Ahmad Dahlan yang menjalin relasi politik dengan banyak pihak. Dekat dengan Budi Utomo, SI, KH Misbah (komunis), dan termasuk kalangan Ahmadiyah. KH Mas Mansur terlibat pendirian PII. Bersama NU dan PSII, Muhammadiyah mendirikan MIAI pada 1937.

Ketika lahir Masyumi yang difasilitasi Jepang pada 1943, Muhammadiyah pun terlibat. Begitu juga ketika lahir Masyumi yang dibidani umat Islam pada 1945 dan berubah menjadi partai pada 1947, Muhammadiyah bersama NU menjadi anggota istimewa. Keterlibatannya di Masyumi berakhir selepas Muhammadiyah menanggalkan anggota istimewanya pada 1959.

Saat transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, Muhammadiyah dihadapkan pada pilihan sulit: menjadi partai, menghidupkan kembali Masyumi, atau bersama ormas Islam lain membentuk partai. Dilema ini tergambar dari putusan Khittah Ponorogo 1969 dan Khittah Ujungpandang 1971. Putusan Khittah Ponorogo menyebut bahwa Muhammadiyah memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam. Untuk perjuangan politik (praktis) membentuk partai di luar Muhammadiyah. Namun, di antara keduanya tak ada relasi organisatoris, meskipun tetap mempunyai relasi ideologis.

Seakan mengoreksi Khittah Ponorogo, lewat Khittah Ujungpandang Muhammadiyah mencoba menjaga jarak kembali dengan partai, meski masih memandang positif Parmusi dan partai lainnya. Khittah 1971 diputuskan beberapa bulan selepas Pemilu 1971. Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam pendirian Parmusi. Bahkan dua jabatan strategis dijabat kader Muhammadiyah. Ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekjen Lukman Harun.

Baru pada Tanwir Surabaya 1978, Muhammadiyah membuat khittah lebih tegas bahwa Muhammadiyah tak mempunyai relasi organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi parpol atau organisasi apa pun (poin 1). Tanwir ini berlangsung selepas Pemilu 1977, saat Parmusi sudah memfusi ke PPP sehingga dapat menjadi pembenar untuk menjauh dari Parmusi dan partai lainnya.

Seiring tumbangnya rezim Orde Baru, saat Tanwir Semarang 1998, Muhammadiyah membuat rekomendasi politik yang salah satu butirnya ditafsir sebagai pembenar bagi berdirinya PAN. Rekomendasi ini mempercepat proses

pembentukan PAN. Euforia politik warga Muhammadiyah dilampiaskan ke PAN.

Seakan sejarah terulang, Tanwir Denpasar 2002, Muhammadiyah kembali membuat keputusan normatif terkait posisi nonafiliatifnya. Pada poin 6 disebutkan, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tak mempunyai relasi organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi mana pun. Muhammadiyah mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai fungsi amar makruf nahi mungkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Paparan di atas adalah realitas politik yang kerap memaksa Muhammadiyah untuk bersikap. Sebagai organisasi yang hidup dalam sistem politik, tentu tak mungkin bagi Muhammadiyah berdiam diri. Namun, sikap Muhammadiyah ini terkadang dikritisi dan dibaca sebagai inkonsistensi Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan. Muhammadiyah dinilai kerap di(ter)goda masuk wilayah politik yang tidak seharusnya, yaitu politik yang dominan berorientasi pada kekuasaan dan politik dukung-mendukung pada kandidat tertentu, terlebih saat pemilihan presiden.

Kenapa Muhammadiyah kerap demikian? Setidaknya ada dua hal yang mendasari. Pertama, pandangan mainstream di lingkup Muhammadiyah Islam al-din wa al-dawlah, Islam adalah agama dan negara, Islam dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini diperkuat realitas historis bahwa Muhammadiyah (termasuk NU) yang lahir jauh sebelum kemerdekaan mempunyai andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab, terlebih dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional, Muhammadiyah merasa perlu ikut cawe-cawe.

Kedua, bangsa ini, terlebih di lingkup pimpinan nasional yang terpilih dalam proses politik, terlebih sejak pasca-Orde Baru, kerap tidak proporsional memosisikan Muhammadiyah (dan juga NU) sebagai ormas keagamaan. Perlakuannya terkadang persis seperti kepada parpol yang untuk memperoleh "kuasa politik"—sebagaimana lazimnya—dituntut terlibat politik dukung-mendukung. Sikap yang tidak proporsional inilah terkadang membawa Muhammadiyah (dan juga NU) pada posisi politik yang terkesan partisan, posisi yang—dalam konteks demokrasi—hanya pantas disandang parpol.

Di sinilah dibutuhkan kesadaran memahami Muhammadiyah (dan NU) secara proporsional. Muhammadiyah (dan juga NU) adalah dua ormas yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Sumbangsihnya juga

tak terhingga. Karenanya, posisikan "orang tua" ini selayaknya. Jangan memancing "orang tua" untuk terlibat politik dukung-mendukung atau sekadar mendapatkan jabatan politik.

Yakinlah, kalau elite politik negeri ini mampu memosisikan Muhammadiyah (dan NU) secara proporsional, maka Muhammadiyah (dan juga NU) pun akan memosisikan diri secara proporsional semata sebatas sebagai ormas keagamaan yang selalu berorientasi pada politik kebangsaan dan menjauhkan dari orientasi politik partisan. Semoga.

KHITAH DAN RAGAM EKSPRESI POLITIK MUHAMMADIYAH

Abd Rohim Ghazali

Menjelang peringatan Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2015 Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengeluarkan seruan agar seluruh kader IMM ikut turun ke jalan mengepung Istana Negara. Tema besar yang diusung adalah: "Meluruskan Arah Kiblat Bangsa", dan salah satu tuntutannya, "Turunkan Rezim Jokowi-JK".

Meskipun tidak setuju dengan tuntutannya itu, saya tetap mendorong teman-teman IMM untuk menggelar aksi karena dengan aksi itulah mahasiswa telah mengimplementasikan salah satu fungsinya sebagai *agent of social change* (agen perubahan sosial). Dengan turun ke jalan, selain untuk menimba pengalaman (pernah berdemonstrasi adalah pengalaman yang "wajib" dipunya setiap aktivis mahasiswa), juga penting untuk menunjukkan kepedulian, menyuarakan kebenaran dan keberpihakan pada rakyat.

Bahwa saya tidak setuju dengan tuntutan " Turunkan Rezim Jokowi-JK" adalah soal lain yang tidak harus disepakati teman-teman aktivis IMM. Mahasiswa harus punya sikap sendiri, tidak harus sama dengan seniornya. Independensi penting bagi gerakan mahasiswa.

Tapi karena independensi itulah, mengapa tuntutan untuk menurunkan Presiden tidak harus disuarakan, karena di samping secara real politik tidak cukup punya alasan, tuntutan semacam itu sangat rawan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu yang menjadi lawan politik Jokowi-JK. Jika itu terjadi, ketulusan dan kemurnian gerakan mahasiswa akan terkotori ambisi elite-elite politik yang baik secara moral maupun visi-misi perjuangannya belum tentu sesuai dengan yang dikehendaki mahasiswa.

Itulah alasan pertama ketidaksetujuan saya. Alasan berikutnya terkait

dengan khitah politik Muhammadiyah yang bergerak pada tataran moral, atau *high politics* dalam bahasa Amien Rais, yakni politik untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai moral, bukan untuk memperjuangkan kursi kekuasaan. Jika sudah menyentuh wilayah kursi kekuasaan maka pada saat itulah *high politics* telah tergelincir ke *low politics,* yakni arena perebutan kekuasaan.

Apakah meluruskan arah kiblat bangsa harus dilalui dengan melengserkan rezim yang tengah berkuasa? Jawaban saya tidak. Meluruskan arah kiblat adalah metafora untuk meluruskan arah politik agar bermuara pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Caranya yang paling strategis adalah dengan mengkaji secara kritis dan meluruskan kebijakan-kebijakan politik, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap tidak mengarah pada muara yang kita inginkan.

Maka, kepeloporan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr M. Din Syamsuddin untuk melakukan jihad konstitusional adalah langkah yang tepat. Beberapa undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Jihad konstitusiaonal menjadi *trade mark* perjuangan politik Muhammadiyah era kepemimpinan Din Syamsuddin, yang akan tercatat dalam sejarah dan terus dikenang sepanjang masa.

Apa yang dilakukan Din Syamsuddin merupakan implementasi dari khitah politik Muhammadiyah, dakwah bil hal dalam bidang politik, dengan cara mengalokasikan nilai-nilai yang sesuai dengan perjuangan Muhammadiyah dalam perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan politik. Din Syamsuddin sering menyebut alokasi nilai-nilai ini dengan strategi politik alokatif.

Goresan Sejarah Politik Muhammadiyah

Dalam perjalanan sejarah politik di Indonesia, Muhammadiyah senantiasa menggoreskan kesan mendalam. Walaupun bukan partai politik, tapi organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini, selalu hadir di permukaan politik dengan caranya yang khas dari masa ke masa. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah memerankan *political actions in non-political ways* (aksi-aksi politik di luar jalur-jalur politik formal).

Selain peran Din Syamsuddin yang sudah disinggung di atas, di antara contoh peran politik Muhammadiyah yang bisa dicatatkan di sini adalah: pertama, harus diakui bahwa KH. Ahmad Dahlan, selain pendiri dan

Ketua Muhammadiyah, beliau adalah penasehat/anggota pimpinan pusat Syarikat Islam dan Budi Utomo.

Kedua, Tahun 1935, bersama-sama NU, Muhammadiyah –dengan tokoh utamanya, KH. Mas Mansur, mempelopori berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), cikal bakal Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang peranannya sangat signifikan dalam menentukan arah kiblat politik, terutama yang diperankan umat Islam di Indonesia.

Ketiga, dalam Tanwir 1956 di Yogyakarta, Muhammadiyah mengukuhkan diri sebagai anggota istimewa Masyumi dan secara tegas menginstruksikan anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politik pada Masyumi. Instruksi yang tentu memberikan pengaruh positif bagi peningkatan perolehan suara partai Islam ini.

Keempat, Sebelum Dekrit Presiden tahun 1959, Muhammadiyah secara resmi keluar dari keanggotaan Istimewa Masyumi. Beberapa langkah politik Presiden Soekarno yang berupaya memberangus keberadaan partai-partai dianggap mencederai demokrasi dan tidak sejalan dengan prinsip politik Muhammadiyah, meskipun Soekarno adalah anggota Muhammadiyah.

Kelima, Tahun 1965, bersama 16 ormas Islam yang lain, Muhammadiyah mempelopori berdirinya Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) yang bertujuan antara lain untuk merehabilitasi Masyumi. Karena Masyumi tidak diperkenankan hidup kembali oleh pemerintah, pada tahun 1967, BKAM mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang dipimpin Djarnawi Hadikusuma --waktu itu Ketua Majelis Hikmah PP Muhammadiyah—dan Anwar Haryono.

Keenam, Tahun 1998, dalam Tanwir Muhammadiyah di Semarang, antara lain menetapkan diizinkannya Amien Rais (waktu itu Ketua PP Muhammadiyah) untuk mendirikan partai politik (yang akhirnya dipilih Partai Amanat Nasional/PAN). Inilah Tanwir yang benar-benar menunjukkan gairah politik Muhammadiyah pasca Orde Baru.

Jika saja Tanwir Semarang tidak mengizinkan Amien Rais mendirikan PAN tentu mustahil PAN akan berdiri.. Karena peranannya yang begitu signifikan dalam mendirikan PAN, banyak aktivis Muhammadiyah menganggap PAN sebagai amal usaha Muhammadiyah di bidang politik.

Khitah dan Pedoman

Bagi Muhammadiyah, politik merupakan salah satu alat dakwah. Muhammadiyah sadar, dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Apalagi dalam tataran politik praktis. Menyadari kondisi politik yang penuh dinamika dan kerawanan, Muhammadiyah menetapkan khitah

dan pedoman dalam berpolitik.

Dalam "Khitah Ponorogo" (Tanwir 1969) ditegaskan bahwa cita-cita perjuangan Muhammadiyah hanya bisa diwujudkan melalui dakwah Islam dengan dua salurah secara serentak, yaitu saluran politik, alatnya adalah organisasi politik, dan saluran masyarakat, alatnya adalah organisasi non politik atau organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujungpandang (Makkasar) disebutkan bahwa bagi Muhammadiyah bidang politik merupakan bagian gerakan dalam masyarakat dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Dalam hal ini ada dua ketentuan: (1) Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun; (2) Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain (termasuk organisasi politik) sepanjang tidak melanggar AD/ART dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

Selain khitah, Muhammadiyah juga menetapkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Dalam pedoman hidup, yang berkaitan erat dengan politik, dirumuskan dalam poin "H" yakni "Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara" yang isinya (1) Warga Muhammadiyah tidak boleh apatis dalam berpolitik; (2) menegakkan prinsip-prinsip yang adil, amanah, dan lain-lain; (3) berpolitik sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT; (4) para politisi Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan; (5) berpolitik dengan kesalehan, sikap positif, dan memiliki cita-cita sebagaimana yang dicita-citakan Muhammadiyah; dan (6) menggalang sillaturrahim dan ukhwah.

Dengan berpegang pada khitah dan pedoman tadi, hingga saat ini Muhammadiyah tetap memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap anggotanya untuk aktif dalam politik sepanjang dijalankan dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar.* Politik yang berbingkai *amar ma'ruf nahi munkar* ini kemudian populer dengan istilah politik tinggi, atau politik adiluhung, atau *high politics.*

Beragam Ekspresi

Bagaimana menjalankan khitah dan pedoman politik Muhammadiyah, setiap era memiliki cara dan gaya masing-masing: KH Ahmad Dahlan misalnya, sebagai seorang ulama yang disegani beliau menggunakan cara-cara dari cara yang sangat bijaksana (*bilhikmah*) dan nasihat (*mau'idhah hasanah*), hingga berdebat (*jidal*) –beliau pernah berdebat dengan seorang

pastor berkebangsaan Jerman.

Berebeda dengan KH Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Kahar Muzakkir adalah tokoh Muhammadiyah yang keras menghadapi Soekarno; KH AR Sutan Mansur yang mulanya dekat dengan Soekarno pernah keluar masuk hutan pada masa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) untuk melawan komunis yang didukung Soekarno.

Sementara KH. Badawi, KH. AR. Fakhruddin, dan KH. Ahmad Azhar Basyir –dalam menghadapi kebijakan-kebijakan Orde Baru-- lebih memilih pendekatan secara personal baik secara langsung maupun melalui surat; Lukman Harun, tokoh Muhammadiyah yang populer dengan lobi politiknya; dan Amien Rais adalah tokoh Muhammadiyah yang keras menghadapi Soeharto, menjadi pelopor gerakan reformasi dan kemudian –bersama tokoh Muhammadiyah yang lain—berjuang melalui partai politik (PAN).

Selain di PAN, banyak juga tokoh Muhammadiyah yang aktif di partai politik lain seperti Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan dua partai baru yang akan ikut berlaga dalam Pemilu 2019, Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Yang juga perlu dicatat, meskipun secara formal tidak bersentuhan langsung dengan partai politik, Ketua Umum PP Muhammadiyah (1998-2005), Prof Dr Ahmad Syafii Maarif merupakan tokoh yang paling disegani dan diakui sebagai tokoh bangsa yang nasihat-nasihatnya terkenal menggunakan diksi yang tajam dan menukik. Buya Syafii –demikian beliau biasa dipanggil—selalu hadir menyuarakan kebenaran dengan cara elegan pada saat tokoh-tokoh lain banyak yang terjebak dalam dinamika politik praktis sehingga abai dengan persoalan bangsa.

Penerus Buya Syafii, Din Syamsuddin, sebagaimana sudah diurai di bagian lain tulisan ini, selain gigih menggerakkan jihad konstitusional, beliau kerap tampil menjadi lokomotif tokoh-tokoh agama yang menyuarakan kebenaran. Biasanya, pada saat negara berada dalam krisis akut, Din Syamsuddin mengundang pemimpin-pemimpin agama lain untuk bersama-sama bersuara, memberi masukan-masukan konstruktif untuk kemajuan bangsa dan Negara.

Demikianlah Muhammadiyah, dalam gerakan politik memiliki landasan khitah dan pedoman yang jelas. Implementasi dari khitah dan pedoman itu kemudian terekspresi dalam langgam yang berbeda-beda dari masa ke masa. Setiap pemimpin Muhammadiyah punya cara masing-masing untuk mengekspresikan langkah-langkah politiknya.

EPILOG

Afirmasi Kebangsaan Menimbang Praksis Keragaman Muhammadiyah "Ahmad Dahlan"

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed

Sesuai dengan tema buku ini *"Muhammadiyah 'Ahmad Dahlan'; Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah"* sebuah judul yang menarik untuk kita baca. Untuk memperjelas orientasi peran Muhammadiyah, maka ada dua persfektif pandangan yang harus bersih *(clear)*, adalah pertama; orientasi Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk menyatukan pandangan kebangsaan Indonesia. Sudah jelas pahami bersama bahwa Pancasila sangat penting dalam menjaga keutuhan kebangsaan kita (Bhinneka Tunggal Ika). Apalagi pergerakan ijtihad politik Muhammadiyah mendominasi wacana politik di era 80-an hingga 90-an dan melalui asas keislaman walaupun waktu itu penerimaan Pancasila tidak bisa dipahami oleh rezim Soeharto bahwa harus Pancasila sehingga Muhammadiyah mendapat intervensi secara keras.

Namun Muhammadiyah konsisten berasaskan Islam sampai sekarang ini tanpa menguranggi penghargaan terhadap Pancasila asas dan ideologi negara republik Indonesia. Sebagai asas bagi kebanyakan organisasi sosial, politik dan agama ini, maka Muhammadiyah telah menorehkan sejarah baru dalam percaturan politik kebangsaan di Indonesia. Pandangan Muhammadiyah dalam mensikapi ke-Indonesiaan adalah sama. Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia inilah yang turut memperjuangkan

kemerdekaan Indonesia dan mendesain dasar-dasar negaranya berupa Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, orientasi kemajuan bangsa dan negara, suatu hal yang patut disyukuri bahwa Muhammadiyah masih tetap tegar bertahan menghadapi gelombang sejarah dan arus peradaban serta semakin menampilkan kiprahnya dalam ikut memajukan kehidapan bangsa menuju keunggulan dan kejayaan. Sepanjang perjalanan sejarahnya, cukup banyak yang telah disumbangkan Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia, melalui gerakan pencerdasan, peningkatan kualitas kesehatan, dan kehidupan sosial, pemberdayaan tarap kehidupan ekonomi masyarakat, selain tentu pencerahan kehidupan keberagamaan umat Islam.

Semua usaha itu dilakukan Muhammadiyah dengan semangat dan untuk kepentingan dakwah Islamiyah, yaitu ajakan kepada kebaikan dan keterbaikan *(al-da`wah ila al-khyar).* Dengan semangat *al-da`wah ila al-khyar* itu Muhammadiyah berjuang mengusung Islam yang berkemajuan melakukan pencerahan kebudayaan dan peradaban. Tidak berlebihan kiranya untuk dikatakan bahwa Muhammadiyah, sebagai kekuatan masyarakat madani, telah ikut tampil sebagai *problem solver* atau penyelesai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Namun, disamping itu Muhammadiyah perlu juga melakukan evaluasi dan introspeksi, karena Muhammadiyah belum menjadi faktor efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks itu, perlu diakui bahwa keterpurukan bangsa selama ini belum mampu bangkit menuju kemajuan yang berarti. Muhammadiyah sebetulnya menyadari bahwa perjuangan dakwah masih panjang dan banyaknya tantangan.

Prof. Munir Mulkhan menyebut, ada empat model elaborasi Islam murni dalam Muhammadiyah berkaitan dengan dinamika kebangsaan sekaligus sebagai praksis teologis Ahmad Dahlan yang di pahami oleh warga Muhammadiyah, yakni Kelompok *pertama,* adalah model al-Ikhlas yang mengamalkan ajaran, keyakinan dan persis hasil fatwa dalam Himpunan Putusan Tarjih, dan mewarisi watak asli Islam puritan yang anti-TBC. Kelompok ini kurang menyukai sekolah modern dan lebih mendukung partai politik berlabel Islam.

Kelompok *Kedua,* model Kyai Dahlan. Kelompok ini tergolong juga puritan namun lebih toleran terhadap orang yang mempraktekkan TBC kendati tidak melakukannya sendiri. Mereka berpartisipasi aktif dalam sekolah modern, terbuka dalam masalah politik dan lebih menyukai bekerja sebagai pegawai dari pada petani. Kelompok kedua ini lebih mencerminkan

kelas priyayi di dalam Muhammadiyah. Pandangan kelompok ini terhadap TBC lebih merupakan cara membuka peluang dakwah. Kelompok *Ketiga,* kelompok Munu (Muhammadiyah-NU). Secara ringkas kelompok ini melakukan praktek agama sebagaimana dilakukan pengikut NU pada umumnya. Mereka bisa melakukan slametan kematian, tahlilan atau TBC lainnya. Pada umumnya mereka adalah berprofesi sebagai petani. Kelompok *keempat* disebut sebagai Marmud (Marhaenis-Muhammadiyah) karena simpati mereka pada Ssoekarno (pengagas Marhaenis) dan perilaku keagamaan yang lebih mendekati abangan daripada kultur santri. Karena sifat pragmatisnya, kelompok ini juga disebut Munas (Muhammadiyah-Nasionalis). Model interaksi kelompok ini dengan TBC lebih merupakan pola ritual yang memiliki tujuan spesifik yang bersifat magis.

Penilaian lain terhadap Muhammadiyah di luar kelompok yang disebutkan di atas, adalah kelompok "Kristen Muhammadiyah". Kelompok ini memberi warna tersendiri, di tengah perdebatan dan dialog antara Islam—Kristen yang kemudian ditumpangi kelompok radikal melalui aksi-aksi bom bunuh diri. Bahkan beberapa kasus 3 tahun terakhir Muhammadiyah dibawa ke arus ekstrem radikal yang mereka sengaja melibatkan warga Muhammadiyah (entah; bapaknya, anak, bibi, cucu dan sanak saudara). Kenapa demikian? mungkin mereka masih menyamakan antara Muhammadiyah dengan Wahabi. Padahal sejatinya Muhammadiyah hidup sebagai kelompok modernis.

Aksi teror yang dihembuskan para teroris kerapkali dihubungkan dengan Islam (mungkin Muhammadiyah bisa dibawa ke arus itu) dibanding NU (mungkin NU dikenal liberal sejati) sehingga mereka seenaknya saja ingin menggoyahkan kekuatan kaum modernis atau provokasi kaum tradisional. Padahal bagi kedua organisasi ini tak akan mungkin berbuat dan menghianati kebangsaan Indonesia karena Muhammadiyah-NU adalah pilar utama penopang keragaman dan kekuatan kehidupan masa depan bangsa Indonesia.

Berangkat dari prilaku aneh radikal sebagian kelompok teroris atas nama Islam itu, tentu mencoreng keadaban masyarakat Islam. Pasalnya karena pelaku mengatasnamakan jihad Islam dalam aksi terornya. Karena mereka senantiasa tidak mengakui keterlibatan agama lain dalam suatu negara atau kehidupan berbangsa. Bahkan, kelompok teroris ini dengan wajah garang dan suram mereka menafsirkan Islam sebagai agama kekerasan. Sungguh dangkal pemahaman yang mereka dapatkan.

Sehingga hal ini perlu ada jembatan dialog terbuka dan harmonisasi Islam-Kristen. Paling tidak di internal Muhammadiyah sudah kita kenal

Kristen Muhammadiyah (Krismuha) yang merupakan sebuah konvergensi Muslim dan Kristen dalam kelompok masyarakat pada umumnya.

Kristen Muhammadiyah lebih pada pemeliharaan toleransi yang terjalin antara Islam dengan Kristiani baik Katolik maupun Kristen Protestan yang mayoritas masyarakat berada dalam dimensi pluralitas. Paradigma Kristen Muhammadiyah sangat tepat, di tengah ekstremisme dan terorisme sedang berkembang. Tentu sebagai antithesis, bahwa partisipatif toleransi pada prinsipnya adalah menghargai keberagaman sebagai sebuah rahmat Tuhan. Artinya orang Kristen yang sangat memahami, menjiwai dan mendukung Muhammadiyah.

Upaya konvergensi untuk mencari titik temu kemajemukan dalam menyongsong Indonesia berkemajuan sehingga mampu menjadi juru bicara perdamaian dunia. Dari awalnya Muhammadiyah lekat dengan anti TBC (*takhayul, bid'ah* dan *khurafat*), namun akhirnya dikembalikan pada lambang matahari. Sinarnya memancar pada siapapun di manapun. Menyinari dengan amal karyanya terutama melalui pendidikan. Hal ini terbukti, bahwa musuh terbesar umat beragama adalah kemiskinan. Selamat membaca semoga bangsa kita selalu damai dan aman, umat Islam harus terbiasa dengan sikap damai, berfikir jernih dan toleran dengan agama lain. *Wallahu a'lam bishawab.*

TENTANG PENULIS

Abd Rohim Ghazali, alumnus pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Jakarta. Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina dan Wakil Ketua Umum Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Koornas Fokal IMM)

Anwar Abbas, lahir di Balaimansiro Sumatera Barat, 15 Pebruari 1955. Menyelesaikan pendidikan Doktor Syariah di universitas Islam Negeri Syarif Hidayat ullah Jakarta tahun 2008. Meraih gelar Magister Agama dengan Konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Magister Manajemen. Bekerja sebagai dosen Ekonomi Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah menjadi Wakil Rektor II dan IV IKIP (Institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Muhammadiyah Jakarta (sekarang UHAMKA). Selain itu ia menduduki jabatan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Amirsyah Tambunan, lahir di Medan 27 Mei 1963. Doktor kajian ilmu ke-Islaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lulus 2007. Sebagai dosen di almaternya UIN dipekerjakan (dpk) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Disamping itu juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat (2010-2015) dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Sebagai aktivis pada organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, antara lain Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Medan (1986-1988), Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan (1989-1994), Wakil Ketua PW. Pemuda Muhammadiyah (1994-1997) Sumatera Utara dan Ketua PP. Pemuda Muhammadiyah (2001-2005).

Ahmad Fuad Fanani, Lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta dan memperoleh Master of Arts (International Relations) di School of International Studies, Flinders University, Adelaide, Australia. Skripsinya tentang Hermeneutika Al-Qur'an dan HAM, Ketua Umum PC IMM Ciputat (2000-2001), Ketua Lembaga Studi Islam DPP IMM (2001-2003), Ketua Program JIMM periode 2003-2006, Presidium Nasional JIMM (2006-2014), dan pengurus PP Pemuda Muhammadiyah, Direktur Riset MAARIF Institute for Culture and Humanity dan program doktor S3 di The University of Toronto, Canada beasiswa The Indonesian Presidential Scholarshif LPDP.

Dahnil Anzar Simanjuntak, lahir di Aceh Timur, 10 April 1982. Kini menjadi Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Univ. Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Komisaris Utama Palm Mandiri Sentosa, yang bergerak di bidang perkebunan. Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Univ. Diponegoro Semarang, lulusan Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia (ME) dan STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Ilmu Akuntansi Publik. (SE). Alumni IMM STIE Ahmad Dahlan Jakarta-Cabang IMM Jakarta Pusat ini, kini menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2014-2018).

Dani Setiawan, Alumni IMM Cabang Ciputat. Saat ini masih aktif sebagai ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Analis Ekonomi-Politik pada Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan anggota perkumpulan Indonesia for Global Justice (IGJ). Penulis buku *"Ekonomi-Politik Pancasila* (2010)", *"Pendanaan Iklim* (2011)" dan *"APBN Konstitusional* (2015)".

David Krisna Alka, Alumni INS Kayutanam, Sumbar dan Lulusan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kolumnis dan Peneliti di Maarif Institute for Culture land Humanity, The Indonesia Insitute dan Populis Institute. Pernah menjabat Kabid Sosial dan Ekonomi PC IMM Ciputat, Pernah menjadi Anggota Pengurus PP Pemuda Muhammadiyah. Tulisannya sudah banyak terbentang di Harian Kompas, Media Indonesia, Republika dan media nasional dan daerah, serta di beberapa buku dan antolog puisi.

Endy Sjaiful Alim, Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan UHAMKA ini pernah menjabat Dekan Fakultas Tehnik (FT) UHAMKA Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Malang, dan Sekretaris Jenderal DPP IMM. Menyelesaikan S2 di Teknik Elektro ITB dan Studi ICT di APTECH, Bombay, India.

Pramono U. Tanthowi, Sekretaris Lembaga Litbang PP Muhammadiyah (2010-2015). Menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah IAIN

(UIN) Jakarta (1997) dan mendapatkan gelar MA dari Departemen Ilmu Politik di University of Hawaii at Manoa (2008) dengan beasiswa dari The East-West Center. Pernah Ketua Umum PC IMM Ciputat (1996-1997), Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta (1997-1999), Ketua Bidang Organisasi DPP IMM (1999-2001) dan Ketua Bidang Hikmah DPP IMM (2001-2003). Saat ini, sehari-hari ia menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten (2012-2017).

M. Azrul Tanjung, lahir di Pauh (Jambi) 9 Desember 1968. Menempuh S3 Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan FEB UHAMKA Jakarta ini menjabat Direktur Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM PP Muhammadiyah dan Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Disamping itu juga pernah menjabat Bendahara DPP IMM dan mantan Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

Masri Mansoer, Guru Besar dan Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pernah Menjabat Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta.

Moh. Supriadi Djae, Ketua Cabang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur periode 2007 – 2008, Mantan Ketua Umum DPD IMM NTT Periode 2008 – 2010, Ketua Bidang Hikmah DPP IMM Periode 2008 – 2010.

Ma'mun Murod Al-Barbasy, lahir di Brebes, 13 Juni 1973. Pendidikan S1 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, selesai 1996 dan S2 Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, selesai 1999. Pernah nyantri di Pesantren Tambakberas Jombang dan Madrasah Al-Qur'an Bahrul Ulum Jombang. Semasa mahasiswa aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dari tingkat Komisariat hingga Dewan Pimpinan Pusat. Mantan Ketua PP. Pemuda Muhammadiyah. Saat ini sebagai Direktur Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ma'ruf el Rumi, Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Solo Jawa Tengah dan sekarang Redaktur Koran Sindo.

Mukhaer Pakkanna, lahir di Bantaeng (Sulawesi Selatan), 14 Januari 1969. Menempuh pendidikan S3 di Konsentrasi Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Lokal pada Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Selain sebagai Peneliti Centre for Information and Development Studies (CIDES), dan pernah menjadi Analis Bursa Berjangka pada Bappebti, mantan Staf Ahli Bidang Ekonomi di DPR-RI pada 1999-2004. Saat ini menjabat Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

Maneger Nasution, lahir di Jorong Rura Patontang, Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat, 2 Februari 1968. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padang (tamat 1993), S2. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S3 Program Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan predikat *Cum Laude*). Mantan Ketua PK IMM Kasman Singodimedjo Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padang (1989-1990), Ketua Umum PC IMM Kota Padang (1991-1993), Ketua Umum DPD IMM Sumatera Barat (1993-1995), DPD KNPI Sumatera Barat (1992-1996), Ketua DPP IMM (1995-1997).

Pradana Boy ZTF, lahir di Lamongan, 16 Juli 1977. Menyelesaikan S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (1999). Direktur Eksekutif RëSIST sejak tahun 2000. Di luar RëSIST bekerja sebagai staf pengajar FAI UMM, dan Peneliti di Pusat Studi Islam dan Filsafat di lembaga yang sama. Karya-karyanya yang sudah diterbitkan: *Agama Empiris: Agama dalam Pergumulan Realitas Sosial* (Pustaka Pelajar, 2002); *Membongkar Praktik Kekerasan, Menggagas Kultur Nir-Kekerasan* (Sinergi Press-PSIF UMM, 2002). Lulusan S3 National University of Singapore. Alumni IMM Jawa Timur ini aktif menulis di berbagai surat kabar.

Rusdianto, Lahir 04 Februari 1982 di Dusun Bonto Desa Labuhan. Bontong Kec. Tarano Kab. Sumbawa NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan sarjana (S1) di FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP) selesai tahun 2008, Pasca Sarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Program Studi Ilmu Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi Politik. Pernah menggagas Tabloid Fastabiqul Khaerat PWM NTB, pendiri dan Pimred Tabloid Kauman DPP IMM (2010-2012), Sekretaris Bidang Media dan Pengembangan Teknologi DPP IMM (2010-2012), Ketua Umum DPP Aliansi Mahasiswa Sumbawa Indonesia (AMSI), Sekretaris Umum DPD IMM NTB (2008-2010).

R. Alpha Amirrachman, lahir di Jakarta 28 November 1970 adalah Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilitation (CDCC), Sekretaris Jendral Gerakan Indonesia Pintar (GIP), dan Kepala Pusat Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banteng. Menyelesaikan S1 di FKIP UHAMKA, S2 University of Sydnei dan S3 Universited Amsterdam. Penulis pernah menjabat Ketua Bidang Hikmah PC IMM Jakarta Selatan, Ketua Bidang Penerbitan Youth Islcamic Study Club dan Bendahara Pimpinan Cabang Istemewa Muhammadiyah di Negeri Belanda.

Sutia Budi, Lahir di Kampung Cibuntu, Dusun Mekarsari, Desa Sarimukti, Kec. Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, 19 Mei 1979. Menyelesaikan S-1

di STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Prodi Manajemen dan S-2 di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Prodi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD). Pernah menjadi Kabid Hikmah PK IMM STIEAD (2000-2001), Presiden BEM STIEAD (2001-2002), Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi DPD IMM DKI Jakarta (2003-2004), Kabid Iptek DPD IMM DKI Jakarta (2004-2005), Sekbid Keilmuan DPP IMM (2006-2007) dan Kabid Keilmuan DPP IMM (2007-2008). Berkhidmat sebagai Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta (STIEAD), sejak Mei 2011 diamanahkan menjadi Wakil Ketua STIEAD Jakarta.

Sholihul Huda, Mantan Ketum Korkom IMM UIN Sunan Ampel Surabaya, Mantan Kabid Hikmah Dewan Pimpinan Daerah - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur, Dosen FAI UMSurabaya, Sekjen Pemuda Muhammadiyah Jatim, Direktur Pusat Studi Agama & Perdamaian/PuSAP.

Sirajuddin Abdul Wahab, Ketua DPD IMM NTB, Ketua Departemen Politik dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (2003-2006), Sekjend DPP KNPI Periode 2015-2020.

Sudarnoto Abdul Hakim, Lahir di Kauman Banjarnagara 3 Februari 1959. Kuliah di Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan gelar Sarjana Muda (Bachelor of Arts/BA) diraih pada tahun 1980 dan program sarjana Doktorandus (Drs) di bidang Sejarah dan Kebudayaan Islam pada tahun 1984. Pada tahun 1989 memperoleh beasiswa dari *Canada Indonesia Development Agency* (CIDA) untuk melanjutkan kuliah tingkat Magister di *The Institute of Islamic Studies* McGill University, Montreal Kanada. Gelar Master of Art (MA) diperoleh pada tahun 1992 dan melanjutkan program Doktor di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 1996 meraih gelar Doktor dengan nilai *Cum Laude*. Pernah menjadi Ketua Umum IMM Cabang Ciputat, anggota DPP-S (Sementara) IMM.

Hazuarli, adalah dosen FIKES UHAMKA. Menyelesaikan S2 Program Studi Kajian Islam di Universitas Paramadina. Saat ini menjabat Sekretaris Jenderal KORNAS FOKAL IMM.

Yayan Sopyani Al Hadi, Ketua Umum IMM Cabang Ciputat periode 2006 - 2008, Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta periode 2008 - 2010, Sekjen DPP IMM tahun 2010, dan sekarang redaktur Rakyat Merdeka Online (RMOL).

Zakiya Darajat, lahir di Tegal, Jawa Tengah 30 Mei 1974. Kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mantan Kabid Immawati di IMM Cabang Ciputat dan DPD IMM DKI (1996-1999), Wakil Sekjen DPP IMM (1999-2001). Menyelesaikan S2 (2004) dan S3 (2014) di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain mengabdi sebagai tenaga pendidik di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan UHAMKA, juga mengabdi di Aisyiyah ranting Legoso dan cabang Ciputat Timur. Karya ilmiah yang pernah ditulisnya; *Amien Rais di Mata generasi Muda Muhammadiyah* (Mizan, 1999), kontributor *Ensiklopedi Muhammadiyah* (2005) dan lain sebagainya.